

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 007/CS-L/PJK/II/2025 tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**” atau “**Undang-Undang Pasar Modal**”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04702/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum Berkelanjutan ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XIX
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	XXI
RINGKASAN.....	XXIII
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	38
III. PERNYATAAN UTANG	42
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	70
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	75
VI. FAKTOR RISIKO	88
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	94
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	95
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	95
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	95
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	96
3. PERIZINAN	97
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	97
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG</i>)	102
6. STRUKTUR ORGANISASI	114
7. SUMBER DAYA MANUSIA	115
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	124
9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	125
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	139
11. ASET TETAP	150
12. SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	150
13. ASURANSI	152
14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	152
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	153
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	153

1. UMUM.....	153
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	153
3. KEGIATAN USAHA.....	154
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF	155
5. PENGENDALIAN MUTU.....	156
6. PEMASARAN.....	156
7. STRATEGI USAHA.....	157
8. PERSAINGAN USAHA.....	158
9. PROSPEK USAHA.....	158
10. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	159
11. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	160
12. <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ("CSR").....	160
IX. PERPAJAKAN.....	163
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH.....	165
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	167
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	170
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH	178
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH	184
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	185
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	209

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
ASPM	Berarti Ahli Syariah Pasar Modal yang merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah dengan Perseroan, berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah.

Akad Mudharabah	Berarti akad kerja sama suatu usaha antara Shahib al-mal, yang menyediakan seluruh dana modal, dan Mudharib, yang mengelola usaha, di mana keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam Akad Mudharabah, sebagaimana dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 13 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar	Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak pemberi kuasa (muwakkil/Wali Amanat yang mewakili Pemegang Sukuk Wakalah) dengan pihak penerima kuasa (wakil/Perseroan) dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengelola Dana Modal Investasi yang diperoleh dari Penawaran Umum dengan memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU dengan Akad Mudharabah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 13 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53/2015.
Akuntan Publik atau KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.
Anggaran Dasar	Berarti Anggaran Dasar Perseroan.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.01/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BTN	Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti tingkat Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri A dan 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Bursa Efek, BEI, atau Bursa Efek Indonesia	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pihak penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya tempat Obligasi dan Sukuk Wakalah Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Rekening Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening Sukuk Wakalah	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Wakalah oleh Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah.
Dana Modal Investasi	Berarti sejumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan / dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah, berdasarkan Sukuk Wakalah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri Sukuk Wakalah dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Dana Modal Investasi masing-masing Seri Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut: • Seri A : sebesar Rp52.500.000.000 (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) • Seri B : sebesar Rp297.500.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari masing-masing Seri Sukuk Wakalah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas dari suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah, Prospektus, Prospektus Ringkas, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Efek Syariah	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: - akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; - aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau - aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: - pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau - dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
Emisi	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Force Majeure	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sampai dengan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah.

FPPO	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.
FPPSW	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah.
Grup Perseroan	Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dan/atau jumlah Dana Modal Investasi.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Imbal Hasil Wakalah	Berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan (<i>Wakil</i>) kepada Pemegang Sukuk Wakalah (<i>Muwakkil</i>) kecuali Sukuk Wakalah yang dimiliki Perseroan sebagai keuntungan yang diberikan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Jumlah Kewajiban	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Sukuk Wakalah, yakni berupa Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Kejadian Penggantian	berarti setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Objek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (Ta'widh)

Berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah serta Pemegang Sukuk Wakalah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Nilai Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).

Pemegang Sukuk Wakalah membatasi diri untuk mengenakan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Imbal Hasil dan/atau Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah adalah tidak melebihi 1% (satu persen) di atas target pendapatan Imbal Hasil Wakalah per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp762.891,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) per hari dan/atau Rp215.278,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per 1 (satu) miliar per hari;
- b. Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp7.437.500,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per hari dan/atau Rp277.778,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per 1 (satu) miliar per hari;

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Dana Modal Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp11.302.083,00 (sebelas juta tiga ratus dua ribu delapan puluh tiga Rupiah) per hari;
- b. Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp82.638.889,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) per hari.

Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSW atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSW atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSW, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	Berarti TnP Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, Imbal Hasil Wakalah dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah yaitu tanggal 1 Juli 2025.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkum atau Menkumham	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
Mudharib	Berarti pihak yang mengelola usaha kerja sama yaitu PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU), suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang bergerak dalam penyedia jasa pertambangan.

Muwakkil	Berarti pemilik Dana Sukuk Wakalah, dalam hal ini Pemegang Sukuk Wakalah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Wakalah.
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Nisbah Shahib al-Mal	berarti bagian pendapatan bagi hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Mudharib (MUTU) kepada Shahib al-Mal (Pemegang Sukuk Wakalah) yang diwakili oleh Perseroan di mana besarannya yang bayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah adalah sampai dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah.
Notaris	Berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.
Objek Investasi Sukuk Wakalah	Berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang merupakan kegiatan investasi Perseroan dengan memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar.
Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti	adalah kegiatan investasi pada proyek-proyek investasi yang menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana disebutkan di dalam pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah, yang terdiri atas aset-aset apapun milik Perseroan atau pihak lain yang tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bebas dari jaminan, agunan, dan jenis-jenis pembebanan lainnya yang bernilai setara dengan atau lebih besar dari nilai Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.
Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti	adalah Objek Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana disebutkan di dalam pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang akan digantikan dengan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti.
Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp552.500.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

	Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Seri B.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
Pasar Modal	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi Efek; b. pengelola investasi; c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan d. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari : (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Sukuk Wakalah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Wakalah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah, yang terdiri dari: a. pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Wakalah; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“ Pefindo ”), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan ditunjuk sebagai penggantinya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Imbal Hasil Wakalah Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.

Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pengakuan Kewajiban	Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 164 tertanggal 25 Juni 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 160 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
Peraturan BEI I-A	Berarti Peraturan I-A dari Lampiran Surat Keputusan BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 yang telah diubah melalui Surat Keputusan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Dicatatkan oleh Perusahaan Tercatat.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 56 tertanggal 13 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Imbal Hasil Wakalah serta Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 57 tertanggal 13 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-018/OBL/KSEI/0225 tanggal 13 Maret 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-007/SKK/KSEI/0225 tanggal 13 Maret 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 52 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 17 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 108 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 158 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 53 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 18 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 111 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 162 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 54 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 109 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 159 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 55 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 112 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 163 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 50 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 15 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 107 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 157 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 51 tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 110 tanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 161 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga Obligasi dan Imbal Hasil Wakalah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal atau Prospektus.

Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah dan Pemegang Rekening.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan yang terkait.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSW	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.
Shahib al-Mal	Berarti pihak yang menyediakan dana dalam usaha kerja sama.
Sukuk Wakalah	Berarti surat berharga syariah berupa Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar (Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 127/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019) yaitu Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan total dana sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Sukuk Wakalah ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.543.750.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp297.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp26.775.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

	Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari masing-masing Seri Sukuk Wakalah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab I Penawaran Umum, Subbab Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi.
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	Berarti tanggal-tanggal saat Imbal Hasil Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah masing-masing Seri Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam dalam Bab I Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi	berarti tanggal-tanggal dimana Dana Modal Investasi dari masing-masing seri Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Target Pendapatan Imbal Hasil	Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil) dalam presentase per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Tim Ahli Syariah (TAS)	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UU Kehutanan	Berarti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.
Wali Amanat	Berarti BTN yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.
Wakil	Berarti pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola Dana Sukuk Wakalah dalam kegiatan Investasi, dalam hal ini adalah Perseroan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AMP	: Berarti PT Armada Maritim Persada
BBK	: Berarti PT Borneo Berkat Kutai
BI	: Berarti PT Bara International
CEP	: Berarti PT Cristian Eka Pratama
CTK	: Berarti PT Chandra Tirta Karian
DBK	: Berarti PT Daya Bumindo Karunia
ESE	: Berarti PT Equator Sumber Energi
GNI	: Berarti PT Green Natural Investama
IBP	: Berarti PT Intan Bumi Persada
INTAM	: Berarti PT Intam
KBL	: Berarti PT Karya Bhumi Lestari
KBS	: Berarti PT Kinarya Bangun Sesama
KJP	: Berarti PT Kreasi Jasa Persada
KMS	: Berarti PT Kemilau Mulia Sakti
KPI	: Berarti PT Kuala Pelabuhan Indonesia
LKB	: Berarti PT Lintas Kelola Berlaba
MIP	: Berarti PT Mahaka Industri Perdana
MP	: Berarti PT Mareta Persada
MUTU	: Berarti PT Multi Tambangjaya Utama
PII	: Berarti PT POSB Infrastructure Indonesia
PIP	: Berarti PTP Investments Pte. Ltd.
PIN	: Berarti PT Petrosea Infrastruktur Nusantara
PMI	: Berarti PT Prima Mineral Investindo
PSA	: Berarti Petros Solution Pty. Ltd.
PT B3	: Berarti PT Borneo Bangun Banua

PT B4	:	Berarti PT Borneo Bangun Banua Bestari
PTRO	:	Berarti PT Petrosea Tbk
PUR	:	Berarti PT Pika Utama Resources
RKN	:	Berarti PT Rekakarsa Karya Nusantara
SSJ	:	Berarti PT Silika Salut Jaya
TP	:	Berarti PT Tamtama Perkasa
UBL	:	Berarti PT Usaha Berlayar Lancar

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Intermediate Stockpile atau ISP	: Suatu tempat penimbunan batu bara yang hanya bersifat sementara saat batu bara tersebut dalam proses perpindahan dari tambang menuju kapal pengangkut di pelabuhan.
Transshipment	: Kegiatan pemindahan barang atau muatan yang dilakukan dari kapal ke kapal. Dalam hal kegiatan Perseroan adalah dari kapal tongkang menuju kapal pengangkut (<i>mother vessel</i>).
Cadangan Terbukti (<i>proven</i>)	: Jumlah cadangan batu bara terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, setelah terdapat kepastian terhadap faktor pengubah terkait yang dipertimbangkan.
Cadangan Terkira (<i>probable</i>)	: Bagian cadangan batu bara tertunjuk yang ekonomis untuk ditambang setelah semua faktor relevan dipertimbangkan. Cadangan terkira juga merupakan bagian dari sumber daya terukur yang dapat ditambang secara ekonomis.
Penutup (<i>overburden</i>)	: Lapisan penutup adalah semua material atau batuan yang menutupi bagian atas dari suatu endapan bijih yang akan ditambang.
Pembersihan / Pembukaan Lahan (<i>land clearing</i>)	: Pembersihan lokasi tambang terhadap tumbuhan dan semak belukar sehingga tidak mengganggu dan mempermudah pekerjaan pengupasan tanah penutup serta pelaksanaan penambangan.
Penggalian Tanah Pucuk (<i>top soil</i>)	: Proses penggalian lapisan tanah yang berada di lapisan paling atas tanah yang mengandung unsur hara dan sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah Pucuk dikupas dengan batasan 0.5m - 2m dan akan digunakan saat penimbunan kembali area bekas tambang.
Sumber Daya Tereka	: Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya hanya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan rendah. Titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dan keyakinan geologi rendah tidak cukup untuk membuktikan kemenerusan cebakan batu bara dan kadarnya.
Sumber Daya Terukur	: Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan tinggi, didasarkan pada informasi yang didapat dari titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dengan keyakinan geologi tinggi.
Pemboran (<i>overburden drilling</i>)	: Suatu tahap kegiatan aktivitas penambangan dilakukan sebelum kegiatan peledakan, dimana lubang setelah pemboran tersebut disiapkan untuk diisi bahan peledak beserta aksesorisnya.
Peledakan Tanah (<i>blasting</i>)	: Suatu kegiatan aktivitas penambangan dimana lapisan tanah yang menutupi dipecahkan melalui ledakkan dengan menggunakan bahan kimia tertentu dalam kondisi dimana alat berat tidak mampu untuk menggali lapisan tanah karena tingkat kekerasan tanah tersebut.
Material Pengotor (<i>parting</i>)	: Lapisan batuan non-batu bara, biasanya batu lempung, yang berada diantara lapisan batu bara dengan ketebalan tertentu.

Area Disposai	: Daerah pada lokasi tambang terbuka yang dijadikan tempat pembuangan material tanah penutup.
Pembersihan Batu bara (<i>coal cleaning</i>)	: Salah satu aktivitas dalam penggalian batu bara dimana batu bara yang akan digali dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat tertentu yang mana fungsinya untuk menjaga kualitas batu bara dari material pengotor.
Penambangan Selektif (<i>selective mining</i>)	: Suatu metode penambangan yang diterapkan untuk mendapatkan batu bara dengan kualitas tertentu untuk memenuhi permintaan berdasarkan spesifikasi yang dimiliki.
Run of Mine (ROM)	: adalah tempat penyimpanan sementara batu bara dimana batu bara dari pit belum sepenuhnya tersaring. Sehingga masih membutuhkan penghancuran, penyaringan, dan proses lainnya.
Belt Conveyor	: Mesin yang digunakan sebagai pemindah batu bara sepanjang arah horizontal dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus.
Thermal Coal	: Jenis batu bara yang biasa dibakar sebagai sumber energi panas untuk menggerakkan turbin penghasil listrik.
Metallurgical Coal or Coking Coal	: Jenis batu bara yang digunakan untuk memproduksi kokas, sumber utama karbon yang digunakan dalam pembuatan baja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perseroan berkantor di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515 ("**Akta Pendirian Perseroan**")

Sejak Akta Pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perseroan No. 23/2023**"). Akta Perseroan No. 23/2023 telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023.

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 23/2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Grup Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan

pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah benar-benar melakukan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjangnya yakni aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) sebagaimana tersebut di atas.

Prospek Usaha

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (“DHE”). Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- (i) Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional (“IEA”) memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.
- (ii) Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan *resilience* di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil. Ini dikarenakan oleh harga batu bara metalurgi dan harga batu bara termal tidak selalu berkorelasi satu sama lain, dan harga batu bara metalurgi cenderung lebih tinggi dari harga batu bara termal, yang mengakibatkan adanya *margin buffer* tambahan untuk produk batu bara metalurgid.
- (iii) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung. Kebijakan Harga Batu bara Acuan (“HBA”) yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- (iv) Penarikan diri sebagian besar negara dari Just Energy Transition Partnership (JETP) termasuk Amerika Serikat. Pendekatan baru dan lebih praktis oleh negara-negara besar (termasuk AS) terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis, menghambat implementasi energi terbarukan. Hal ini juga telah menyebabkan kenaikan harga batu bara karena potensi peningkatan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.

Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China.

Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan, maka Perseroan juga

akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan kedepannya.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Seri A : Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) - Seri B : Rp552.500.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender Seri B : 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun Seri B : 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: _{id} A (<i>Single A</i>) dari Pefindo.

Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah $\text{id}A$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi $\text{id}A$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Wali Amanat : BTN

Agen Pembayaran : KSEI

KETERANGAN MENGENAI SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Wakalah : Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

Jumlah Dana Modal Investasi : Sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Seri A : Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
 - Seri B : Rp297.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah

Jangka Waktu : Seri A : 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender
 Seri B : 5 (lima) tahun

- Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah** : Seri A : sebesar Rp3.543.750.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun
Seri B : Rp26.775.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
- Periode Pembayaran Imbal Hasil Wakalah** : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Perdagangan** : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Jaminan** : Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek** : $A_{id(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Wakalah** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali atas Sukuk Wakalah yang belum jatuh tempo, untuk sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah atau untuk disimpan, selanjutnya disebut "Pembelian Kembali". Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan Pembelian Kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $A_{id(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $A_{id(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Wali Amanat : BTN

Agen Pembayaran : KSEI

RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 23/2023 adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 6.000.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 2.248.378.000.000
Modal disetor	:	Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Mei 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,966
2. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	1.690.000.000	338.000.000.000	15,033
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	18.758.110.000	3.751.622.000.000	

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 16 Juni 2025, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	677.691	165.043
Aset Tidak Lancar	1.100.105	65.019
Jumlah Aset	1.777.796	230.062
Liabilitas Jangka Pendek	347.193	46.903
Liabilitas Jangka Panjang	864.704	62.457
Jumlah Liabilitas	1.211.897	109.360
Ekuitas	565.899	120.702

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	801.723	97.943
Beban pokok pendapatan	(683.857)	(60.725)
Laba bruto	117.866	37.218
Laba usaha	216.248	19.722
Laba neto tahun berjalan	169.970	15.250
Total penghasilan komprehensif lain	11.997	682
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	181.967	15.932
Laba per saham (nilai penuh)	0,014	0,001

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(2.649)	(1.120)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(284.615)	(49.087)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	496.662	94.842
Kenaikan (penurunan) neto dalam kas dan setara kas	209.398	44.635
Dampak neto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	2.674	91
Kas dan setara kas pada awal tahun	60.919	16.193
Kas dan setara kas pada akhir tahun	272.991	60.919

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)		
Pendapatan	718,56	(4,15)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1014,56	(59,68)
Jumlah Aset	672,75	107,84
Jumlah Liabilitas	1008,17	269,26
Ekuitas	368,84	48,88
EBITDA	1.376,95	(58,50)
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor / Pendapatan	14,70	38,00
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	21,33	20,00
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	21,20	15,57
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	30,04	12,63
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	9,56	6,63
Rasio Keuangan (%)		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	68,17	47,54
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	140,32	61,29
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	78,63	129,88
Margin EBITDA	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	160,33	59,32
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	459,83	1575,24

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Wakalah Perseroan. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2024
<i>Current Ratio</i>	Minimal 1 kali	1,95x
<i>EBITDA to Interest plus Installment</i>	Minimal 1,15 kali	3,92x
<i>Interest Bearing Debt to Equity*</i>	Maksimal 3 kali	1,40x

* *Interest Bearing Debt to Equity* yaitu, seluruh kewajiban / utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul dari pembiayaan leasing.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Perusahaan Anak yang terkonsolidasi pada Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 :

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan langsung</u>							
1.	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,22
2.	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,07
3.	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,16
4.	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,00
5.	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	99,99	Belum beroperasi	5,95
6.	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,43
7.	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	9,68
8.	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum beroperasi	0,08
9.	PT B4	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Belum Beroperasi	0,17
10.	TP	Jakarta Barat	2011	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	5,46

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui ESE</u>							
1.	BI	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,23
2.	DBK	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	1,62
3.	INTAM	Jakarta Barat	2013	Pertambangan emas dan perak	99,99	Belum beroperasi	0,17
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui DBK</u>							
1.	PUR	Jakarta Barat	2013	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,04
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PMI</u>							
1.	SSJ	Jakarta Barat	2023	Penggalian kuarsa / pasir silika	85,00	Belum beroperasi	0,03
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui AMP</u>							
1.	UBL	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	40,00 & 30,00 Melalui PTRO	Belum beroperasi	0,03
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui KJP</u>							
1.	PTRO	Tangerang Selatan	2024	Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan	41,52	Beroperasi	37,52
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PTRO</u>							
1.	KBL	Tangerang Selatan	2024	Jasa penunjang perusahaan pertambangan	99,99	Beroperasi	2,94
2.	KBS	Tangerang Selatan	2024	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan	99,99	Beroperasi	0,04

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
3.	KMS	Tangerang Selatan	2024	Perusahaan holding	99,99 & 0,01 melalui KBL	Beroperasi	0,65
4.	KPI	Jakarta Selatan	2024	Operasi pelabuhan, transportasi, <i>contracting</i> (jalan) dan jasa <i>rendering</i>	95,00	Beroperasi	0,59
5.	PII	Tangerang Selatan	2024	Pengelolaan pelabuhan khusus	99,80	Beroperasi	0,09
6.	PIP	Singapura	2024	Investasi	100,00	Belum beroperasi	0,00
7.	PIN	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,90 & 0,10 melalui RKN	Belum beroperasi	0,01
8.	PSA	Australia	2024	<i>Solution provider</i> dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi	100,00	Belum beroperasi	0,12
9.	RKN	Balikpapan	2024	Jasa rekayasa	99,90 & 0,10 melalui PII	Belum beroperasi	0,02
Kepemilikan tidak langsung Melalui PII							
1.	MIP	Tangerang Selatan	2024	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum	51,25	Beroperasi	0,07
Kepemilikan tidak langsung Melalui KMS							
1.	CEP	Tangerang Selatan	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,10
Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4							
1.	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1.01
Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN							
1.	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04
2.	LKB	Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51,00	Belum beroperasi	0,01
Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK							
1.	IBP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,45

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko Perseroan

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Risiko Perusahaan Anak

Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perusahaan Anak

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan yaitu Risiko investasi atau aksi korporasi

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
2. Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan
3. Risiko sumber daya manusia
4. Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
5. Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya
6. Risiko tidak tercapainya performa kontraktor
7. Risiko kepatuhan terhadap perundang-undangan
 - a. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan
 - b. Ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* ("DMO")
 - c. Ketentuan mengenai lingkungan hidup
8. Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
9. Risiko serangan *cyber* dalam teknologi informasi

C. RISIKO UMUM

Risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
2. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
3. Risiko perubahan kebijakan atau aturan pemerintah
4. Risiko kenaikan tingkat suku bunga
5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
6. Risiko nilai tukar mata uang asing
7. Risiko kepatuhan

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Pembeli Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah, Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I
PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN
RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp650.000.000.000,-
(ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp552.500.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Seri B.

**DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I
PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan
menawarkan:

**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp350.000.000.000,-
(TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.543.750.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp297.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp26.775.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2025, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri B.



PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Konsultasi Manajemen, dan Pertambangan Batu Bara melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Tel: (021) 5308520

Fax: (021) 535567

Website: www.petrindo.co.id

Email: corsec@petrindo.co.id

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)

A_{id} (SINGLE A) & $A_{id(sy)}$ (SINGLE A SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan No. 192/KAP-PIC/OJK/MA/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar Perseroan tertanggal 13 Maret 2025 yang telah ditandatangani Perseroan;
- iv. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan pemeringkatan $_{id}A$ (*Single A*) dan $_{id}A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp552.500.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri A dan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1.	4 Oktober 2025	4 Oktober 2025
2.	4 Januari 2026	4 Januari 2026
3.	4 April 2026	4 April 2026
4.	11 Juli 2026	4 Juli 2026
5.		4 Oktober 2026
6.		4 Januari 2027
7.		4 April 2027
8.		4 Juli 2027
9.		4 Oktober 2027
10.		4 Januari 2028
11.		4 April 2028
12.		4 Juli 2028
13.		4 Oktober 2028
14.		4 Januari 2029
15.		4 April 2029
16.		4 Juli 2029
17.		4 Oktober 2029
18.		4 Januari 2030
19.		4 April 2030
20.		4 Juli 2030

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah A , maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi A atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020 sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (kedua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak sesuai anggaran dasar;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset, yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan atau pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha Perseroan atau pengalihan aktiva lainnya milik Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;

- (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini; dan
- (iv) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;

Adapun yang dimaksud dengan “Aset” berarti seluruh aset tidak bergerak konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan;

Dan yang dimaksud dengan “Sebagian Besar” Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang paling akhir sebelum dilaksanakannya suatu transaksi penjualan, pengalihan atau pelepasan;

- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif Yang Material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- d. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi/peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan atau konsolidasi/peleburan), kecuali:
 - i. penggabungan atau konsolidasi/peleburan yang berkaitan dengan, atau diperlukan untuk keperluan restrukturisasi internal grup perusahaan Perseroan, atau untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan Dampak Negatif Yang Material; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus; atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga kecuali:
 - i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak sehubungan dengan:
 - (a) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*); atau
 - (b) investasi atau belanja modal Entitas Anak; atau
 - (c) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*) atau pinjaman yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan kebendaan lain termasuk undertaking (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak sepanjang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.

- g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman tersebut (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang dan/atau utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
 - b. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - Current Ratio yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali;
 - EBITDA to Interest plus Instalment yaitu (laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) terhadap bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 (satu koma lima belas) kali;
 - Interest Bearing Debt to Equity yaitu, seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul akibat pembiayaan leasing.
 - c. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.

- f. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat dan memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja untuk melakukan kunjungan kepada Perseroan terkait Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau pembagian dividen, perubahan pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.
- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- i. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek serta mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- k. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- l. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

- m. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah id A, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi id A atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
- n. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening;
- o. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- p. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 dan huruf a di atas); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya atau diharuskan membayar sejumlah dana sehingga memberikan Dampak Negatif yang Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); atau
 - e. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - f. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - g. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi atau pihak lain. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Angka 1 huruf b sampai dengan angka 1 huruf g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.
 maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Emiten;
- c. Wali Amanat; atau
- d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 54 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 19 tertanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 109 tertanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 159 tertanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

^{id}
(Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

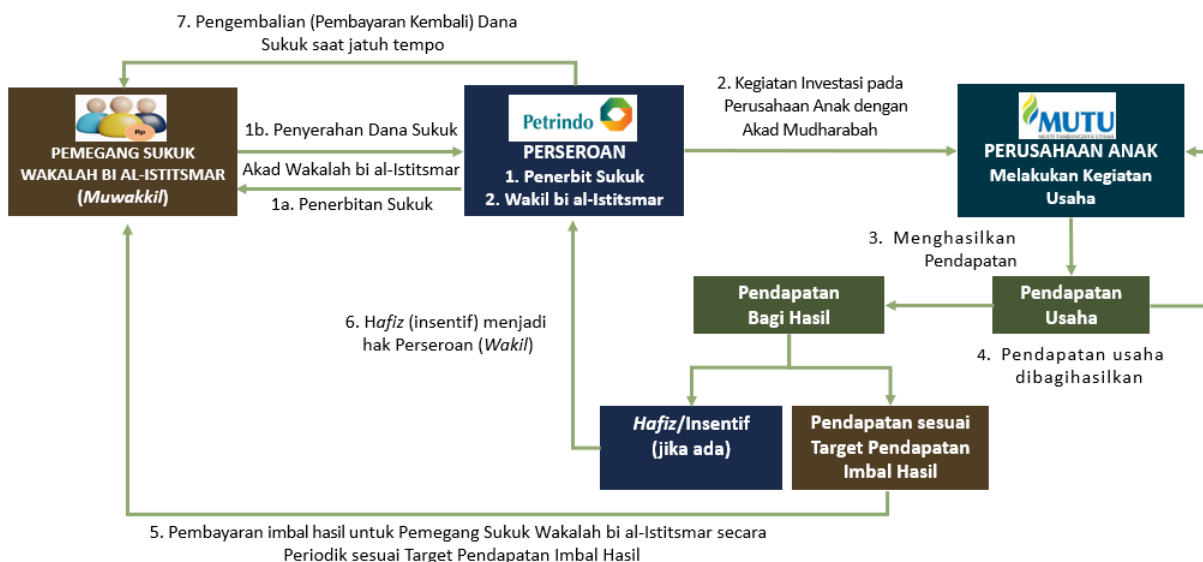
NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

SKEMA SUKUK WAKALAH



KETERANGAN SKEMA SUKUK WAKALAH

- Perseroan sebagai Penerbit Sukuk Wakalah dan Pemegang Sukuk Wakalah (yang diwakili oleh Wali Amanat) melakukan Akad Wakalah bi al-Istitsmar, di mana Perseroan sebagai *Wakil* dari Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) untuk mengelola Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dalam kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah.
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Wakalah.
 - Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) menyerahkan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah kepada Perseroan (*Wakil*).
- Perseroan (*Wakil*) menyalurkan Dana Modal Investasi untuk kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah, di mana Pemegang Sukuk Wakalah yang diwakili oleh Perseroan sebagai *Shahib al-Mal* dan Perusahaan Anak sebagai *Mudharib*.
- Kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah tersebut menghasilkan pendapatan.
- Pendapatan atas Objek Investasi Sukuk Wakalah dibagihasilkan sesuai Nisbah Bagi Hasil antara *Shahib al-Mal* dan *Mudharib*.
- Bagian pendapatan bagi hasil yang menjadi hak *Shahib al-Mal* diteruskan kepada Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) sebesar sampai dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan selama jangka waktu Wakalah secara periodik.

6. Dalam hal pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan (*Wakil*) dalam pengelolaan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah melebihi Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah maka kelebihan tersebut diberikan dan menjadi hak Perseroan sebagai *hafiz (insentif)* atas kinerjanya. Perseroan selaku penerima kuasa (*wakil*) berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga ekspektasi rata-rata bagi hasil efektif bagi pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) dalam pembiayaan kepada MUTU berdasarkan Akad Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah ini sekurang-kurangnya sama dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*).
7. Pengembalian (Pembayaran Kembali) Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dari Penerbit (*Wakil*) kepada Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) pada saat jatuh tempo.

RANGKUMAN AKAD SYARIAH

I. Akad Wakalah bi al-Istitsmar:

- Para Pihak dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar adalah Perseroan selaku penerima kuasa (*wakil*) dan Wali Amanat selaku pemberi kuasa (*muwakkil*).
- Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dan berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar, Pemegang Sukuk Wakalah menempatkan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah kepada Perseroan untuk dikelola Perseroan sebagai modal kerja dengan memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada entitas anak usaha Perseroan, yaitu MUTU.
- Perseroan (*Wakil*) bersedia untuk menerima penempatan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah untuk dikelola Perseroan selaku Penerima Kuasa (*Wakil*) bertanggung jawab dan mengurus semua Pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan praktek kegiatan usaha yang wajar; memastikan adanya catatan yang akurat dan terbaru mengenai aktivitas pengelolaan dana investasi atas Objek Investasi Sukuk Wakalah dan wajib disampaikan kepada Wali Amanat apabila diminta; dan dalam semua hal yang material akan selalu sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.
- Atas penempatan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut Muwakkil berhak untuk menerima Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan melalui Wali Amanat mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wakil sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Ketentuan mengenai Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah, Objek Investasi Sukuk Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi diatur dan disepakati oleh Para Pihak dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Perseroan selaku Penerima Kuasa (*Wakil*) menyatakan kepada Wali Amanat bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan dan akan menjalankan tugasnya berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dengan seluruh keterampilan, kepedulian dan tanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Perseroan selaku Wakil berjanji dan menyetujui kepada Wali Amanat (*Muwakkil*) untuk:
 - a. melakukan Pengelolaan Dana
 - b. Investasi secara wajar dengan upaya terbaiknya terhadap Objek Investasi Sukuk Wakalah;
 - c. memperoleh persetujuan sebelumnya dari setiap otoritas yang berwenang yang dibutuhkan untuk Pengelolaan Dana Investasi;
 - d. mematuhi dalam semua hal yang material, dengan semua undang-undang, peraturan, arahan dan pedoman sehubungan dengan Pengelolaan Dana Investasi.
 - e. secara sukarela menjadi kafil (*penjamin*) pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan pengembalian Dana Modal Investasi.
 - f. Dalam hal pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan selaku penerima kuasa (*Wakil*) dalam pengelolaan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah ini melebihi Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) maka Para Pihak sepakat bahwa kelebihan tersebut diberikan dan menjadi hak Perseroan selaku penerima kuasa (*Wakil*);

- g. menjaga ekspektasi rata-rata bagi hasil efektif bagi Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil) dalam pembiayaan kepada MUTU berdasarkan Akad Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah ini sekurang-kurangnya sama dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil).
- Periode Penunjukan Perseroan selaku Penerima Kuasa (Wakil) tersebut adalah sepanjang seluruh Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah belum selesai dipenuhi/dibayar kembali dan akan berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah berakhir.

II. Akad Pembiayaan Mudharabah:

- Para Pihak pada Akad Pembiayaan Mudharabah adalah Perseroan (Shahib al-Mal) dan MUTU (Mudharib).
- Shahib al-mal selaku pemilik dana, setuju untuk menyertakan Dana Modal (ra's al-mal) kepada Mudharib untuk dikelola dalam kegiatan usaha Mudharib berupa pertambangan batu bara yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Mudharib setuju untuk menerima dana dari Shahib al-Mal tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan usaha Mudharib.
- Atas penempatan Dana Modal (ra's al-mal) tersebut Shahib al-Mal berhak untuk menerima Bagi Hasil dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Mudharib dengan tujuan agar Mudharib mendapatkan keuntungan usaha dengan maksimal.
- Atas penempatan Dana Modal (ra's al-mal) tersebut, Mudharib berhak untuk menerima Bagi Hasil yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang disepakati dan mengelola kegiatan usaha yang didanai oleh Dana Modal (ra's al-mal) yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- Ketentuan tentang jumlah Dana Modal, Bagi Hasil sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil dan Pembayaran Kembali Dana Modal diatur dalam Akad Pembiayaan Mudharabah dan telah disepakati oleh Para Pihak.
- Jangka waktu Akad Mudharabah terhitung sejak tanggal penyertaan Dana Modal (ra's al-mal) dan berakhir ketika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi atau jangka waktu sesuai yang ditentukan dalam Akad Mudharabah telah terlewati.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh opini berupa Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 13 Ramadan 1446 H (tiga belas Ramadan seribu empat ratus empat puluh enam) Hijriah atau tanggal 13 Maret 2025 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh lima) yang berpendapat bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

Objek Investasi Sukuk Wakalah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang merupakan kegiatan investasi Perseroan dengan memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI DAN IMBAL HASIL WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.543.750.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp297.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp26.775.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada saat jatuh tempo.

IMBAL HASIL WAKALAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah berasal dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perseroan berupa pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah ini dilakukan secara triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah pada tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Imbal Hasil Wakalah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Sukuk Wakalah harus dibayar Kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Perkiraan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

Imbal Hasil Wakalah Ke-	Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	
	Seri A	Seri B
1.	4 Oktober 2025	4 Oktober 2025
2.	4 Januari 2026	4 Januari 2026
3.	4 April 2026	4 April 2026
4.	11 Juli 2026	4 Juli 2026
5.		4 Oktober 2026
6.		4 Januari 2027
7.		4 April 2027
8.		4 Juli 2027
9.		4 Oktober 2027
10.		4 Januari 2028
11.		4 April 2028
12.		4 Juli 2028
13.		4 Oktober 2028
14.		4 Januari 2029
15.		4 April 2029
16.		4 Juli 2029
17.		4 Oktober 2029
18.		4 Januari 2030
19.		4 April 2030
20.		4 Juli 2030

JAMINAN

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah A_(sy), maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemerinkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemingkatan Sukuk Wakalah menjadi $A_{(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Satuan Perdagangan Sukuk Wakalah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PENGgantian OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

1. Objek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilakukan penggantian dalam hal adanya setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Objek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola.
2. Pemberian Hak Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah:
Perseroan berhak untuk melakukan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah yang diganti dengan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW dan adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakan RUPSW, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 11 huruf C Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah:
 - i. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Wakalah atas diskresi Perseroan; atau
 - ii. Setelah terjadinya suatu Kejadian Penggantian.

Dalam hal terjadi penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah, Perseroan harus memberikan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari nilai Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.

Pelaksanaan Hak Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah:

Hak-hak yang diberikan berdasarkan angka 2 di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas tanggal penggantian, Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti dan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti. ("**Pemberitahuan Penggantian**").

Setelah dikirimkannya pemberitahuan penggantian melalui surat pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut di atas, penggantian objek investasi Sukuk Wakalah, menjadi efektif pada tanggal penggantian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 11 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

PERUBAHAN STATUS SUKUK WAKALAH

1. Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki Objek Investasi Sukuk Wakalah; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Objek Investasi Sukuk Wakalah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut, "**Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah**").

Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.

3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSW, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (tidak melebihi 1% (satu persen) di atas target pendapatan Imbal Hasil Wakalah per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif) sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal dan mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) adalah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah pada tahapan penerbitan Sukuk Wakalah selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini, maka Perseroan harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah atas Sukuk Wakalah tersebut.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Objek Investasi Sukuk Wakalah:

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah (Objek Investasi Sukuk Wakalah) adalah:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah (RUPSW).
2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah dengan melakukan pelunasan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju tersebut.
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSW.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Sukuk Wakalah ditujukan sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - e. pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSW;

- f. pembelian kembali Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut;
- h. pembelian kembali Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i periode penawaran pembelian kembali;
 - ii jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli kembali;
 - iv harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - v tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
 - vii tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
 - viii tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah; dan
 - ix hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah.
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - i jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - ii Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia); dan
 - iii Sukuk Wakalah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Wakalah;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah;
- n. pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Wakalah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang diterbitkan Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Wakalah; dan
- q. pembelian kembali Sukuk Wakalah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - i hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSW, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - ii pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSW, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e di atas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSW.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak sesuai anggaran dasar;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset, yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan atau pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha Perseroan atau pengalihan aktiva lainnya milik Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini; dan
 - (iv) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;

Adapun yang dimaksud dengan "Aset" berarti seluruh aset tidak bergerak konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan;

Dan yang dimaksud dengan "Sebagian Besar" Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang paling akhir sebelum dilaksanakannya suatu transaksi penjualan, pengalihan atau pelepasan;

- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
 - d. Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi/peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan atau konsolidasi/peleburan), kecuali:
 - i. penggabungan, atau konsolidasi/peleburan berkaitan dengan, atau diperlukan untuk keperluan restrukturisasi internal grup perusahaan Perseroan, atau untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan, atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Wakalah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus; atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
 - e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga kecuali:
 - i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak sehubungan dengan:
 - (d) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (arm's length); atau
 - (e) investasi atau belanja modal Entitas Anak; atau
 - (f) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (arm's length) atau pinjaman yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
 - f. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau jaminan kebendaan lain termasuk undertaking (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak sepanjang tidak melanggar rasio keuangan dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
 - g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman tersebut (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang dan/atau utang bank baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
 - b. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Wakalah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - Current Ratio yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali;
 - EBITDA to Interest plus Instalment yaitu (laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) terhadap bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 (satu koma lima belas) kali;
 - Interest Bearing Debt to Equity yaitu, seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul akibat pembiayaan leasing.
 - c. Menyetorkan dana Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
 - f. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat dan memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja untuk melakukan kunjungan kepada Perseroan terkait pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat.
 - g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau pembagian dividen, perubahan pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;

- iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.
- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- i. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek serta mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- k. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- l. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $idA_{(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemerinkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemerinkatan Sukuk Wakalah menjadi $idA_{(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
- n. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening;
- o. melakukan pemerinkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemerinkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemerinkatan tahunan atas Sukuk Wakalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.

- ii. Dalam hal peringkat Sukuk Wakalah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Sukuk Wakalah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Wakalah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
- 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Wakalah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- p. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah dan/atau Imbal Hasil Wakalah pada Tanggal Pembayaran Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ; atau
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 dan huruf a di atas); atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya atau diharuskan membayar sejumlah dana sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

- c. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); atau
 - d. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSW mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau pihak lain. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Angka 1 huruf b sampai dengan angka 1 huruf g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
- maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSW menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Dalam RUPSW tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
- Apabila RUPSW tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSW memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Wakalah sesuai dengan keputusan RUPSW menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSW itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSW bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSW)

Untuk penyelenggaraan RUPSW, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan POJK 20/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSW diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu, Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, perubahan Target Pendapatan Imbal Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan dalam POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak; dan
 - g. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah untuk melakukan perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Wakalah bi al-Istitsmar, dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Wakalah.
2. RUPSW dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum di bayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Wakalah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Emiten;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSW.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSW, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumuman RUPSW wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;

- b. pemanggilan RUPSW dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPSW, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPSW kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPSW kedua atau dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSW sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. panggilan harus memuat rencana RUPSW dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSW;
 - (2) agenda RUPSW;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSW;
 - (4) Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSW; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSW.
 - e. RUPSW kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPSW sebelumnya.
6. Tata cara RUPSW, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSW dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
 - b. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPSW:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk Wakalah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. RUPSW dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPSW dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSW termasuk materi RUPSW dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSW;
 - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, RUPSW dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSW tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSW tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSW dan materi RUPSW;
 - i. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSW adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSW kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSW wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSW sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSW yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSW;

- l. setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
- m. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- n. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal RUPSW bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSW dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - 2) Apabila RUPSW dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - 3) Apabila RUPSW dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.

- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
- b. RUPSW yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tidak tercapai, maka wajib RUPSW kedua;
 - 3) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga;
 - 5) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali kewajiban dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSW yang keempat;
 - 7) RUPSW keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSW keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSW menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPSW wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPSW mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Wakalah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSW. Keputusan RUPSW mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Wakalah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSW dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSW tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSW yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan

perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan tingkat Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSW atau tanggal lain yang diputuskan RUPSW (jika RUPSW memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbal Hasil Wakalah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSW.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSW dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSW ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Imbal hasil Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

CARA PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 55 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 20 tertanggal 10 April 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 112 tertanggal 20 Mei 2025; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 163 tertanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

$\overset{\text{id}}{\underset{(\text{sy})}{A}}$
(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Wakalah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK WAKALAH

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan.

MATA UANG DENOMINASI

Mata uang yang akan menjadi denominasi utang Obligasi dan Sukuk adalah Rupiah.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Obligasi diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pinjaman No. 206/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025
Fasilitas Pinjaman	: Pinjaman maksimum sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	: Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	: setiap 3 (tiga) bulan
Jatuh Tempo	: MUTU akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	: a. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK; b. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	: 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman 4. Bilamana MUTU tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	: MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Sukuk Wakalah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	:	Akad Pembiayaan Mudharabah No. 207/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025
Fasilitas Pembiayaan	:	Dana maksimum sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bagi Hasil	:	Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal (ra's al-mal).
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas Pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Dana	:	Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pembiayaan	Pendahuluan:	a. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK; b. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	:	1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	:	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pemberian pinjaman kepada MUTU merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, mengingat MUTU merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya akan wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka kekurangan nya akan dibiayai oleh arus kas Perseroan dan/atau pinjaman modal kerja dari bank.

Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Emisi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam setiap RUPO dan/atau RUPSW tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSW dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSW sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSW wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSW.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam bulan) dengan tanggal laporan terakhir yaitu Nomor 012/PJK/FIN/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah sebagian terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,52544% (satu koma lima dua lima empat empat persen) dari nilai emisi Obligasi yang terdiri dari :

• Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,40781%
• Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,08739%
• Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,08739%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Akuntan Publik	0,54308%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,12308%
- Biaya jasa Notaris	0,01000%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,01650%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,08250%
• Biaya lain-lain (OJK, BEI, KSEI, Percetakan, dan Audit Penjataan)	0,16770%

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,41426% (satu koma empat satu empat dua enam persen) dari nilai emisi Sukuk Wakalah yang terdiri dari :

• Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,40863%
• Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,08756%
• Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,08756%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Akuntan Publik	0,54308%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,05714%
- Biaya jasa Notaris	0,01000%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,01650%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,08250%
• Biaya lain-lain (OJK, BEI, KSEI, TAS, Percetakan, dan Audit Penjataan)	0,12129%

III. PERNYATAAN UTANG

Di bawah ini disajikan posisi liabilitas yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD1.211.897 ribu. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	58.716
Utang usaha	
Pihak ketiga	130.977
Pihak berelasi	212
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	1.002
Pihak berelasi	21
Utang dividen	879
Utang pajak	4.212
Beban akrual	71.855
Liabilitas kontrak	20.833
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	44.517
Utang obligasi	3.175
Utang sukuk	2.172
Liabilitas sewa	8.622
Total Liabilitas Jangka Pendek	347.193
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas derivative	1.380
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	598.552
Utang obligasi	58.396
Utang sukuk	28.554
Liabilitas sewa	13.670
Liabilitas pajak tangguhan	124.025
Liabilitas imbalan kerja karyawan	29.397
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	10.730
Total Liabilitas Jangka Panjang	864.704
TOTAL LIABILITAS	1.211.897

1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar USD58.716 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang bank jangka pendek yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Rupiah		
Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi		
Tranche A		24.595
Dolar AS		
PT Bank Central Asia Tbk		34.121
Total		58.716

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai kreditur adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**"), PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**").

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai Debitur adalah Perseroan sebagai Peminjam, MP sebagai *Co-Borrower* dan TP, B4, B3 dan MUTU sebagai *Subsequent Co-Borrower* setelah memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Penawaran Pemberian Kredit.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., terdapat fasilitas utang berupa pinjaman jangka pendek (*Tranche A – Term Loan Revolving*) dan pinjaman jangka panjang (*Tranche B dan C – Long Term*).

Tranche A – Term Loan Revolving

Fasilitas Tranche A bersifat *revolving* dan *committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp 400.000.000.000, dengan tujuan untuk memenuhi belanja modal dan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ("**PK**").

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *Jakarta Interbank Offered Rate* ("**JIBOR**") 3 bulan +1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan melakukan penarikan sepenuhnya dari fasilitas *Term Loan Tranche A* sebesar Rp400.000.000.000 dan telah melakukan pembayaran kembali pada 13 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas No. CBG.CB4/11373/2024 tanggal 16 Desember 2024, Perseroan melakukan penarikan lagi dari fasilitas *Term Loan Tranche A* sebesar Rp400.000.000.000.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp397.500.000.000 setara dengan USD24.595 ribu setelah dikurangi biaya penerbitan langsung sebesar Rp2.500.000.000.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA**")**

Pada tanggal 29 Mei 2024, Grup dan BCA menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas *time loan revolving* sebesar USD70 juta, dengan jatuh tempo 2 tahun dan tingkat suku bunga *term Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun untuk Dolar AS dan *JIBOR* tiga bulan ditambah margin sebesar 1,75% per tahun untuk IDR. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai modal kerja Grup. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP. Utang bank ini jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai USD34.000 ribu.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD34.121 ribu.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan PTRO menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai USD30.000 ribu. Fasilitas ini diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan yang terakhir di 9 Oktober 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar *term Secured Overnight Financing Rate* (“SOFR”) tiga bulan ditambah *Credit Adjustment Spread* (“CAS”) tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2024, PTRO membayar fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar USD10.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Pada tanggal 12 dan 21 Juni 2024, PTRO melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar USD20.000 ribu dan USD10.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun. Dana untuk pelunasan pinjaman ini berasal dari pinjaman dari BCA.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Mandiri telah mengakhiri fasilitas KMK yang diberikan kepada PTRO.

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Pada tanggal 13 April 2022, PTRO dan HSBC menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja sebesar USD15.000 ribu.

Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 23 Januari 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun atau dengan tingkat suku bunga sebesar *term Jakarta Interbank Offered Rate* (“JIBOR”) ditambah margin sebesar 1,38% per tahun.

Pada tanggal 6 dan 23 Maret 2024, PTRO melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dari HSBC masing-masing sebesar USD3.000 ribu and USD4.000 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah margin sebesar 2% per tahun. Tidak ada perpanjangan atas fasilitas ini.

Pada tanggal 22 Maret 2024, fasilitas kredit ini telah diakhiri.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 sebesar USD4.860 ribu.

2. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang sebesar USD598.552 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang bank jangka panjang yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		178.993
Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi		170.307
PT Bank Central Asia Tbk		128.108
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		43.203
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk Sindikasi		20.719
Sub-total		541.330

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Dolar AS		
PT Bank Central Asia Tbk		104.824
Biaya utang jangka panjang yang belum diamortisasi		(3.517)
Bunga yang masih harus dibayar		432
Total		643.069
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(44.517)
Bagian jangka panjang		598.552

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai kreditur adalah Mandiri, BCA dan BNI.

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai Debitur adalah Perseroan sebagai Peminjam, MP sebagai *Co-Borrower* dan TP, B4, B3 dan MUTU sebagai *Subsequent Co-Borrower* setelah memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Penawaran Pemberian Kredit.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., terdapat fasilitas utang berupa pinjaman jangka pendek (*Tranche A – Term Loan Revolving*) dan pinjaman jangka panjang (*Tranche B dan C – Long Term*).

1. Tranche B – Term Loan

Fasilitas Tranche B bersifat *non-revolving* dan *committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp200.000.000.000 atau setara dengan USD12.000 ribu pada saat dilakukan penarikan, mana yang lebih rendah, dengan tujuan untuk membiayai akuisisi Debitur terhadap kepemilikan saham B4 secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan secara efektif sebesar 100% (seratus persen).

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 13 Maret 2024, Perseroan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan Tranche B* sebesar Rp132.073.200.000. Fasilitas utang ini digunakan untuk pembiayaan 70% dari nilai akuisisi Perseroan terhadap kepemilikan saham B4.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp105.658.560.000 setara dengan USD6.537 ribu.

2. Tranche C – Term Loan

Fasilitas *Tranche C* bersifat *non-revolving* dan *committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp2.906.724.800.000 atau setara dengan USD174.400 ribu pada saat dilakukan penarikan, mana yang lebih rendah, dengan tujuan untuk membiayai maksimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai akuisisi Debitur terhadap kepemilikan saham MUTU secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan secara efektif sebesar 100% (seratus persen).

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan Tranche C* sebesar Rp2.728.697.280.000. Fasilitas utang ini digunakan untuk pembiayaan 80% (delapan puluh persen) dari nilai akuisisi Perseroan terhadap kepemilikan saham MUTU.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.646.836.361.600 setara dengan USD163.770 ribu.

Fasilitas kredit sindikasi dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah yang terdaftar atas nama TP dan MP, kepemilikan saham TP dan MP yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), akta kuasa untuk menjual saham yang dimiliki oleh Perseroan pada TP dan MP, rekening bank atas nama Perseroan, TP dan MP, akta kuasa untuk penarikan dana atas nama Perseroan, TP dan MP, fidusia atas piutang usaha, mesin dan peralatan, serta klaim asuransi yang diberikan Perseroan, TP dan MP sehubungan dengan polis asuransi atas aset-aset yang dijadikan agunan pada Agunan Tahap 1.

Fasilitas kredit sindikasi juga dijamin dengan rekening bank yang dimiliki oleh B4, B3 dan MUTU, kepemilikan saham B3 yang dimiliki oleh B4 sampai dengan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), kepemilikan saham B4 dan MUTU yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

Akta kuasa untuk penarikan dana atas nama B4, B3 dan MUTU, akta kuasa untuk menjual saham yang dimiliki oleh Perseroan pada B4 dan MUTU, dan saham yang dimiliki oleh B4 pada B3, *corporate guarantee* dari B4, B3 dan MUTU, fidusia atas piutang usaha, mesin dan peralatan, serta klaim asuransi yang diberikan B4, B3 dan MUTU sehubungan dengan polis asuransi atas aset-aset yang dijadikan agunan pada Agunan Tahap 2.

Fasilitas kredit sindikasi mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- *Debt to Equity* rasio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted current* rasio lebih dari atau sama dengan 1,0x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perseroan.

Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 219 oleh Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perseroan dengan BNI dengan fasilitas berupa:

1. Tranche Fasilitas Term Loan – Fasilitas Kredit Revolving

Fasilitas *Term Loan* bersifat *revolving* dan memiliki plafon sebesar Rp950.000.000.000, dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perseroan, termasuk akuisisi saham perusahaan terbuka.

Pada bulan Februari 2024, Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas *term loan* dengan plafon sebesar Rp400.000.000.000. dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perseroan, termasuk akuisisi saham perusahaan terbuka.

Jangka waktu fasilitas peminjaman tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan PK dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan No. 383, Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas *term loan Revolving B* dengan plafon sebesar Rp775.000.000.000 dengan tujuan untuk membiayai kegiatan Perseroan secara umum (*General Corporate purposes*).

Jangka waktu fasilitas *Revolving B* adalah 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,90% per tahun.

Pembayaran pokok dilakukan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo akhir.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.117.875.000.000 setara dengan USD131.041 ribu (setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar Rp11.525.000.000).

2. Fasilitas Treasury Line

Fasilitas *Treasury Line* bersifat *revolving uncommitted facility* memiliki plafon sebesar Rp15.000.000.000.

Kewajiban keuangan:

- *Debt to Equity* rasio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen).

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perseroan.

Agunan dan Pengikatan

Adanya penanggungan Perusahaan yang akan diberikan oleh MP dan KJP dengan gadai saham atas saham-saham Perusahaan terbuka yang dimiliki oleh KJP.

Terdapat kuasa untuk menjual saham atas saham-saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh KJP serta kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang akan diterbitkan oleh KJP.

Pada tanggal 21 November 2023, Perseroan dan BNI telah menandatangani suatu Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ("**PIDI**") sehubungan dengan transaksi derivatif di Indonesia.

3. Fasilitas Term Loan – Fasilitas Kredit Aflopend

Pada tanggal 30 Agustus 2024 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 319 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perseroan dengan BNI.

Fasilitas *Term Loan* bersifat *aflopend*, dan memiliki plafon sebesar Rp775.000.000.000 atau setara dengan USD50.000 ribu pada saat dilakukan penarikan, dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perseroan termasuk untuk membiayai pembelian saham PTRO.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 2,00% per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 5 September 2024, Perseroan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan* sebesar Rp775.000.000.000 atau setara dengan USD50.000 ribu.

Fasilitas kredit mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- *Debt to Equity* ratio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* ratio minimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted current* ratio lebih dari atau sama dengan 1,0x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perseroan.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp775.000.000.000 setara dengan USD47.952 ribu.

Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada tanggal 29 Mei 2024, BCA dan bersama-sama PTRO, KBL, dan CEP, entitas anak, telah menyetujui beberapa pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman tunai

i. Kredit investasi 1 (“KI 1”)

Fasilitas ini senilai setara USD107 ribu, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk Dolar AS dan JIBOR tiga bulan ditambah 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mengambilalih fasilitas *Term Loan* I, II, III dan *Senior Secured Term Loan* di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO dan KBL.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 1 ini telah digunakan oleh PTRO dan KBL sebesar USD97.180 ribu. Fasilitas KI 1 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2032.

ii. Kredit investasi 2 (“KI 2”)

Fasilitas ini senilai setara USD83 ribu, dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk Dolar AS dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mengambilalih fasilitas *Senior Secured Term Loan* di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO dan KBL.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 2 ini telah digunakan oleh PTRO sebesar USD81.698 ribu. Fasilitas KI 2 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2034.

iii. Kredit investasi 3 (“KI 3”)

Fasilitas ini senilai Rp500 miliar (setara dengan USD30,4 ribu), dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur CEP yang terletak di dekat tambang CEP. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 3 ini telah digunakan oleh CEP sebesar Rp138 miliar (setara dengan USD8.512 ribu). Fasilitas KI 3 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2034.

iv. Kredit investasi 4 (“**KI 4**”)

Fasilitas ini senilai USD50 ribu, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 29 Juli 2024, PTRO mengajukan permohonan untuk pengalihan limit dari KI 4 ke fasilitas Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar USD25 ribu, permohonan ini telah disetujui oleh pihak BCA.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 4.

Sampai pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, PTRO telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp136 miliar (setara dengan USD8.393 ribu). Fasilitas KI 4 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2032.

v. Kredit investasi 5 (“**KI 5**”)

Fasilitas ini senilai Rp 800 miliar (setara dengan USD48,7 ribu), dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 5 ini telah digunakan oleh PTRO dan KBL masing-masing sebesar Rp785,4 miliar (setara dengan USD48.595 ribu) dan Rp14,5 miliar (setara dengan USD897 ribu). Fasilitas KI 5 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2032.

Setelah periode pelaporan, PTRO telah menambahkan penggunaan fasilitas ini sebesar Rp312 miliar (setara dengan USD19.328 ribu).

b. Fasilitas pinjaman non-tunai

i. Kredit Multi Fasilitas (“**KMF**”)

Fasilitas ini senilai setara USD100 ribu, dengan tenor fasilitas 1 tahun. Fasilitas ini dapat digunakan untuk *Letter of Credit* (“**LC**”) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“**SKBDN**”), *Forex Forward Line*, dan Bank Garansi (“**BG**”) atau *Stand by Letter of Credit* (“**SBLC**”). Fasilitas ini dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, porsi yang telah digunakan sebesar USD86.455 ribu untuk penerbitan SBLC atas BG/SBLC dan LC/SKBDN.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai USD72.274 ribu.

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan penyesuaian rasio lancar tidak kurang dari 1x, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 1,15x, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5x, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit setiap tahunan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan rasio tersebut.

Pada tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan Surat No. 10526/GBK/2024, BCA telah memberikan persetujuan terkait dengan adanya rencana Perseroan untuk penambahan fasilitas pinjaman sindikasi Mandiri dan BNI sebesar ekuivalen USD200 ribu.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) dan PT Bank Mandiri Tbk (“Mandiri”) Sindikasi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Berjangka tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali tanggal 13 September 2024, BNI bersama dengan Mandiri menyetujui pengajuan Fasilitas Kredit Berjangka Senior kepada PTRO sebesar Rp3,1 triliun (setara dengan USD192.000 ribu) dengan suatu opsi *accordion* hingga Rp775 miliar (setara dengan USD48.000 ribu), yang akan digunakan untuk membiayai *capital expenditure* dari bisnis PTRO. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dengan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin sebesar 1,90% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas Kredit Berjangka Senior ini telah digunakan oleh PTRO sebesar Rp337,4 miliar (setara dengan USD20.870 ribu). Fasilitas akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2032.

Fasilitas Kredit Berjangka Senior ini mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 1:1, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 115%, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5:1, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap triwulanan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan tersebut.

Setelah periode pelaporan, PTRO telah menambahkan penggunaan fasilitas ini sebesar Rp295 miliar (setara dengan USD18.273 ribu).

1. Perseroan

Fasilitas *Term Loan* – Fasilitas Kredit *Non-Revolving*

Pada tanggal 13 September 2024 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 91 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perseroan dan KJP dengan Mandiri.

Fasilitas *Term Loan* bersifat *non-revolving and committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp700.000.000.000 dengan keperluan untuk memenuhi *Cashflow Gap* Perseroan.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama 60 (enam puluh dua) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 19 September 2024, Perseroan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan* sebesar Rp700.000.000.000 (setara dengan USD46,2 ribu).

Fasilitas kredit mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- *Debt to Equity* rasio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen);

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perseroan.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp698.250.000.000 (setara dengan USD43.203 ribu).

2. PT Petrosea Tbk (“PTRO”)

Mandiri dan PTRO telah menyetujui pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman non-tunai

Mandiri dan PTRO menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman non tunai *non-revolving* untuk BG dan/atau SBLC dan/atau LC dan/atau SKBDN pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar USD30.000 ribu. Pada tanggal 27 Desember 2017, fasilitas *non-revolving* ditambah menjadi USD50.000 ribu. Tingkat suku bunga fasilitas *non-revolving* ini adalah 1% per tahun dari nilai BG/SBLC yang diterbitkan. Pada tanggal 10 Juli 2020, PTRO dan Mandiri mengubah fasilitas *non-cash non-revolving loan letter of credit/SKBDN* menjadi 360 hari.

Pada tanggal 8 Desember 2021, PTRO merubah fasilitas *non-revolving* LC/SKBDN menjadi *global line* dengan KBL. Pada tanggal 22 Juni 2023, PTRO mengubah fasilitas *non-revolving* menjadi *revolving* LC/SKBDN. Mandiri dan PTRO telah beberapa kali menyetujui perubahan fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk LC/SKBDN dengan tenor 180 hari dan 9 Juli 2023 dengan tenor 360 hari.

Pada tanggal 20 Maret 2024, PTRO menerima surat dari Mandiri mengenai persetujuan perubahan ketentuan perjanjian kredit dan dokumen jaminan. Dalam surat ini, Mandiri juga telah menyetujui permohonan peningkatan limit fasilitas menjadi USD100.000 ribu untuk BG/SBLC dan USD50.000 ribu untuk LC/SKBDN.

b. Fasilitas *treasury line* 1 – lindung nilai mata uang asing

Mandiri dan PTRO menandatangani perjanjian fasilitas *treasury line* pada tanggal 29 Desember 2014 dengan limit fasilitas sebesar USD5.000 ribu. Pada tanggal 27 Desember 2017, limit fasilitas dinaikkan menjadi USD15.000 ribu dan pada tanggal 5 Februari 2020, limit fasilitas juga meningkat menjadi USD50.000 ribu. Mandiri dan PTRO telah beberapa kali menyetujui perubahan dan limit fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 10 Oktober 2022 terkait dengan perpanjangan dan perubahan limit fasilitas menjadi USD5.000 ribu untuk melakukan transaksi *forward buy and sale*, dan opsi guna mengurangi risiko kurs (lindung nilai), berlaku sampai dengan 9 Oktober 2024.

c. Fasilitas *treasury line* 2 – *interest rate swap*

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan PTRO menyetujui pemberian fasilitas *treasury line* 2 – *interest rate swap* dengan limit fasilitas sebesar USD60.000 ribu. Fasilitas ini bertujuan untuk melakukan lindung nilai arus kas terkait *interest rate swap*. Pada tanggal 10 Juni 2020, limit atas fasilitas tersebut dinaikkan menjadi USD267.000 ribu. Perpanjangan fasilitas ini sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.

d. Fasilitas pinjaman tunai

i. *Term Loan I*

Pada tanggal 10 Juni 2020, PTRO dan Mandiri telah menandatangani perjanjian fasilitas *non-revolving Term Loan I* senilai USD50.000 ribu dengan tingkat suku bunga 1,85% ditambah *London Interbank Offered Rate* (“LIBOR”) tiga bulan untuk Dolar AS atau 3,75% ditambah JIBOR tiga bulan untuk Rupiah. Fasilitas *nonrevolving* ini bertujuan untuk pembiayaan modal alat berat dan mesin PTRO.

Pada tanggal 22 Desember 2020, PTRO bersama-sama dengan KBL dan Mandiri menandatangani perubahan ketentuan fasilitas *Term Loan I*. Perubahan ini terkait penambahan debitur KBL.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri menaikkan tingkat suku bunga sehubungan dengan transaksi perubahan pemegang saham PTRO menjadi sebesar term SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 2,85% per tahun.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan I* dari Mandiri sebesar setara USD4.976 ribu.

ii. *Term Loan II*

Pada tanggal 22 Desember 2020, PTRO dan Mandiri menandatangani fasilitas *nonrevolving Term Loan II*, senilai USD41.500 ribu, dengan suku 2% ditambah LIBOR tiga bulan. Fasilitas *non-revolving* ini bertujuan untuk pembiayaan *cashflow gap* sehubungan dengan pelunasan pinjaman pihak berelasi. Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri meresolusi tingkat suku bunga menjadi sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 3,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas *non-revolving* telah sepenuhnya dipakai oleh PTRO. Fasilitas *non-revolving* ini akan jatuh tempo pada 23 Desember 2025.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan II* dari Mandiri sebesar setara USD20.666 ribu.

iii. *Senior secured term loan*

Pada tanggal 21 Maret 2023, PTRO dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit (*senior secured term loan facility*) senilai USD91.500 ribu dengan suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun dan Rp1,4 triliun dengan suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan usaha melalui akuisisi dan investasi aset tambang serta memperkuat modal kerja PTRO.

Pada tanggal 30 Maret 2023, PTRO mencairkan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja PTRO sebesar Rp1,2 triliun (setara dengan USD78.000 ribu) dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PTRO mencairkan fasilitas untuk membiayai akuisisi dan investasi PTRO sebesar USD91.500 ribu dengan tingkat suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Senior Secured Term Loan* dari Mandiri sebesar setara USD149.384 ribu.

iv. *Term Loan III*

Pada tanggal 28 Juli 2023, PTRO, KBL dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit *Term Loan III* senilai USD48.200 ribu dengan suku bunga sebesar *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun untuk Dolar AS dan sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mendanai pembelian alat berat/mesin yang digunakan untuk izin bisnis PTRO.

Pada tanggal 7 Agustus 2023, PTRO melakukan pencairan fasilitas sebesar USD690 ribu, dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, KBL melakukan pencairan fasilitas sebesar Rp13,2 miliar (setara dengan USD804 ribu), dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 30 Oktober 2023, PTRO melakukan pencairan fasilitas sebesar USD2.280 ribu, dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan III* dari Mandiri sebesar USD3.029 ribu.

Beban bunga pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar USD38.755 ribu.

Sebagian alat berat, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang.

Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 27 Desember 2024, BNI telah memberikan beberapa fasilitas (A, B dan C) kepada ESE dan DBK, Entitas Anak, sebesar USD150.195 ribu. Fasilitas-fasilitas ini ditujukan untuk mendukung biaya proyek DBK. Fasilitas ini berjangka waktu 120 bulan sejak tanggal penarikan pertama masing-masing fasilitas dengan suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin 2,00% - 2,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas tersebut belum digunakan oleh ESE dan DBK.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang usaha sebesar USD131.189 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang usaha yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
<u>Berdasarkan pemasok</u>		
Pihak ketiga		
PT Trakindo Utama		14.120
PT United Tractors		8.944
PT Indo Traktor Utama		5.021
PT Titian Servis Indonesia		4.768
PT Sefas Pelindotama		3.285
PT Samudera Energi Tangguh		2.652
PT Buma Perindahindo		2.539
PT AKR Corporindo		1.855
PT Liebherr Indonesia Perkasa		1.826
PT Indoraya Megah Teknik		1.735
PT Hanwha Mining Services Indonesia		1.617
PT Sinar Alam Duta Perdana II		1.375
PT Pelayaran Tanjung Kumawa		1.210
PT Riung Mitra Lestari		1.209
PT Triguna Internusa Pratama		1.205
PT Harapan Wahyu Abadi		1.174
PT Tata Bara Utama		1.147
PT Gemilang Sarana Sakti		1.146
PT Hexindo Adiperkasa		1.143
PT Pacific Firstrack Indonesia		948
PT Putra Otomona Jaya		935

		(dalam ribuan USD)
Keterangan	31 Desember 2024	
PT Eka Dharma Jaya Sakti		837
PT Indotruck Utama		752
PT Pangansari Utama		691
PT Sehati Mandiri Utama		621
PT Linda Hanta Wijaya		586
PT Sinomast Mining		561
PT Pelayaran Duta Lintas Samudera		554
PT Mandiri Herindo Adiperkasa		508
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500)		66.013
Sub-total		130.977
Pihak berelasi		212
Total		131.189

Berdasarkan mata uang

Rupiah	112.653
Dolar AS	17.461
Dolar Australia	1.029
Euro	45
Dolar Singapura	1
Total	131.189

Analisis umur utang usaha di atas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan	31 Desember 2024	
Belum jatuh tempo		103.432
Jatuh tempo:		
1 – 30 hari		4.356
31 – 60 hari		4.747
61 – 90 hari		2.711
Lebih dari 90 hari		15.943
Total		131.189

3. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar USD1.023 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang lain-lain yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan	31 Desember 2024	
Pihak ketiga		
PT Prima Unggul Persada		83
Lain-lain		919
Sub-total		1.002
Pihak berelasi		21
Total		1.023

4. Utang dividen

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2024, pemegang saham PTRO menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2023 sebesar USD3.050 ribu atau USD0,00308 per lembar saham. Dividen kas dibayar pada tanggal 30 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang dividen sebesar USD879 ribu.

5. Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang pajak sebesar USD4.212 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang pajak yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Perseroan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21		21
Pasal 23		5
Sub-total		26
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)		422
Pasal 15		84
Pasal 21		559
Pasal 22		28
Pasal 23		1.437
Pasal 25		974
Pasal 26		11
Pasal 29		79
Pajak Pertambahan Nilai		445
Pajak bumi dan bangunan		147
Sub-total		4.186
Total		4.212

6. Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki beban akrual sebesar USD71.855 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai beban akrual yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Kontraktor		40.275
Gaji dan bonus		16.687
Kewajiban pasar domestic		5.268
Tanggung jawab sosial Perusahaan		1.355
Cuti tahunan		1.115
Bunga		747
Cuti berimbalan jangka panjang – yang jatuh tempo dalam satu tahun		547
Jasa professional		334
Pajak kendaraan		219
Solar		7
Lain-lain		5.301
Total		71.855

Beban akrual lain-lain terdiri dari biaya perawatan, biaya keamanan dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

7. Liabilitas kontrak

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Kontrak konstruksi - pihak ketiga	20.833

Liabilitas kontrak adalah saldo terutang yang berkaitan dengan kontrak konstruksi dan jasa kontraktor pertambangan kepada pelanggan selama kontrak. Hal ini muncul jika tonggak pembayaran tertentu melebihi pendapatan yang diakui hingga saat ini berdasarkan metode biaya-ke-biaya.

Jumlah pendapatan yang diakui terkait kontrak dengan pelanggan dengan liabilitas kontrak bawaan sebesar USD 29.408 ribu. Tidak ada pendapatan yang diakui pada tahun berjalan yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi di tahun lalu.

8. Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang Obligasi sebesar USD 61.571 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang Obligasi yang dimiliki Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I 2024	61.874
Biaya transaksi belum diamortisasi	(570)
Bunga masih harus dibayar	267
Total	61.571
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.175)
Utang Obligasi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	58.396

Pada tanggal 6 Desember 2024, PTRO, Entitas Anak, memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-162/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun (setara dengan USD 185.621 ribu). PTRO telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan USD 92.811 ribu).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, PTRO telah menerbitkan:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Jumlah
Obligasi Tahap I	47.000	171.640	465.400	315.960	1.000.000

Atau pada tanggal 31 Desember 2024 setara dengan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Jumlah
Obligasi Tahap I	2.908	10.620	28.796	19.550	61.874

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D masing-masing sebesar 6,50%, 8,00%, 8,75% dan 9,50% yang dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu Obligasi untuk Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D masing-masing adalah 367 hari, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 September 2024.

Obligasi diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja PTRO dan telah dicatatkan di BEI.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PTRO diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap kewajiban bunga dan cicilan tidak kurang dari 115%, rasio utang berbunga terhadap ekuitas tidak melebihi 300%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang obligasi.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Beban bunga utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD267 ribu.

9. Utang Sukuk Ijarah

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang Sukuk Ijarah sebesar USD30.726 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai utang Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I 2024	30.937
Biaya transaksi belum diamortisasi	(341)
Cicilan Imbalan Ijarah masih harus dibayar	130
Total	30.726
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.172)
Utang Sukuk Ijarah – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28.554

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, PTRO telah menerbitkan:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Jumlah
Obligasi Tahap I	33.000	128.360	254.600	84.040	500.000

Atau pada tanggal 31 Desember 2024 setara dengan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Jumlah
Obligasi Tahap I	2.042	7.942	15.753	5.200	30.937

Tingkat cicilan imbalan ijarah per tahun untuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D masing-masing sebesar 6,50%, 8,00%, 8,75% dan 9,50%, yang dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu Sukuk Ijarah untuk Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D masing-masing adalah 367 hari, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk ijarah ini memperoleh pemeringkatan “A+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 September 2024.

Sukuk ijarah diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja PTRO dan telah dicatatkan di BEI.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PTRO diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap kewajiban imbalan ijarah dan cicilan tidak kurang dari 115%, rasio utang imbalan ijarah terhadap ekuitas tidak melebihi 300%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang sukuk ijarah.

Sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Objek ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah berasal dari manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh PTRO.

10. Liabilitas sewa

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar USD22.292 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas sewa yang dimiliki Perseroan:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
Analisis jatuh tempo:		
Tahun 1		10.627
Tahun 2		7.610
Tahun 3		4.131
Tahun 4		1.546
Tahun 5		941
Lebih dari 5 tahun		604
Sub-total		25.459
Beban keuangan yang ditangguhkan		(3.167)
Total		22.292
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(8.622)
Liabilitas sewa – neto		
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		13.670

Rincian liabilitas sewa berdasarkan penyewa:

Pihak ketiga

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	6.258
PT Mandiri Tunas Finance	4.071
PT Putra Otomona Jaya	1.978
PT Dokindo Aimas Papua	1.698
PT Hexa Finance Indonesia	1.209
PT Chandra Sakti Utama Leasing	873
PT Wiera Mineral Investama	802
PT Catepillar Finance Indonesia	759
PT SMFL Leasing Indonesia	665
PT Radios Apirja Sorong	654
PT Bagong Dekaka Makmur	635
PT Buana Jaya Rentama	559
CV Aditya Karya	449
PT Gatra Kaltim Jaya	302
PT Indo Nuansa Abadi	270
PT KDB Tifa Finance Tbk	270

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		31 Desember 2024
PT Gelora Lintas Maharitas		173
PT Transkon Jaya		105
Lainnya (masing-masing dibawah USD100 ribu)		562
Total		22.292

PT Petrosea Tbk (“PTRO”)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (“MHCI”)

Pada tanggal 8 Mei 2019, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD5.272 ribu. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 24 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 28 Mei 2019, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa Dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD648 ribu. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Mei 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 19 September 2022, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp18 miliar (setara dengan USD1.000 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp32,1 miliar (setara dengan USD2.000 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 3 November 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp26,7 miliar (setara dengan USD1.700 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp13,8 miliar (setara dengan USD890 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp30 miliar (setara dengan USD1.900 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp41,8 miliar (setara dengan USD2.700 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 27 April 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PT KDB Tifa Finance Tbk (“KDB TIFA”)

Pada tanggal 7 November 2023, PTRO dan KDB TIFA menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa di mana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar Rp5,65 miliar (setara dengan USD366 ribu). Tingkat bunga fasilitas ini adalah 11% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 7 November 2027.

PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”)

Pada tanggal 30 September 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp13,23 miliar (setara dengan USD874 ribu). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2027.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, PTRO dan MTF menandatangani dua perjanjian fasilitas kredit untuk sewa masing masing sebesar Rp14,46 miliar (setara dengan USD915 ribu). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2028.

Pada tanggal 29 November 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp13,68 miliar (setara dengan USD846 ribu). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp12,29 miliar (setara dengan USD761 ribu). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2029.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“MLCI”)

Pada tanggal 5 Februari 2025, PTRO dan MLCI menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp13,06 miliar (setara dengan USD808 ribu). Fasilitas ini telah dicairkan oleh PTRO pada tanggal 7 Februari 2025. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 8,75% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2029.

PT Karya Bhumi Lestari (“KBL”)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (“MHCI”)

Pada tanggal 13 Mei 2019, KBL, Perusahaan Anak, dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar USD 3.768 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa tersebut pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 12 Juli 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD 177 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada 12 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

Pada tanggal 7 November 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD3.389 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 7 November 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 7 November 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan.

Pada tanggal 9 Desember 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar USD1.653 ribu. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 9 Desember 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan.

Pada tanggal 3 Juli 2023, KBL dan MHCI menandatangani amendemen fasilitas kredit tersebut atas tingkat bunga yang berlaku adalah tarif per tahun berdasarkan 3 bulan term SOFR ditambah tarif Spread Adjustment ditambah 2,30%. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

PT SMFL Leasing Indonesia (“SMFL”)

Pada tanggal 24 Juni 2022, KBL dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp18 miliar (setara dengan USD1.100 ribu). Pada tanggal 26 Juli 2022, KBL mencairkan fasilitas sewa tersebut sebesar Rp 6,5 miliar (setara dengan USD418). Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 26 Juli 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,75% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp6,8 miliar (setara dengan USD437 ribu) pada tanggal 30 September 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp4,5 miliar (setara dengan USD290 ribu) pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

PT Chandra Sakti Utama Leasing (“CSUL”)

Pada tanggal 21 Oktober 2022, KBL dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar USD2.000 ribu. Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 21 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,19% per tahun.

Pada tanggal 26 Oktober 2022, KBL mencairkan fasilitas kredit sales dan leaseback sebesar USD1.060 ribu dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar USD750 ribu pada tanggal 4 November 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 4 Oktober 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia (“CFI”)

Pada tanggal 5 September 2023, KBL dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp59 miliar (setara dengan USD3.800 ribu). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 14 September 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit sales and lease-back sebesar Rp15,3 miliar (setara dengan USD985 ribu). Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 14 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia (“HFI”)

Pada tanggal 21 Agustus 2023, KBL dan HFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp34,8 miliar (setara dengan USD2.200 ribu). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 3 Januari 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 10% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 3 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit direct lease sebesar Rp5,7 miliar (setara dengan USD367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 3 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 20 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit direct lease sebesar Rp5,7 miliar (setara dengan USD367 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 20 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit direct lease sebesar Rp2,9 miliar (setara dengan USD187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 1 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit direct lease sebesar Rp2,9 miliar (setara dengan USD187 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 1 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 30 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit direct lease sebesar Rp8,6 miliar (setara dengan USD553 ribu) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 30 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Syarat dan ketentuan atas perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

- i. PTRO dan KBL tidak diperbolehkan untuk menjual, meminjamkan, melakukan sewa kembali, atau melepaskan atau, menghentikan pengendalian langsung atas, aset hak-guna; dan
- ii. PTRO dan KBL tidak diperbolehkan menggunakan aset hak-guna sebagai jaminan, termasuk jaminan deposito, atau garansi kepada lessor lainnya.

11. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar USD124.025 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas pajak tangguhan yang dimiliki Perseroan:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember 2023	Akuisisi Entitas Anak	Penyesuaian	Dikreditkan ke laba rugi	Dibebaskan ke penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	31 Desember 2024
Aset (liabilitas) pajak tangguhan							
<u>Perseroan</u>							
Penyisihan imbalan kerja karyawan	5	-	-	2	2	(2)	7
Bonus	-	-	-	48	-	-	48
Sub-total	5	-	-	50	2	(2)	55
<u>Entitas Anak</u>							
Penyisihan imbalan kerja karyawan	31	6.381	(270)	574	(25)	(517)	6.174
Liabilitas sewa	-	2.111	-	886	-	-	2.997
Beban masih harus dibayar	-	1.569	-	683	-	-	2.252
Persediaan	-	61	-	81	-	(220)	(78)
Piutang usaha	-	5	-	10	-	-	15
Aset tak- berwujud	-	(22.519)	-	2.335	-	-	(20.184)
Aset tetap	-	(12.873)	(1.553)	142	-	-	(14.284)
Aset hak- guna	-	(1.778)	-	(823)	-	-	(2.601)
Bonus	-	-	(46)	(42)	-	-	(88)

(dalam ribuan USD)

	31 Desember 2023	Akuisisi Entitas Anak	Penyesuaian	Dikreditkan ke laba rugi	Dibebaskan ke penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	31 Desember 2024
Kombinasi bisnis	-	(105.544)	-	7.164	-	-	(98.380)
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	86	-	-	408	-	-	494
Sub-total	117	(132.587)	(1.869)	11.418	(25)	(737)	(123.683)
Total	122	(132.587)	(1.869)	11.468	(23)	(739)	(123.628)

12. Liabilitas derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki liabilitas derivatif sebesar USD1.380 ribu.

13. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar USD29.397 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas imbalan kerja karyawan yang dimiliki Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Imbalan pasca kerja	23.777
Cuti berimbalan jangka panjang	6.167
Total	29.944
Cuti berimbalan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(547)
Bagian jangka panjang	29.397

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan tahun 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nurichwan and KKA Steven & Mourits, aktuaris independent dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan metode "Projected Unit Credit" adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024
Tingkat diskonto	7,10% – 7,15%
Tingkat kenaikan gaji	8% – 10%
Tingkat mortalitas	TMI IV
Tingkat cacat	5% dari mortalitas
Umur pensiun normal	55 – 56

14. Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar USD10.730 ribu. Berikut di bawah ini rincian mengenai provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	391
Kenaikan provisi yang disebabkan oleh berlalunya waktu	103
Penambahan melalui bisnis kombinasi	1.245
Penambahan	8.991
Saldo akhir	10.730

Grup membuat provisi penuh untuk biaya rehabilitasi lokasi tambang di masa depan berdasarkan basis diskonto atas pengembangan tambang. Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan nilai kini dari biaya rehabilitasi yang berkaitan dengan lokasi tambang yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Provisi ini dibentuk berdasarkan estimasi internal Grup. Asumsi-asumsi, berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, telah dibuat yang menurut manajemen merupakan dasar yang wajar untuk mengestimasi liabilitas masa depan. Estimasi ini ditelaah secara berkala untuk memperhitungkan perubahan material terhadap asumsi-asumsi tersebut. Namun demikian, biaya rehabilitasi aktual pada akhirnya akan bergantung pada harga pasar di masa depan untuk pekerjaan penonaktifan yang diperlukan, yang akan mencerminkan kondisi pasar pada waktu yang relevan. Selain itu, waktu pelaksanaan rehabilitasi akan bergantung pada saat tambang berhenti berproduksi pada tingkat yang layak secara ekonomi. Hal ini, pada gilirannya, akan bergantung pada harga batu bara di masa depan, yang pada dasarnya tidak pasti.

15. Perjanjian penting, komitmen dan kontinjensi

Perseroan

1. Perjanjian *Interest Rate Swap*

Pada tanggal 21 November 2023, Perseroan menerima surat perjanjian dengan Nomor Referensi Transaksi 363 tentang transaksi *Interest Rate Swap* (“IRS”) dari BNI.

IRS merupakan perjanjian antara dua pihak berdasarkan kesepakatan untuk melakukan pembayaran periodik kepada masing-masing pihak dalam waktu yang disepakati, sesuai dengan jumlah nosional tertentu. Swap ini mengizinkan Perseroan untuk mengkonversi kewajiban bunga mengambang menjadi kewajiban bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar derivatif yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp22.306.055.814 (setara dengan USD1.380 ribu). Derivatif ini ditujukan sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi risiko suku bunga yang timbul dari utang Grup dengan suku bunga mengambang. Oleh karena itu, perubahan nilai wajar derivative tersebut dicatat secara langsung di ekuitas pada “Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Entitas Anak

PT Prima Mineral Investindo (“PMI”)

2. Akuisisi PT Silika Salut Jaya (“SSJ”)

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 06 dan 07, keduanya tertanggal 11 September 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., PMI melakukan transaksi akuisisi saham sebanyak 85,00% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam SSJ.

SSJ saat ini sedang dalam proses akhir untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) pasir silica di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk wilayah kerja seluas 461,49 Ha.

PT Petrosea Tbk (“PTRO”) dan Entitas Anak

- a. Mulai 1 Januari 2011, PTRO memberikan jasa pemindahan tanah penutup dan penambangan batu bara dan jasa konstruksi kepada Kideco Jaya Agung (“KJA”).

Pada tanggal 22 Oktober 2010, PTRO dan KJA, menandatangani Kontrak Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batu bara senilai USD216 juta di SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur. Perjanjian ini efektif mulai 1 Januari 2011.

Pada tanggal 10 Mei 2013, PTRO dan KJA menandatangani Kontrak Sewa Peralatan (*Wet Rental*) di wilayah SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur.

Baik perjanjian terkait perjanjian pemindahan tanah penutup dan produksi batu bara maupun kontrak sewa peralatan (*wet rental*) telah beberapa kali perubahan. PTRO dan KJA menandatangani perubahan terakhir atas perjanjian pemindahan tanah penutup tersebut melalui perubahan ke-13 pada tanggal 20 Mei 2024 perihal perubahan volume kontrak, harga kontrak terbaru dan kompensasi lumpur, dimana target volume produksi untuk tahun 2024 sebesar 43.471 juta bcm untuk tanah penutup dan 11.238 juta ton untuk tonase batu bara. Perjanjian ini akan berakhir pada Desember 2028.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2015, KPI mengadakan perubahan perjanjian untuk pemberian jasa kepada PT Freeport Indonesia ("**PTFI**") yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, KPI akan mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas yang dijelaskan dalam perjanjian hanya untuk pemberian jasa tersebut dan akan memberikan jasa secara eksklusif untuk kepentingan PTFI. Sebagai kompensasi, KPI akan menerima sebagai berikut:
 - Beban KPI yang akan diganti terdiri dari semua *cash costs, expenses, charges, fees*, dan jumlah lain, baik *capital, ordinary or extraordinary in nature*, kecuali *extraordinary expenses* seperti yang didefinisikan dalam perjanjian, yang dikeluarkan oleh KPI dalam menjalankan kegiatannya di bawah dan sehubungan dengan perjanjian tersebut.
 - Biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi sejumlah USD142 ribu ditambah 7,5% dari biaya tenaga kerja langsung dari karyawan KPI yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan atau sebagai biaya gaji terkait untuk bulan tersebut, dan insentif keamanan dengan jumlah sampai dengan 2,5% dari biaya yang disepakati. Insentif akan dihitung dan diakui bulanan dan dibayarkan setiap enam bulan.

Pada tanggal 1 Januari 2020, berdasarkan surat pemberitahuan dari PTFI tanggal 22 Oktober 2019, dilakukan pengurangan biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi dari sebesar USD142 ribu menjadi USD42 ribu. Pada tahun 2021, biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi disesuaikan kembali menjadi sebesar USD142 ribu. Tidak terdapat perubahan atas manfaat lainnya yang diperoleh KPI dari PTFI.

Pada 27 Desember 2023, KPI dan PTFI telah menandatangani perpanjangan perjanjian jasa sampai dengan 31 Agustus 2025.

- c. Pada tanggal 23 Juni 2017, PTRO dan BP Berau Ltd. telah menandatangani Kontrak untuk Jasa *Supply Base services* di Sorong. Nilai kontrak adalah sebesar Rp734 miliar (setara dengan USD52 juta) dengan masa kontrak selama 5 tahun sampai dengan 22 Juni 2022, dengan opsi perpanjangan tiap tahun selama 3 tahun setelah durasi kontrak.

Pada tanggal 22 Juni 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian ini dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp73,4 miliar (setara dengan USD4,7 juta) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp807,6 miliar (setara dengan USD52 juta).

Pada tanggal 1 Juni 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 6 atas perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir sampai dengan 22 Juni 2025.

- d. Pada tanggal 24 Mei 2017, PTRO dan PTFI menandatangani *Master Services Agreement* untuk jasa pertambangan Grasberg Wanagon di Papua. Nilai kontrak adalah sebesar USD44 juta dengan masa kontrak selama 25 bulan yang terdiri dari 5 *Work Assignment*.

Pada tanggal 22 September 2023, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Maret 2025.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 5 Oktober 2023 kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Desember 2025.

- e. Pada tanggal 15 Juni 2022, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen Perjanjian untuk Proyek *Levee Stockpile Project Extension* dengan nilai kontrak sebesar USD125,16 juta. Proyek ini memiliki durasi penyelesaian hingga tanggal 30 Juni 2026.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan kontrak No. 020. Amandemen ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar USD477,3 ribu.

- f. Pada tanggal 10 April 2018, PTRO dan CSTS Joint Operation menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemuatan & Pembongkaran dan Penyimpanan di POSB Sorong dengan nilai kontrak sebesar Rp14,3 miliar (setara dengan USD872 ribu). Pada tanggal 17 Februari 2020, PTRO dan CSTS Joint Operation telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian tersebut dengan nilai kontrak menjadi Rp236 miliar (setara dengan USD16,7 juta).

- g. Pada tanggal 27 Juni 2021, PTRO, PT Masmino Dwi Area dan PT Indika Energy Tbk sebagai penjamin pembayaran telah menandatangani *Umbrella Service Agreement* dengan durasi sampai dengan 31 Oktober 2021 di mana PTRO bertindak sebagai kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan yang akan disepakati kemudian untuk memastikan progres implementasi Proyek Awak Mas.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022, PTRO dan PT Masmino Dwi Area juga telah menandatangani *Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract* dengan nilai Rp95.009 juta (setara dengan USD6.040 ribu). Periode pekerjaan berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

- h. Pada tanggal 29 Desember 2020, PTRO dan PT Kartika Selabumi Mining ("KSM") dan PT Palm Mas Asri (sebagai pihak penjamin KSM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan volume produksi lapisan penutup tanah sebesar 80,1 juta bcm dan batu bara sebesar 3,95 juta ton yang kemudian dialihkan kepada anak PTRO, KBL.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Plant Hire Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM untuk penyewaan peralatan bergerak dan penyediaan tenaga kerja di lokasi tambang KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

- i. PTRO mendukung pengembangan pembangunan smelter sebesar USD1 juta pada PIM dimana PTRO dapat menagihkan kembali biaya pengembangan tersebut atau dapat dikonversikan menjadi saham Perusahaan Anak PIM, PT Perkasa Alumina Indonesia (PAI).

Pada tanggal 17 Februari 2025, PTRO menerima surat konfirmasi dari PIM atas pengembalian dana pengembangan pembangunan smelter yang akan diterima selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.

- j. Pada tanggal 10 Oktober 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan PT Hardaya Mining Energy ("HME") dan PT Central Cipta Murdaya ("CCM") sebagai pihak penjamin dari HME. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian diakhiri pada tanggal 31 Desember 2024.

- k. Pada tanggal 15 September 2022, PTRO dan IBP menandatangani Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan dengan durasi pekerjaan selama 5 tahun di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. PTRO akan menyediakan jasa pertambangan dan project management.

- l. Pada tanggal 17 April 2023, PTRO dan PT Kedap Sayaq ("KS") menandatangani surat perikatan untuk jasa konsultasi.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tanggal 22 Maret 2024, dimana PTRO dan KS telah menandatangani perubahan kedua atas perjanjian No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan tarif, perubahan biaya infrastruktur dan mobilisasi/demobilisasi, dan penambahan pasal mengenai jaminan pembayaran. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2028.

- m. Pada tanggal 19 September 2023, PTRO dan PT Sumberdaya Arindo ("SDA") telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana PTRO akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek SDA dengan nilai kontrak Rp1.090 miliar (setara dengan USD70.347 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 22 September 2026.
- n. Pada tanggal 9 Agustus 2024, PTRO dan PT Pasir Bara Prima ("PBP") telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan yang berlaku hingga cadangan batu bara dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") dan yang dapat ditambang habis sepanjang umur tambang (life of mine) dengan total sekitar 52 juta ton, dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp17,4 triliun (setara dengan USD1,08 miliar). Perjanjian ini berlaku sampai dengan cadangan batu bara yang ditambang habis (life of mine).
- o. Pada tanggal 1 Juli 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani Perjanjian Rental Alat Berat untuk area Portsites, Amamapare, Papua Indonesia. Nilai Perjanjian ini adalah sebesar Rp8,1 miliar (setara dengan USD501 ribu).

Pada tanggal 9 Oktober 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen Change Order No. 001 untuk penambahan peralatan dengan nilai kontrak sebesar Rp2,2 miliar (setara dengan USD136 ribu).

Pada tanggal 20 November 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen Change Order No. 002. Change Order ini dimaksudkan untuk menambahkan sejumlah anggaran di dalam Perjanjian atas penambahan alat sebesar Rp12,02 miliar (setara dengan USD744 ribu) dan memperpanjang periode perjanjian hingga tanggal 7 November 2025.

- p. Pada tanggal 27 Desember 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani perjanjian Site Preparation, Sheet Piling and Firewater. Nilai perjanjian ini sebesar Rp71,79 miliar (setara dengan USD4.441 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 15 November 2025.
- q. Pada tanggal 8 April 2019, PTRO dan PTFI menandatangani perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja dan Alat (Corrosion Project) senilai Rp54,55 miliar (setara dengan USD3.375 ribu) dengan estimasi penyelesaian sampai dengan 31 Agustus 2020.

Selama bulan Agustus 2020 hingga Desember 2024, PTRO dan PTFI menandatangani beberapa Contract Change Order (CCO-001 sampai dengan CCO-013) dengan tambahan nilai sebesar Rp132,16 miliar (setara dengan USD8.177 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2025.

- r. Pada tanggal 3 Juli 2024, PTRO dan PT Vale Indonesia Tbk menandatangani perjanjian atas Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Tambang Blok Pomalaa dengan nilai kontrak sebesar Rp2,8 triliun (setara dengan USD175 juta) dengan estimasi durasi proyek selama 24 bulan.
- s. Pada Tanggal 5 Juni 2024, PTRO dan PT Global Bara Mandiri (GBM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan estimasi nilai kontrak sebesar USD230 juta untuk periode 8 tahun.
- t. Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO dan GI telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun.
- u. Pada tanggal 2 September 2024, PTRO dan PT GBM telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 65 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2032.

- v. Pada tanggal 26 Februari 2025, PTRO, PT Niaga Jasa Dunia, dan PT Bara Prima Mandiri (BPM) menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan. Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 5 November 2024 sampai tanggal 31 Desember 2032 dengan total OB volume 135,5 mbcm dan volume batu bara 7,5 mton, dengan estimasi kontrak sebesar Rp4,03 miliar (setara dengan USD231 juta).

Liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan yaitu sebesar USD13.907.863,59. Seluruh liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan akan dilunasi menggunakan kas internal Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak Prospektus ini diterbitkan :

(dalam USD penuh)

Kreditur	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman Yang Akan Jatuh Tempo Dalam 3 Bulan	Jatuh Tempo
Perseroan			
Sindikasi (BCA, Mandiri, BNI)	Sindikasi Tranche B	397.284,32	30-Sep-25
	Sindikasi Tranche C	6.156.067,14	30-Sep-25
Mandiri	Term loan bilateral	210.564,31	30-Sep-25
BNI	Term loan bilateral	699.374,32	30-Sep-25
	RCF II Tranche B	699.374,32	30-Sep-25
PTRO			
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	Lease Loan	570.904,54	30-Sep-25
PT KDB IFA Finance	Lease Loan	20.579,27	30-Sep-25
PT Mandiri Tunas Finance	Lease Loan	298.839,83	30-Sep-25
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	Lease Loan	79.171,47	30-Sep-25
PT Komatsu Astra Finance	Lease Loan	49.173,90	30-Sep-25
BCA	BCA KI 1 USD	322.676,88	30-Sep-25
	BCA KI 1 IDR	872.905,71	30-Sep-25
	BCA KI 2 USD	1.021.222,11	30-Sep-25
	BCA KI 5 IDR	591.867,03	30-Sep-25
	BCA KI 4 IDR	644.162,04	30-Sep-25
	BCA KI 3 IDR	112.667,94	30-Sep-25
BNI	BNI Sindikasi	617.439,27	30-Sep-25
KBL			
BCA	KI 1	10.185,27	30-Sep-25
	KI 5	10.959,40	30-Sep-25
PT Chandra Sakti Leasing	Lease Loan	119.937,80	30-Sep-25
PT SMFL Leasing Indonesia	Lease Loan	55.147,81	30-Sep-25
PT Caterpillar Finance Indonesia	Lease Loan	42.388,04	30-Sep-25
PT Hexa Finance Indonesia	Lease Loan	94.312,71	30-Sep-25
CEP			
BCA	KI 3 CEP	105.329,08	30-Sep-25
	KI 3 CEP WD 2	105.329,08	30-Sep-25
TOTAL		13.907.863,59	

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	272.991	60.919
Dana yang dibatasi penggunaannya	7.739	-
Aset keuangan lainnya	31.172	-
Piutang usaha		
Pihak ketiga	163.218	1.583
Pihak berelasi	29.006	-
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	22.879	101
Pihak berelasi	96	-
Persediaan	69.212	39.227
Aset kontrak	3.869	-
Pajak dibayar di muka	32.548	7.158
Uang muka investasi	631	43.835
Uang muka dan beban dibayar di muka	38.464	12.220
Aset lancar lainnya	5.866	-
Total Aset Lancar	677.691	165.043
ASET TIDAK LANCAR		
Dana yang dibatasi penggunaannya	12.055	939
Piutang lain-lain	13.275	-
Uang muka pembelian aset tetap	627	1.094
Aset eksplorasi dan evaluasi	53.701	18.174
Aset tetap	471.206	36.926
Properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah	358.505	6.048
Aset hak guna	19.863	-
Aset tak berwujud	119.421	2
Goodwill	19.768	-
Aset pajak tangguhan	397	122
Taksiran klaim pajak penghasilan	21.133	1.699
Aset tidak lancar lainnya	10.154	15
Total Aset Tidak Lancar	1.100.105	65.019
TOTAL ASET	1.777.796	230.062

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	58.716	12.811
Utang usaha		
Pihak ketiga	130.977	8.725
Pihak berelasi	212	-
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	1.002	6.302
Pihak berelasi	21	-
Utang dividen	879	-
Utang pajak	4.212	851
Beban akrual	71.855	18.214
Liabilitas kontrak	20.833	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	44.517	-
Utang obligasi	3.175	-
Utang sukuk	2.172	-
Liabilitas sewa	8.622	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	347.193	46.903
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas derivatif	1.380	740
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	598.552	61.162
Utang obligasi	58.396	-
Utang sukuk	28.554	-
Liabilitas sewa	13.670	-
Liabilitas pajak tangguhan	124.025	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	29.397	164
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	10.730	391
Total Liabilitas Jangka Panjang	864.704	62.457
TOTAL LIABILITAS	1.211.897	109.360
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Modal dasar – 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 11.241.890.000 lembar saham	164.392	164.392
Tambahan modal disetor	1.689	1.689
Komponen ekuitas lainnya	20.381	(1.042)
Kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.380)	(740)
Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun	468	608
Selisih penjabaran laporan keuangan	(3.527)	(19.535)
Laba ditahan (defisit)	124.128	(36.657)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	306.151	108.715
Kepentingan non-pengendali	259.748	11.987
Total Ekuitas	565.899	120.702
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.777.796	230.062

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN	801.723	97.943
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(683.857)	(60.725)
LABA BRUTO	117.866	37.218
Beban penjualan	(35.514)	(13.161)
Beban umum dan administrasi	(53.400)	(3.953)
Beban pajak final	(8.912)	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya – net	196.208	(382)
LABA USAHA	216.248	19.722
Pendapatan keuangan	3.758	1.118
Beban keuangan	(48.966)	(1.252)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	171.040	19.588
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(10.669)	(4.438)
Tangguhan	9.599	100
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO	(1.070)	(4.338)
LABA NETO UNTUK TAHUN BERJALAN	169.970	15.250
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	10.751	1.411
Keuntungan aktuarial atas program pensiun imbalan pasti	1.909	14
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(640)	(740)
Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(23)	(3)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	11.997	682
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN BERJALAN	181.967	15.932
Total laba netto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	160.785	15.621
Kepentingan non-pengendali	9.185	(371)
Total	169.970	15.250
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	176.013	15.271
Kepentingan non-pengendali	5.954	661
Total	181.967	15.932
LABA PER SAHAM (nilai penuh)	0,014	0,001

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	764.031	105.117
Pengeluaran kas kepada pemasok	(482.661)	(52.588)
Pengeluaran kas untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	(122.176)	(2.863)
Pengeluaran kas untuk beban usaha	(87.015)	(38.090)
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	72.179	11.576
Pembayaran beban keuangan	(48.235)	(1.022)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final	(28.289)	(12.792)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	3.758	1.118
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(2.062)	-
Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi	(2.649)	(1.120)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(143.704)	(4.903)
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Multi Tambangjaya Utama	(106.669)	-
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(24.306)	(1.737)
Penambahan investasi pada aset keuangan lainnya	(22.585)	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Petrosea Tbk	18.317	-
Akuisisi properti pertambangan	(2.002)	(4.039)
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Borneo Bangun Banua Bestari	(1.801)	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Borneo Berkat Kutai	(1.733)	-
Perolehan aset tak berwujud	(238)	(2)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	106	-
Uang muka investasi	-	(41.225)
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	-	(1.106)
Penerimaan dari piutang pemegang saham	-	3.925
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(284.615)	(49.087)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	606.564	61.162
Pembayaran utang bank jangka panjang	(199.213)	-
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	71.796	12.811
Pembayaran utang bank jangka pendek	(62.000)	-
Penerimaan dari utang obligasi	61.564	-
Penerimaan dari utang sukuk ijarah	30.790	-
Pembayaran liabilitas sewa	(9.845)	-
Pembayaran dividen oleh entitas anak	(2.232)	-
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(762)	-
Penerimaan dari penawaran umum perdana	-	24.372
Pembayaran transaksi pinjaman biaya	-	(2.988)
Pembayaran biaya penerbitan saham	-	(515)
Arus kas netto diperoleh dari aktivitas pendanaan	496.662	94.842
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	209.398	44.635
Dampak netto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	2.674	91
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	60.919	16.193
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	272.991	60.919

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)		
Pendapatan	718,56	(4,15)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1014,56	(59,68)
Jumlah Aset	672,75	107,84
Jumlah Liabilitas	1008,17	269,26
Ekuitas	368,84	48,88
EBITDA	1.376,95	(58,50)
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor / Pendapatan	14,70	38,00
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	21,33	20,00
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / <i>Net Profit Margin</i>)	21,20	15,57
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	30,04	12,63
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	9,56	6,63
Rasio Keuangan (%)		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	68,17	47,54
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	140,32	61,29
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	78,63	129,88
Margin EBITDA	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	160,33	59,32
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	459,83	1575,24

INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT

Berikut adalah informasi nilai kurs mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

(Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kurs yang berlaku pada tanggal laporan	16.162	15.416

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian kredit. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2024
<i>Adjusted Current Ratio</i>	Minimal 1 kali	2,35
<i>Adjusted DSCR</i>	Minimal 3 kali	7,21
<i>Interest Bearing Debt to Equity*</i>	Maksimal 3 kali	1,40

* *Interest Bearing Debt to Equity* yaitu, seluruh kewajiban / utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul dari pembiayaan leasing.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, adalah Perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No.12 oleh Benny Kristiano, S.H., tanggal 4 Agustus 2008. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023.

Berdasarkan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini ialah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Desember 2012. Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor di Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pendapatan, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha. Dalam menghadapi dinamika industri, Perseroan telah menerapkan strategi mitigasi risiko dan optimalisasi operasional guna menjaga daya saing dan stabilitas keuangan. Berikut dibawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

Fluktuasi harga batu bara dunia

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, sebagian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak diperoleh dari penjualan batu bara. Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batu bara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batu bara adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi konsumsi penggunaan listrik dan permintaan batu bara
2. Neraca perdagangan batu bara yang dipengaruhi oleh:
 - a. Volume ekspor batu bara dunia;
 - b. Fluktuasi permintaan volume batu bara dari pasar domestik maupun negara pengimpor.
3. Produksi batu bara dunia yang dapat mempengaruhi pasokan domestik dan ekspor, penemuan cadangan batu bara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batu bara.
4. Kebijakan pemerintah negara lain atas ekspor atau impor batu bara di negaranya.
5. Perubahan biaya yang mempengaruhi margin penjual.
6. Nilai tukar mata uang yang mempengaruhi daya beli.
7. Perubahan biaya angkut.
8. Perubahan cuaca atau musim serta bencana alam.
9. Konflik antar negara yang memiliki dampak geopolitik internasional.
10. Target dekarbonisasi negara-negara pengimpor dan pengekspor.

Permintaan batu bara dunia

Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara termal dunia. Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara termal dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti, peraturan baru tentang Hasil Ekspor (DHE), dan biaya operasional lainnya.

Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik di negara-negara ekonomi utama seperti China dan India. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%).

Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lanskap energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana 67% pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025. Target ini meningkat 3,52% dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 710 juta ton. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor. Sementara itu realisasi produksi batu bara pada tahun 2024 mencapai 831,05 juta ton, melebihi target yang ditetapkan. Tingginya produksi ini didorong oleh permintaan dari China dan negara-negara ASEAN.

Volume dan tingkat efisiensi produksi batu bara Perusahaan Anak

Kinerja penjualan Perusahaan Anak dapat dipengaruhi oleh harga batu bara dan volume produksi Perusahaan Anak. Volume produksi dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas operasional pertambangan dimana faktor efisiensi sangat bergantung pada kondisi geologis area pertambangan.

Kondisi bebatuan dan lapisan tanah yang tebal akan mempengaruhi *striping ratio* (volume masa batuan yg dibongkar (lapisan tanah penutup) dengan jumlah batu bara yang dapat diambil). Semakin rendah lapisan tanah penutup yang dibongkar, maka semakin rendah *striping ratio*, dan semakin efisien produksi batu bara Perusahaan Anak. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya produksi batu bara Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan. Sedangkan produktifitas pertambangan Perusahaan Anak utamanya dipengaruhi oleh kondusifitas cuaca pada area pertambangan. Kondisi cuaca yang baik meningkatkan produktivitas dan berdampak positif bagi hasil operasi Perusahaan Anak.

Perubahan cuaca dan iklim di wilayah Perusahaan Anak

Letak geografis lokasi tambang milik Perusahaan Anak yang terletak di Pulau Kalimantan beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat mempengaruhi kegiatan produksi Perusahaan Anak (kegiatan pengupasan di lokasi tambang) dan penjualan (perlintasan jalan akses *hauling* dan transportasi air). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kering akan memberikan sisi positif terhadap kinerja penambangan dan pengangkutan batu bara melalui darat karena tingginya ketersediaan jam kerja namun pengangkutan melalui jalur air (sungai) mengalami kendala karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim basah, dimana kinerja penambangan dan pengangkutan darat mengalami kendala namun pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang.

Fluktuasi harga bahan bakar

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: meningkatkan biaya operasional penambangan, meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan batu bara dan kegiatan pemuatan batu bara ke dalam tongkang, dan meningkatkan biaya transportasi darat (*hauling*) dan air (*barging*).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar baru, amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2024

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi keuangan tahun sebelumnya, kecuali penyajian mata uang bagi pengadopsian standar dan amendemen baru yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan amendemen.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, DSAK juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS (diawali dengan angka 3 dan 4).

- PSAK 207 (amendemen), Laporan Arus Kas dan PSAK 107 (amendemen), Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen ini memperjelas pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok, sehingga memungkinkan pengguna untuk menilai dampak fasilitas pembiayaan tersebut terhadap liabilitas, arus kas, dan likuiditas, serta dampaknya jika fasilitas pembiayaan tidak lagi tersedia.

Amendemen tersebut mengharuskan entitas untuk memberikan pengungkapan tertentu (kualitatif dan kuantitatif) yang terkait dengan pengaturan pembiayaan pemasok. Amendemen tersebut juga memberikan panduan tentang karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok.

- PSAK 116 (amendemen), Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik

Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik, mencakup penjelasan bagaimana entitas mencatat penjualan dan penyewaan kembali setelah tanggal transaksi. Sebelum Amendemen, PSAK 116 tidak membuat persyaratan pengukuran khusus untuk kewajiban sewa yang mungkin memuat pembayaran sewa variabel yang timbul dalam transaksi jual dan sewa balik, seperti transaksi jual dan sewa kembali yang sebagian atau seluruh pembayaran sewanya merupakan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga, kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Dalam menerapkan persyaratan pengukuran kewajiban sewa berikutnya pada transaksi jual dan sewa balik, amendemen mengharuskan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa yang direvisi' sedemikian rupa sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui sejumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak pengguna yang dimiliki oleh penjual-penyewa.

- PSAK 201 (amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan sehingga kondisi yang harus dipatuhi suatu entitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan mempengaruhi klasifikasi suatu kewajiban yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang belum efektif

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117, Kontrak Asuransi

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan pada perusahaan asuransi seperti pemisahan antara pendapatan yang diperoleh dari bisnis asuransi dan bisnis investasi, termasuk penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

- PSAK 221 (amendemen), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran

Amendemen ini menjelaskan pengaturan pengungkapan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	801.723	97.943
Beban pokok pendapatan	(683.857)	(60.725)
Laba bruto	117.866	37.218
Laba usaha	216.248	19.722
Laba netto untuk tahun berjalan	169.970	15.250
Total penghasilan komprehensif lain	11.997	682
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	181.967	15.932
Laba per saham	0,014	0,001

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD801.723 ribu, meningkat sebesar 718,56% atau USD703.780 ribu dibandingkan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan batu bara sebesar USD180.402 ribu atau 184,19% menjadi USD278.345 ribu pada tahun 2024 dibandingkan penjualan batu bara pada tahun 2023. Selain itu, terdapat pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar USD250.408 ribu, pendapatan penambangan sebesar USD243.173 ribu, pendapatan jasa sebesar USD27.607 ribu dan pendapatan lain-lain sebesar USD2.190 ribu yang tercatat mulai tahun 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD683.857 ribu, meningkat sebesar USD623.132 ribu atau 1.026,15% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pengembangan dan pengangkutan, gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu terdapat biaya subkontraktor, biaya material dan biaya operasi alat berat dan peralatan yang tercatat mulai tahun 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD216.248 ribu, meningkat sebesar 996,48% atau USD196.526 ribu dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto serta pendapatan operasi lainnya, yang diimbangi juga dengan peningkatan beban penjualan, beban umum dan administrasi.

Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD169.970 ribu, meningkat sebesar 1.014,56% atau USD154.720 ribu dibandingkan Laba Neto Tahun Berjalan pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang diimbangi juga dengan peningkatan beban keuangan.

Total Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD11.997 ribu, meningkat sebesar 1.659,09% atau USD11.315 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif Lain pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD181.967 ribu, meningkat sebesar 1.042,15% atau USD166.035 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	677.691	165.043
Aset Tidak Lancar	1.100.105	65.019
Jumlah Aset	1.777.796	230.062
Liabilitas Jangka Pendek	347.193	46.903
Liabilitas Jangka Panjang	864.704	62.457
Jumlah Liabilitas	1.211.897	109.360
Ekuitas	565.899	120.702

(dalam ribuan USD)

a. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.777.796

ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD677.691 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD1.100.105 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD512.648 ribu atau sebesar 310,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dan piutang usaha pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD1.035.086 ribu atau sebesar 1.591,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah serta aset takberwujud.

Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

b. Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.211.897 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD347.193 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD864.704 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD300.290 ribu atau sebesar 640,24% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek, utang usaha pihak ketiga serta liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD802.247 ribu atau sebesar 1.284,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan serta liabilitas jangka panjang, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

c. Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD565.899 ribu, mengalami kenaikan sebesar USD445.197 ribu atau sebesar 368,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan dan kepentingan non-pengendali dari akuisisi Entitas Anak.

6. ARUS KAS

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disebutkan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(2.649)	(1.120)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(284.615)	(49.087)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	496.662	94.842
Kenaikan (penurunan) neto dalam kas dan setara kas	209.398	44.635
Dampak neto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	2.674	91
Kas dan setara kas pada awal tahun	60.919	16.193
Kas dan setara kas pada akhir tahun	272.991	60.919

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar USD2.649 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD1.529 ribu atau sebesar 136,52% dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban keuangan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar USD2.649 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD764.031 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD482.661 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD122.176 ribu, pembayaran beban usaha lainnya sebesar USD87.015 ribu, pembayaran beban keuangan sebesar USD48.235 ribu serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD28.289 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar USD1.120 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD105.117 ribu dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD52.588 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar USD2.863 ribu, pembayaran beban usaha lainnya sebesar USD38.090 ribu serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD12.792 ribu.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD284.615 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD235.528 ribu atau sebesar 479,82% dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap serta untuk akuisisi Entitas Anak.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD284.615 ribu, dimana sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar USD143.704 ribu, akuisisi beberapa Entitas Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar USD91.886 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD49.087 ribu, dimana sebagian besar digunakan untuk uang muka investasi terkait akuisisi Entitas Anak sebesar USD41.225 ribu.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD496.662 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD401.820 ribu atau sebesar 423,67% dibandingkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan atas utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD496.662 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan atas utang bank jangka pendek sebesar USD71.796 ribu, utang bank jangka panjang sebesar USD606.564 ribu, utang obligasi sebesar USD61.564 ribu dan utang sukuk ijarah sebesar USD30.790 ribu. Selain itu juga terdapat pembayaran atas utang bank jangka pendek sebesar USD62.000 ribu dan utang bank jangka panjang sebesar USD199.213 ribu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD94.842 ribu, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan atas utang bank jangka pendek sebesar USD12.811 ribu, utang bank jangka panjang sebesar USD61.162 ribu dan penerimaan dari penawaran umum perdana sebesar USD24.372 ribu.

Karakteristik dan siklus bisnis Perseroan:

- Proses eksplorasi dan pengembangan tambang batu bara memerlukan investasi modal yang sangat besar pada tahap awal. Pengeluaran ini mencakup pembelian peralatan berat, pembangunan infrastruktur, dan biaya eksplorasi. Oleh karena itu, pada awalnya, pola arus kas cenderung negatif, dengan pengeluaran yang sangat tinggi dan pemasukan yang masih terbatas.
- Terdapat jangka waktu antara produksi batu bara dan pembayaran dari pembeli. Ini dapat memengaruhi pola arus kas karena ada waktu antara ketika biaya telah dikeluarkan untuk produksi dan saat Perseroan menerima pembayaran.
- Pendapatan dari penjualan batu bara sangat bergantung pada harga pasar batu bara, yang dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada permintaan global, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Fluktuasi harga ini akan memengaruhi pola arus kas, baik dalam hal pendapatan maupun laba.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar 195,19% dan 351,88%.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun pinjaman jangka panjang.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024:

Kreditur	Jenis Fasilitas	Plafon	31 Desember 2024 (belum digunakan)	Keterangan
Perseroan				
Sindikasi BCA – BNI – Mandiri Tranche B	Long Term Loan	Rp200.000.000.000	Rp67.926.800.000	telah digunakan sebagian
DBK				
BNI Tranche A	Long Term Loan	Rp956.197.000.000	Rp956.197.000.000	belum digunakan
Tranche B	Long Term Loan	Rp963.477.000.000	Rp963.477.000.000	belum digunakan
Tranche C	Long Term Loan	Rp507.770.000.000	Rp507.770.000.000	belum digunakan
PTRO				
BCA KI 3	Long Term Loan	Rp500.000.000.000	Rp360.224.094.805	telah digunakan sebagian
KI 4	Long Term Loan	USD50.000.000	USD50.000.000	belum digunakan
KI 5	Long Term Loan	Rp800.000.000.000	Rp25.220.445	telah digunakan sebagian
BCA non cash loan	Non Cash Loan	USD100.000.000	USD13.544.931	telah digunakan sebagian
Time loan revolving	Long Term Loan	USD70.000.000	USD35.999.944	telah digunakan sebagian
CEP				
BCA KI 3	Long Term Loan	Rp500.000.000.000	Rp360.224.094.805	telah digunakan sebagian

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja. Jika modal kerja Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 214,15% dan 90,60%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 68,17% dan 47,54%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 30,04% dan 12,63%.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 9,56% dan 6,63%.

Profitabilitas

Margin laba (*net profit margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, *net profit margin* Perseroan adalah sebesar 21,20%, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar 15,57%. Peningkatan net profit margin pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan pendapatan operasi lainnya.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

8. SEGMENT OPERASI

Berikut dibawah ini tabel yang menyajikan rincian segmen operasi Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024					
	Pertambangan	Rekayasa dan Konstruksi	Jasa	Lain-lain	Eliminasi	Total
Pendapatan	529.268	250.408	59.752	2.196	(39.901)	801.723
Laba bruto	125.700	51.651	3.282	(27.058)	(35.709)	117.866
Beban penjualan	(51.267)	-	-	-	15.753	(35.514)
Beban umum dan administrasi	(48.423)	(13.788)	(5.338)	(1.738)	15.887	(53.400)
Beban pajak final	-	(8.790)	(122)	-	-	(8.912)
Beban operasi lainnya	11.190	2.698	14.850	74.042	93.428	196.208
Laba usaha	37.200	31.771	12.672	45.246	89.359	216.248
Pendapatan keuangan	2.610	4	3.093	633	(2.582)	3.758
Beban keuangan	(17.986)	(6.169)	(27.271)	(122)	2.582	(48.966)
Laba sebelum pajak penghasilan	21.824	25.606	(11.506)	45.757	89.359	171.040
Beban pajak penghasilan	(7.687)	-	(65)	4.182	2.500	(1.070)
Laba neto untuk tahun berjalan	14.137	25.606	(11.571)	49.939	91.859	169.970
Depresiasi, deplesi dan amortisasi	92.779	5.042	2.015	1	-	99.857
Aset segmen	1.203.039	257.690	710.153	46.787	(439.873)	1.777.796
Liabilitas segmen	514.116	267.429	510.624	3.869	(84.141)	1.211.897

Pada tahun 2024, pendapatan dari segmen pertambangan (penjualan batu bara dan kontrak pertambangan) memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yakni sebesar 65,05%, diikuti dengan segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 31,23% serta segmen jasa dan lain - lain sebesar 3,72%.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024			
	Pertambangan dan perdagangan batu bara	Lain-lain	Eliminasi	Total
Pendapatan	97.943	-	-	97.943
Laba bruto	37.218	-	-	37.218
Beban penjualan	(13.161)	-	-	(13.161)
Beban umum dan administrasi	(3.673)	(280)	-	(3.953)
Beban operasi lainnya	(382)	-	-	(382)
Laba (rugi) usaha	20.002	(280)	-	19.722
Pendapatan keuangan	1.118	-	-	1.118
Beban keuangan	(1.252)	-	-	(1.252)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	19.868	(280)	-	19.588
Beban pajak penghasilan	(4.338)	-	-	(4.338)
Laba (rug) neto untuk tahun berjalan	15.530	(280)	-	15.250
Depresiasi, deplesi dan amortisasi	2.274	10	-	2.284
Aset segmen	420.644	5.361	(195.943)	230.062
Liabilitas segmen	150.845	59	(41.544)	109.360

Pada tahun 2023, pendapatan dari segmen pertambangan (penjualan batu bara) memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yakni sebesar 100%.

9. BELANJA MODAL

Dalam rangka mendukung lini bisnis penjualan batu bara, kontrak pertambangan, konstruksi dan rekayasa, untuk memastikan kelancaran aktivitas operasional yang berlangsung, Perseroan telah merencanakan belanja modal setiap tahunnya. Belanja modal ini mencakup investasi dalam berbagai aset dan infrastruktur penting yang diperlukan untuk mendukung efektivitas operasional penjualan batu bara, kontrak pertambangan, konstruksi dan rekayasa.

Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya dengan memperhatikan resiko investasi. Keduanya berpengaruh langsung terhadap reputasi Perseroan, sehingga manajemen mampu menjaga keseimbangan antara realisasi investasi barang modal dan perlindungan atas setiap resiko.

Selama tahun 2024, tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan dan tidak ada komitmen investasi barang modal yang dilakukan dalam rangka persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. PEMBATASAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan, dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai dianggap minimal.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi, serta perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus ini.

12. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kontrak penjualan baik dengan mata uang Rupiah maupun dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan lindung nilai alami mengingat pengeluaran biaya operasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagian besar berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun sesuai Peraturan BI No.17/3/PBI/2015, realisasi pembayaran atas biaya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Manajemen mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga terhadap arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi dengan tarif bunga yang bervariasi. Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif memantau risiko suku bunga untuk meminimalkan dampak negatif bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak.
- c. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi biaya operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
- d. Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan dan Perusahaan Anak.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah.
- f. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan Sukuk Wakalah mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan Sukuk Wakalah. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko utama Perseroan

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Setiap kegiatan operasional dan kinerja keuangan yang dihasilkan sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi Perusahaan Anak untuk membayar kewajiban dan dividen Perseroan.

Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Perusahaan Anak terganggu sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Risiko utama Perusahaan Anak

Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perusahaan Anak

Harga jual batu bara global memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun berdasarkan permintaan dan pasokan. Perubahan tingkat produksi penambangan batu bara, dan konsumsi batu bara dari industri pembangkit listrik, semen, baja, dan lainnya sangat mempengaruhi harga batu bara. Pasar batu bara dunia juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batu bara. Penurunan harga batu bara dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas dan dapat diikuti dengan penyesuaian target produksi Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha Perseroan

Risiko investasi atau aksi korporasi

Guna mengoptimalkan proses bisnis dan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan investasi atau aksi korporasi yang meliputi pembangunan fasilitas pengolahan dan transportasi, hingga melakukan akuisisi perusahaan ataupun pengembangan tambang. Tidak ada jaminan bahwa setiap kegiatan investasi atau aksi korporasi akan selalu menguntungkan dan berdampak sesuai dengan harapan. Kegagalan dalam melakukan investasi atau aksi korporasi dapat memberikan

dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan investasi atau aksi korporasi, Perseroan dituntut untuk melakukan Analisa dan kajian secara komprehensif agar dapat meminimalisir risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi.

Risiko usaha Perusahaan Anak

1). Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya

Perkiraan cadangan batu bara terbukti dan terkira oleh anak perusahaan yang tercantum dalam prospektus ini merupakan perkiraan berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktik industri sesuai dengan aturan perhitungan cadangan. Perkiraan cadangan batu bara dapat berubah di masa mendatang seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi. Rencana pengembangan dan penambangan perusahaan, kelangsungan bisnis, situasi keuangan, kinerja operasi, dan prospek bisnis, semuanya dapat dipengaruhi oleh perubahan cadangan batu bara terbukti dan terkira Perusahaan Anak.

2). Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan

Kegiatan usaha Perusahaan Anak tidak terlepas dari bencana alam dan kecelakaan, termasuk risiko cuaca buruk (hujan lebat), tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat puncak musim hujan, tingginya tingkat curah hujan dapat mengakibatkan area penambangan menjadi licin, tergenang dan/atau sulit diakses, sehingga mengganggu aktivitas penambangan Perusahaan Anak dan berdampak pada volume produksi. Selain mengganggu aktivitas penambangan, cuaca buruk juga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan batu bara dan apabila aktivitas pengangkutan terganggu, maka dapat menyebabkan keterlambatan Perseroan dalam merealisasikan pendapatannya.

Perusahaan Anak memiliki standar keselamatan kerja yang cukup baik, namun hal tersebut tidak dapat menjamin di masa yang akan datang tidak terjadi kecelakaan. Kelalaian kontraktor jasa penambangan dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longornya area penambangan, kerusakan alat, cidera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga mengganggu profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

3). Risiko sumber daya manusia

Seluruh kegiatan usaha perusahaan anak bergerak dalam industri pertambangan. Adapun karakteristik dari industri pertambangan adalah lokasi pertambangan yang terletak pada daerah terpencil, peraturan yang ketat, dan memerlukan kemampuan teknikal yang spesifik. Oleh karena itu, Perusahaan anak dituntut untuk dapat terus menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai, sehingga dapat menghindari risiko penurunan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan akibat dari ketidaktersediaan sumber daya manusia.

4). Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

Perubahan kebijakan importir dan eksportir dapat berdampak pada keputusan perusahaan pembeli untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak pembelian. Kuota impor dan kekhawatiran geopolitik akan mempengaruhi kebijakan moneter. Selain itu, variasi kualitas batu bara akan mempengaruhi pilihan perusahaan pembeli untuk memperbarui kontrak pembelian batu bara. Operasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, situasi keuangan, dan prospek bisnis di masa depan semuanya dapat mengalami perubahan signifikan dengan dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan.

5). Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya

Usaha pertambangan Perusahaan Anak bersaing dengan penghasil batu bara domestik dan asing di pasar batu bara dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk memasok batu bara secara berkelanjutan. Permintaan batu bara oleh pelanggan dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan yang berhubungan langsung dengan industri-industri seperti pembangkit listrik, semen, dan industri – industri lainnya.

Daya saing batu bara Perusahaan Anak dibandingkan dengan produk batu bara dari pesaingnya dievaluasi berdasarkan harga dan kualitasnya. Faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi batu bara, ketebalan lapisan, kedalaman cadangan batu bara (depth of mining), biaya transportasi, ketersediaan serta biaya tenaga kerja, dan logistik. Wilayah kerja Perusahaan Anak memiliki jalur logistik yang sama dengan perusahaan lainnya di Kalimantan Tengah. Kapasitas jalur logistik baik darat dan air akan membatasi peningkatan produksi. Perusahaan Anak dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi untuk menjaga daya saing.

Secara umum, ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor di atas atau faktor-faktor lainnya dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

6). Risiko tidak tercapainya performa kontraktor

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Anak menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan dan transportasi batu bara.

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan yang diperlukan demi kelangsungan produksi beserta dengan tenaga kerja, dan fasilitas peralatan penunjang lainnya. Kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terhambat oleh masalah ketenagakerjaan, kurangnya persediaan peralatan dan suku cadang, atau persediaan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan operasi.

Tidak tercapainya performa kontraktor yang disebabkan oleh terhambatnya kegiatan produksi yang disebabkan kurangnya tenaga kerja, rusaknya peralatan, dan kurangnya persediaan spare part yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dapat berdampak negatif bagi kondisi hasil operasi, dan kondisi keuangan Perusahaan Anak.

7). Risiko kepatuhan terhadap perundang-undangan

a. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan

Semua operasi pertambangan Anak Perusahaan terletak di daerah-daerah yang diatur oleh UU Kehutanan, memerlukan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dengan Perpu Cipta Kerja telah berganti nama menjadi persetujuan pinjam pakai kawasan hutan.

Pemerintah Republik Indonesia juga dapat memutuskan untuk memperpanjang moratorium izin hutan, yang akan membuatnya lebih sulit bagi anak perusahaan untuk memperoleh, memperbarui, menambah, atau memperluas izin sewa. Pengenaan moratorium dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada penggunaan penuh aset terkait, yang dapat berdampak buruk pada operasi perusahaan, situasi keuangan, hasil bisnis, dan prospek masa depan.

b. Ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* (“**DMO**”)

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam Negeri yang ditentukan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara yang disetujui oleh pemerintah. Apabila ketentuan mengenai DMO tersebut tidak terpenuhi yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka Perusahaan Anak berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tersebut hingga pelarangan ekspor.

c. Ketentuan mengenai lingkungan hidup

Peraturan yang ketat di bidang lingkungan hidup terkait emisi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan industri pengguna batu bara lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara, sehingga dapat mempengaruhi permintaan batu bara sebagai sumber energi. Selain itu peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

8). Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan Perusahaan Anak, dibutuhkan sumber daya dan pasokan bahan baku seperti bahan bakar, spare part untuk alat berat, bahan peledak, dan peralatan lainnya. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku akibat kelangkaan dapat menghambat operasional Perusahaan Anak yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perusahaan Anak

9). Risiko Serangan Cyber Dalam Teknologi Informasi

Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak mengupayakan untuk tidak membuka aplikasi umum secara gratis, dan e-mail mencurigakan dalam lingkungan kantor, melarang penggunaan wi-fi umum untuk perangkat kerja milik Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat menghindari virus yang dapat mengakibatkan serangan *cyber*.

C. RISIKO UMUM

Risiko umum adalah berbagai risiko yang berpotensi untuk dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun rincian dari risiko umum yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak

Penguatan ataupun pelemahan ekonomi global akan memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan dan harga komoditas utama. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan permintaan batu bara Perusahaan Anak. Perubahan kestabilan ekonomi seperti tingginya tingkat inflasi global, bergejolaknya kondisi sosial, dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Penjualan batu bara Perusahaan Anak mayoritas dilakukan melalui ekspor ke negara-negara pengimpor seperti batu bara seperti RRC, Taiwan, Jepang, Filipina, dan Eropa. Selama ini Perusahaan Anak memasok batu bara sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang membatasi atau menghambat penjualan batu bara Perusahaan Anak ke negara lain, (sebagai contoh: pembatasan impor dan dilakukannya *ceiling price* batu bara oleh Cina, atau peningkatan spesifikasi kualitas batu bara oleh negara-negara pengimpor lainnya), maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja penjualan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko Perubahan kebijakan atau aturan Pemerintah

Hukum dan aturan pemerintah dapat berdampak pada bagaimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan bisnis. Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak percaya bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku saat melakukan bisnis, namun dengan implementasi dari Undang-undang dan peraturan baru, maupun revisinya menghadirkan risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara tidak sengaja belum mematuhi implementasi peraturan baru atau revisi tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menghadapi konsekuensi perdata, seperti denda, hukuman, dan hukuman pidana lainnya, jika hal itu terjadi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perubahan Undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, Undang-undang dan peraturan upah minimum, serta Undang-undang dan peraturan tentang kebebasan berserikat, juga dapat berdampak pada operasi Perusahaan. Pengurangan emisi energi karbon merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang relevan. Kelangsungan hidup perusahaan di masa depan tidak diragukan lagi akan terpengaruh jika peraturan tersebut kemudian diatur dengan sangat ketat dan merugikan peserta ekonomi dalam industri batu bara. Perseroan dan Perusahaan Anak mengurangi risiko ini dengan mematuhi semua izin dan persyaratan yang berlaku.

4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif terhadap usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, karena dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan akibatnya menurunkan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu juga menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memperoleh dana baru untuk pengembangan usaha, baik dalam modal kerja maupun belanja modal. Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memantau dan meninjau perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap transaksi yang dilakukan untuk menjaga proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan, Perusahaan Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor dan subkontraktor pertambangan, karyawan, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penambangan. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap nilai tukar mata uang asing cukup besar mengingat sebagian besar kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Risiko kepatuhan

Kegagalan untuk mematuhi hukum di daerah dan nasional, termasuk undang-undang yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan seperti ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan, *Domestic Market Obligation*, lingkungan hidup, serta ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan peraturan keselamatan, dapat mengakibatkan denda, sanksi, atau bahkan penghentian operasi. Kepatuhan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi perusahaan di mata Pemerintah dan Masyarakat setempat.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Pembeli Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah, Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juni 2025 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Petrindo Jaya Kreasi berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta diumumkan pada BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008 dan TBNRI No. 29515 (**"Akta Pendirian"**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan awal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Inge Tjandra	450	450.000.000	36,00
2. Rudy Arsian	400	400.000.000	32,00
3. Bujung Hasili Halim	400	400.000.000	32,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	3.750	3.750.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 (**"Akta Perseroan No. 23/2023"**).

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 23/2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410, dan beroperasi sejak tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang secara riil dilakukan saat ini, yaitu usaha pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak, aktivitas perusahaan *holding*, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari batu bara.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral pilihan di Indonesia melalui penciptaan nilai secara berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Dapat terus tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.
- Menyediakan produk & layanan yang andal kepada seluruh pelanggan dan menjaga dampak lingkungan seminimal mungkin.
- Menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan nilai para pemegang saham.
- Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan pertumbuhan Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah benar-benar melakukan seluruh kegiatan usaha penunjangnya yakni aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) sebagaimana tersebut di atas.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 23/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 6.000.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp 2.248.378.000.000
Modal disetor	: Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per lembar saham.

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 23/2023 tidak mengalami perubahan dalam 2 tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran juga tidak mengalami perubahan. Berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Mei 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
1. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,966
2. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	1.690.000.000	338.000.000.000	15,033
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	18.758.110.000	3.751.622.000.000	

3. Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin umum, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 1205000442588	11 Desember 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.899.701.3-031.000	27 Agustus 2008 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01781/WPJ.05/KP.0103/2008	27 Agustus 2008 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-64/PKP/KPP.050103/2024	28 Februari 2024 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Selain daripada perizinan umum di atas, Perseroan telah memiliki izin-izin operasional yakni berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 02112310113173312 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 2 November 2023 dan berlaku hingga 1 November 2026. Dengan demikian, perizinan operasional tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini.

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 ("**Akta Perseroan No. 46/2025**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi

Presiden Direktur : Michael
 Direktur : Daniel Jr. Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti
 Direktur : Kartika Hendrawan
 Direktur : Lim Hendra Gunawan

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Erwin Ciputra, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

2022 – Saat ini	: Perseroan sebagai Komisaris Utama.
2022 – Saat ini	: Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., sebagai Direktur.
2017 – Saat ini	: PT Chandra Asri Perkasa sebagai Presiden Direktur
2011 – Saat ini	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai Presiden Direktur.
2020 – 2022	: Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. sebagai Direktur.
2013 – 2019	: PT Synthetic Rubber Indonesia sebagai Presiden Komisaris.
2010 – 2020	: PT Styrimdo Mono Indonesia sebagai Presiden Direktur.
2010 – 2019	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Presiden Direktur.
2010 – 2018	: Altus Capital Pte. Ltd. (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.) sebagai Direktur.
2007 – 2010	: PT Chandra Asri sebagai Presiden Direktur.
2004 – 2007	: PT Chandra Asri sebagai Wakil Presiden Direktur.
2003 – 2004	: Corporate Planning Department di Barito Pacific Group.
2002 – 2003	: UOB Global Treasury and Assets Management.
2001 – 2002	: Prism Capital Partners L.P sebagai Portfolio Manager.
1998 – 1999	: JP Morgan Securities Inc. Sebagai Research Associate Inc.
1996 – 1998	: Memulai karir sebagai analis di TIAA-CREF Management Inc.



Baritono Prajogo Pangestu, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

2025 – Saat ini	: Perseroan sebagai Komisaris
2024 – Saat ini	: PT Chandra Asri Konsultasi sebagai Presiden Komisaris
2023 – Saat ini	: PT Chandra Cilegon Port sebagai Presiden Komisaris
2023 – Saat ini	: PT Chandra Samudera Port sebagai Presiden Komisaris
2023 – Saat ini	: PT Chandra Pelabuhan Nusantara sebagai Presiden Komisaris

2023 – Saat ini	:	PT Chandra Asri Port sebagai Presiden Komisaris
2023 – Saat ini	:	PT Chandra Asri Alkali sebagai Komisaris
2022 – Saat ini	:	PT Nusantara Polymer Solutions sebagai Presiden Komisaris
2022 – Saat ini	:	PT Buana Primatama Niaga sebagai Presiden Komisaris
2017 – Saat ini	:	PT Chandra Asri Perkasa sebagai Presiden Komisaris
2017 – Saat ini	:	PT Panca Puri Perkasa sebagai Komisaris
2017 – Saat ini	:	PT SCG Barito Logistics sebagai Komisaris
2015 – Saat ini	:	PT Chandra Asri Pacific Tbk sebagai Wakil Presiden Direktur
2018 – 2022	:	PT Nusantara Polymer Solutions sebagai Komisaris
2017 – 2022	:	PT Buana Primatama Niaga sebagai Komisaris
2015 – 2019	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Presiden Komisaris
2011 – 2015	:	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai Direktur
2007 – 2010	:	PT Chandra Asri sebagai Direktur



Henky Susanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

2022 – Saat ini	:	Perseroan sebagai Komisaris Independen
2019 – Saat ini	:	PT Barito Pacific Tbk sebagai Komisaris Independen
1991 – 2018	:	PT Barito Pacific Tbk jabatan terakhir sebagai Direktur
1976 – 1991	:	Memulai karir sebagai Chief Accountant di PT Dresser Magcobar Indonesia

Direksi



Michael, Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Parahyangan pada 2010, dan Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya pada 2012.

Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

2022 – saat ini	:	Perseroan sebagai Direktur Utama
2018 – saat ini	:	PT Barito Pacific Lumber sebagai Direktur Utama
2017 – 2018	:	PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk sebagai Direktur Utama di Perusahaan Anak
2011 – 2017	:	Memulai karir sebagai konsultan di Skha Management Consulting



Daniel Jr. Lopez Laurente, Direktur

Warga negara Filipina, 62 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang geologi dari University of Philippines. Pada tahun 1986.

Menjabat Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Pengalaman Kerja:

- 2010 – saat ini : Perseroan sebagai Direktur
- 2007 – 2010 : PT Itacha Resources sebagai Direktur dan Technical Manager
- 1999 – 2006 : Gajah Tunggal Group Mining Division (Gold and Coal Mines) sebagai Direktur dan Technical Manager
- 1996 – 1998 : PT Kasongan Bumi Kencana (Pelsart Resources NL) sebagai Project Manager
- 1995 – 1996 : Consultant Geologist
- 1987 – 1993 : Memulai karir di Benguet Corporation, Filipina sebagai Production and Research Geologist



Diana Arsiyanti, Direktur

Warga negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Menjabat Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

- 2022 – saat ini : Perseroan sebagai Direktur
- 2019 – saat ini : PT Barito Pacific Tbk sebagai Direktur
- 2023 – 2024 : PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai Komisaris
- 2016 – 2018 : Jipyong South Asia (Legal Consultant) sebagai Partner
- 2008 – 2014 : Makarim & Taira S. (law firm) sebagai Senior Associate
- 2001 – 2008 : Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm) sebagai Partner
- 1998 – 2001 : PT Danareksa (Persero) sebagai Legal Counsel
- 1995 – 1997 : Memulai karir di Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm) sebagai associate



Kartika Hendrawan, Direktur

Warga negara Indonesia, 44 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Informatika dari Wesleyan University pada tahun 2001, dan Master of Business Administration dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 2007.

Menjabat Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024.

Pengalaman Kerja:

- 2024 – saat ini : Perseroan sebagai Direktur
- 2023 – saat ini : PT Petrosea Tbk sebagai Direktur
- 2022 – saat ini : PT BNI Modal Ventura sebagai Komisaris Independen
- 2015 – 2023 : Sirclo / Orami sebagai CFO
- 2013 – 2015 : PT Eastspring Investment Indonesia sebagai Investment Director
- 2008 – 2013 : Principal di Indies Capital
- 2007 – 2008 : Citigroup sebagai Investment Banking Associate
- 2001 – 2005 : Memulai karirnya di NERA Economic Consulting sebagai Analyst



Lim Hendra Gunawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh Diploma in Mechanical Engineering dari Singapore Polytechnic Major in Plant Maintenance pada tahun 1997, Advance Diploma in Strategic Marketing dari Singapore Polytechnic pada tahun 1999, dan International Diploma in Supply Chain Management by International Trade Centre dari Geneva/Prasetiya Mulya pada tahun 2023.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Pengalaman Kerja:

2025 – Saat ini	: Perseroan sebagai Direktur
2024 – Saat ini	: PT Petrosea Tbk sebagai Deputy Director of Supply Chain Management
2016 – 2023	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai General Manager of Polymer Sales
2016 – 2023	: PT Nusantara Polymer Solutions sebagai Vice President Director
2022	: PT Royal Lestari Utama sebagai Presiden Direktur
2018 – 2020	: PT SCG Barito Logistics sebagai Vice President Director
2007 – 2016	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Styrimo Mono Indonesia & PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Head of Contract & Procurement Department
2005 – 2007	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Styrimo Mono Indonesia & PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Senior Officer of General Affairs Department
2010 – 2018	: PT Transnational Indosin sebagai Senior Manager of Procurement, GA & Internal Audit
2000 – 2003	: Eureka Systems Singapore sebagai Business Development & Project Manager
1998 – 2000	: NEC Semiconductor Pte, Ltd Singapore sebagai Maintenance Technician

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

5. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- e. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun piagam komite audit.
- b. Membentuk komite audit.
- c. Menyetujui piagam audit internal.
- d. Menyetujui penunjukan ketua audit internal.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2024, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 6 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk komite.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2024, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 12 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase
Erwin Ciputra	6	100%
Henky Susanto	6	100%

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Anggota Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase
Michael	12	100%
Daniel Jr. Lopez Laurente	12	100%
Diana Arsiyanti	12	100%
Kartika Hendrawan	12	100%

Tingkat kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Kehadiran	Persentase
Erwin Ciputra	4	100%
Henky Susanto	4	100%
Michael	4	100%
Daniel Jr. Lopez Laurente	4	100%
Diana Arsiyanti	4	100%
Kartika Hendrawan	4	100%

Remunerasi dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar USD2.736 ribu dan USD580 ribu.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Perseroan secara langsung menjalankan fungsi nominasi & remunerasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah menyusun dan memiliki pedoman fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 001/PJK/KOM/X/2022 pada tanggal 18 Oktober 2022. Adapun susunan Dewan Komisaris yg menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Erwin Ciputra
Anggota : Henky Susanto

Riwayat singkat mengenai ketua dan anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dapat dilihat pada Prospektus halaman 83.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.039/CS-L/PJK/XI/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Robertus Maylando Siahaya sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Berikut di bawah ini riwayat singkat Sekretaris Perusahaan:

Robertus Maylando Siahaya

Warga negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2023.

Pengalaman Kerja:

2013 – Saat ini : Divisi Legal Perseroan
 2022 – Saat ini : Legal Manager PT Barito Pacific Lumber Group
 2013 : MNC Energy

Alamat, nomor telepon, dan *e-mail* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
 Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
 Jakarta 11410
 Tel: (021) 5308520
 Fax: (021) 5307940
 Website: www.petrindo.co.id
 Email: corsec@petrindo.co.id

Berikut dibawah ini merupakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan selama tahun 2024 :

No.	Tanggal Pelatihan	Nama Pelatihan	Penyelenggara
1	29 Februari 2024	SOSIALISASI KEPADA PENERBIT EFEK Penggunaan EASY dan Fasilitas terkait Emiten di KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2	7 Februari 2024	ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD	RSM Indonesia
3	22 April 2024	INDONESIA'S ECONOMIC AND CAPITAL MARKET DEVELOPMENT	IDX
4	22 Mei 2024	SOSIALISASI KEPADA PENERBIT EFEK Pelaksanaan RUPS melalui eASY KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5	3 Juni 2024	Implementasi Biaya Layanan Jasa eASY.KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
6	15 Agustus 2024	Sosialisasi POJK NO. 42 Tahun 2020 dan POJK No.17 Tahun 2020	OJK & AEI
7	10 Agustus 2024	Kesiapan Adopsi IFRS S1 & S2 di Indonesia dan Strategi untuk Mendukung Penerapannya	IKATAN AKUNTAN INDONESIA
8	15 Oktober 2024	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA	OJK & AEI
9	15 Oktober 2024	SOSIALISASI POJK NOMOR 30 /POJK.04/2015 TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	OJK & AEI
10	23 Oktober 2024	SOSIALISASI KEPADA PENERBIT EFEK Tentang eRUPS	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11	29 Oktober 2024	Capital Market Training	BRPT & AHP
12	13 Desember 2024	SOSIALISASI SPE-IDXNET AP/KAP, WARAN TERSTRUKTUR, DAN ESG REPORTING	IDX & OJK

Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan peraturan OJK yang berlaku terhadap Perseroan;

3. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan Perseroan kepada publik, OJK, Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Memastikan penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan, koordinasi, keterbukaan informasi dan dokumentasi sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - d. Penyelenggaraan, koordinasi dan dokumentasi terkait rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan yang berlaku;
2. Memberikan usulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal;
3. Memastikan keterbukaan informasi terhadap pemangku kepentingan;
4. Menyampaikan pelaporan kepada OJK secara tepat waktu;
5. Mendukung penyelenggaraan dan membuat dokumentasi Paparan Publik dan RUPS;
6. Mendukung penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 18 Oktober 2022, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	: Henky Susanto Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Henky Susanto dapat dilihat pada halaman 83 Prospektus ini.

Anggota	: Dikdik Sugiharto Warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

2002 – Saat ini:	Deltaplus Consulting sebagai Direktur
1998 – 2002	: Andersen sebagai Business Consulting Experience Manager
1997 – 1998	: Andersen sebagai Business Consulting Associate Manager
1995 – 1997	: Andersen sebagai Business Consulting Supervisor
1994 – 1995	: Andersen sebagai Audit Senior
1992 – 1994	: Andersen sebagai Audit Staff

Anggota : Kurniadi

Warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

2013 – Saat ini: PT Kobexindo Tractors Tbk sebagai Audit Committee

2012 – Saat ini: PT Indostrait Tbk sebagai Audit Committee

2010 – Saat ini: Premier Consulting sebagai Financial Consultant

1996 – 2010 : PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk sebagai Corporate Secretary

1993 – 1996 : Prasetio Utoma & Co sebagai Auditor dan Konsultan

1992 – 1993 : Johan Malonda & Rekan sebagai Auditor

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, misalnya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perseroan yang diperlukan.
 - 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
 - 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan, termasuk aspek kelengkapan, kualitas, transparansi, hingga kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun yang baru diterbitkan;
3. Mengawasi dan menelaah aspek perizinan, peraturan baru terkait industri petrokimia, masalah litigasi, pelanggaran, dan penyelewengan lainnya;
4. Menjalin komunikasi secara berkala dengan Divisi Internal Audit mengenai ruang lingkup rencana kerja sekaligus memantau kinerja Divisi tersebut; dan
5. Membahas laporan keuangan konsolidasian melalui rapat bersama dengan Kepala Divisi Internal Audit dan Akuntansi.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Henky Susanto	Ketua	4	4	4
Dikdik Sugiharto	Anggota	4	4	4
Kurniadi	Anggota	4	4	4

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/PJK/ DIR/X/2022 tentang Penunjukkan Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, yaitu organ tata kelola pendukung Direksi yang berfungsi memberikan pendapat dan konsultasi independen dan objektif untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : **Jefry Susanto**
Unit Audit Internal : Warga negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari IBK STIE pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di PT Suryamas Akurasi sebagai Staff Accounting (1997-2000), PT Indadi Utama sebagai Senior Staff Corporate Finance & Accounting (2000-2002), PT Dwiputra Reka Mahligai sebagai Finance & Accounting Manager (2003-2005), PT Barito Pacific Lumber sebagai Finance & Accounting Manager (2005-2007), PT Royal Indo Mandiri sebagai Senior Finance & Accounting Manager, PT Barito Pacific Lumber sebagai Senior Finance & Accounting Manager (2018-saat ini).

Pengalaman Kerja:

2018 – Saat ini: PT Royal Indo Mandiri sebagai Senior Finance & Accounting Manager
2018 – Saat ini: PT Barito Pacific Lumber sebagai Senior Finance & Accounting Manager
2005 – 2007 : PT Barito Pacific Lumber sebagai Finance & Accounting Manager
2003 – 2005 : PT Dwiputra Reka Mahligai sebagai Finance & Accounting Manager
2000 – 2002 : PT Indadi Utama sebagai Senior Staff Corporate Finance & Accounting
1997 – 2000 : PT Suryamas Akurasi sebagai Staff Accounting

Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan.

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Sejalan dengan perkembangan skala usahanya, Perseroan juga menemui sejumlah risiko yang berpotensi menimbulkan disrupsi atas perkembangan bisnis. Oleh sebab itu, Perseroan perlu memiliki dan menerapkan sebuah sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara praktikal dan terukur.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha

a. Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak

Perseroan memantau aktivitas, melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas dan mencari solusi dari setiap permasalahan, serta mencari cara preventif untuk menghindari masalah tersebut. Perseroan juga memonitor perkembangan dan rencana Perusahaan Anak agar target-target Perusahaan Anak dapat tercapai secara keseluruhan sehingga kinerja keuangan meningkat.

Selain itu, hampir seluruh anak usaha dimiliki 100% oleh Perseroan. Perseroan merupakan pemegang saham pengendari dan memiliki kontrol terhadap kinerja operational dan keuangan seluruh Perusahaan Anak.

b. Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Terhadap Pendapatan Perusahaan Anak

Harga jual batu bara global memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun berdasarkan permintaan dan pasokan. Penurunan harga batu bara dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas dan dapat diikuti dengan penyesuaian target produksi Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengevaluasi dan mengatur porsi penjualan, sehingga menemukan titik optimum untuk porsi penjualan dengan kontrak jangka panjang agar dapat mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak terus melakukan penetrasi pasar dan diversifikasi usaha ke berbagai sektor dan jenis mineral lainnya diluar batubara seperti emas, tembaga, dan pasir silika sehingga dapat memiliki portofolio yang kuat dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi pasar serta memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Risiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan

a. Risiko Investasi atau aksi korporasi

Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya dengan membangun fasilitas pengolahan dan transportasi yang memerlukan investasi yang cukup besar, hingga melakukan akuisisi atau pengembangan tambang.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengkajian dan analisis yang mendalam dan komprehensif sebelum melakukan sebuah investasi. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dalam jangka panjang.

b. Risiko Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sesungguhnya

Perkiraan cadangan batu bara dapat berubah di masa mendatang seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi. Rencana pengembangan dan penambangan perusahaan, kelangsungan bisnis, situasi keuangan, kinerja operasi, dan prospek bisnis, semuanya dapat dipengaruhi oleh perubahan cadangan batu bara terbukti dan terkira Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan program eksplorasi berkelanjutan serta meminta opini pihak konsultan independen untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi dan tingkat keyakinan geologi, melakukan kajian secara detail baik dari aspek teknis penambangan, dan sisi ekonomi baik dari infrastruktur, dan lainnya sehingga dapat memberikan estimasi perhitungan sumber daya dan cadangan secara akurat.

c. Risiko Bencana Alam, Iklim dan Kecelakaan

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari bencana alam dan kecelakaan, termasuk risiko cuaca buruk (hujan lebat), tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kelalaian kontraktor jasa penambangan dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longsornya area penambangan, kerusakan alat, cidera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga mengganggu profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan pengawasan dan standar keselamatan kerja yang sangat tinggi demi mewujudkan terciptanya kondisi kerja yang aman. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki Emergency Team dan Safety Team sebagai pencegahan dan penanggulangan untuk penanganan suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berbahaya atau berisiko.

d. Risiko Sumber Daya Manusia

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis atau wilayah yang cukup menantang dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia dengan tingkat disiplin yang tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang efektif. Perseroan percaya bahwa sumber daya manusia dalam organisasi adalah kunci keberhasilan dari sebuah organisasi sehingga hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia di dalam Perseroan perlu dijaga.

Perseroan memfasilitasi beragam program pelatihan dan pengembangan di bidang tambang kepada karyawan sehingga para karyawan memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar yang diperlukan, serta mengadakan program retensi untuk menghindari kehilangan tenaga ahli berkualitas. Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan diskusi dan musyawarah bersama untuk menjaga hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan, guna menunjang keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak.

e. Risiko Dihentikan atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pelanggan

Perubahan kebijakan importir dan eksportir dapat berdampak pada keputusan perusahaan pembeli untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak pembelian. Kuota impor dan kekhawatiran geopolitik akan mempengaruhi kebijakan moneter. Operasi bisnis Perseroan, situasi keuangan, dan prospek bisnis di masa depan semuanya dapat mengalami perubahan signifikan dengan dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan.

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi pemasaran dan terus melakukan penetrasi pasar untuk memperkuat basis pelanggan dan portofolio, agar tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan, atau pasar tertentu. Perusahaan Anak berusaha untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan dengan latar belakang yang baik, terpercaya, dan dapat diandalkan untuk menjadi mitra yang saling memberikan nilai demi kelangsungan dan tumbuhnya bisnis bersama dalam jangka panjang.

f. Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Pertambangan Lainnya

Usaha pertambangan Perseroan bersaing dengan penghasil batu bara domestik dan asing di pasar batu bara dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk memasok batu bara secara berkelanjutan. Daya saing batu bara Perseroan dibandingkan dengan produk batu bara dari pesaingnya dievaluasi berdasarkan harga dan kualitasnya. Faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi batu bara, ketebalan lapisan, kedalaman cadangan batu bara (depth of mining), biaya transportasi, ketersediaan serta biaya tenaga kerja, dan logistik.

Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk dari Perusahaan Anak dan menjaga efisiensi biaya sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tetap dapat bertahan dan bersaing secara kompetitif dengan biaya yang terukur dan produk yang berkualitas.

g. Risiko Tidak Tercapainya Performa Kontraktor

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan dan transportasi batu bara. Kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terhambat oleh masalah ketenagakerjaan, kurangnya persediaan peralatan dan suku cadang, atau persediaan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan operasi. Tidak tercapainya performa kontraktor yang disebabkan oleh terhambatnya kegiatan produksi yang disebabkan kurangnya tenaga kerja, rusaknya peralatan, dan kurangnya persediaan spare part yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dapat berdampak negatif bagi kondisi hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan perencanaan, tinjauan, dan membahas permasalahan yang dihadapi bersama dan berusaha untuk melakukan tindakan preventif untuk menghindari masalah yang dapat menghambat performa kontraktor dan kegiatan operasional Perusahaan Anak. Perusahaan Anak dan kontraktor sebagai mitra yang saling mendukung demi keberhasilan bersama juga melakukan pertemuan secara intens untuk membahas target di bulan depan, target 3 (tiga) bulan ke depan, dan mengevaluasi kinerja bulan sebelumnya agar dapat meningkatkan kinerja kontraktor dari waktu ke waktu.

h. Risiko Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Ketentuan Mengenai Penggunaan Kawasan Hutan

Semua operasi pertambangan Perseroan terletak di daerah-daerah yang diatur oleh UU Kehutanan, memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dengan UU Cipta Kerja telah berganti nama menjadi persetujuan pinjam pakai kawasan hutan. Pemerintah Republik Indonesia dapat memutuskan untuk memperpanjang moratorium izin hutan, yang akan berpengaruh pada peluang untuk memperoleh, memperbaharui, menambah, atau memperluas izin sewa.

Ketentuan Mengenai Domestic Market Obligation (DMO)

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri yang ditentukan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara yang disetujui oleh pemerintah. Apabila ketentuan mengenai DMO tersebut tidak terpenuhi yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka Perseroan berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tersebut hingga pelarangan ekspor.

Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup

Peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk mematuhi setiap perundang-undangan yang diwajibkan oleh pemerintah.

i. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, dibutuhkan sumber daya dan pasokan bahan baku seperti bahan bakar, spare part untuk alat berat, bahan peledak, dan peralatan lainnya. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku akibat kelangkaan dapat menghambat operasional Perseroan yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perseroan.

Perusahaan Anak meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi rantai pasok serta selalu berupaya melakukan pencarian beberapa pemasok agar Perusahaan Anak memiliki pemasok substitusi.

j. Risiko Serangan Cyber Dalam Teknologi Informasi

Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan mengupayakan untuk tidak membuka aplikasi umum secara gratis dan email mencurigakan dalam lingkungan kantor, serta melarang penggunaan wifi umum untuk perangkat kerja milik Perseroan agar dapat menghindari virus yang dapat mengakibatkan serangan siber.

Perseroan dan Perusahaan Anak berupaya tidak membuka aplikasi umum secara gratis dan email mencurigakan dalam lingkungan kantor, melarang penggunaan wifi umum untuk perangkat kerja milik Perseroan dan Perusahaan Anak agar dapat menghindari virus yang dapat mengakibatkan serangan siber.

Risiko Umum

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan dan Perusahaan Anak

Penguatan ataupun pelemahan ekonomi global akan memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan dan harga komoditas utama. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan permintaan batu bara Perseroan. Perubahan kestabilan ekonomi seperti tingginya tingkat inflasi global, bergejolaknya kondisi sosial, dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kondisi ekonomi terkini.

b. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Penjualan batu bara Perseroan mayoritas dilakukan melalui ekspor ke negara-negara pengimpor seperti batu bara seperti China, Taiwan, Jepang, Filipina, dan Eropa. Selama ini, Perseroan memasok batu bara sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang membatasi atau menghambat penjualan batu bara ke negara lain, maka akan berdampak negatif terhadap kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

Perusahaan Anak berupaya tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pasar tertentu agar tetap memiliki pasar lain saat terjadinya perubahan ketentuan pada suatu negara.

c. Risiko Perubahan Kebijakan atau Aturan Pemerintah

Hukum dan aturan pemerintah dapat berdampak pada bagaimana Perseroan menjalankan bisnis. Perseroan dapat menghadapi konsekuensi perdata, seperti denda, hukuman, dan hukuman pidana lainnya, jika hal itu terjadi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan juga dapat berdampak pada operasi Perseroan. Perseroan mengurangi risiko ini dengan mematuhi semua izin dan persyaratan yang berlaku.

Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk mematuhi seluruh perizinan dan kewajiban yang berlaku di industri batu bara serta menyesuaikan perizinan dan kewajiban tersebut apabila terdapat perubahan atas kebijakan dan peraturan pemerintah terkait.

d. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif terhadap usaha Perseroan karena dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan akibatnya menurunkan laba bersih Perseroan. Selain itu, risiko ini juga menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam memperoleh dana baru untuk pengembangan usaha, baik dalam modal kerja maupun belanja modal. Perseroan akan terus memantau dan meninjau perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap transaksi yang dilakukan.

Perseroan dan Perusahaan Anak terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini

e. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor dan subkontraktor pertambangan, karyawan, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku di industri batu bara. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis (pelanggan, kontraktor, subkontraktor, kreditur, dan lainnya) telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga meminimalisir terjadinya gugatan yang dapat merugikan Perseroan dan Perusahaan Anak.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing cukup besar mengingat sebagian besar kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

g. Risiko Kepatuhan

Kegagalan untuk mematuhi hukum di daerah dan nasional, termasuk undang-undang yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan seperti ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan, *Domestic Market Obligation*, lingkungan hidup, serta ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan peraturan keselamatan, dapat mengakibatkan denda, sanksi, atau bahkan penghentian operasi. Kepatuhan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi perusahaan di mata Pemerintah dan Masyarakat setempat.

Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha mematuhi seluruh hukum di daerah dan nasional termasuk undang-undang yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Untuk menilai tingkat efektivitas sistem manajemen risiko dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya, Perseroan melakukan peninjauan secara komprehensif atas sistem manajemen risiko. Upaya ini dilakukan dengan mencermati kondisi usaha saat ini, perkembangan risiko, dampak risiko, serta ketepatan langkah mitigasi yang ditentukan.

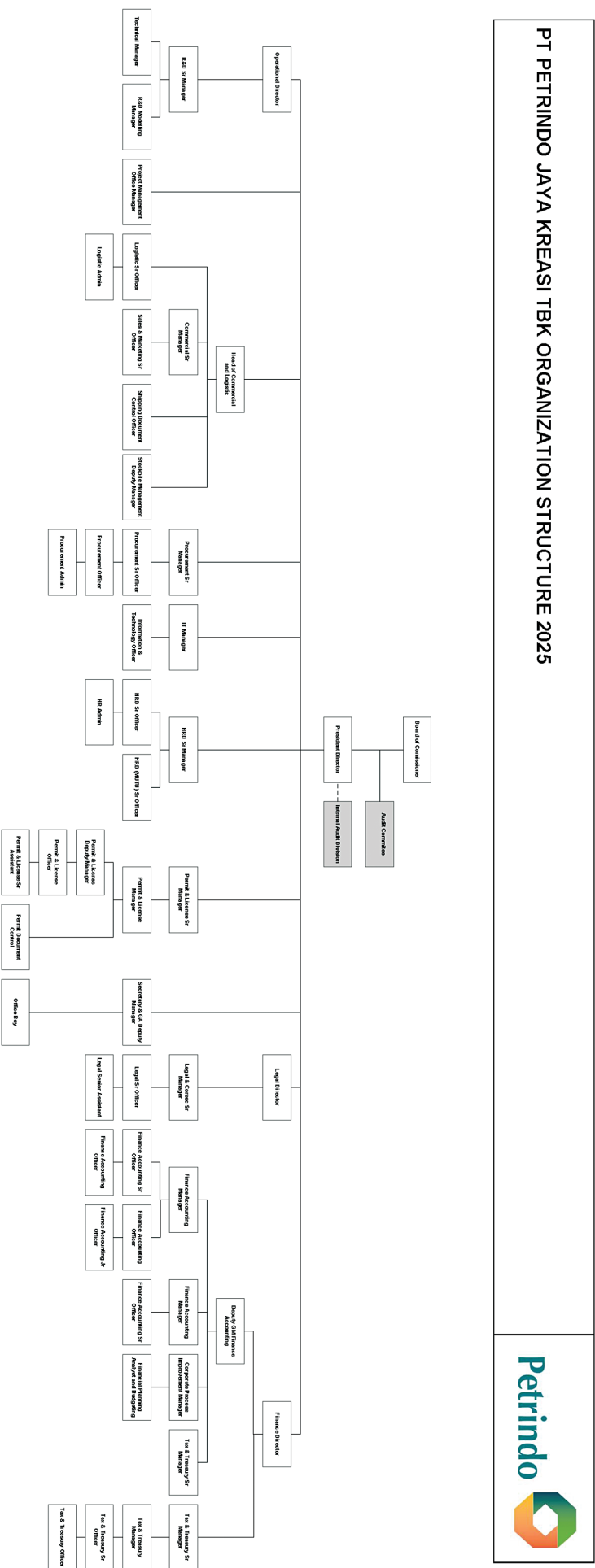
Dalam menerapkan manajemen risiko, Perseroan melakukan proses identifikasi, mengkaji tindakan pencegahan, dan merumuskan cara penanganan risiko. Melalui tahapan ini, Perseroan memastikan pelaksanaan kegiatan usahanya tidak terdampak risiko secara signifikan.

Perseroan mengajak seluruh anggota perusahaan untuk turut terlibat dan bersikap proaktif dalam mengelola setiap risiko yang terkait dengan lingkup pekerjaannya, serta memberikan masukan dan solusi yang konstruktif kepada Perseroan.

Berdasarkan kegiatan peninjauan yang telah dilakukan selama tahun 2024, Perseroan menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan saat ini memiliki tingkat kecukupan yang memadai dan cukup efektif dalam meminimalisir dampak-dampak risiko.

6. Struktur Organisasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



7. Sumber Daya Manusia

Organisasi yang ideal membutuhkan Sumber Daya Manusia (“SDM”) yang berkarakter, kompeten, dan berdaya tahan tinggi. Perseroan menjalankan sistem pengelolaan SDM secara terorganisir dan terpadu sehingga Perseroan mampu memetakan dan mengoptimalkan kualitas karyawan. Sistem pengelolaan SDM Perseroan melibatkan proses rekrutmen yang objektif, penilaian karyawan yang berimbang, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan konstruktif.

Perseroan menyatakan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan adil dan setara, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap perbedaan latar belakang suku, ras, agama, gender, dan kelas sosial. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, kami berupaya untuk memperkuat fundamental bisnis Perseroan serta mengarahkan Perseroan pada pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Manajer Senior	1	34	1	4
Manajer	4	203	4	18
Supervisor	6	1.123	1	33
Staff	-	1.074	-	35
Non Staff	-	4.659	-	133
Jumlah	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
< 20 Tahun	-	33	-	4
20 – 30 Tahun	2	2.243	-	70
31 – 40 Tahun	5	2.783	4	63
41 – 50 Tahun	4	1.728	2	54
51 – 55 Tahun	-	245	-	18
> 55 Tahun	-	61	-	14
Jumlah	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Pasca Sarjana	-	100	-	3
Sarjana/Sarjana Muda	11	2.067	6	57
SLTA/SLTP	-	4.825	-	132
Dan Lainnya	-	101	-	31
Jumlah	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Jakarta dan Tangerang (<i>head office</i>)	11	449	6	22
Kalimantan Tengah (<i>site office</i>)	-	1.157	-	199
Kalimantan Timur (<i>site office</i>)	-	2.688	-	-
Kalimantan Utara (<i>site office</i>)	-	51	-	-
Jawa Barat (<i>site office</i>)	-	1	-	-
Jawa Timur (<i>site office</i>)	-	1.589	-	-
Maluku Utara (<i>site office</i>)	-	320	-	-
Nusa Tenggara Barat (<i>site office</i>)	-	16	-	2
Papua (<i>site office</i>)	-	207	-	-
Papua Barat (<i>site office</i>)	-	179	-	-
Papua Barat Daya (<i>site office</i>)	-	96	-	-
Sulawesi Tengah (<i>site office</i>)	-	88	-	-
Sulawesi Tenggara (<i>site office</i>)	-	252	-	-
Jumlah	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Permanen	6	3.559	5	75
Kontrak	5	3.534	1	148
Jumlah	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Fungsi

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
<i>Operational</i>	-	6.545	-	163
Keuangan dan Investasi	5	87	2	8
<i>Legal</i>	1	9	1	1
Perijinan	-	19	-	6
Sumber Daya Manusia	3	146	2	5
Pemasaran	1	1	-	1
Pengadaan	-	172	-	-
Administrasi Umum	1	19	1	39
Pengelolaan Korporat	-	1	-	-
Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi	-	7	-	-
Internal Audit dan Risiko	-	14	-	-
SHE	-	19	-	-
Digitalisasi	-	54	-	-
Jumlah	11	7.093	6	223

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakteradaannya dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Tenaga kerja asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tenaga kerja asing. Berikut adalah informasi mengenai tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
PTRO				
1.	David Richard Gilbert	Australia	Business Development Manager	- KITAS No. 2C2C2C22JE036780-B, berlaku hingga 12 Juni 2026 - RPTKA No. B.3/048090/PK.04.01/V/2025, berlaku hingga 12 Juni 2026
2.	Nicolas Moussios	Australia	Operation Manager	- KITAS No. 2C2C2C22JE036149-B, berlaku hingga 9 Juni 2026 - RPTKA No. B.3/048089/PK.04.01/V/2025, berlaku hingga 9 Juni 2026
3.	Simon Neil Megginson	Inggris	Project Manager	- KITAS No. 2D21AF0098-U, berlaku hingga 29 Oktober 2025 - RPTKA No. B.3/078286/PK.04.01/VI/2024, berlaku hingga 23 Juli 2025
4.	William Jason Tei	Australia	Operation Manager	- KITAS No. 2C21JE0479AA, berlaku hingga 9 September 2025 - RPTKA No. B.3/105732/PK.04.01/VIII/2024, berlaku hingga 9 September 2025
5.	Grant David Hensen	Australia	Maintenance Manager	- KITAS No. 2C21D10537-A, berlaku hingga 5 Desember 2025 - RPTKA No. B.3/152108/PK.04.01/X/2024, berlaku hingga 5 Desember 2025
6.	Neil James Harvey	Inggris	Site Project Control Manager	- KITAS No. 2C2C2C22JE028517-B, berlaku hingga 20 Mei 2026 - RPTKA No. B.3/033870/PK.04.01/III/2025, berlaku hingga 20 Mei 2026
7.	Neil James Mcallum	New Zealand	General Superintendent	- KITAS No. 2C2C2C22FF000097-A, berlaku hingga 25 Desember 2025 - RPTKA No. B.3/155412/PK.04.01/XI/2024, berlaku hingga 25 Desember 2025
8.	William Robert Gibs	Inggris	Project Coordinator Manager	- KITAS No. 2C21D10348-A, berlaku hingga 20 Juli 2025 - RPTKA No. B.3/076218/PK.04.01/VI/2024, berlaku hingga 20 Juli 2025

Pengembangan dan Pelatihan

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawannya agar mampu bersaing secara unggul dan kompetitif. Kami menyadari bahwa Perseroan harus mahir beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang timbul setiap saat.

Salah satu upaya Perseroan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusianya adalah dengan memberikan ruang dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Pada tahun 2024, karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengikuti pelatihan dengan total 273.824 jam pelatihan. Berikut adalah pelatihan dan sertifikasi yang diberikan kepada Karyawan di Perseroan dan Perusahaan Anak.

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan	Meningkatkan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait proses pengangkutan, serta menciptakan ekosistem maritim yang lebih aman dan berkelanjutan.	1	28
Juru Ukur Tambang	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan menyiapkan peralatan, mengukur polygon, mengukur situasi, mendesain peta topografi dan peta penampang, menghitung luas dan volume serta mematok batas wilayah pertambangan	1	49
Pengawas Operasional Pertama	Meningkatkan pemahaman dan menerapkan peraturan, standar, dan prosedur yang berlaku dalam lingkup tugas pengawas operasional.	2	70

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
Pengawas Operasional Madya	Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai operasional Madya dalam pengelolaan operasional dan keselamatan pertambangan	3	105
Pengawas Operasional Utama	Meningkatkan kompetensi peserta dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara serta meningkatkan kemampuan pengawas terhadap seluruh operasional pertambangan	2	70
Instruktur Junior	Meningkatkan pemahaman dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan kompetensi Metodologi Pelatihan sesuai dengan kualifikasi instruktur bidang pelatihan.	3	84
Pelatihan Manajemen Mutu	Memonitor kualitas batubara yang diproduksi dan mengatur kualitas batubara agar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak jual beli batubara dengan cara blending management.	1	14
Pembekalan Ahli Estimasi Cadangan Batubara	Meningkatkan kompetensi peserta sehingga dapat mengelola dan melaporkan sumber daya alam sesuai standar	1	21
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kompetensi dalam manajemen SDM, strategi rekrutmen, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan regulasi guna mendukung efisiensi dan keberlanjutan perusahaan.	1	27
Pelatihan Penyegaran Juru Ledak Handak Komersial Polri	Competency training for compliance - Juru Ledak Handak Komersil Polri (refreshment)	1	24
Project Management	Understanding project risks and the use of project management tools	1	24
FINNON - Understanding Financial Statement	Meningkatkan pemahaman finansial seperti manajemen keuangan, laporan keuangan dan laporan nerca	1	24
Diklat Investigasi Kecelakaan Tambang	Mampu melakukan dan pelaporan investigasi kecelakaan tambang	1	24
Time Management	Meningkatkan pemahaman terkait produktivitas kerja dengan menggabungkan keterampilan manajemen waktu dan delegasi.	1	16
Diklat Implementasi SMKP	Mampu membuat perencanaan penerapan SMKP Minerba di perusahaan	1	48
Annual Refresh Expired KIMPER	Program Refresh Pengoperasian untuk operator yang dilakukan setiap tahun	2481	9981.5
Assessment (KIMPER, Internal, Additional, Skill Audit, New Hire, Mapping Competency)	Program asesment Kimper untuk Operator	1499	10999
Bimtek for Certification	Program bimbingan sebelum mengikuti sertifikasi	132	1320
Coaching Program	Program Coaching untuk Operator	11	60
Cross Training Operator	Program Pelatihan alat bergerak bagi Karyawan yang pernah memiliki pengalaman mengoperasikan suatu jenis alat berat, kemudian harus mengoperasikan jenis alat lain, misalnya; Off-highway trucks ke track dozers atau sebaliknya.	250	735
Defensive Driving Training / Awareness	Program Pelatihan mengemudi yang mengajarkan operator/driver untuk mengantisipasi bahaya dan menghindari kecelakaan	323	1083
Project Hand and Finger Safety Awareness (HICP)	Program Pelatihan untuk membangun Kesadaran Keselamatan Tangan dan Jari	101	6395
Project Created Opening Training	Program khusus untuk EPC Gresik	10	1939
Project Flagman Training	Program khusus untuk EPC Gresik	256	50

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
English Second Language	Program khusus untuk EPC Gresik	321	1384
Familiarization Training	Program Pelatihan yang diperuntukkan untuk operator untuk pengenalan atau pendekatan terhadap situasi, sistem dan atau konsep baru	643	3299
Fast Track to Technician	Program Percepatan Pelatihan untuk menambah kompetensi dan capability Mekanik dan Auto Elektrik	29	248
Fuel Efficiency	Program untuk membangun kesadaran terhadap efisiensi bahan bakar	5	612
Green Training Operator	Program untuk orang karyawan non operator menjadi operator	187	1142
Jacking, Blocking and Rigging	Program Pelatihan untuk membekali pekerjaan aktivitas pengangkatan/lifting	31	738
Asset Green Training KBL – TDP	Program pengembangan fresh Graduate menjadi Teknisi	25	136
KIPP Assessment	Program Asesmen untuk pengguna peralatan bertenaga	581	8142.5
Lifting Gear Inspection	Program Pelatihan Inspeksi untuk peralatan pengangkatan/lifting	78	2805
Lifting Study	Program Pelatihan untuk membuat sebuah rencana pengangkatan yang komprehensif	61	178
Mechanical Awareness	Program Pelatihan tentang cara kerja mesin dan sistem mekanis, termasuk pengoperasian, pemeliharaan.	21	1306
Minerva Project (Production Improvement Program)	Program yang fokus untuk peningkatan productivity	1716	3185
Operator Green Training Program (OGTP)	Program pengembangan masyarakat sekitar menjadi Operator	279	4290
Refresh Assessment PO & PT	Program asesmen Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis	37	1726
Other Operator Program	Program Pengembangan Operator berdasar kebutuhan individu	120	761
Asset Green Training-Kelas Kerjasama Poltekba	Program Pelatihan Mahasiswa Bekerjasama dengan Poltekba untuk menghasilkan lulusan Diploma yang siap kerja	208	654
PRE-MOBILIZATION TRAINING	Program Pelatihan Wajib untuk pekerja yang akan berkerja di area BP Tangguh	781	192
Rebuild & Fabrication Strengthening	Program Pelatihan untuk tim Teknisi Rebuild dan Tim Fabrication	147	1232
After Incident OHT - Refresh	Program Pelatihan khusus untuk Operator berdasar issue penyebab kecelakaan	83	2212
Rigging & Slings	Program Pelatihan Pengikatan Pengangkatan	53	22327
SCM Operational Crew	Program Pelatihan untuk karyawan Non-Staff SCM	12	915
SCM Staff	Program Pelatihan untuk karyawan Staff SCM	53	1922
Fundamental SHE for Supervisor	Program Pelatihan wajib untuk karyawan level Supervisor keatas	330	7221
Fundamental SHE for Employee	Program Pelatihan wajib untuk karyawan level Pengawas	3403	1079
Fitness for Work/Fatigue Management	Program Pelatihan wajib untuk karyawan non-Pengawas	127	1408
LOTO & Working with Energy	Program Pelatihan untuk melakukan Isolasi Energi yang bisa menjadi potensi bahaya dan bagaimana cara kontrolnya	315	293
Basic Fire Safety	Program Pelatihan Dasar pemadaman Api	1172	22462
Basic First Aid	Program Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama	141	246
Incident Investigation Reporting	Program Pelatihan sebagai Investigator Kecelakaan	90	3860
Working Over/Near Water & Water Survival	Program Pelatihan untuk bekerja dengan aman di area kerja dekat dengan perairan	48	1144

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
Working at Height	Program Pelatihan untuk berkerja di Ketinggian dengan aman	2231	226
Chemical Handling	Program Pelatihan penanganan	64	4368
Confined Space Training	Program Pelatihan untuk berkerja di Ketinggian dengan aman	492	856
First Aider	Program Pelatihan untuk karyawan yang ditunjuk sebagai First Aider	125	384
Basic Environment Training	Program Pelatihan untuk membangun kesadaran tentang isu lingkungan, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan menumbuhkan budaya tanggung jawab lingkungan.	60	384
Internal Training POP	Program Pelatihan untuk karyawan yang akan mengikuti sertifikasi POP	294	120
Internal Training POM	Program Pelatihan untuk karyawan yang akan mengikuti sertifikasi POM	51	384
Vertical Rescue	Program Pelatihan untuk melakukan Penyelamatan Emergency ditebing	30	72
Water Rescue	Program Pelatihan untuk melakukan Penyelamatan Emergency di Perairan	30	414
Vehicle Accident Rescue	Program Pelatihan untuk melakukan Penyelamatan Emergency kecelakaan Mobil	15	54
Confined Space Rescue	Program Pelatihan untuk melakukan Penyelamatan Emergency di ruang terbatas	30	160
Emergency Response & Preparedness	Program Pelatihan untuk melakukan tindakan proaktif dan tindakan segera untuk meminimalkan bahaya dan memastikan keselamatan selama dan setelah keadaan darurat, bencana, atau kejadian tak terduga lainnya.	12	120
Risk Management	Program Pelatihan Manajemen Resiko	68	1292
Apply SHE Management System	Program Pelatihan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan	9	84
SHE Induction	Program Pelatihan Wajib untuk semua Karyawan	4737	23585
IKABAR KJA	Program Pelatihan Wajib untuk Karyawan yang berkerja di Project Kideco (Persyaratan Klien)	946	3768
SHE Awareness	Program Pelatihan untuk membangun kesadaran terhadap keselamatan	32	242
Simulator Training Program	Program Pelatihan simulasi pengoperasian alat berat untuk oprator menggunakan alat simulasi	515	5207.5
Supervisory Improvement Program	Program Peningkatan kompetensi SHE untuk para Leader	23	460
Skill Upgrade Training	Program Pelatihan yang dilakukan pada alat bergerak dari ukuran kecil ke alat sejenis yang lebih besar, misalnya: track dozer CAT D8 ke D10.	161	2065
Socialization Mining Procedure	Program sosialisasi terhadap prosedur-prosedur Mining	173	963
Staff & Supervisory	Program Pengembangan untuk Staff dan Pengawas Asset Management Group	327	4877
Supervisory Assessment	Program Asesmen untuk Pengawas	7	35
Thematic PDM	Program Pelatihan dengan sistem Kluster untuk melakukan Predictiv Maintenance	19	833
Thematic TA	Program Pelatihan dengan sistem Kluster untuk melakukan Testing & Adjusting Sietem pada Alat Berat	194	3766
Tire Awareness	Program Pelatihan untuk perawatan Ban	323	898
Traineeship (OTP)	Program Pelatihan Spesial untuk fresh graduate menjadi Operator Unggulan	1280	10495

Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
Traineeship Fab Welder	Program Pelatihan Spesial untuk fresh graduate menjadi Welder	4	88
Training Module Module Group 1	Program Pelatihan untuk Operator mengenai pengenalan Fitur, Komponen, Monitor dan Alat Kontrol Alat Berat	861	4581
Training Module Module Group 2	Program Pelatihan untuk Operator mengenai Dasar Pengoperasian Alat Berat	1704	8783
Training Module Module Group 3	Program Pelatihan untuk Operator mengenai Dasar Peningkatan Teknik Pengoperasian Alat Berat	2071	10789.5
Training Performance Review	Program Peningkatan Kinerja Operator	4	35
Training Program for New Hire (TPNH)	Program Pelatihan untuk Operator baru agar memahami pola, sistem dan metode kerja perusahaan	248	2466
Tyres & Rims Maintenance Activities	Program Pelatihan untuk memperbaiki Ban dan Velg	25	541
Upskilling and Cross-skilling for Technician	Program Pengembangan keterampilan silang membekali teknisi dengan keterampilan yang berlaku untuk berbagai peran, sehingga menambah keahlian yang lebih serba bisa dan mudah beradaptasi	4301	47313
Support Recruitment	Program Support terhadap Test Kompetensi Calon Karyawan, terutama untuk Teknisi dan Operator	9385	2725

Sertifikasi untuk Karyawan

Sertifikat	Kompetensi	Pemberi Sertifikat
Ahli K3 Listrik	Ahli K3 Listrik	Lembaga Sertifikasi Profesi
Diklat dan Sertifikasi Competent Person (CP)	Pembekalan Ahli Estimasi Cadangan Batubara	Lembaga Sertifikasi Profesi
Diklat Sertifikasi Pengawas Operasional Madya (POM)	Pengawas Operasional Madya (POM)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Diklat Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP)	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Diklat Sertifikasi Pengawas Operasional Utama (POU)	Pengawas Operasional Utama (POU)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Jenjang 8 Ahli Madya Teknik Jembatan	Ahli Madya Teknik Jembatan	Lembaga Sertifikasi Profesi
Manajer Energi	Sistem Manajemen Energi	Lembaga Sertifikasi Profesi
Operator Genset	Ahli Genset	Lembaga Sertifikasi Profesi
Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya Jalan	Ahli Madya Jalan	Lembaga Sertifikasi Profesi
Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	Lembaga Sertifikasi Profesi
Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya Teknik Jembatan	Ahli Madya Teknik Jembatan	Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA)	Operasional Pengolahan Air Limbah	Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)	Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)	Pengendalian Pencemaran Udara	Lembaga Sertifikasi Profesi
Renewal Authorized Gas Tester BNSP	Gas Tester	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi – Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi – Petugas P3K	Petugas P3K	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi – Petugas Penanggulangan Kebakaran Tingkat D	Petugas Penanggulangan Kebakaran Tingkat D	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi – POM	POM	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi – POP	POP	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Operator Dump Truck	Operator Dump Truck	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Operator Mobile Crane	Operator Mobile Crane	Lembaga Sertifikasi Profesi

Sertifikat	Kompetensi	Pemberi Sertifikat
Sertifikasi BNSP – Pemeriksaan Kecelakaan Tambang	Pemeriksaan Kecelakaan Tambang	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Penerapan K3 Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian (BNSP)	Penerapan K3 Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian (BNSP)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Pengoperasian Kendaraan Pengangkut Barang Khusus (Flatbed)	Pengoperasian Kendaraan Pengangkut Barang Khusus (Flatbed)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Pengoperasian Kendaraan Ringan	Pengoperasian Kendaraan Ringan	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Pengopersian Forklift	Pengopersian Forklift	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Petugas Pengambil Contoh Uji Air	Petugas Pengambil Contoh Uji Air	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Pipe Welder Certification	Pipe Welder Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP – Teknisi Ruang Terbatas (BNSP)	Teknisi Ruang Terbatas (BNSP)	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP Teknikal Aset	Technical Asset	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikasi BNSP Training For Trainer Level 4	Training For Trainer	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Lembaga Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi Instruktur Junior	Instruktur Junior	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi Juru Ukur Tambang	Juru Ukur Tambang	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Madya	Pengawas Operasional Madya	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Pertama	Pengawas Operasional Pertama	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Utama	Pengawas Operasional Utama	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Training of Trainer (ToT) Level 4	Pelatihan trainer dan asesor operator alat berat	Lembaga Sertifikasi Profesi

Salah satu Perusahaan Anak memiliki lembaga di bawah naungan Direktorat Sumber Daya Manusia (*Petrosea Academy – PetA*) yang memiliki kapabilitas dalam menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi yang membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Adapun kedua lembaga tersebut adalah:

- **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) – P2**

Tahun 2024, PetA melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah memperluas kapabilitasnya dengan menjalankan sembilan skema sertifikasi yang sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2022. Selain itu, PetA saat ini telah mendapatkan lisensi 12 skema sertifikasi baru dari Badan Nasional Sertifikasi (BNSP), sehingga saat ini LSP telah memiliki 21 skema sertifikasi. Skema sertifikasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dan posisi pekerjaan dapat dipastikan kompetensi dan kapabilitasnya.

Berikut sembilan skema sertifikasi tersebut:

1. Skema *Pipe Welder*
2. Skema Pengoperasian *Crane Mobil*
3. Skema *Operator Dump Truck*
4. Skema Pengoperasian *Flatbed*
5. Skema Pengoperasian Kendaraan Ringan
6. Skema Teknisi Ruang Terbatas
7. Skema Penerapan K3 Dalam Pekerjaan Ketinggian
8. Skema Pemeriksaan Kecelakaan Tambang
9. Skema Pengambilan Contoh Air
10. Skema Instruktur
11. Skema Ahli K3
12. Skema Pengoperasian *Forklift*
13. Skema Pengoperasian Pemindahan Beban (*Rigging*)

14. Skema Pengoperasian *Crane* Mobil s/d 35 Ton
15. Skema Pengoperasian *Crane* Mobil s/d 70 Ton
16. Skema Pengoperasian *Crane* Mobil > 70 Ton
17. Skema *Preventive Maintenance Mechanical* Alat Berat
18. Skema *Preventive Maintenance AC & Electrical* Alat Berat
19. Skema *Repair & Maintenance Mechanical* Alat Berat
20. Skema *Overhaul Drive Train*
21. Skema *Overhaul* Transmisi Alat Berat

Tingkat aktualisasi LSP dari rencana tahun ini telah mencapai 73% dengan 251 assessee yang telah diuji.

- **Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKs)**

Pada tahun ini, tepatnya tanggal 9 Oktober 2023 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKs) Petrosea telah berhasil diregistrasikan dibawah Dinas Tenaga Kerja kota Balikpapan. Untuk tahun ini LPKs berfokus untuk mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang secara sah menurut hukum, dimana program-program pelatihan yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Petrosea.

Berikut ini adalah PBK yang telah dikembangkan dan diregistrasikan pada Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pengelasan Pelat dan Pipa
2. Pengoperasian Kendaraan Ringan
3. Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang
4. Pengoperasian *Dump Truck*
5. Pengoperasian *Crane* Mobil

Selain PBK di atas, PetA juga secara berkelanjutan menjalankan beberapa program-program Legal Licensing, Internal Licensing dan program-program strategis untuk memastikan operasional yang aman, efektif dan produktif.

Berikut ini program-program yang dijalankan:

1. Kartu Izin Pengoperasian Perkakas (KIPP)
2. Kartu Izin Mengoperasikan Peralatan Perusahaan (KIMPER)
3. Pengawas Operasional Pratama (POP) & Pengawas Operasional Madya (POM) Pertambangan
4. *Technical Safety, Health Environment & Rescue*
5. Peningkatan Produksi; Pengembangan/Peningkatan Keterampilan Operator Alat Berat (*upskilling & crosskilling*)
6. Pengembangan Teknisi Alat Berat (*upskilling & crosskilling*)

Serikat Pekerja

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aktivitas serikat pekerja.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan senantiasa menjadi prioritas utama bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan selalu berupaya untuk mengedepankan aspek kesejahteraan dan kesehatan seluruh karyawan dan keluarga, baik secara fisik dan mental. Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan dengan dukungan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif serta setara merupakan salah satu inisiasi yang selalu dikembangkan oleh Perseroan. Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi yang adil dan merata berdasarkan tingkat jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi kerja hingga kinerja setiap karyawan.

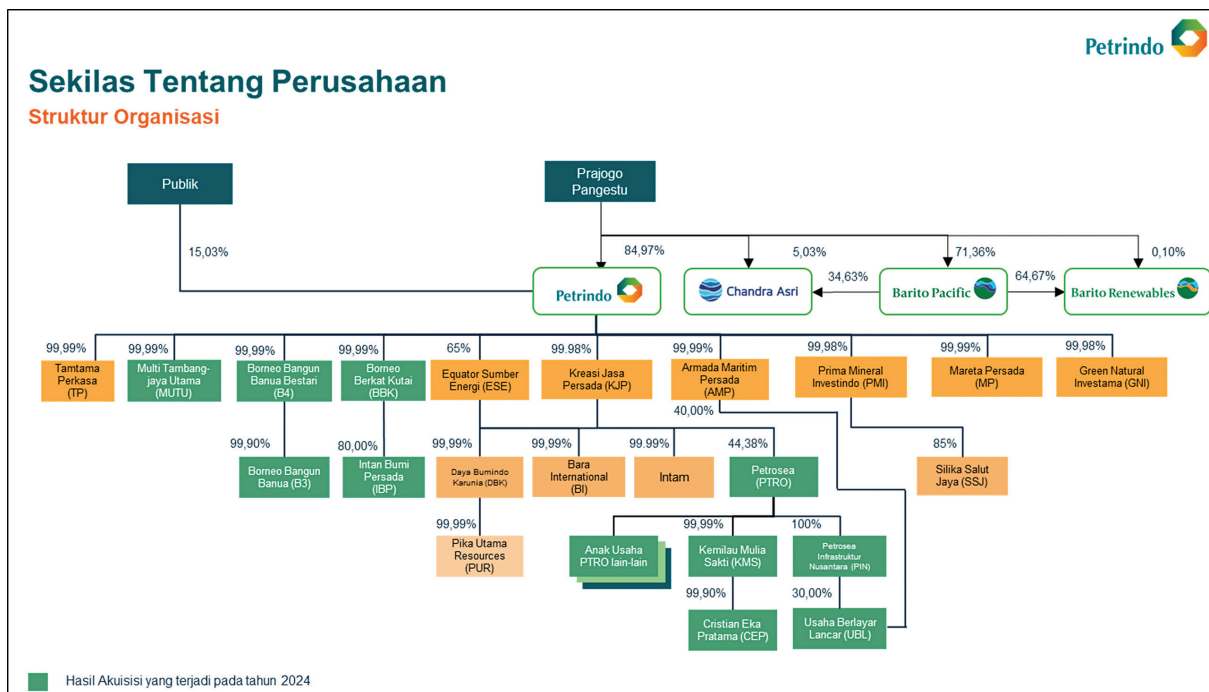
Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus atau insentif, cuti tahunan serta cuti lain sesuai dengan ketentuan pemerintah, fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan, tunjangan transportasi, dan santunan kedukaan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, upah yang diterima karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku. Khusus karyawan yang berlokasi di *site*, akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu fasilitas mess dan transportasi pulang pergi ke *point of hire* dengan periode waktu tertentu.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, tidak terdapat program kepemilikan saham khusus (*employee stock ownership program/ ESOP*) atau bentuk keterlibatan lain yang memberikan hak kepemilikan saham kepada manajemen maupun karyawan.

8. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 2022, Perseroan telah menetapkan Prajogo Pangestu sebagai pengendali Perseroan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021 juncto Peraturan OJK No. 9/2018.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Prajogo Pangestu sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 7 November 2022 yang telah dilaporkan kepada Menkumham melalui sistem administrasi hukum umum pada tanggal 9 November 2022.

Prajogo Pangestu selaku pengendali juga merupakan pengendali dari dua Perusahaan Terbuka lainnya yaitu PT Barito Pacific Tbk dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

9. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan pernyataan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan langsung</u>							
	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,22
	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,07
	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,16
	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,00
	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	99,99	Belum beroperasi	5,95
	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,43
	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	9,68
	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum beroperasi	0,08
	PT B4	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Belum Beroperasi	0,17

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
TP		Jakarta Barat	2011	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	5,46
Kepemilikan tidak langsung Melalui ESE							
BI		Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,23
DBK		Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	1,62
INTAM		Jakarta Barat	2013	Pertambangan emas dan perak	99,99	Belum beroperasi	0,17
Kepemilikan tidak langsung Melalui DBK							
PUR		Jakarta Barat	2013	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,04
Kepemilikan tidak langsung Melalui PMI							
SSJ		Jakarta Barat	2023	Penggalian kuarsa / pasir silika	85,00	Belum beroperasi	0,03
Kepemilikan tidak langsung Melalui AMP							
UBL		Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	40,00 & 30,00 Melalui PTRO	Belum beroperasi	0,03
Kepemilikan tidak langsung Melalui KJP							
PTRO		Tangerang Selatan	2024	Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan	41,52	Beroperasi	37,52
Kepemilikan tidak langsung Melalui PTRO							
KBL		Tangerang Selatan	2024	Jasa penunjang perusahaan pertambangan	99,99	Beroperasi	2,94

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
	KBS	Tangerang Selatan	2024	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan	99,99	Beroperasi	0,04
	KMS	Tangerang Selatan	2024	Perusahaan holding	99,99 & 0,01 melalui KBL	Beroperasi	0,65
	KPI	Jakarta Selatan	2024	Operasi pelabuhan, transportasi, <i>contracting</i> (jalan) dan jasa <i>rendering</i>	95,00	Beroperasi	0,59
	PII	Tangerang Selatan	2024	Pengelolaan pelabuhan khusus	99,80	Beroperasi	0,09
	PIP	Singapura	2024	Investasi	100,00	Belum beroperasi	0,00
	PIN	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,90 & 0,10 melalui RKN	Belum beroperasi	0,01
	PSA	Australia	2024	<i>Solution provider</i> dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi	100,00	Belum beroperasi	0,12
	RKN	Balikpapan	2024	Jasa rekayasa	99,90 & 0,10 melalui PII	Belum beroperasi	0,02
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PII</u>							
	MIP	Tangerang Selatan	2024	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum	51,25	Beroperasi	0,07
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui KMS</u>							
	CEP	Tangerang Selatan	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,10
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4</u>							
	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1,01
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN</u>							
	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
LKB		Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51,00	Belum beroperasi	0,01
Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK							
IBP		Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,45

Berikut adalah keterangan Perusahaan Anak Perseroan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap jumlah aset Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024:

1. PT Kreasi Jasa Persada ("KJP")

Riwayat Singkat

KJP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

KJP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 3 Agustus 2023, dibuat di hadapan Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056910.AHU.01.01.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149318.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 ("**Akta Pendirian KJP**").

Perubahan terakhir anggaran dasar KJP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KJP No. 14 tanggal 10 Desember 2024, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0219864 tanggal 10 Desember 2024 dan (ii) menerima pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080322.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0268587. AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, dimana para pemegang saham KJP menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai modal KJP ("**Akta KJP No. 14/2024**").

Akta Pendirian KJP beserta seluruh perubahannya, termasuk Akta KJP No. 14/2024 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar KJP**".

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KJP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta KJP No. 14/2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	2.095.999	2.095.999.000.000	99,99
2. TP	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.096.000	2.096.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	-

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KJP, maksud dan tujuan KJP adalah melakukan usaha dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan KJP adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya (KBLI 09900).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KJP telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 1508230062996	15 Agustus 2023 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala BKPM, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 39.857.332.9-031.000	4 Agustus 2023 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-3737/KT/KPP.050103/2023	4 Agustus 2023 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-62/PPK/KPP.050103/2024	28 Februari 2024 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
5.	Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 15082300629960001	30 Oktober 2023 / 29 Oktober 2028	Menteri Investasi atas nama Menteri ESDM
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 15082310113173042	15 Agustus 2023 / 14 Agustus 2028	Menteri Investasi atas nama Menteri ESDM

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KJP adalah sebagaimana tercantum Akta Pendirian KJP, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Diana Arsiyanti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	414.281	61.650
Aset Tidak Lancar	717.215	-
Jumlah Aset	1.131.496	61.650
Liabilitas Jangka Pendek	228.265	5
Liabilitas Jangka Panjang	434.120	-
Jumlah Liabilitas	662.385	5
Ekuitas	469.111	61.645

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	591.030	-
Beban pokok pendapatan	(526.676)	-
Laba bruto	64.354	-
Laba neto untuk tahun berjalan	74.751	237
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	73.316	540

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.131.496 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD414.281 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD717.215 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD352.631 ribu atau sebesar 571,98% bila dibandingkan dengan aset lancar KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas, piutang usaha yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD717.215 ribu atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset takberwujud, aset tetap, dan aset pertambangan yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD662.385 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD228.265 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD434.120 ribu.

Liabilitas jangka pendek KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD228.260 ribu bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha, utang bank jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun yang mulai tercatat pada tahun 2024 setelah akuisisi Entitas Anak.

Liabilitas jangka panjang KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD434.120 ribu atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang sukuk, dan liabilitas pajak tangguhan yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD469.110 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD407.466 ribu atau sebesar 660,99% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya modal saham, laba ditahan, dan kepentingan non-pengendali.

d. Pendapatan

Pendapatan KJP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD591.030 ribu, meningkat 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya pendapatan dari penjualan batu bara, kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa, jasa, dan lain - lain yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

e. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan KJP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD526.675 ribu, meningkat 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya beban subkontraktor, beban operasi alat berat dan peralatan serta beban gaji dan tunjangan karyawan yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

f. Laba Bruto

Laba bruto KJP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD64.354 ribu, meningkat 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya pendapatan dari penjualan batu bara, kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa, jasa, dan lain - lain yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

g. Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan KJP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD74.751 ribu, meningkat USD74.514 ribu dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya laba usaha dari hasil penjualan batu bara, kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa yang mulai tercatat pada tahun 2024, setelah akuisisi Entitas Anak.

2. PT Multi Tambangjaya Utama ("MUTU")

Riwayat Singkat

MUTU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MUTU didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 392 tanggal 17 November 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02-1542.HT.01.01-TH.90 tanggal 22 Maret 1990 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam buku register No. 440/1990, tanggal 31 Maret 1990 ("**Akta Pendirian MUTU**").

Perubahan terakhir anggaran dasar MUTU adalah berdasarkan Akta Penegasan No. 8 tanggal 6 November 2024, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001563 tertanggal 8 Januari 2025 dan (ii) menerima pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000423.AH.01.02.Tahun 2025 tertanggal 8 Januari 2025 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000754.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025, dimana para pemegang saham MP menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai modal MUTU ("**Akta MUTU No. 8/2024**").

Akta Pendirian MUTU beserta seluruh perubahannya, termasuk Akta MUTU No. 8/2024 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Anggaran Dasar MUTU"**.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MUTU adalah sebagaimana tercantum dalam Akta MUTU No. 8/2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp850,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500.000.000	2.125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	2.263.029.999	1.923.575.499.150	99,99
2. KJP	1	850	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.263.030.000	1.923.575.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	236.970.000	201.424.500.000	

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MUTU, maksud dan tujuan MUTU adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan batu bara. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MUTU adalah Aktivitas Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MUTU telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120311041593	19 Oktober 2018 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala BKPM, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.348.513.1-091.000	No. 12 Desember 1989 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.348.513.1-714.001	No. 29 Oktober 2007 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Muara Teweh
4.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-799KT/WPJ.19/KP.0103/2019	25 September 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
5.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-180PKP/WPJ.19/KP.0103/2019	25 September 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
6.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	20 November 1997 / 3 Mei 2039	Pemerintah Indonesia diwakilkan Menteri ESDM.
7.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	21 Juni 2023 / 20 Juni 2026	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah
8.	Sertifikat Laik Operasi JG6.O.30.171.6204.0000.21	No. 14 Desember 2021 / 14 Desember 2026	PT Surveyor Indonesia (Persero)
9.	Sertifikat Laik Operasi JG7.O.30.171.6204.0000.21	No. 14 Desember 2021 / 14 Desember 2026	PT Surveyor Indonesia (Persero)
10.	Sertifikat Laik Operasi JG8.O.30.171.6204.0000.21	No. 14 Desember 2021 / 14 Desember 2026	PT Surveyor Indonesia (Persero)
11.	Sertifikat Laik Operasi JG9.O.30.171.6204.0000.21	No. 14 Desember 2021 / 14 Desember 2026	PT Surveyor Indonesia (Persero)

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
12.	Sertifikat Laik Operasi No. JH1.O.30.171.6204.0000.21	14 Desember 2021 / 14 Desember 2026	PT Surveyor Indonesia (Persero)
13.	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus No. 81203110415930007	6 Maret 2024 / Masa berlaku tidak diatur	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika
14.	Izin Komersial / Operasional Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara No. KW/JASA-Perkapalan-Dan	7 Juli 2023 / 6 Juli 2028	Plt. Direktur Pelabuhan atas nama Dikretur Jendral Perhubungan Laut
15.	PKKPR No. 22082210216204002	22 Agustus 2022 / 21 Agustus 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agama dan Tata Ruang
16.	Izin Lingkungan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batu bara Beserta Sarana Penunjangnya Di Kecamatan Karau Kuala, Dusun Selatan Dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara, Dan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT Multi Tambangjaya Utama No. 188.44/306/2015	25 Juni 2015 / Masa berlaku tidak diatur	Gubernur Kalimantan Tengah
17.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya No. SK.819/Menhut-II/2013	19 November 2013 / 18 November 2027	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MUTU adalah sebagaimana tercantum Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 75 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013568.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086276 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0051082 tanggal 29 Februari 2024, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043981.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 Februari 2024, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Diana Arsiyanti

Direksi

Direktur Utama : Michael
 Direktur : Daniel Jr Lopez Laurente
 Direktur : Kartika Hendrawan
 Direktur : Polmer Nababan
 Direktur : Pujo Tri Wahyudi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	112.123	137.618
Aset Tidak Lancar	102.472	88.127
Jumlah Aset	214.595	225.745
Liabilitas Jangka Pendek	40.030	39.836
Liabilitas Jangka Panjang	12.001	2.061
Jumlah Liabilitas	52.031	41.897
Ekuitas	162.564	183.848

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	136.598	237.014
Beban pokok pendapatan	(93.047)	(162.600)
Laba bruto	43.551	74.414
Laba neto untuk tahun berjalan	12.501	22.124
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	12.571	22.217

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD214.595 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD112.123 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD102.472 ribu.

Aset lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar USD25.495 ribu atau sebesar 18,52% bila dibandingkan dengan aset lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pajak dibayar dimuka dan kas operasional.

Aset tidak lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD14.345 ribu atau sebesar 16,28% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset pertambangan, aset tetap, dan klaim pengembalian pajak.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD52.031 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD40.030 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD12.001 ribu.

Liabilitas jangka pendek MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD193 ribu atau sebesar 0,48% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek MUTU pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha.

Liabilitas jangka panjang MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD9.940 ribu atau sebesar 482,29% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang MUTU pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya provisi atas penghentian pengoperasian aset.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD162.564 ribu. Ekuitas MUTU pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan USD21.283 ribu atau sebesar 11,58% bila dibandingkan dengan ekuitas MUTU pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh transaksi penurunan modal.

d. Pendapatan

Pendapatan usaha MUTU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD136.598 ribu, menurun USD100.415 ribu atau 42,37% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga jual dan volume penjualan pada batu bara thermal.

e. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan MUTU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD93.047 ribu, menurun USD69.552 ribu atau 42,77% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan biaya produksi dan royalty, yang diikuti dengan penurunan volume penjualan.

f. Laba Bruto

Laba bruto MUTU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD43.550 ribu, menurun USD30.863 ribu atau 41,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan atas penurunan harga dan volume penjualan batu bara.

g. Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan MUTU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD12.501 ribu, menurun USD9.622 ribu atau 43,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan atas penurunan harga dan volume penjualan batu bara.

3. PT Tamtama Perkasa ("TP")

Riwayat Singkat

TP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdomisili di Wisma Barito Pacific Tower B, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Jakarta Barat, Jakarta 11410, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

TP didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan No. AHU-66963.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0088859.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 ("**Akta Pendirian TP**").

Sejak Akta Pendirian TP sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar TP telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TP No. 17 tanggal 12 Desember 2024, dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.03.0221080 tertanggal 12 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0271186.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, dimana para pemegang saham TP menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal TP ("**Akta TP No. 17/2024**").

Akta Pendirian TP, beserta setiap perubahannya termasuk Akta TP No. 17/2024 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar TP**”.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta TP No. 17/2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	776.499	776.499.000.000	99,99
2. Prajogo Pangestu	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	776.500	776.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	223.500	223.500.000.000	

Kegiatan Usaha dan Perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TP, maksud dan tujuan TP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan batu bara, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan TP adalah Aktivitas Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TP telah memiliki izin-izin umum dan operasional, sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120113131468	16 November 2018 / Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala BKPM Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.663.604.3-031.000	27 Agustus 2008 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-6118K/ WPJ.05/KP.0103/2017	17 Oktober 2017 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palmerah
4.	Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. S-85PKP/WPJ.05/ KP.0803/2021	9 Juli 2021 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat
5.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 188.45/377/2011	3 Oktober 2011 / 2 Oktober 2031	Bupati Barito Utara
6.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri No. 812011313146800150008	7 Januari 2025 / 6 Januari 2028	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah
7.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri No. 812011313146800150009	7 Januari 2025 / 6 Januari 2028	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah
8.	Izin Operasi Terminal Khusus No. A.785/ AL.308/DJPL	11 Juli 2024 / 10 Juli 2029	Menteri Perhubungan Republik Indonesia

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
9.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus No. 812011313146800020005	1 Maret 2024 / 1 Maret 2029	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perhubungan
10.	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang No. 12092310216204004	12 September 2023 / 11 September 2026	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan
11.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya No. SK-349/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2018	13 Agustus 2018 / 3 Oktober 2031	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
12.	Izin Lingkungan atas Peningkatan Kapasitas Produksi, Pembangunan Jalan Angkut dan Terminal Khusus Batu bara No. 188.45/495/2013	10 September 2013 / Masa berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan usaha	Bupati Barito Utara
13.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pembangunan dan Pengoperasionalan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah No. 14092301162040010	14 September 2023 / Masa berlaku sampai berakhirnya perizinan berusaha	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TP adalah sebagaimana tercantum Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0061894 tanggal 4 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0197836.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Daniel Jr Lopez Laurente
Direktur : Diana Arsiyanti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	96.628	70.623
Aset Tidak Lancar	24.525	19.802
Jumlah Aset	121.153	90.425
Liabilitas Jangka Pendek	70.493	68.960
Liabilitas Jangka Panjang	1.785	479
Jumlah Liabilitas	72.278	69.439
Ekuitas	48.875	20.986

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	100.247	97.943
Beban pokok pendapatan	(80.306)	(60.725)
Laba bruto	19.941	37.218
Laba neto untuk tahun berjalan	4.243	15.306
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	2.970	9.473

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

a. Aset

Jumlah aset TP pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD121.153 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD96.628 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD24.525 ribu.

Aset lancar TP pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD26.005 ribu atau sebesar 36,82% bila dibandingkan dengan aset lancar TP pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan terutama ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha.

Aset tidak lancar TP pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD4.723 ribu atau sebesar 23,85% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar TP tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset eksplorasi dan *claim for tax refund*.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas TP pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD72.278 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD70.493 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.785 ribu.

Liabilitas jangka pendek TP pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD1.533 ribu atau sebesar 2,22% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek TP pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban akrual.

Liabilitas jangka panjang TP pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD1.306 ribu atau sebesar 272,65% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang TP pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang jaminan pasca tambang.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD48.875 ribu. Ekuitas TP pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan USD27.889 ribu atau sebesar 132,89% bila dibandingkan dengan ekuitas TP pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya modal saham dibandingkan pada akhir tahun 2023.

d. Pendapatan

Pendapatan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD100.247 ribu, meningkat USD2.304 ribu atau 2,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan batu bara.

e. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD80.306 ribu, meningkat USD19.581 ribu atau 32,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume batu bara yang dijual, namun harga rata-rata penjualan batu bara TP mengalami penurunan.

f. Laba Bruto

Laba bruto TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD19.941 ribu, menurun USD17.277 ribu atau 46,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan harga rata-rata penjualan batu bara pada tahun 2024.

g. Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD4.243 ribu, menurun USD11.063 ribu atau 72,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga rata-rata penjualan batu bara pada tahun 2024.

10. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
TP				
1.	Perjanjian Jasa Pertambangan Pemindahan Lapisan Batuan Penutup (Overburden), Pengangkutan Batubara ke ISP KM39 dan Dermaga Perusahaan dan Perawatan Jalan Pengangkutan Batubara No. 001A/TP-KTC/II/2018 tanggal 4 Januari 2018	- TP sebagai penerima jasa - PT KTC Metal Mining ("KTC") sebagai kontraktor	KTC menyediakan jasa pertambangan berupa rencana pertambangan, survei, pengawasan, pembelian dan penggunaan bahan-bahan peralatan (termasuk bahan ledak dan peledak), perawatan peralatan, perekrutan personil kontraktor, mobilisasi, pengawasan jasa kesehatan personil kontraktor, dan pembelian dan penggunaan barang habis dan prasarana di area tambang milik TP yang berlokasi di kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2028.
2.	Perjanjian Sewa Alat No. 001B/TP-KTC/II/2018 tanggal 4 Januari 2018	- TP sebagai penerima sewa; dan - KTC sebagai penyedia	TP menyewa alat tertentu dan sumber daya untuk mengoperasikan peralatan pertambangan dari KTC untuk digunakan oleh TP mengelola tambang milik TP yang berlokasi di kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2028.
PTRO				

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	<i>Contract Agreement of Waste Removal & Coal Production SM Popor, Suara Area Pasir Mine East Kalimantan No. KJA-010P</i> tertanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui <i>13th Amendment to Contract Agreement of Waste Removal & Coal Production Contract No. KJA-010P</i> tertanggal 20 Mei 2024	- PTRO sebagai kontraktor - PT Kideco Jaya Agung ("KJA") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa pertambangan yang meliputi pembebasan lahan (<i>land clearing</i>), <i>top soil removal</i> , penggalian (<i>excavation</i>), pengeboran (<i>drill & blast</i>), <i>overburden and top soil</i> , pengelolaan kualitas air (<i>control box</i>), penyaliran dan penanganan lumpur membangun/mendirikan/merancang jalan di dalam lo kasi tambang, produksi batu bara dan pengeringan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan KJA yang berlokasi di Kalimantan Timur dan dimiliki oleh KJA.	1 Januari 2011 sampai dengan Desember 2028
2.	<i>Contract for Sorong Supply Base Services No. 4420001807</i> tertanggal 23 Juni 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Amandemen No. 6 untuk <i>Sorong Supply Base Services</i> tertanggal 1 Juni 2024	- PTRO sebagai kontraktor - BP Berau Ltd. ("BP") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa manajemen, perekayasa, rancangan, pengawasan, tenaga kerja, logistik, peralatan dan fasilitas lainnya untuk layanan <i>supply base services</i> dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik Tangguh LNG <i>Operation</i> dan Tangguh <i>Integrated Drilling Program</i> atau Tangguh <i>Expansion Program</i> di Sorong yang dimiliki BP.	23 Juni 2017 sampai dengan 22 Juni 2025
3.	<i>Master Services Agreement (MSA) No. JK1700044-000</i> tertanggal 24 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian No. 013 tertanggal 5 Oktober 2023	- PTRO sebagai kontraktor - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada jasa pendukung konstruksi fasilitas pertambangan, jasa logistik, penyediaan alat kendaraan berat, layanan transportasi, untuk Proyek Grasberg di Papua yang dimiliki PTFI.	24 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2025
4.	<i>Amended and Restated Construction Services Agreement on Levee Construction and Stockpile Project No. TP1500131-001</i> tertanggal 1 September 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Amendemen No. 021 tertanggal 9 Januari 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PTFI sebagai penerima jasa	Perseroan memberikan jasa konstruksi pertambangan dengan di antaranya menyediakan tenaga kerja, pendirian dan pemeliharaan komunikasi infrastruktur dan jaringan komunikasi, melakukan perlindungan dan pemeliharaan borrow areas dari erosi dan dampak-dampak alam lain yang mungkin terjadi pada lokasi pekerjaan di Papua yang dimiliki PTFI.	30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2026
5.	<i>Construction and Project Management Works Contract No. 330-800-CN-CC-0005</i> tertanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui <i>Amendment II to the Construction and Project Management Works Contracts No. 330-800-CN-CCC-0012 for the Awak Mas Gold Project</i> tertanggal 23 Agustus 2023	- PTRO sebagai kontraktor - PT Masmino Dwi Area ("MDA") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa dibidang teknis, desain, pengadaan, konstruksi dan manajemen diantaranya pengadaan tenaga kerja, penyediaan alat berat, pabrik, dan kendaraan berat untuk Proyek Awak Mas Gold yang dimiliki oleh MDA.	26 Juli 2022 sampai dengan seluruh kewajiban kontraktor telah selesai atau diakhiri oleh para pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/IV-0001 tertanggal 6 April 2021 ("Perjanjian Jasa Pertambangan KSM")	- PTRO sebagai kontraktor manajemen proyek - KBL sebagai kontraktor - PT Kartika Selabumi Mining ("KSM") sebagai penerima jasa - PT Palm Mas Asri ("PMA") sebagai penjamin penerima jasa	PTRO sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Kota Bangun, Muara Muntai dan Loa Kulu, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh KSM, dimana pembayaran terhadap jasa KBL tersebut dijamin oleh PMA.	6 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027
7.	Perjanjian Rental Peralatan untuk Rental Peralatan Bergerak & Personil di Lokasi Tambang PT Kartika Sela Bumi No. KBL/AGR/2021/IV-0002 tertanggal 6 April 2021 ("Perjanjian Rental Peralatan KSM")	- PTRO sebagai kontraktor manajemen proyek penjamin - KBL sebagai pemberi sewa - KSM sebagai penerima sewa - PMA sebagai pemberi jaminan	PTRO sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa sewa peralatan tambang batu bara termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian dan perawatan atas peralatan tersebut yang dibutuhkan KSM untuk pelaksanaan proyek tambang batu bara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pertambangan KSM.	24 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2027 atau hingga cadangan batu bara KSM yang dapat ditambang telah habis
8.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2021/X-0003 tertanggal 10 Oktober 2021 ("Perjanjian Jasa Pertambangan HME")	- PTRO sebagai kontraktor manajemen proyek - KBL sebagai kontraktor - PT Hardaya Mining Energy ("HME") sebagai penerima jasa - PT Central Cipta Murdaya ("CCM") sebagai penjamin penerima jasa	PTRO sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan untuk mengambil material tanah penutup dan pengangkutan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek tambang batu bara di Nunukan, Kalimantan Utara yang dimiliki oleh CCM melalui HME, dimana pembayaran terhadap jasa KBL tersebut dijamin oleh CCM.	10 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
9.	Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2022/IX-0002 tanggal 15 September 2022 ("Perjanjian Jasa Pertambangan IBP")	- PTRO sebagai kontraktor manajemen proyek - KBL sebagai kontraktor - PT Indo Bara Pratama ("IBP") sebagai penerima jasa	PTRO sebagai penyedia jasa manajemen proyek untuk pekerjaan jasa pertambangan dan KBL sebagai penyedia jasa pertambangan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup ke <i>disposa</i> , pembuatan dan perawatan lereng dan jalan angkut, pengelolaan air tambang, pengangkutan batu bara dan reklamasi yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh IBP.	5 tahun sejak tanggal mulai pekerjaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Jasa Operasi Penambangan No. PTP/AGR/2022/VI-0063 tertanggal 3 Juni 2022	- PTRO sebagai kontraktor - PT Cipta Djaya Selaras Mining ("CDSM") dan PT Agung Pratama Mineral ("APM") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa operasi pertambangan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan rencana tambang, operasi penambangan, pengangkutan batu bara ke pelabuhan dan aktivitas pelabuhan yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang dimiliki dan dioperasikan oleh CDSM dan APM.	11 Oktober 2022 sampai dengan 4 tahun sejak tanggal mulai operasi penambangan atau ketika target produksi 4,5 juta WMT tercapai

11.	Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> No. PTP/AGR/2022/VII-0072 tertanggal 18 Juli 2022 sebagaimana telah diakhiri melalui Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan <i>Tailing</i> tanggal 28 September 2022 ("Perjanjian Pabrik Pengolahan")	- PTRO sebagai kontraktor - PT Santana Rekso Nidhana ("SRN") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan pabrik pengolahan untuk pengelolaan emas yang berlokasi di Gosowong, Maluku Utara yang dimiliki oleh SRN.	18 Juli 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023

Catatan:

Jangka waktu Perjanjian Pabrik Pengolahan telah berakhir, namun masih terdapat kewajiban SRN kepada PTRO. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, PTRO telah mengalihkan sisa kewajiban SRN berdasarkan Perjanjian Pabrik Pengolahan melalui Perjanjian Pengalihan Tagihan Atas Penyelesaian Tagihan tanggal 4 Agustus 2023 tertanggal 27 September 2023 kepada PT Insan Global Pawulang ("IGP"). Berdasarkan Surat Pembayaran atas Tagihan atas Proyek SRN No. CORPLEGAL/L/2024/VI-022 tertanggal 28 Juni 2024, PTRO memberikan jangka waktu pelunasan kewajiban SRN berdasarkan Perjanjian Pabrik Pengolahan kepada IGP sampai 31 Desember 2027.

12.	Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Ore Mas No. PTP/AGR/2022/IX-0091A tertanggal 23 September 2022 sebagaimana telah diakhiri melalui Perjanjian Penyelesaian Atas Perjanjian Operasi Bersama Pelaksanaan Pertambangan Ore Emas Tanggal 23 September 2022 tertanggal 4 Agustus 2023 ("Perjanjian Pertambangan Ore Mas")	- PTRO sebagai kontraktor - PT Nusa Halmahera Minerals ("NHM") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa pertambangan yang terdiri dari pemindahan lapisan tanah penutup, penambangan emas, dan pekerjaan lainnya yang berlokasi di Gosowong, Maluku Utara yang dimiliki oleh NHM.	1 Mei 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023

Catatan:

Jangka waktu Perjanjian Pabrik Pertambangan Ore Mas telah berakhir, namun masih terdapat kewajiban NHM kepada PTRO. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, PTRO telah mengalihkan sisa kewajiban NHM berdasarkan Perjanjian Pertambangan Ore Mas melalui Perjanjian Pengalihan Tagihan Atas Perjanjian Penyelesaian Tagihan atas Perjanjian Pertambangan Ore Mas tertanggal 27 September 2023 kepada IGP. Berdasarkan Surat Pembayaran atas Tagihan atas Proyek NHM No. CORPLEGAL/L/2024/VI-023 tertanggal 28 Juni 2024, PTRO memberikan jangka waktu pelunasan kewajiban NHM berdasarkan Perjanjian Pertambangan Ore Mas kepada IGP sampai 31 Desember 2027.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
13.	<i>Mining Services Agreement West Kutai, East Kalimantan Contract No. PTP/AGR/2023/IV-0003</i> tertanggal 18 April 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Perubahan No.2 tertanggal 22 Maret 2024 atas Kontrak No. PTP/AGR/2023/IV-0003 tanggal 18 April 2023	- PTRO sebagai kontraktor - PT Kedap Sayaaq ("PTKS") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa pertambangan yang meliputi pembukaan lahan, pengupasan tanah pucuk, penggalian, pengangkutan tanah penutup dan tanah pucuk, jalan angkut dan jalan pintas, area pembuangan, produksi batu bara dan pengeringan pembuangan limbah, sesuai dengan rencana pengembangan tambang yang berlokasi di Kalimantan Barat yang dimiliki oleh PTKS.	2 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2028
14.	Kontrak Jasa Pekerjaan Material Removal, Pengangkutan Bijih Nikel Tambang Tanjung Buli Halmahera Timur, Maluku Utara No. PTP/AGR/2023/IX-0010 tertanggal 19 September 2023 sebagaimana telah diubah melalui Amandemen I Kontrak No. PTP/AGR/2023/IX-0010 Jasa Pekerjaan Material Removal, Pengangkutan Bijih Nikel Tambang Tanjung Buli Halmahera Timur, Maluku Utara tertanggal 19 Oktober 2023	- PTRO sebagai Kontraktor - PT Sumberdaya Arindo ("SDA") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa pekerjaan material yang meliputi penggalian, pemuatan dan pengangkutan material, serta pengangkutan bijih nikel tambang termasuk penyediaan tenaga kerja yang berlokasi di Tanjung Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dimiliki oleh SDA.	19 September 2023 sampai dengan 22 September 2026
15.	<i>Contract for Onshore Early Works Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for Ubadari, Tangguh EDR/CCUS, and Tangguh Onshore Compression (UCC) Project No. 4420003405A</i> tertanggal 1 Februari 2024 ("Perjanjian Proyek Tangguh")	- PTRO sebagai kontraktor - BP sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa penyediaan manajemen, perekayasa teknik, rancangan, pengawasan, pekerja, peralatan konstruksi, kapal dan fasilitas lainnya untuk pembangunan jalan, drainase dan infrastruktur untuk Proyek Tangguh yang dimiliki oleh BP.	1 Februari 2024 sampai dengan 25 November 2025
16.	Perjanjian Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Tambang Blok Pomalaa No. 4600082007 tertanggal 3 Juli 2024 ("Perjanjian PTVI")	- PTRO sebagai kontraktor - PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa konstruksi berupa penyediaan tenaga kerja, keterampilan dan sumber daya untuk pengembangan dan pembangunan Proyek Tambang Blok Pomalaa yang dimiliki oleh PTVI.	3 Juli 2024 sampai dengan seluruh kewajiban kontraktor telah selesai atau hingga diakhiri lebih awal sesuai Perjanjian PTVI
17.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2024/IX-0027 tertanggal 2 September 2024	- PTRO sebagai kontraktor - PT Global Bara Mandiri ("GBM") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa penambangan kepada GBM yang terdiri dari penggalian lapisan penutup, pengupasan batu bara dan pemuatan batu bara di wilayah pertambangan batu bara GBM di Kecamatan Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah.	2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2032
18.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2024/VIII-0020 tertanggal 9 Agustus 2024	- PTRO sebagai kontraktor - PT Pasir Bara Prima ("PBP") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa pertambangan termasuk namun tidak terbatas kepada pengupasan, pemuatan, pengangkutan penumpukan dan penataan tanah pucuk serta pengupasan, pemuatan, pengangkutan dan penimbunan tanah penutup, pengangkutan tanah pucuk dan tanah penutup, pemberian material batuan, penambangan dan pemuatan batu bara sesuai dengan rencana tambang yang disepakati untuk PBP di Kapuas, Kalimantan Tengah.	9 Agustus 2024 sampai dengan cadangan batu bara dalam IUP OP PBP habis (<i>life of mine</i>)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
19.	<i>Short Form Services Agreement</i> No. 2300110-001 tertanggal 1 Juli 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Change Order</i> No. 002 tanggal 7 November 2025	- PTRO sebagai pemberi jasa - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa penyediaan alat berat beserta dengan operator dan rigger untuk membantu pengangkutan barang-barang material sehubungan proyek yang dimiliki PTFI.	1 Juli 2024 sampai dengan 7 November 2025.
20.	<i>Construction Agreement</i> No. JK2400092-01 tanggal 27 Desember 2024	- PTRO sebagai kontraktor - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa konstruksi termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak, kepada PTFI.	27 Desember 2024 sampai dengan 15 November 2025
21.	Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/2025/II-0004 tanggal 26 Februari 2025	- PT Niaga Jasa Dunia dan PT Bara Prima Mandiri sebagai penerima jasa - Perseroan sebagai kontraktor	PTRO menyediakan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan personil tenaga kerja, peralatan serta bahan habis pakainya (minyak pelumas, suku cadang, dan sebagainya), dan fasilitas-fasilitas sementara untuk PT Niaga Jasa Dunia dan PT Bara Prima Mandiri pada area IUP yang dimiliki oleh PT Bara Prima Mandiri di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia.	29 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2032

b. Perjanjian Kredit

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan dari perjanjian atau instrumen utang yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 219 tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 87 tanggal 15 Februari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan terakhir diubah melalui Akta Perjanjian Perubahan No. 383 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Michael Yogatama, S.H., M.Kn., yang merupakan Notaris pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.	- Perseroan sebagai debitur; - MP dan KJP sebagai penanggung awal; dan - BNI sebagai kreditur.	Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari Bank BNI kepada Perseroan, antara lain: - Fasilitas Revolving Merupakan fasilitas pinjaman revolving dengan nilai total fasilitas sebesar Rp755.000.000.000. - Fasilitas Revolving B Merupakan fasilitas pinjaman revolving dengan nilai total fasilitas sebesar Rp1.350.000.000.000. - Fasilitas Treasury Line Merupakan fasilitas pinjaman treasury line dengan nilai total fasilitas sebesar Rp32.120.000.000. <u>Bunga</u> - Fasilitas Revolving dan Fasilitas Treasury Line <i>Jakarta Inter Bank Offered Rated ("JIBOR")</i> 3 bulan + margin sebesar 1,75% per tahun. - Fasilitas Revolving B JIBOR 3 bulan + margin sebesar 1,90% per tahun.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> - Fasilitas Revolving 26 September 2028. - Fasilitas Revolving B 26 November 2027. - Fasilitas Treasury Line Pencairan diusulkan paling lambat 30 Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran terakhir (dimana tanggal pembayaran terakhir adalah 25 Oktober 2028). <u>Jatuh Tempo Pembayaran Terakhir:</u> - Fasilitas Revolving dan Fasilitas Treasury Line 25 Oktober 2028. - Fasilitas Revolving B 26 Desember 2027.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (" Akta Fasilitas Sindikasi No. 155/2023 ")	- Perseroan dan MP sebagai debitur; dan - BCA, Mandiri, dan BNI sebagai kreditur - Mandiri sebagai Agen Fasilitas; dan - BCA sebagai Agen Jaminan dan Agen Penampungan.	<u>Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari BCA, Mandiri, dan BNI kepada Perseroan dan MP, antara lain:</u> - Fasilitas Tranche A Merupakan fasilitas pinjaman revolving dengan nilai komitmen sebesar Rp400.000.000.000. - Fasilitas Tranche B Merupakan fasilitas pinjaman berjangka non-revolving dengan nilai komitmen sebesar Rp200.000.000.000. - Fasilitas Tranche C Merupakan fasilitas pinjaman berjangka non-revolving dengan nilai komitmen sebesar Rp2.906.724.800.000. <u>Bunga</u> Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Akta Fasilitas Sindikasi No. 155/2023 dihitung dengan rincian sebagai berikut: - Fasilitas Tranche A JIBOR 3 bulan + Margin 1,75% per tahun. - Fasilitas Tranche B JIBOR 3 bulan + Margin 1,95% per tahun. - Fasilitas Tranche C JIBOR 3 bulan + Margin 1,95%.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> - Fasilitas Tranche A paling lambat 14 Desember 2024, dimana jangka waktu akseptasi terbagi menjadi (i) Fasilitas KMK maksimal 3 bulan sejak tanggal penarikan sedangkan (ii) Fasilitas <i>Bridging</i> maksimal 12 bulan sejak tanggal penarikan.. - Fasilitas Tranche B paling lambat 12 bulan sejak tanggal 14 Desember 2023 atau pada saat terjadinya akuisisi saham B4 secara sepenuhnya sesuai dengan keputusan Menteri ESDM (mana yang lebih cepat); dan - Fasilitas Tranche C paling lambat 12 bulan sejak tanggal 14 Desember 2023 atau pada saat terjadinya akuisisi saham MUTU secara sepenuhnya sesuai dengan keputusan Menteri ESDM (mana yang lebih cepat). <u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u> - Fasilitas Tranche A 14 Desember 2024. - Fasilitas Tranche B 14 Desember 2028. - Fasilitas Tranche C 14 Desember 2029.
3.	Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No: WCO.KP/2455/ TLN.2024 No. 91 tanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Sc., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (" Akta Fasilitas Term Loan No. 91/2024 ")	- Mandiri sebagai kreditur; dan - Perseroan dan KJP sebagai debitur	Pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan dan KJP berupa fasilitas term loan dengan limit kredit sebesar Rp700.000.000.000 dan bersifat committed dan non revolving. <u>Bunga</u> JIBOR 3 bulan + margin sebesar 1,75% per tahun.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit</u> Maksimal 12 Maret 2025. <u>Jatuh Tempo Pembayaran</u> 12 September 2029.
4.	Perjanjian Kredit No. 319 tanggal 30 Agustus 2024 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (" Akta Kredit No. 319/2024 ")	- BNI sebagai kreditur; dan - Perseroan sebagai debitur	Pemberian fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar 775.000.000.000. <u>Bunga</u> Margin dan JIBOR yang berlaku.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit</u> 28 Februari 2025. <u>Jatuh Tempo Pembayaran Terakhir:</u> 30 Agustus 2030.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
PTRO				
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (" Perjanjian Kredit BCA ")	- PTRO, KBL, dan CEP sebagai debitur - BCA sebagai kreditur	Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari BCA kepada PTRO, antara lain: <u>Untuk PTRO dan KBL:</u> - fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD107.000.000 untuk mengambil alih utang Perseroa dan Perusahaan Anak di Mandiri namun tidak termasuk utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>; dan - fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD83.000.000 untuk mengambil alih utang Perseroan dan Perusahaan Anak di Mandiri khusus atas utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i>. <u>Untuk PTRO, KBL, dan CEP:</u> - fasilitas <i>time loan revolving</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD70.000.000 untuk membiayai modal kerja, termasuk mengambil alih utang fasilitas modal kerja Perseroan pada PT Bank HSBC Indonesia; - fasilitas kredit multi (terdiri dari <i>letter of credit</i>, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, <i>standby letter of credit</i>, dan <i>forex forward line</i>) dengan jumlah pokok tidak melebihi dari USD100.000.000 untuk mendukung kegiatan operasional yang utamanya digunakan untuk menjamin pembelian komponen/ <i>sparepart</i>, menjamin tender, menjamin uang muka pendapatan, menjamin pelaksanaan proyek, menerbitkan SBLC untuk menjamin L/C yang fasilitas kreditnya telah diambil alih dari bank lain, dan lindung nilai kurs dana hasil ekspor sumber daya alam;	<u>Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> 29 November 2024 untuk fasilitas kredit investasi 1 dan fasilitas kredit investasi 2; 29 Mei 2025 untuk fasilitas kredit multi, fasilitas kredit investasi 4, dan fasilitas kredit investasi 5; dan 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>. <u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u> - Maksimal 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 1; 120 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 2; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 4; dan 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 5.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			- fasilitas kredit investasi 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025; dan - fasilitas kredit investasi 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000 untuk membiayai pembelian dan/atau membiayai kembali pembelian alat berat dan/atau mesin baru, termasuk komponen atas alat berat dan/atau mesin baru <i>capital expenditure</i> tahun 2024-2025. <u>Bunga</u> Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit BCA dihitung dengan rincian sebagai berikut: - JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; <i>Secured Overnight Financing Rate Data ("SOFR") Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; - JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1;	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			• SOFR <i>Term</i> 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 1; • JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang - dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; • SOFR <i>Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 2 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 2; • SOFR <i>Term</i> 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 4 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 4; dan • JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 5 yang - telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh debitur, untuk fasilitas kredit investasi 5.	
2.	Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior No. 64 tertanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (" Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior ")	• Perseroan sebagai peminjam awal • BNI sebagai bank koordinator dan penataan • BNI dan Mandiri sebagai para pengatur utama dan pembuku yang diamanatkan • BNI dan Mandiri sebagai para pemberi pinjaman awal ("Para Pemberi Pinjaman") • BNI sebagai agen • BNI sebagai agen jaminan awal • Mandiri sebagai agen jaminan	Pemberian fasilitas perbankan dari Para Pemberi Pinjaman kepada Perseroan dengan nilai fasilitas sejumlah Rp3.100.000.000.000 untuk mendanai belanja modal terkait pembelian setiap aset usaha untuk seluruh usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jasa pertambangan, kontrak jasa rekayasa, pengadaan, dan pembangunan (<i>engineering, procurement and construction</i>) atau kontrak terkait kegiatan usaha lainnya yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. <u>Bunga</u> Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior dihitung dengan komponen-komponen: (i) margin yang ditentukan oleh Para Pemberi Pinjaman dan (ii) JIBOR.	<u>Periode Penarikan Fasilitas:</u> 29 Agustus 2025. <u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u> 29 Agustus 2032.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Dengan Hak Opsi) No. PR22091689 tertanggal 19 September 2022 sebagaimana telah diubah melalui Amandemen Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Dengan Hak Opsi) No. PR22091689 tanggal 19 September 2022 ("Perjanjian No. PR22091689")	- Perseroan sebagai <i>lessee</i> - PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia ("MHCI") sebagai <i>lessor</i>	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh MHCI untuk pengadaan sejumlah barang modal Perseroan melalui mekanisme penjualan dan penyewagunausahaan kembali (<i>sale and lease back</i>). Perseroan telah mencairkan beberapa fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam skedul-skedul turunan dari Perjanjian No. PR22091689 dengan rincian sebagai berikut: - Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 01 tertanggal 19 September 2022 ("Skedul Turunan 01"); - Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 02 tertanggal 19 September 2022 ("Skedul Turunan 02"); - Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 03 tertanggal 30 September 2022 ("Skedul Turunan 03"); - Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 04 tertanggal 7 Desember 2022 ("Skedul Turunan 04"); dan - Skedul Sewa Guna Usaha Turunan No. 05 tertanggal 3 Februari 2023 ("Skedul Turunan 05").	- Skedul Turunan 01: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian No. PR22091689); - Skedul Turunan 02: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; - Skedul Turunan 03: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; - Skedul Turunan 04: 60 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha; dan - Skedul Turunan 05: 48 bulan sejak Tanggal Permulaan Sewa Guna Usaha.
4.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JJKLS23070011 tertanggal 19 Oktober 2023	- Perseroan sebagai <i>lessee</i> - PT KDB Tifa Finance Tbk ("KDB") sebagai <i>lessor</i>	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh KDB untuk pengadaan sejumlah barang modal Perseroan melalui mekanisme sewa guna usaha atau <i>sale and lease back</i> .	7 November 2023 sampai dengan 7 November 2027
5.	Perjanjian Pembiayaan No. 5802401708-709 tertanggal 23 September 2024	- Perseroan sebagai debitur - PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") sebagai kreditur	Pemberian fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan/ atau jasa oleh MTF kepada Perseroan melalui mekanisme pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional.	23 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2027
6.	Perjanjian Pembiayaan No. 5802401932 tertanggal 23 Oktober 2024	- Perseroan sebagai debitur - MTF sebagai kreditur	Pemberian fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan/ atau jasa oleh MTF kepada Perseroan melalui mekanisme pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional.	23 November 2024 sampai dengan 23 Oktober 2027

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Pembiayaan No. 5802401933 tertanggal 23 Oktober 2023	- Perseroan sebagai debitur - MTF sebagai kreditur	Pemberian fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan/ atau jasa oleh MTF kepada Perseroan melalui mekanisme pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional.	23 November 2024 sampai dengan 23 Oktober 2028
8.	Perjanjian Pembiayaan No. 5802402749-755 tertanggal 23 Desember 2024	- Perseroan sebagai debitur - MTF sebagai kreditur	Pemberian fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan/ atau jasa oleh MTF kepada Perseroan melalui mekanisme Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional.	1 Januari 2025 sampai dengan 23 Desember 2029
9.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912559001 tanggal 5 Februari 2025	- Perseroan sebagai lessee - PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("MLCI") sebagai lessor	Pemberian fasilitas pembiayaan oleh MLCI kepada Perseroan melalui mekanisme jual dan sewa balik.	48 bulan sejak dimulainya tanggal sewa, yakni tanggal dilakukan pembayaran harga perolehan atas barang dari penjual.

11. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar USD471.206 ribu yang terdiri antara lain:

No.	Keterangan	NBV (dalam ribuan USD)
1.	Tanah	40.941
2.	Bangunan dan prasarana	53.142
3.	Pelabuhan dan dermaga	2.594
4.	Mesin dan peralatan	4.574
5.	Peralatan tambang dan eksplorasi	262.655
6.	Aset dalam penyelesaian dan aset lain-lain	107.300
Total		471.206

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memanfaatkan aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut di atas untuk mendukung kegiatan operasional utama dalam bidang pertambangan batu bara dan juga sebagai penyedia jasa tambang, jasa infrastruktur & pendukung lainnya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

12. Saldo dan Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain berupa piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan tersebut mempunyai hubungan berelasi karena mempunyai kesamaan kepemilikan dan/atau pengurus dengan Grup.

Pihak berelasi	Sifat dan hubungan	Sifat dan transaksi
Fluor Petrosea Joint Organization	Proyek kerjasama antara anak perusahaan dengan pihak ketiga	Piutang usaha dan pendapatan
PT Trisetia Cita Graha	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Meranti Sembada	Afiliasi	Utang usaha dan beban umum dan administrasi
PT Barito Pacific	Afiliasi	Utang lain-lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Desember 2024
Piutang usaha	
Fluor Petrosea Joint Organization	29.006
Persentase total aset	1,63%
Pendapatan	
Fluor Petrosea Joint Organization	65.285
Persentase total pendapatan	8,14%
Piutang lain-lain	
PT Trisetia Cita Graha	96
Persentase total aset	0,01%
Utang usaha	
PT Meranti Sembada	212
Persentase total liabilitas	0,02%
Utang lain-lain	
PT Barito Pacific Tbk	21
Persentase total liabilitas	0,00%
Beban umum dan administrasi	
PT Meranti Sembada	5
Persentase total beban umum dan administrasi	0,00%

Operasi Bersama Fluor-Petrosea ("FPJO")

Pada tanggal 11 Maret 2020, PTRO bersama dengan PT Fluor Daniel Indonesia ("FDI") telah membentuk suatu kerjasama organisasi FPJO untuk melaksanakan Proyek Optimalisasi Pabrik Bijih Bawah Tanah (*Mill Optimization for Underground Ores Project*) untuk PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, FPJO bersama dengan PT Freeport Indonesia menandatangani *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

Pada tanggal 3 November 2020, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* dengan nilai estimasi total USD100.122 ribu.

Pada periode 12 November 2021 sampai dengan 10 Oktober 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Change Order* 001- 010 untuk Proyek SAG3 (*Change Order* untuk *Supplement Agreement* No. TP1900216-002). Melalui *Change Order* ini, durasi proyek diperpanjang hingga tanggal 30 Mei 2024, dengan tambahan nilai kontrak sebesar USD92.733 ribu.

Pada periode 30 November 2021 sampai dengan 1 Agustus 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani beberapa LNTP dan *Supplement Agreement* untuk Proyek *Copper Cleaner Circuit Construction Services* ("CUCL"). Proyek ini telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp802.087 juta (setara dengan USD52.029 ribu).

Pada tanggal 15 Januari 2024, PT Freeport Indonesia telah menunjuk FPJO untuk mengerjakan Proyek *Redundant Conveyor ("RECON") Construction Services* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp66.122 juta melalui LNTP No. TP1900216-007. LNTP ini berlaku efektif dari tanggal 15 Januari 2024 hingga 30 April 2024.

Pada tanggal 10 Maret 2024, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 untuk Proyek CUCL. Melalui *Supplement Agreement* ini, Proyek CUCL diperpanjang hingga tanggal 31 Agustus 2024 dan mendapatkan tambahan nilai kontrak sebesar Rp1.614 miliar (setara dengan USD105 ribu).

Pada tanggal 18 Juni 2024, PT Freeport Indonesia telah menerbitkan LNTP kepada FPJO untuk menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi di SAG2. Nilai LNTP ini adalah Rp25,9 miliar (setara dengan USD1,6 juta) dan berlaku hingga ditandatanganinya *Supplement Agreement* untuk pekerjaan ini.

Bagian PTRO, Entitas Anak dalam kerja sama ini secara keseluruhan adalah 40% sehubungan dengan *Mill Optimization for Underground Ores Project* untuk PT Freeport Indonesia. Grup berhak atas proporsional bagian dari penghasilan konstruksi dan rekayasa yang diterima dan menanggung bagian proporsional dari biaya operasi bersama.

Ringkasan keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

Keterangan	(dalam ribuan USD)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah aset	47.046	31.658
Jumlah liabilitas	48.071	30.240
Jumlah pendapatan	161.796	66.040
Jumlah beban	154.289	62.307

13. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan hasil uji tuntas, Perseroan tidak memiliki asuransi apa pun karena tidak ada keperluan untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan atas kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan.

14. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga, atau sedang dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi, baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini.

15. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah tabel kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan, berupa merek:

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Merek	Kelas	Etiket Merek
	IDM001104727	26 Oktober 2022	Petrindo + logo	37	
	IDM001104576	26 Oktober 2022	TP + logo	37	

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan induk (*holding*) yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan energi melalui Perusahaan Anak. Perseroan merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk.

Melalui Perusahaan Anak, Perseroan memiliki beberapa konsesi tambang seperti batu bara termal, metalurgi, emas, perak, tembaga, dan pasir silika. Konsesi-konsesi tersebut berada di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2024, Perseroan mengakuisi PTRO dan menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan sebesar 41.52% pada Desember 2024. Melalui PTRO, Perseroan menjalankan usaha dibidang jasa tambang meliputi kontraktor pertambangan, rekayasa konstruksi dan penyedia jasa logistik dan pendukung lainnya untuk minyak dan gas.

Selain itu, melalui Perusahaan Anak lainnya, Perseroan juga menjalankan usaha sebagai penyedia pengangkutan produk (*barging*), penyedia fasilitas *intermediate stockpile* (ISP), port dan jalan transportasi (*hauling road*) yang dapat digunakan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga.

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral yang terintegrasi dengan menciptakan pertumbuhan dan nilai yang berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- (1) Tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Menyediakan produk dan layanan yang dapat diandalkan oleh pelanggan dan menjaga dampak lingkungan seminimal mungkin.
- (3) Menciptakan pertumbuhan
- (4) Menciptakan pertumbuhan *value-added* dan berkelanjutan
- (5) Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat setempat dan pertumbuhan Indonesia.

2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Pada bulan Februari 2024, Perseroan telah melakukan penyelesaian pengambilalihan saham PTRO melalui KJP dengan kepemilikan sebesar 34% dan menjadi Pemegang Saham Pengendali. Selanjutnya, Perseroan juga telah menyelesaikan Akuisisi saham MUTU dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Pada bulan Februari 2024, Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas term loan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan plafon sebesar Rp400.000.000.000. dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perseroan.

Pada bulan April 2024, Perseroan, melalui KJP, telah melakukan penyelesaian proses *mandatory tender offer*.

Pada bulan Mei 2024, Perseroan membeli 99,99% saham PT B4. Melalui PT B4, Perseroan memiliki 70% kepemilikan atas PT B3.

Pada bulan Juni 2024, Perseroan telah melakukan Peningkatan kepemilikan saham PTRO melalui KJP menjadi 41,52%.

Pada bulan Agustus 2024, Perseroan mendapatkan penambahan fasilitas kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp775.000.000.000 dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perseroan.

Pada bulan September 2024, Perseroan juga mendapatkan Fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") bersifat *non-revolving and committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp700.000.000.000 dengan keperluan untuk memenuhi *Cashflow Gap* Perseroan.

Pada bulan November 2024, Perseroan membeli 99,99% saham BBK. Melalui BBK, Perseroan memiliki 80% kepemilikan atas IBP.

Pada bulan Desember 2024, Perseroan mendapatkan penambahan fasilitas kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp775.000.000.000. Selanjutnya, pada bulan yang sama, BNI telah memberikan beberapa fasilitas (A, B dan C) kepada ESE dan DBK, Entitas Anak Perseroan, sebesar USD150,2 juta. Fasilitas-fasilitas ini ditujukan untuk mendukung biaya proyek DBK.

3. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut, Perusahaan Anak memiliki beberapa wilayah usaha pertambangan berdasarkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat, dengan luas 71.524 hektar dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) di Kalimantan Tengah, dengan luas 24.970 hektar.

Wilayah izin usaha pertambangan dari Perusahaan Anak berdasarkan jenis produk dan statusnya :

No	Perusahaan Anak	Luas Area (Ha)	Provinsi	Tipe Produk	Status	IUP Periode	IUP Status
1.	TP	9.540	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	02-Oct-31	IUP OP
2.	MUTU	24.970	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Produksi	03-May-39	PKP2B
3.	PT B3	3.918	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	17-Mar-35	IUP OP
4.	IBP	5.000	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	20-Jun-32	IUP OP
5.	CEP	4.776	Kalimantan Timur	Batu bara Termal	Produksi	22-Jul-38	IUP OP
6.	BI	14.990	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Pengembangan	17-Jun-29	IUP OP
7.	DBK	14.800	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Pengembangan	17-Jun-29	IUP OP
8.	INTAM	18.500	Nusa Tenggara Barat	Emas, Perak & Tembaga	Eksplorasi	21-Oct-35	IUP OP
9.	SSJ	461	Kalimantan Timur	Pasir silika	Studi Kelayakan	-	Proses WIUP

Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara

Berikut ini adalah tabel sumber daya dan cadangan batu bara yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

Sumber daya

Informasi berikut adalah estimasi sumber daya batu bara Perusahaan Anak yang diklasifikasikan dalam Sumber daya Terukur (*Measured*), Tertunjuk (*Indicated*), dan Tereka (*Inferred*) disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Perusahaan	Lokasi	Sumber Daya / Resources (juta ton)				Status
			<i>Inferred</i> (Tereka)	<i>Indicated</i> (Tertunjuk)	<i>Measured</i> (Terukur)	Total	
1.	TP	Kalimantan Tengah	4,14	10,55	45,56	60,25	JORC
2.	MUTU	Kalimantan Tengah	23,51	26,83	44,48	94,83	JORC, SNI, KCMI
3.	PT B3	Kalimantan Tengah	38,63	3,42	22,8	64,85	JORC
4.	CEP	Kalimantan Timur	34,38	57,95	42,2	134,53	JORC, FS 2022
5.	BI	Kalimantan Tengah	7,60	4,00	15,7	27,30	JORC
6.	DBK	Kalimantan Tengah	105,20	65,10	55,80	226,10	JORC

Cadangan Batu Bara

Informasi berikut adalah cadangan batu bara Perusahaan Anak yang diklasifikasikan dalam Cadangan Terbukti (*Proved*) dan Terkira (*Probable*) ditampilkan dalam tabel berikut ini:

No	Perusahaan	Lokasi	Cadangan / Reserves (juta ton)			Status
			<i>Probable</i> (Terkira)	<i>Proved</i> (Terbukti)	Total	
1.	TP	Kalimantan Tengah	1,99	3,6	5,59	JORC
2.	MUTU	Kalimantan Tengah	3,40	13,64	17,04	JORC, SNI, KCMI
3.	PT B3	Kalimantan Tengah	3,54	0,3	3,83	JORC
4.	CEP	Kalimantan Timur	37,26	35,67	72,93	JORC, FS 2022
5.	BI	Kalimantan Tengah	3,00	13,9	16,9	JORC
6.	DBK	Kalimantan Tengah	51	48,5	99,5	JORC

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Keunggulan Kompetitif Perusahaan

- Manajemen dengan Rekam Jejak Yang Telah Terbukti dan Tim yang Berpengalaman.** Perseroan dikelola oleh tim manajemen dan ahli pertambangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti di dunia pertambangan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan.
- Fundamental Keuangan yang Kuat** didukung oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yg berkesinambungan, dan posisi neraca yang kuat.
- Diversifikasi di Berbagai Sektor dan Jenis Mineral** membantu mengurangi risiko di masa depan dan menghadapi fluktuasi pasar dan menciptakan rantai pasokan yang terintegrasi. Perseroan juga memiliki Portfolio klien yang terdiversifikasi yang beragam dan klien-klien *blue-chip* yang menegaskan kehadiran pasar dan keandalan bisnis Perseroan.
- Kepedulian Terhadap Lingkungan dan masyarakat setempat.** Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan sejumlah kegiatan dengan upaya untuk meningkatkan masyarakat setempat, serta tetap berusaha untuk beroperasi maksimal mungkin agar bisa menghasilkan produk yang dapat dipercaya oleh pelanggan dengan dampak lingkungan seminimal mungkin.

- e. **Integrasi berkelanjutan antar Perseroan dan Anak Perusahaan** mencakup hulu (eksplorasi sumber daya dan operasional pertambangan) hingga hilir (pengolahan jasa tambang, EPC, penyediaan jasa logistik, dan pengembangan infrastruktur) untuk memastikan efisiensi biaya, sinergi operasional, dan keberlanjutan jangka panjang.
- f. **Sinergi dengan Barito Group** untuk membuka jaringan ekspansi bisnis baru terutama dalam sektor energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (*renewable energy*). Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang.
- g. **Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali** melalui penyuntikan modal untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis Perseroan sejak didirikan pada tahun 2008.
- h. **Dukungan Keuangan dari Pihak Perbankan** untuk mendukung ekspansi bisnis dan kebutuhan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Keunggulan Kompetitif Perusahaan Anak

- a. **Cadangan Mineral yang besar dan Terdiversifikasi.** Perseroan memiliki cadangan batu bara yang besar dengan *calorific value* yang tinggi di *thermal coal* dan *metalurgical coal*, serta potensi cadangan-cadangan mineral lainnya sebagai sumber utama pertumbuhan.
- b. **PTRO sebagai Perusahaan Anak Baru, Memberikan Kontribusi Arus Kas yang Stabil.** PTRO sebagai kontraktor pertambangan yang melayani perusahaan pertambangan *blue-chip* sebagai klien, memiliki basis pendapatan yang stabil dengan kisaran jangka waktu kontrak yang cukup panjang, dari 5 hingga 15 tahun.

5. Pengendalian Mutu

Prosedur kontrol kualitas anak perusahaan digunakan untuk memastikan batu bara Perusahaan Anak memenuhi persyaratan spesifikasi yang terkandung dalam kontrak jual beli. Kelembaban, kadar abu, zat terbang, sulfur total, dan distribusi ukuran partikel hanyalah beberapa metrik yang dapat diukur oleh laboratorium *surveyor* independen untuk melacak kualitas batu bara milik Perusahaan Anak.

6. Pemasaran

Produk Komoditas

Perseroan menerapkan strategi penjualan yang terdiversifikasi dan berorientasi terhadap dinamika *supply/demand* dipasar, terutama untuk ekspor berdasarkan skema pembayaran yang menguntungkan dan harga optimal guna memaksimalkan pendapatan. Perseroan secara aktif mempercepat penetrasi ke negara-negara pengimpor di Asia dan Eropa untuk mendiversifikasi penjualan serta memperluas basis pasar.

Dalam upaya mencapai target pemasaran, beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Mempromosikan keunggulan kompetitif Perseroan dan Perusahaan Anak khususnya dalam hal kualitas dan keandalan produk, kedekatan geografis, integrasi dengan rantai pasokan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dan memperkuat positioning Perseroan dan Perusahaan Anak di pasar.
- b. Melakukan pengiriman sampel untuk dianalisis oleh calon pembeli dan laboratorium independent sebagai referensi teknis oleh tenaga ahli untuk meyakinkan pelanggan dan calon pelanggan.
- c. Memperkenalkan produk Perseroan dan Perusahaan Anak partisipasi aktif pada acara dan publikasi nasional dan internasional.
- d. Menjalin kerja sama yang baik dengan *trader* yang memiliki reputasi yang baik dalam perdagangan komoditi, serta *trader* yang memiliki akses sebagai pemasok utama para *end user* (perusahaan pembangkit listrik, *smelter*, dan lainnya).

Jasa Tambang

Perseroan dan Perusahaan Anak mencanangkan berbagai target pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat positioning Perseroan dan Perusahaan Anak. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk lini bisnis jasa tambang, adalah sebagai berikut:

- Melakukan implementasi strategi pemasaran berfokus pada diferensiasi produk dan jasa di setiap lini bisnis, khususnya dengan dukungan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform. Pasar yang menjadi sasaran adalah sektor pertambangan mineral dan batu bara serta minyak & gas bumi, dengan target perolehan kontrak-kontrak baru melalui pendekatan B2B atau *business to business*.
- Melakukan implementasi strategi komunikasi yang efektif dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh klien strategisnya. Lebih lanjut lagi, Perseroan dan Perusahaan Anak juga terus berinovasi melalui pengembangan *business model* yang dirancang khusus untuk keperluan setiap klien, dengan tujuan untuk memberikan *added value* serta memastikan terjadinya *customer satisfaction*.
- Melakukan promosi layanan pertambangan dan rekayasa dan konstruksi berinovasi dengan mengimplementasikan *technology integration & flexible business model*. Untuk mendukung inovasi tersebut, berbagai program *public relations* (“PR”) dilaksanakan, termasuk mengikuti berbagai seminar dan forum diskusi pertambangan serta rekayasa & konstruksi. Seluruh promosi dan PR program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan *awareness* publik dan pelaku pasar di dalam industri dimana Perseroan dan Perusahaan Anak berada.
- Melakukan komunikasi tentang komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap pelaksanaan GCG sebagai bagian integral dalam menjaga *trust & confidence* bagi seluruh pemangku kepentingan yang telah terbukti menjadi enabler dalam mendukung pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan lima pilar utama strategi bisnis:

- Diversifikasi Usaha.** Perseroan secara aktif mengeksplorasi aset tambang lainnya diluar Batu bara seperti emas, tembaga, dan pasir silika untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Termasuk juga menangkap peluang bisnis lain di sektor minyak, gas alam, dan infrastruktur lainnya sejalan dengan perkembangan industri yang ada.
- Ekspansi Sumber Daya Strategis.** Strategi eksplorasi berfokus pada keberlanjutan cadangan jangka panjang, sinergi dengan infrastruktur yang ada, serta optimalisasi kelayakan ekonomi khususnya ekspansi di Kalimantan Tengah, di mana beberapa lokasi tambang batu bara dapat berbagi aset infrastruktur lewat strategi “Project Clustering”.
- Integrasi Seluruh Lini Bisnis & Perusahaan Anak.** Model bisnis terintegrasi Perseroan dan Perusahaan Anak memungkinkan sinergi antar Perusahaan Anak, khususnya dalam bidang pengembangan proyek kolaboratif, memaksimalkan penggunaan infrastruktur bersama, pengembangan digitalisasi-inovasi bersama dan juga optimalisasi spesifikasi batu bara guna mencapai peningkatan nilai bagi Perseroan.
- Sinergi dengan Barito Group.** Sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam Barito Group, termasuk pengembangan proyek kolaboratif: untuk mendapatkan peluang pasar baru di berbagai sektor, termasuk energi, petrokimia, dan infrastruktur, yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru Perseroan ke depannya.
- Akuisisi Strategis.** Akuisisi strategis guna mencapai visi jangka panjang Perseroan menjadi perusahaan pertambangan terintegrasi dengan mengedepankan sinergi berkelanjutan antar Perusahaan Anak. Mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir.

8. Persaingan Usaha

Industri pertambangan batu bara, emas, mineral, konstruksi EPC, dan infrastruktur beroperasi di pasar yang dinamis dan terus berkembang. Pergerakan industri ini dipengaruhi oleh tren harga komoditas, dinamika permintaan dan pasokan global, efisiensi biaya produksi, serta kemajuan dalam keahlian teknis dan rekayasa. Petrindo aktif berpartisipasi di berbagai sektor ini, bersaing dengan pemain lokal maupun internasional. Lanskap pasar ini menekankan pentingnya posisi strategis dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan industri.

Batu Bara Termal: Sektor batu bara termal ditandai dengan persaingan antara produsen besar Indonesia dan pemasok global. Indonesia, Australia, dan Rusia mendominasi ekspor batu bara termal, dengan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena kedekatannya dengan pasar utama seperti Filipina, Jepang, Tiongkok, Korea, dan Taiwan.

Batu Bara Metalurgi: Pasar batu bara metalurgi lebih terkonsolidasi tetapi tetap dinamis karena pasokan global yang terbatas dan meningkatnya permintaan dari industri baja. Australia mendominasi sektor ini, tetapi dengan cadangan yang semakin menipis serta meningkatnya pembatasan lingkungan, pemasok alternatif seperti Indonesia mulai mendapatkan daya tarik.

Pertambangan Emas, Perak, dan Tembaga: Sektor pertambangan emas, perak, dan tembaga didominasi oleh perusahaan tambang multinasional dengan kemampuan eksplorasi dan pemurnian yang luas. Pasar ini sangat padat modal, membutuhkan investasi besar dalam eksplorasi, pengolahan, dan inisiatif keberlanjutan.

Jasa kontraktor pertambangan dan rekayasa konstruksi: Sektor ini berkembang pesat dengan kehadiran perusahaan jasa teknik dari dalam dan luar negeri yang menawarkan layanan rekayasa, konstruksi, dan pengadaan khusus untuk proyek tambang, energi, dan infrastruktur.

Jasa Infrastruktur & Pendukung lainnya: Sektor infrastruktur dan pendukung komoditas tambang sangat dinamis, dengan perusahaan bersaing berdasarkan efisiensi biaya, keandalan, serta akses ke pelabuhan.

9. Prospek Usaha

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor ("DHE"). Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- (i) Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional ("IEA") memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.
- (ii) Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan *resilience* di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil. Ini dikarenakan oleh harga batu bara metalurgi dan harga batu bara termal tidak selalu berkorelasi satu sama lain, dan harga batu bara metalurgi cenderung lebih tinggi dari harga batu bara termal, yang mengakibatkan adanya *margin buffer* tambahan untuk produk batu bara metalurgid.

- (iii) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung. Kebijakan Harga Batu bara Acuan (“HBA”) yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- (iv) Penarikan diri sebagian besar negara dari *Just Energy Transition Partnership* (JETP) termasuk Amerika Serikat. Pendekatan baru dan lebih praktis oleh negara-negara besar (termasuk AS) terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis, menghambat implementasi energi terbarukan. Hal ini juga telah menyebabkan kenaikan harga batu bara karena potensi peningkatan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.

Tabel dibawah adalah prediksi konsumsi penggunaan batu bara sampai dengan tahun 2025 yang dikutip oleh IEA.

Coal Consumption 2020-2025 based on IEA data						
<i>(000,000 ton)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Thermal Coal						
China	3,222	3,410	3,810	4,146	4,219	4,244
India	875	990	1,090	1,173	1,241	1,284
United States	420	491	440	371	354	335
Rest of The Word	1,839	1,909	1,989	1,900	1,881	1,882
World	6,356	6,800	7,329	7,590	7,695	7,745
Metallurgical Coal						
China	749	720	718	737	720	696
India	56	66	72	72	74	79
United States	13	17	15	15	14	16
Rest of The Word	282	303	281	273	268	265
World	1,100	1,106	1,086	1,097	1,076	1,056
Total						
China	3,971	4,130	4,528	4,883	4,939	4,940
India	931	1,056	1,162	1,245	1,315	1,363
United States	433	508	455	386	368	351
Rest of The Word	2,121	2,212	2,270	2,173	2,149	2,147
World	7,456	7,906	8,415	8,687	8,771	8,801

Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China.

Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan, maka Perseroan juga akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan kedepannya.

10. Riset dan Pengembangan

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dan Perusahaan Anak dirancang secara terstruktur untuk memaksimalkan potensi sumber daya, memastikan keunggulan kompetitif, mendukung implementasi strategi Perseroan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan difokuskan untuk mendukung kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara berkelanjutan melakukan riset dan pengembangan khususnya untuk area-area dibawah ini:

- a. Pengembangan yang mendukung diversifikasi komoditas Perseroan diluar batu bara. Hal ini dibutuhkan mengurangi ketergantungan Perseroan pada batu bara, sekaligus membuka sumber pendapatan baru khususnya untuk memastikan Perseroan berkembang sejalan dengan tren pasar industri masa depan dan energi terbarukan. Sebagai contoh:
 - Perseroan secara aktif mengeksplorasi aset emas, tembaga, dan pasir silika untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka Panjang.
 - Eksplorasi emas dan tembaga INTAM berfokus pada mineral industri dengan permintaan tinggi.
 - Ekspansi pasir silika SSJ selaras dengan permintaan global untuk semikonduktor, kaca, dan panel surya.
- b. Pembangunan Infrastruktur yang Terarah di Kalimantan Tengah sehingga dapat disinergikan dengan lokasi tambang dan infrastruktur bersama yang sudah ada seperti (i) jalan dan pelabuhan milik TP, MUTU, dan DBK untuk mengurangi biaya transportasi (ii) *Intermediate stockpiles* (ISP) untuk mengoptimalkan pencampuran batu bara dan manajemen persediaan.
- c. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara strategis melakukan penelitian untuk area-area baru yang memiliki potensi masa depan, terutama untuk area yang memiliki potensi akuisisi strategis.
- d. Penelitian untuk pengembangan digitalisasi dalam seluruh aspek operational Perseroan dan Perusahaan Anak. Sebagai contoh, PTRO sebagai Perusahaan Anak berinvestasi dalam platform digital seperti Minerva untuk meningkatkan efisiensi operasional *mining* dan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data *real time* di lapangan melalui *dashboard* yang dapat diakses dimana pun terutama di kantor pusat.
- e. Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsisten mengembangkan sistem untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menjunjung tinggi kualitas barang yang dihasilkan dalam rangka menambah nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif Perusahaan Anak.

11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perusahaan Anak yang berhubungan dengan kepemilikan tambang dan penjualan hasil-hasil tambang dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan musim seperti tingginya curah hujan yang dapat mengganggu aktivitas penambangan. Selanjutnya, sektor pertambangan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran komoditas global dan juga secara langsung terpapar naik turunnya harga komoditas.

Namun, kegiatan usaha Perusahaan Anak yang berhubungan dengan jasa tambang meliputi kontraktor pertambangan dan rekayasa konstruksi dan juga jasa infrastruktur dan pendukung lainnya, memiliki aliran proyek yang lebih stabil terlepas dari fluktuasi harga pasar jangka pendek akibat dari:

- (i) Kontrak jangka panjang. Kontrak-kontrak ini memberikan pendapatan yang stabil dan kepastian bisnis, memungkinkan kontraktor untuk fokus pada efisiensi operasional dan kualitas layanan tanpa tekanan langsung dari perubahan pasar, sehingga memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bahkan di tengah ketidakstabilan harga.
- (ii) Kontrak juga sering sekali mencakup tarif layanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa, terlepas dari fluktuasi harga komoditas, pendapatan kontraktor tetap relatif konsisten, melindungi mereka dari volatilitas yang dihadapi oleh pemilik tambang.
- (iii) Hubungan yang baik dengan perusahaan tambang *blue-chip*.

Sehingga secara garis besar, diversifikasi kegiatan usaha dan pendapatan membantu menurunkan resiko musiman dan fluktuasi pasar jangka pendek bagi Perseroan.

12. Corporate Social Responsibility ("CSR")

Pada tahun 2024, Perseroan bersama Perusahaan Anak, yaitu TP, MUTU dan PTRO mengikuti program "*Sustainability Best Practices Journey*" yang dilaksanakan oleh Yayasan Bakti Barito. Tujuan dari program tahunan ini adalah untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar departemen Corporate Social Responsibility (CSR) di perusahaan yang tergabung di dalam Barito Group.

Kegiatan CSR Perseroan dilakukan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ("PPM") yang dibagi ke dalam delapan pilar atau program utama yang meliputi bidang:

1. Pendidikan
Perseroan dan Perusahaan Anak fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan moral, serta pembentukan karakter, termasuk upaya memfasilitasi keterampilan dan keahlian dasar bagi masyarakat.
2. Kesehatan
Mendukung *Sustainable Development Goals* ("SDGs") nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sekaligus mendukung Program Indonesia Sehat.
3. Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan
Ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
4. Kemandirian Ekonomi
Mendukung kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
5. Sosial Budaya
Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat dalam sejumlah kegiatan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana.
6. Lingkungan
Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat langsung dalam berbagai upaya untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.
7. Pembentukan Lembaga Komunitas
Pembentukan lembaga komunitas untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan.
8. Infrastruktur
Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan dukungan infrastruktur vital bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Pada sisi kinerja sosial, sepanjang tahun 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan berbagai program CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung pencapaian SDGs, di antaranya:

Melalui TP, Perseroan melaksanakan 12 program CSR, di antaranya program Bantuan Bakti Kesehatan berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 215 orang, penyediaan sarana & prasarana sumber air bersih untuk Desa Muara Inu, Desa Hurung Enep dan Desa Malawaken, serta renovasi fasilitas umum berupa perbaikan 1 jembatan sungai Lontar, 13 km jalan Desa Rahaden dan 2 rumah ibadah masyarakat lokal.

Melalui MUTU, Perseroan melaksanakan 47 program CSR, di antaranya pemberian bantuan beasiswa bagi 282 siswa berprestasi di 19 sekolah, pemberian makanan tambahan bagi 27.754 anak melalui 46 posyandu dan pemberian bantuan sarana sekolah bagi dua sekolah.

Sedangkan melalui PTRO, Perseroan melaksanakan 34 program CSR, di antaranya program peningkatan kapasitas guru berupa pelatihan Kurikulum Merdeka Mengajar bagi 17 guru SMP di daerah Timika dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan jumlah sampah mencapai 44,9 ton. Selain itu, PTRO juga memberikan beasiswa kepada 130 siswa tingkat SMP dan SMA di sekitar kantor pusat.

Dari sisi kinerja lingkungan, Perseroan terus berupaya untuk mengelola dan mengurangi emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional dengan menggunakan bahan bakar biodiesel B35 yang lebih ramah lingkungan dan memanfaatkan teknologi terkini melalui Minerva Digital Platform dari Perusahaan Anak, PTRO. Di samping itu, PTRO terus melaksanakan berbagai upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi sehingga berhasil menurunkan emisi (Cakupan 1 dan 2) sebanyak 17,34% dibandingkan *baseline year* 2023.

Informasi rinci mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersedia dalam Laporan Keberlanjutan 2024 yang terpisah dari Laporan Tahunan.

13. Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup

Perusahaan tambang harus memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan apabila melakukan kegiatan pertambangan di daerah hutan. Perusahaan Anak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nomor	Tanggal	Periode	Luas Wilayah (Hektar)	Lokasi
1.	TP	SK.349/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2018	13 Agustus 2009	13	990	Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.	DBK	SK.868/Menhut-II/2014	29 September 2014	17	3.324	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
3.	BI	SK.371/Menhut-II/2010	22 Juni 2010	15	1.580	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
4.	MUTU	SK.819/Menhut-II/2013	19 November 2013	14	3.115	Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

Selain itu juga terdapat peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi. Perseroan dan Perusahaan Anak dalam hal ini berusaha untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah.

Sampai saat ini, tidak terdapat permasalahan hukum material terkait lingkungan hidup yang berdampak pada kelangsungan operasional maupun penggunaan aset tetap Perseroan.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berupa:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;

Tidak dikenakan pemotongan Pajak Final atas bunga Obligasi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, IMBAL HASIL WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 kepada Masyarakat sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)			%
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	20.000.000.000	1.100.000.000	21.100.000.000	3,25
2.	PT BCA Sekuritas	3.915.000.000	190.025.000.000	193.940.000.000	29,84
3.	PT BNI Sekuritas	-	78.000.000.000	78.000.000.000	12,00
4.	PT Henan Putihrai Sekuritas	33.300.000.000	147.000.000.000	180.300.000.000	27,74
5.	PT Indo Premier Sekuritas	6.785.000.000	32.575.000.000	39.360.000.000	6,05
6.	PT Sucor Sekuritas	16.700.000.000	62.800.000.000	79.500.000.000	12,23
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	16.800.000.000	41.000.000.000	57.800.000.000	8,89
Total		97.500.000.000	552.500.000.000	650.000.000.000	100,00

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)			%
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	-	15.200.000.000	15.200.000.000	4,34
2.	PT BCA Sekuritas	1.095.000.000	38.180.000.000	39.275.000.000	11,22
3.	PT BNI Sekuritas	1.100.000.000	17.000.000.000	18.100.000.000	5,17
4.	PT Henan Putihrai Sekuritas	39.200.000.000	113.000.000.000	152.200.000.000	43,49
5.	PT Indo Premier Sekuritas	5.000.000	26.620.000.000	26.625.000.000	7,61
6.	PT Sucor Sekuritas	5.600.000.000	57.100.000.000	62.700.000.000	17,91
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	5.500.000.000	30.400.000.000	35.900.000.000	10,26
Total		52.500.000.000	297.500.000.000	350.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan untuk Obligasi dan Sukuk Wakalah ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga dan Imbal Hasil Wakalah

Tingkat Bunga Obligasi dan Imbal Hasil Wakalah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Wakalah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan global BDO)**
Prudentia Tower, 17th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 79
Jakarta 12910 - Indonesia

Telepon : (021) 5795 7300
Faksimili : (021) 5795 7301
Nama Rekan : Martinus Arifin, SE.,AK., CA., CPA
STTD No. : STTD.AP-224/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.4011
Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penugasan : P2304/SSF/A24/329/12-24

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **TnP Law Firm**
Satrio Tower Lantai 15
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4

Telepon : 021 22513653
Nama Rekan : Rambun Tjajo, S.H.
STTD No. : STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 12 Desember 2023
Keanggotaan Asosiasi : HKHPM
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/ HKHPM/ XI/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/ HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan : Surat Ref. No. 040/TnP-RT-KY/II/2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980

Website : www.btn.co.id
 Telepon : (021) 50931835
 STTD No. : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Surat Penunjukan : 001/PJK/LGL/I/2025 tanggal 24 Januari 2025

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, BTN selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, BTN:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
2. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Pemegang Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; dan/atau
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

Notaris : **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**
 Komplek Taman Gandaria No. 11 A
 Jakarta 12420
 Indonesia

Telepon : (+62 21) 2912 5500
 STTD No. : STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 0539819800414
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan : 001A/PJK/LGL/I/2025 tanggal 24 Januari 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta antara lain Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
 Equity Tower Lantai 30
 Sudirman Central Business District, Lot.9
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190

Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penasehat Investasi kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
 Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.

Tugas utama Pemeringkat Efek yaitu mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi dan Sukuk Wakalah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0075/DSN-MUI/II/2025 tanggal 6 Sya'ban 1446 H bertepatan dengan 5 Februari 2025, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Tri Meryta	Anggota	KEP-11/PM.021/PJ-ASPM/2024

Tim Ahli Syariah tersebut telah memiliki izin sebagai ASPM. Berikut ini ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Wakalah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Wakalah;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Wakalah; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Wakalah apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 juncto Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 & Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan ini. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.

BTN dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan ini telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPPSK. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Wakalah antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 216/FICD/FS/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak mewakili hubungan Kredit dengan Perseroan;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Pemegang Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.
- Surat pernyataan No. 215/FICD/FS/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 217/FICD/FS/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, maka Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara terbuka atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pendirian BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.09.0205085 tanggal 24 April 2025 ("Akta No.40").

2. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2025-1759 tanggal 2 Juni 2025 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna: Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN terakhir sesuai Akta No.40 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suryo Utomo*)
Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo*)
Komisaris Independen : Ida Nuryanti*)
Komisaris : Fahri Hamzah*)
Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh*)
Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*)

Direksi:

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Hirwandi Gafar**)
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	: Eko Waluyo
Direktur <i>Risk Management</i>	: Setiyo Wibowo
Direktur <i>Operations</i>	: I Nyoman Sugiri Yasa*)
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	: Venda Yuniarti*)
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	: Rully Setiawan*)
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Helmy Afrisa Nugroho*)
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Hermita*)
Direktur <i>Information Technology</i>	: Tan Jacky Chen*)

Keterangan :

*) Direksi dan Komisaris yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**) Direksi yang memiliki pengetahuan, membidangi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha dibidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu:

Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

Misi :

- Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;
- Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;
- Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
- Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
- Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "*Milenial*", sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign* yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan new aplikasi *mobile banking* BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **Bale by BTN** serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang ABF *Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence 2024* yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation*, *Best ESG Reporting & Transparency*, *Best Sustainable Finance Leadership*, dan *Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards (EIA) 2024* dan lain-lain.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN Memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan *Smart Branch* BTN serta *Digital Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program Pemerintah terkait perumahan, konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkuat pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *Wealth Management*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (Hijrah To Syariah) *for Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Konvensional, Syariah atau Sukuk, Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), Obligasi Berwawasan Lingkungan & Sosial atau Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bond*) dan Surat Berharga Perpetual:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN *Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

- Jaringan Perbankan Syariah :
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, tetapi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

- Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan RUPSW dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO dan RUPSW sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan
- Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi dan Sukuk telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Dana Modal Investasi, Bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah termasuk Denda (jika ada) dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;

- b. Obligasi dan Sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
- c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi dan Sukuk; atau
- d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas dan setara kas	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	4.661.104	30.561.122
Efek-efek- neto	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	302.352.171	282.392.324
Pembiayaan/piutang syariah – neto	42.563.574	35.713.853
Tagihan Derivatif	102.843	32.176
Tagihan akseptasi	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	4.205.664	3.235.046
TOTAL ASET	469.614.502	438.749.736
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.644.422	3.277.514
Simpanan dari nasabah	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	70.035	91.312
Efek-efek yang dijual dg janji dibeli kembali	3.409.426	-
Liabilitas akseptasi	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	647.496
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.372.168	2.951.848
Pinjaman subordinasi	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	407.794.597	381.164.489
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	29.248.016	27.106.095
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900
Opsi saham	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(1.107.982)	(769.001)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(424.015)	(560.339)
Arus kas	(44.082)	(32.346)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	15.982.004	13.181.214
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.164.069	3.657.72
TOTAL EKUITAS	32.571.889	30.479.152
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	469.614.502	438.749.736

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	29.541.592	28.281.252
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(18.048.940)	(14.850.962)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	214	249

9. Informasi Mengenai Wali Amanat

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Telepon : (021) 50931835
 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
 Website : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSW). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSW yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang sudah dibubuhi nomor formulir FPPO dan/atau formulir FPPSW atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSW yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSW serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Wakalah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah. Obligasi dan Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 Juli 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Wakalah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSW, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSW dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSW dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSW;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSW selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSW yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 2 Juli 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2025 pada rekening berikut:

Obligasi		Sukuk Wakalah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas	Bank Nano Syariah
	Cabang: KFO Thamrin	Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro
	No. Rekening: 0055054347	No. Rekening: 9930048938
	Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

	Obligasi	Sukuk Wakalah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang: Thamrin No. Rekening: 2063535222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0012012019 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 8999998875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 0062226667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040005728006 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas	CIMB Niaga Syariah Cabang: Millenium Centennial Center No. Rekening: 860012283200 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 1040004430455 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040001016752 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00702598753 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 04001763984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 00970613161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 4 Juli 2025 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Wakalah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Imbal Hasil Wakalah dari masing-masing seri Sukuk Wakalah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 1 Juli 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH / PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Website: www.bnisekuritas.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website: www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 30 Juni 2025

Ref. No. 466/TnP-RT/VI/2025

Kepada Yang Terhormat,

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Gedung Wisma Barito Pacific, Lantai 3B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

U.p. : Direksi

**Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK WAKALAH
PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum TnP Law Firm ("**TnP**"), dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHSK**") dengan Nomor 98037, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 040/TnP-RT-KY//2025 tertanggal 21 Januari 2025, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target dana yang dihimpun secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target Sisa Imbalan Wakalah secara keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000 sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I**").

PSH ini menggantikan PSH yang telah diberikan sebelumnya dengan Ref. No. 447/TnP-RT/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I tersebut, Perseroan akan:

1. menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp650.000.000.000 ("**Obligasi**"), yang terdiri dari 2 seri, yaitu seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
 - (a) Seri A: sebesar Rp97.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu 367 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; dan

- (b) Seri B: sebesar Rp552.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi,

pembayaran masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo (secara bersama-sama disebut sebagai “**PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025**”);

2. menerbitkan dan menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan Sisa Imbalan Wakalah sebesar Rp350.000.000.000 (“**Sukuk Wakalah**”), yang terdiri dari 2 seri, yaitu seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah dana modal investasi. Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Wakalah yang dikehendaki sebagai berikut:

- (a) Seri A: sebesar Rp52.500.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp3.543.750.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 367 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; dan
- (b) Seri B: sebesar Rp297.500.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp26.775.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi,

pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri Sukuk Wakalah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah dana modal investasi pada saat jatuh tempo (secara bersama-sama disebut sebagai “**PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025**”).

PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, secara bersama-sama disebut “**PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I**”.

PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku para penjamin pelaksana emisi dan para penjamin emisi obligasi dalam PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I (“**Para Penjamin Pelaksana Emisi**”). Untuk PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I ini, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat (“**Wali Amanat**”).

Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 54 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 19 tertanggal 10 April 2025, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 109 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

No. 159 tertanggal 25 Juni 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"**);

2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 55 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 20 tertanggal 10 April 2025, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 112 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 163 tertanggal 25 Juni 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah"**);
3. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 50 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 15 tertanggal 10 April 2025, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 107 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 157 tertanggal 25 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi"**);
4. Akta Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 51 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 16 tertanggal 10 April 2025, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 110 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 161 tertanggal 25 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah"**);
5. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 52 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana diubah melalui (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 17 tertanggal 10 April 2025, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 108 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 158 tertanggal 25 Juni 2025, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Obligasi, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**);
6. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 53 tertanggal 13 Maret 2025 sebagaimana melalui dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 18 tertanggal 10 April

2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 111 tertanggal 20 Mei 2025, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 162 tertanggal 25 Juni 2025, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah"**);

7. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 56 tertanggal 13 Maret 2025 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"**);
8. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 57 tertanggal 13 Maret 2025 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah"**);
9. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 160 tertanggal 25 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta Pengakuan Utang"**); dan
10. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 No. 164 tertanggal 25 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah"**),

Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **"Perjanjian PUB Tahap I"**.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Februari 2025.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI atas permohonan pencatatan berdasarkan Surat No. S-04702/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil:

1. PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada salah satu Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, biaya pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	: Perjanjian Pinjaman No. 206/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025

Rincian		Keterangan
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman maksimum sebesar Rp 650.000.000.000
Tingkat Bunga	:	Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	:	Per 3 bulan
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pelunasan atas pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	:	a. Pernyataan Pendaftaran PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK; b. Perseroan telah efektif menerima dana dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur Persyaratan Pelunasan	dan :	1. Pembayaran kembali pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pinjaman. 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman. 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh pinjaman. 4. Bilamana MUTU tidak membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu

Rincian	Keterangan
	dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus.

Sifat Hubungan : MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan
Afiliasi yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

2. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada salah satu Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, biaya pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah hasil PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan di atas telah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	: Akad Pembiayaan Mudharabah No. 207/PJK/FIN/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025
Fasilitas Pembiayaan	: Dana maksimum sebesar Rp 350.000.000.000,-
Tingkat Bagi Hasil	: Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	: Setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal (<i>ra's al-mal</i>).
Jatuh Tempo	: MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Dana	: Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pembiayaan	: a. Pernyataan Pendaftaran PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

Rincian	Keterangan
	oleh Perseroan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK; b. Perseroan telah efektif menerima dana dari PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025; c. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan : Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah. 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah. 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah. 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
Sifat Hubungan : Afiliasi	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok obligasi dan pembayaran kembali dana modal investasi sukuk wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

(“Rencana Penggunaan Dana”).

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015 Perseroan wajib:

- (a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi atau sukuk wakalah kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah; dan
- (b) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah. Perseroan wajib menyampaikan hasil rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah paling lambat 2 hari kerja setelah penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi atau sukuk wakalah.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT:

“Anggaran Dasar” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

“Bapepam-LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana digantikan oleh OJK yang pendirian dan penyelenggaraannya diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK;

“BPJS” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

“Dewan Komisaris” berarti dewan komisaris dari suatu PT;

“Direksi” berarti direksi dari suatu PT;

“HKHSK” berarti Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan;

“Hukum Indonesia” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

“KBLI” berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

“LUT” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang memuat hasil Uji Tuntas TnP, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHSK dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas;

“Menkumham” atau **“Menkum”** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

“Peraturan No. IX.J.1” berarti Peraturan No. IX.J.1, sebagaimana yang dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;

“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan dari OJK untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan Tanggal LUT, kecuali yang terkait dengan (a) pemeriksaan terhadap Anggaran Dasar hanya merujuk kepada Anggaran Dasar pada saat pendirian dan perubahan terakhir dan (b) pemeriksaan saham dan struktur permodalan hanya untuk 2 tahun terakhir;

“Perizinan Operasional” berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan;

“Perizinan Umum” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perpres No. 13/2018” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi, sebagaimana diimplementasikan oleh Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi;

“Perusahaan Anak” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia serta perusahaan-perusahaan yang aktif beroperasi atau keberadaannya bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang dalam hal ini adalah:

- (1) PT Tamtama Perkasa (**“TP”**);
- (2) PT Mareta Persada (**“MP”**);
- (3) PT Equator Sumber Energi (**“ESE”**);
- (4) PT Armada Maritim Persada (**“AMP”**);
- (5) PT Multi Tambangjaya Utama (**“MUTU”**);
- (6) PT Kreasi Jasa Persada (**“KJP”**),
- (7) PT Borneo Bangun Banua Bestari (**“PT B4”**),
- (8) PT Borneo Berkat Kutai (**“BBK”**),
- (9) PT Intam (**“INTAM”**),
- (10) PT Bara Internasional (**“BI”**),
- (11) PT Daya Bumindo Karunia (**“DBK”**),

- (12) PT Petrosea Tbk (“**PTRO**”),
- (13) PT Karya Bhumi Lestari (“**KBL**”),
- (14) PT Kinarya Bangun Sesama (“**KBS**”),
- (15) PT Kuala Pelabuhan Indonesia (“**KPI**”),
- (16) PT POSB Infrastructure Indonesia (“**PII**”),
- (17) PT Kemilau Mulia Sesama (“**KMS**”),
- (18) PT Mahaka Industri Perdana (“**MIP**”),
- (19) PT Cristian Eka Pratama (“**CEP**”),
- (20) PT Borneo Bangun Banua (“**PT B3**”), dan
- (21) PT Intam Bumi Persada (“**IBP**”);

“**Pihak Terafiliasi**” berarti pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, dan “**Afiliasi**” berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM;

“**POJK**” berarti Peraturan OJK;

“**POJK No. 33/2014**” berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 34/2014**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 35/2014**” berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 36/2014**” berarti POJK No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;

“**POJK No. 30/2015**” berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

“**POJK No. 55/2015**” berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

“**POJK No. 56/2015**” berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

“**POJK No. 9/2017**” berarti POJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang;

“**POJK No. 15/2020**” berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

“**POJK No. 16/2020**” berarti POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

“**POJK No. 17/2020**” berarti POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan

Perubahan Kegiatan Usaha;

"POJK No. 42/2020" berarti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

"Prospektus" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I;

"PT" berarti Perseroan Terbatas;

"RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

"Standar HKHSK" berarti Standar Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHSK No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

"Surat Pernyataan Perseroan" berarti surat yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025;

"Tanggal LUT" berarti tanggal dikeluarkannya LUT, yaitu tanggal 30 Juni 2025;

"Tanggal Pendapat Hukum" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 30 Juni 2025;

"TBNRI" berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

"Uji Tuntas" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT;

"UU" berarti Undang-Undang;

"UU Cipta Kerja" berarti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

"UUP2SK" berarti UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

"UUPM" berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UUP2SK;

"UUPT" berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja; dan

"UUTK" berarti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. seluruh ruang lingkup dan pembatasan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (kecuali Perseroan dan Perusahaan Anak yang terhadapnya kami lakukan Uji Tuntas), semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dan material dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan dan bersifat material yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami untuk diperiksa oleh kami sampai dengan Tanggal LUT, dimana seandainya dokumen dan informasi yang tidak diberikan tersebut diketahui oleh kami, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap isi dan kesimpulan dari Pendapat Hukum ini;
3. seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam informasi tersebut beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. dokumen-dokumen yang mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut serta perubahan-perubahan, pengalihan, penunjukan pihak lainnya oleh pihak

tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak tersebut;

7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (antara lain, persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut;
8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
12. bahwa tidak ada pertimbangan yang telah diberikan sehubungan dengan pertanyaan apakah Perseroan atau Perusahaan Anak pernah mengalami kerugian sebesar 50% atau lebih dari total modal Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat mempengaruhi keberadaan Perseroan atau Perusahaan Anak sebagai badan hukum menurut Hukum Indonesia.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, serta diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008, TBNRI No. 29515 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selama Periode Uji Tuntas, anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 4 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal Perseroan ("**Akta Perseroan No. 23/2023**").

(Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Perseroan No. 23/2023, selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan adalah sah dan berlaku serta telah sesuai dengan UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 32/2015.

Akta pendirian Perusahaan Anak dan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan Anak telah sah dan berlaku sesuai dengan UUPT.

2. Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 23/2023, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp2.248.378.000.000

Modal Disetor : Rp2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 30.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp200 per lembar saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama 2 tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

3. Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan tertanggal 31 Mei 2025, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- / saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	84,966
2. Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%*	1.690.000.000	338.000.000.000	15,033
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.241.890.000	2.248.378.000.000	100
Saham Dalam Portepel	18.758.110.000	3.751.622.000.000	-

Sebagaimana yang juga telah diungkapkan dalam Prospektus, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan POJK No. 3/2021.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai Perpres 13/2018 adalah Prajogo Pangestu, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat tanggal 7 November 2022 yang telah dilaporkan ke sistem Menkumham pada tanggal 9 November 2022.

Susunan pemegang saham Perseroan di atas, sejak 2 tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat secara berkesinambungan dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Michael
Direktur	:	Daniel JR Lopez Laurente
Direktur	:	Diana Arsiyanti
Direktur	:	Kartika Hendrawan
Direktur	:	Lim Hendra Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Erwin Ciputra
Komisaris	:	Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris Independen	:	Henky Susanto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia, termasuk POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah memiliki:
 - (a) Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 55/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015;
 - (b) Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 35/2014;
 - (c) Kepala Unit Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015; dan

- (d) fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014 dan Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yakni aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah benar-benar menjalankan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami, kegiatan usaha Perusahaan Anak termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Perusahaan Anak dan telah sesuai dengan UUPT.

7. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang telah dijalankan secara komersial sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali TP dan MUTU yang belum memiliki izin persetujuan lingkungan untuk penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, dimana pada Tanggal Pendapat Hukum ini, TP sedang dalam tahap revisi dan validasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan khusus untuk MUTU sedang menunggu surat arahan penyusunan dokumen lingkungan hidup pasca validasi oleh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Berdasarkan Pasal 103 UU No. 32/2009, konsekuensi atas tidak dimilikinya izin persetujuan lingkungan untuk penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dapat mengakibatkan TP dan MUTU dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000.

8. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT, dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali:

- (a) (i) 12.499 saham TP, 12.648 saham MP, 59.999 saham PT B4, dan 2.263.029.999 saham MUTU yang seluruhnya dimiliki Perseroan, (ii) 700 saham PT B3 yang dimiliki PT B4, (iii) SHGB No. 00020/IPU yang dimiliki TP, dan (iv) SHGB No. 00003/Mangkatip, SHGB No. 00004/Mengkatip, SHGB No. 00005/Mengkatip, dan SHGB No. 00006/Mengkatip yang seluruhnya dimiliki MP untuk menjamin kewajiban Perseroan dan MP yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;

- (b) 4.187.624.000 saham PTRO yang dimiliki KJP untuk menjamin kewajiban Perseroan dan KJP yang timbul berdasarkan (i) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 219 tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 87 tanggal 15 Februari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan terakhir diubah melalui Akta Perjanjian Perubahan No. 383 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Michael Yogatama, S.H., M.Kn., yang merupakan Notaris pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan (ii) Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No: WCO.KP/2455/TLN.2024 No. 91 tanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Sc., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
- (c) 39.718.000 saham PTRO yang dimiliki KJP untuk menjamin kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 319 tanggal 30 Agustus 2024 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan
- (d) (i) 292.697.616 saham KBL, 280.589.375 saham KMS, 380.000 saham KPI yang seluruhnya dimiliki PTRO, (ii) 50 saham CEP dan 25.000 saham KMS yang seluruhnya dimiliki KBL, (iii) 249.950 saham CEP yang dimiliki KMS, dan (iv) SHGB No. 1209/ Kariangau, SHGB No.140/Batu Kajang, SHGB No. 142/Batu Kajang, SHGB No. 017/Wanagon, SHGB No. 191/Batu Kajang, SHGB No. 192/Batu Kajang, SHGB No. 442/Kariangau, SHGB No. 444/Kariangau, SHGB No. 649/Kariangau, dan SHGB No. 002/Belo yang seluruhnya dimiliki PTRO untuk menjamin kewajiban PTRO, KBL dan CEP yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BCA No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, Notaris di Jakarta.

Adapun berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, apabila terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas dan dalam LUT, maka proses eksekusi akan dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia. Dengan demikian, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat kehilangan hak kepemilikan atas aset yang akan dijaminakan tersebut dan dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan beserta Perusahaan Anak yang bersangkutan akan senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian jaminan dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak terikat didalamnya untuk menghindari terjadinya wanprestasi, sehingga tidak akan terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset tersebut.

9. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan namun Perseroan memiliki beberapa Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam LUT. Selain itu, Perusahaan Anak memiliki:
 - (a) Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak, kecuali MP, ESE, KJP, AMP, MUTU, PT B4, BBK, INTAM, BI, DBK, IBP, KBS, KPI, PII, KMS, MIP, dan PT B3 yang tidak memiliki Perjanjian Material; dan

- (b) Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak, kecuali TP, KJP, AMP, MUTU, PT B4, BBK, INTAM, BI, IBP, KBS, KPI, PII, KMS, MIP, dan PT B3 yang tidak memiliki Perjanjian Kredit,

sebagaimana diungkapkan di dalam LUT.

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang dilakukan antara Perusahaan Anak yaitu PTRO dengan PT Griya Idola telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 42/2020, dimana PTRO telah (a) mengumumkan keterbukaan informasi tanggal 24 Juni 2024, (b) menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK melalui Surat No. Ref. CORSEC/L/2024/VI-0064 tanggal 24 Juni 2024, dan (c) memperoleh pendapat kewajaran dari penilai berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP Firman Suryanto Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan No. 00019/2.0074-00/BS/02/0537/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Seluruh Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang diungkapkan dalam LUT tersebut tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I, dan tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dan memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I.

10. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan material sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berlaku umum termasuk telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara patut seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 bulan terakhir, kecuali:

- (a) (i) Perseroan, MUTU, DBK, INTAM dan PTRO yang sedang mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Ketenagakerjaan terkait, dan (ii) AMP yang belum mempunyai Peraturan Perusahaan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Keterangan No. 059/EXT/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pastiniarga & Parters, AMP telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan di Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Berdasarkan Pasal 108 UUTK, perusahaan yang telah memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan dan memperoleh pengesahan dari dinas ketenagakerjaan setempat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 188 UUTK, pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 108 UUTK dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000; dan

- (b) MUTU yang telah mempekerjakan lebih dari 50 pekerja namun belum membentuk lembaga kerja sama bipartit sesuai Pasal 106 UUTK. Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) UUTK, pelanggaran terhadap kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki asuransi atas aset-aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, kecuali untuk (i) AMP yang tidak memiliki polis asuransi atas kapal yang dimilikinya karena kapal yang dimilikinya masih dalam kondisi yang kurang baik dan sedang dalam tahap perbaikan dan (ii) Perseroan, MP, ESE, MUTU, PT B4, BBK, INTAM, BI, DBK, dan IBP karena tidak memiliki harta kekayaan yang dapat diasuransikan.
12. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Maret 2025, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun dinyatakan pailit oleh pihak ketiga atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I.
13. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang terlibat dalam suatu perselisihan dan perkara apa pun di luar pengadilan dan/atau perkara baik pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, perkara perburuhan di pengadilan hubungan industrial, maupun proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi di hadapan pengadilan yang kompeten di Republik Indonesia, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I atau kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kepada pemegang Obligasi dan/atau pemegang Sukuk Wakalah.
14. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur modal dan susunan pemegang saham, Perizinan Umum, Perizinan Operasional, Perjanjian Material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
15. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I adalah sebagaimana diuraikan di bagian Uraian Transaksi di atas.

Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, mengingat MUTU merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.
16. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (*Single A*) untuk surat utang jangka panjang berdasarkan Surat No.: RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan peringkat idA(sy) (*single A Syariah*) untuk surat utang syariah jangka panjang berdasarkan Surat

No.: RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang mana telah memenuhi Pasal 5 POJK No. 36/2014.

17. Perjanjian PUB I Tahap I telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk POJK No. 36/2014 dan POJK No. 20/2020.
18. Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, (a) Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan (b) Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi tidak memiliki hubungan Afiliasi.
19. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yakni Perseroan telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I.
20. Dalam rangka PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 13 Maret 2025 ("**Pernyataan Kesesuaian Syariah**").

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tersebut, ditetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
TnP Law Firm



Rambun Tjajo, S.H.
STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024/
*FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024***

DAN/*AND*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

*These Consolidated Financial Statements are
originally issued in Indonesian language*

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

D A F T A R I S I

C O N T E N T S

Pernyataan Direksi

Directors' Statement

	Ekshibit/ Exhibit	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	A	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	B	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	C	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	D	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	E	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama : Michael
Alamat Kantor : Wisma Barito Pacific, Gedung B Lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta
Alamat Domisili : Jl Raya Joglo Perumahan Magnolia 6, Blok K2 No. 8, RT 008 RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 5308520
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kartika Hendrawan
Alamat Kantor : Wisma Barito Pacific, Gedung B Lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta
Alamat Domisili : Apt Citylofts Lt 11 Unit 20 RT 013/ RW 011, Karet Tengsin, Tanah Abang
Nomor Telepon : (021) 5308520
Jabatan : Direktur keuangan

1. Name : Michael
Office Address : Wisma Barito Pacific, Gedung B Lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta
Domicile Address : Jl Raya Joglo Perumahan Magnolia 6, Blok K2 No. 8, RT 008 RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Telephone Number : (021) 5308520
Position : President Director
2. Name : Kartika Hendrawan
Office Address : Wisma Barito Pacific, Gedung B Lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta
Domicile Address : Apt Citylofts Lt 11 Unit 20 RT 013/ RW 011, Karet Tengsin, Tanah Abang
Telephone Number : (021) 5308520
Position : Finance Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

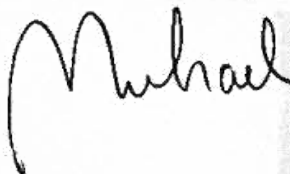
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak;
2. Laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company and subsidiaries;*
2. *The financial statements of the Company and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the financial statements of the Company and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The financial statements of the Company do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit material information or facts;*
4. *We are responsible for internal control system of the Company and subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 16 Juni 2025 / Jakarta, 16 June 2025


Michael
Direktur Utama/
President Director




Kartika Hendrawan
Direktur Keuangan/
Finance Director

PT Petrindo Jaya Kreasi
Wisma Barito Pacific Tower B, 5th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +6221 530 8520 F +6221 535 5678

Ekshibit A

Exhibit A

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023*	1 Januari 2023/ 1 January 2023*	
A S E T					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c, 2f, 2g, 2p, 4	272.991	60.919	16.193	Cash and cash equivalents
Dana yang dibatasi penggunaannya	2c, 2f, 2h, 2p, 5	7.739	-	-	Restricted funds
Aset keuangan lainnya	2c, 2f, 2p, 6	31.172	-	-	Other financial assets
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	2c, 2f, 2i, 2p, 7	163.218	1.583	8.508	Third parties
	2c, 2f, 2i, 2m, 2p, 7, 44	29.006	-	-	Related party
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	2c, 2f, 2i, 2p, 8	22.879	101	42	Third parties
	2c, 2f, 2i, 2m, 2p, 8, 44	96	-	3.806	Related party
Persediaan	2c, 2j, 9	69.212	39.227	16.593	Inventories
Aset kontrak	2c, 2ae, 10	3.869	-	-	Contract assets
Pajak dibayar di muka	2c, 2af, 27a	32.548	7.158	2.868	Prepaid taxes
Uang muka investasi	2c, 11	631	43.835	2.980	Advances for investments
Uang muka dan beban dibayar di muka	2c, 2k, 2u, 12	38.464	12.220	7.342	Advances and prepaid expenses
Aset lancar lainnya	2c, 2u, 13	5.866	-	-	Other current assets
Total Aset Lancar		677.691	165.043	58.332	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Dana yang dibatasi penggunaannya	2c, 2f, 2h, 2p, 5	12.055	939	901	Restricted funds
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2c, 2f, 2i, 2p, 8	13.275	-	-	Other receivables - Third parties
Uang muka pembelian aset tetap	2c, 2u, 14	627	1.094	-	Advances for acquisitions of property, plant and equipment
Aset eksplorasi dan evaluasi	2c, 2s, 2u, 15	53.701	18.174	14.813	Exploration and evaluation assets
Aset tetap	2c, 2r, 2u, 16	471.206	36.926	33.033	Property, plant and equipment
Properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah	2c, 2t, 2u, 2v, 17	358.505	6.048	3.570	Mining properties and stripping activity assets
Aset hak-guna	2c, 2u, 2z, 18	19.863	-	-	Right-of-use assets
Aset takberwujud	2c, 2u, 2y, 21	119.421	2	-	Intangible assets
Goodwill	2c, 2d, 2e, 2x, 19	19.768	-	-	Goodwill
Aset pajak tangguhan	2c, 2af, 27f	397	122	26	Deferred tax assets
Taksiran klaim pajak penghasilan	2c, 27d	21.133	1.699	-	Estimated claim for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	2c, 13	10.154	15	15	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		1.100.105	65.019	52.358	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		1.777.796	230.062	110.690	TOTAL ASSETS

*Disajikan kembali (Catatan 51)

*As restated (Note 51)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023*	1 Januari 2023/ 1 January 2023*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2c,2n,2p,28	58.716	12.811	-	Short-term bank loans
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	2c,2n,2p,22	130.977	8.725	798	Third parties
Pihak berelasi	2c,2m,2n,2p,22,44	212	-	-	Related party
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	2c,2n,2p,23	1.002	6.302	6.146	Third parties
Pihak berelasi	2c,2m,2n,2p,23,44	21	-	21	Related party
Utang dividen	2c,2n,2p,24	879	-	-	Dividends payable
Utang pajak	2c,2af,27b	4.212	851	7.736	Taxes payable
Beban akrual	2c,2n,2p,25	71.855	18.214	14.519	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	2c,2ae,26	20.833	-	-	Contract liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	2c,2n,2p,31	44.517	-	-	Bank loans
Utang obligasi	2c,2n,2p,29	3.175	-	-	Bonds payable
Utang sukuk ijarah	2c,2n,2p,2aa,30	2.172	-	-	Sukuk ijarah payable
Liabilitas sewa	2c,2n,2p,2z,18	8.622	-	-	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		347.193	46.903	29.220	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas derivatif	2c,2n,2o,2p	1.380	740	-	Derivative liability
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	2c,2n,2p,31	598.552	61.162	-	Bank loans
Utang obligasi	2c,2n,2p,29	58.396	-	-	Bonds payable
Utang sukuk ijarah	2c,2n,2p,2aa,30	28.554	-	-	Sukuk ijarah payable
Liabilitas sewa	2c,2n,2p,2z,18	13.670	-	-	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	2c,2af,27f	124.025	-	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2c,2ad,2ah,32	29.397	164	119	Liabilities for employee benefits
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	2c,2w,2ah,33	10.730	391	277	Provision for mine reclamation and closure
Total Liabilitas Jangka Panjang		864.704	62.457	396	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		1.211.897	109.360	29.616	Total Liabilities

*Disajikan kembali (Catatan 51)

*As restated (Note 51)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023*	1 Januari 2023/ 1 January 2023*	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham					Share capital
Modal dasar -					Authorized -
30.000.000.000 saham					30,000,000,000 shares
dengan nilai nominal					with par value of
Rp 200 per saham					Rp 200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					Issued and fully paid-up capital -
11.241.890.000 saham	2ab,34	164.392	164.392	142.385	11,241,890,000 shares
Tambahan modal disetor	2ac,35	1.689	1.689	-	Additional paid-in capital
					Other component of equity
Komponen ekuitas lainnya	36	20.381 (	1.042)	-	Loss on hedging instrument in a cash flow hedge
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	2o	(1.380)(	740)	-	
Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun	2ad,32	468	608	587	Actuarial gain on defined benefit pension plan
Selisih penjabaran laporan keuangan	2ag	(3.527)(	19.535)(	20.946)	Foreign currency translation adjustment
Saldo laba (defisit)		124.128 (	36.657)(	52.278)	Retained earnings (deficits)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		306.151	108.715	69.748	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2d,37	259.748	11.987	11.326	Non-controlling interest
Total Ekuitas		565.899	120.702	81.074	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.777.796	230.062	110.690	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

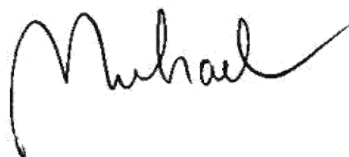
*Disajikan kembali (Catatan 51)

*As restated (Note 51)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 16 Juni 2025 / 16 June 2025



Michael
Direktur Utama / President Director



Kartika Hendrawan
Direktur / Director

Ekshibit B

Exhibit B

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN	801.723	2l,2m,2ae, 38,44	97.943	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(683.857)	2l,2ae,39	(60.725)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	117.866		37.218	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(35.514)	2l,2ae,40	(13.161)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(53.400)	2l,2m,2ae, 41,44	(3.953)	General and administrative expenses
Beban pajak final	(8.912)	2af	-	Final tax expense
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	196.208	2ae,42	(382)	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	216.248		19.722	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	3.758	2ae	1.118	Finance income
Beban keuangan	(48.966)	2ae,43	(1.252)	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	171.040		19.588	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	(10.669)	2af,27c	(4.438)	Current
Tangguhan	9.599	2af,27f	100	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(1.070)		(4.338)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO TAHUN BERJALAN	169.970		15.250	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	10.751	2ag	1.411	Exchange differences on translation of financial statements
Keuntungan aktuarial atas program pensiun manfaat pasti	1.909	2ad,32	14	Actuarial gain on defined benefit pension plan
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(640)	2o	(740)	Loss on hedging instrument in a cash flow hedge
Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(23)	2af,32	(3)	Tax relating to item that will not be reclassified
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	11.997		682	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	181.967		15.932	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Laba neto yang diatribusikan kepada:				Net profit attributable to:
Pemilik entitas induk	160.785		15.621	Owners of the parent company
Kepentingan non-pengendali	9.185	(	371)	Non-controlling interest
T o t a l	169.970		15.250	T o t a l
Total penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	176.013		15.271	Owners of the parent company
Kepentingan non-pengendali	5.954		661	Non-controlling interest
T o t a l	181.967		15.932	T o t a l
LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh Dolar AS)	0,014	2ai,46	0,001	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full amount of US Dollar)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 16 Juni 2025 / 16 June 2025



Michael
Direktur Utama / President Director



Kartika Hendrawan
Direktur / Director

These Consolidated Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit C

Exhibit C

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar, unless otherwise stated)

	Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity										
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other component equity	Kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ Loss on hedging instrument in a cashflow hedge	Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pension/ Actuarial gain on defined benefit pension plan	Selisih penjabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustments	Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficits)	T o t a l	Kepentingan non-pegendali/ Non- controlling interest	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	142.385	-	-	-	587 (	20.946)(	52.278)	69.748	11.326	81.074	Balance as of 1 January 2023
Penambahan dari penawaran umum perdana (Catatan 1c)	22.007	1.689	-	-	-	-	-	23.696	-	23.696	Proceeds from the initial public offering (Note 1c)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	(1.042)	(740)	21	1.411	15.621	15.271	661	15.932	Total comprehensive income for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	164.392	1.689	(1.042)	(740)	608 (	19.535)(	36.657)	108.715	11.987	120.702	Balance as of 31 December 2023
Akuisisi entitas anak baru (Catatan 45)	-	-	-	-	-	-	-	-	269.755	269.755	Acquisition of new subsidiaries (Note 45)
Perubahan persentase kepemilikan pada entitas anak (Catatan 1d)	-	-	21.423	-	-	-	-	21.423 (	25.716)(	4.293)	Change in percentage of ownership in subsidiaries (Note 1d)
Dividen yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali (Catatan 24)	-	-	-	-	-	-	-	- (	2.232)(	2.232)	Dividend paid to non-controlling interest (Note 24)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(640)	(140)	16.008	160.785	176.013	5.954	181.967	Total comprehensive income for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	164.392	1.689	20.381	(1.380)	468 (	3.527)	124.128	306.151	259.748	565.899	Balance as of 31 December 2024
	Catatan 34/ Note 34	Catatan 35/ Note 35	Catatan 36/ Note 36		Catatan 32/ Note 32				Catatan 37/ Note 37		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	764.031		105.117	Cash receipts from customer
Pengeluaran kas untuk/kepada:				Cash disbursements for/to:
Pemasok	(482.661)	(52.588)		Suppliers
Gaji, upah dan				Salaries, wages and
kesejahteraan karyawan	(122.176)	(2.863)		employee benefits
Beban usaha	(87.015)	(38.090)		Operating expenses
Arus kas diperoleh dari				Cash flows provided by
aktivitas operasi	72.179	11.576		operating activities
Pembayaran beban keuangan	(48.235)	(1.022)		Payments of finance expenses
Pembayaran pajak penghasilan				Payments for corporate income
badan dan pajak final	(28.289)	(12.792)		tax and final tax
Penerimaan pendapatan keuangan	3.758	1.118		Receipts of finance income
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(2.062)	-		Payments of employee benefits
Arus kas neto digunakan untuk				Net cash flow used in
 aktivitas operasi	(2.649)	(1.120)		operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(143.704)	16 (4.903)		Acquisitions of property, plant
Akuisisi entitas anak, setelah				and equipment
dikurangi kas yang diperoleh -				Acquisition of subsidiary,
PT Multi Tambangjaya Utama	(106.669)	45 -		net of cash acquired -
Penambahan aset eksplorasi				PT Multi Tambangjaya Utama
dan evaluasi	(24.306)	(1.737)		Additions of exploration
Penambahan investasi pada				and evaluation assets
aset keuangan lainnya	(22.585)	-		Additions of investment
Akuisisi entitas anak, setelah				in other financial assets
dikurangi kas yang diperoleh -				Acquisition of subsidiary,
PT Petrosea Tbk	18.317	45 -		net of cash acquired -
Perolehan properti pertambangan	(2.002)	17 (4.039)		PT Petrosea Tbk
Akuisisi entitas anak, setelah				Acquisitions of mining properties
dikurangi kas yang diperoleh -				Acquisition of subsidiary,
PT Borneo Bangun Banua Bestari	(1.801)	45 -		net of cash acquired -
Akuisisi entitas anak, setelah				PT Borneo Bangun Banua Bestari
dikurangi kas yang diperoleh -				Acquisition of subsidiary,
PT Borneo Berkat Kutai	(1.733)	45 -		net of cash acquired -
Perolehan aset takberwujud	(238)	21 (2)		PT Borneo Berkat Kutai
Penerimaan atas penjualan				Acquisitions of intangible assets
aset tetap	106	16 -		Proceeds from selling of property,
Uang muka investasi	-	(41.225)		plant and equipment
Penerimaan dari piutang				Advances for investments
pemegang saham	-	3.925		Proceeds from
Pembayaran uang muka perolehan				shareholder receivables
aset tetap	-	(1.106)		Payments for advance of
				acquisition for property, plant
				and equipment
Arus kas neto digunakan untuk				Net cash flow used in
 aktivitas investasi	(284.615)	(49.087)		investing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

	2 0 2 4	Catatan/ Notes	2 0 2 3	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	606.564		61.162	Proceeds from long-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	(199.213)		-	Payments of long-term bank loan
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	71.796		12.811	Proceeds from short-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka pendek	(62.000)		-	Payments of short-term bank loan
Penerimaan dari penerbitan obligasi	61.564	29	-	Proceeds from issuance of bonds
Penerimaan dari penerbitan sukuk ijarah	30.790	30	-	Proceeds from issuance of sukuk ijarah
Pembayaran liabilitas sewa	(9.845)		-	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen oleh entitas anak	(2.232)		-	Payment of dividends by subsidiary
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(762)		-	Placement of restricted funds
Penerimaan dari penawaran umum perdana	-		24.372	Proceeds from initial public offering
Pembayaran transaksi pinjaman biaya	-	(2.988)	-	Payments of loan transaction fees
Pembayaran biaya penerbitan saham	-	(515)	-	Payments of share issuance cost
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	496.662		94.842	Net cash flow provided by financing activities
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	209.398		44.635	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak neto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	2.674		91	Net effect of changes in foreign exchange rate on cash and cash equivalents balances
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	60.919	4	16.193	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	272.991	4	60.919	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 52

The additional information for activities not affecting cash flows is stated in Note 52

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 oleh Benny Kristianto, S.H., tanggal 4 Agustus 2008. Akta Pendirian ini disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 26 Desember 2008, Tambahan No. 29515.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 23 oleh Aulia Taufani S.H., tanggal 4 Mei 2023, mengenai perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Desember 2012. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor di Wisma Barito Pacific Gedung B, Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta.

Pihak pengendali Perusahaan terakhir adalah Tuan Prajogo Pangestu, pemegang saham.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama :	Erwin Ciputra
Komisaris Independen :	Henky Susanto
Direksi	
Direktur Utama :	Michael
Direktur :	Daniel Jr. Lopez Laurente
Direktur :	Diana Arsiyanti
Direktur :	Kartika Hendrawan

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and General Information

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 12 of Benny Kristianto, S.H., dated 4 August 2008. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-70724.AH.01.01.Year 2008 dated 7 October 2008, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated 26 December 2008, Supplement No. 29515.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 23 of Aulia Taufani S.H., dated 4 May 2023, regarding changes to the Articles of Association which were received and recorded in the Legal Entity Administration System by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0062333 dated 10 May 2023 regarding the Receipt of Notification and Amendment to the Articles of Association.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to engage in Holding Company Activities and Other Management Consulting Activities.

The Company started its commercial business activities in December 2012. The Company is domiciled in Jakarta and has an office at Wisma Barito Pacific Building B, 3rd Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta.

The ultimate beneficial owner of the Company is Mr. Prajogo Pangestu, a shareholder.

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Board of Commissioners and Directors are the Company's key management personnel.

As of 31 December 2024 and 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors are as follows:

	2024	2023	
			Board of Commissioners
	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	: President Commissioner
	Henky Susanto	Henky Susanto	: Independent Commissioner
			Directors
	Michael	Michael	: President Director
	Daniel Jr. Lopez Laurente	Daniel Jr. Lopez Laurente	: Director
	Diana Arsiyanti	Diana Arsiyanti	: Director
	-	-	: Director

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Henky Susanto	:
Anggota	:	Dikdik Sugiharto	:
Anggota	:	Kurniadi	:

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 12 tanggal 12 Februari 2024 di Jakarta Selatan, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0071184 tanggal 20 Februari 2024.

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Grup masing-masing sebesar US\$ 2.736 dan US\$ 580 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan dan Entitas Anaknya (secara bersama disebut "Grup") memiliki masing-masing sebanyak 4.186 dan 80 orang karyawan tetap (tidak di audit).

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 20 tanggal 7 November 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0224304.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan, para pemegang saham menyetujui IPO Perusahaan melalui penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.690.000.000 saham baru yang merupakan 15,03% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah IPO.

Status Perusahaan berubah dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka pada tanggal 7 November 2022 sehingga nama Perusahaan yang sebelumnya PT Petrindo Jaya Kreasi menjadi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-62/D.04/2023 untuk melakukan IPO Perusahaan sejumlah 1.690.000.000 saham (yang merupakan 15,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh) dengan nilai nominal Rp 200 per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp 220 per lembar saham. Pada tanggal 8 Maret 2023, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

The members of the Company's Audit Committee as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

Chairman	:	Henky Susanto	:
Member	:	Dikdik Sugiharto	:
Member	:	Kurniadi	:

Based on Notarial Deed No. 12 of Aulia Taufani, S.H., dated 12 February 2024 in South Jakarta, there were changes to compositions of the Company's Commissioners and Directors. This change was approved by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0071184 dated 20 February 2024.

Total remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Group amounted to US\$ 2,736 and US\$ 580 for the year ended 31 December 2024 and 2023, respectively.

As of 31 December 2024 and 2023, the Company and its Subsidiaries (Collectively referred to as the "Group") had 4,186 and 80 permanent employees (unaudited), respectively.

c. Public Offering of the Company's Shares

Based on Notarial Deed No.20 of Aulia Taufani, S.H., dated 7 November 2022 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0224304.AH.01.11.Year 2022 dated 9 November 2022, regarding the planned Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, the shareholders approved the IPO of the Company through the issuance of new shares in a maximum number of 1,690,000,000 new shares representing 15.03% of the Company's issued and paid-up capital after the IPO.

The Company's status changed from a Private Company to a Public Company on 7 November 2022 so that the Company's name, which was previously PT Petrindo Jaya Kreasi, became PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

On 28 February 2023, the Company received notification of the effectiveness of the registration statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its letter No. S-62/D.04/2023 to conduct an IPO of the Company's shares in the amount of 1,690,000,000 shares (representing 15.03% of the issued and fully paid-up capital) to the public with par value of Rp 200 per share at an offering price of Rp 220 per share. On 8 March 2023, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange ("BEI").

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup

d. Structure of the Group

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Awal beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)		Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				2024	2023	2024	2023
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company							
PT Tamtama Perkasa	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	2013	99,99	99,99	121.155	90.423
PT Mareta Persada	Jakarta	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI; Industri produk dari batu bara/ Wholesale trade of solid, liquid and gas fuels and YBDI products; Coal products industry	2008	99,99	99,99	9.526	1.773
PT Equator Sumber Energi	Jakarta	Aktivitas perusahaan holding/ Holding company activities	2015	65,00	65,00	92.216	43.304
PT Prima Mineral Investindo	Jakarta	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ Holding company activities and other management consulting activities	-	100,00	100,00	1.817	232
PT Green Natural Investama	Jakarta	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ Holding company activities and other management consulting activities	-	100,00	100,00	-	-
PT Kreasi Jasa Persada	Jakarta	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya/ Other mining and excavation support activities	-	100,00	100,00	132.060	61.650
PT Borneo Bangun Banua Bestari	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	-	100,00	-	3.778	-
PT Multi Tambangjaya Utama	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	Pertambangan batu bara/ Coal mining	2009	100,00	-	214.595	-
PT Armada Maritim Persada	Jakarta	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang/ Activities in the field of domestic sea transportation of goods	2024	100,00	-	4.769	-
PT Borneo Berkat Kutai	Jakarta	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ Other management consulting activities	-	100,00	-	1.544	-
Dimiliki melalui PT Equator Sumber Energi/Held through PT Equator Sumber Energi							
PT Intam	Jakarta	Pertambangan emas dan perak dan perdagangan besar logam dan bijih logam/ Mining of gold and silver and wholesale trading of metals and metal ores	-	99,99	99,99	3.734	3.588
PT Bara International	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	-	99,99	99,99	5.205	5.038
PT Daya Bumindo Karunia	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	-	99,99	99,99	35.975	34.639

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Structure of the Group (Continued)

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows: (Continued)

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Awal beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)		Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				2024	2023	2024	2023
Dimiliki melalui PT Kreasi Jasa Persada/Held through PT Kreasi Jasa Persada							
PT Petrosea Tbk	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan/ Construction, mining and quarrying, processing industry, trading, transportation, and warehousing, information and communication, professional, scientific and technical activities, leasing and leasing activities without option rights, employment and education	1972	41,52	-	832.115	-
Dimiliki melalui PT Prima Mineral Investindo/Held through PT Prima Mineral Investindo							
PT Silika Salut Jaya	Jakarta	Penggalian pasir kuarsa atau silika/ Excavation of quartz or silica sand	-	85,00	85,00	627	162
Dimiliki melalui PT Borneo Bangun Banua Bestari/Held through PT Borneo Bangun Banua Bestari							
PT Borneo Bangun Banua	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	Pertambangan batu bara/ Coal mining	-	70,00	-	22.435	-
Dimiliki melalui PT Borneo Berkut Kutai/Held through PT Borneo Berkut Kutai							
PT Intan Bumi Persada	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	2007	80,00	-	10.030	-
Dimiliki melalui PT Armada Maritim Persada/Held through PT Armada Maritim Persada							
PT Usaha Berlayar Lancar	Jakarta	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang/ Activities in the field of domestic sea transportation of goods	-	40,00	-	619	-
Dimiliki melalui PT Daya Bumindo Karunia/Held through PT Daya Bumindo Karunia							
PT Pika Utama Resources	Jakarta	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara/ Wholesale trading of solid, liquid, gas and YBDI products and products from coal	-	99,99	99,99	963	1.003
Dimiliki melalui PT Petrosea Tbk/ Held through PT Petrosea Tbk							
PTP Investments Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Investasi/ Investment	-	100,00	-	3	-
PT Kinarya Bangun Sesama	Tangerang Selatan/ South Tangerang	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan/ Agriculture, processing industrv and trading	2021	99,99	-	964	-

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Structure of the Group (Continued)

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode
pelaporan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Details of the Group's subsidiaries at the end of
the reporting period are as follows: (Continued)

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Awal beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)		Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				2024	2023	2024	2023
Dimiliki melalui PT Petrosea Tbk (Lanjutan)/ Held through PT Petrosea Tbk (Continued)							
PT POSB Infrastructure Indonesia	Tangerang Selatan/ South	Pengelolaan pelabuhan khusus/ Special port management	2015	99,80	-	1.980	-
PT Rekakarsa Karya Nusantara	Tangerang Kalimantan Timur/ East	Jasa rekayasa/ Engineering services	2022	99,90	-	412	-
PT Karya Bhumi Lestari	Kalimantan Tangerang Selatan/ South	Jasa penunjang perusahaan pertambangan/ Support mining companies services	2018	99,99	-	65.130	-
PT Kuala Pelabuhan Indonesia	Tangerang Jakarta	Operasi pelabuhan, transportasi, contracting (jalan) dan jasa renderring/ Port operation, transportation, contracting (roads) and renderring services	1995	95,00	-	13.019	-
Petros Solution Pty. Ltd.	Australia	Solution provider dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi/ Solution provider in geology, mining, engineering and construction	2021	100,00	-	2.768	-
PT Kemilau Mulia Sakti	Tangerang Selatan/ South	Pertambangan batu bara/ Coal Mining	2023	99,99	-	14.473	-
PT Petrosea Infrastruktur Nusantara	Tangerang Jakarta	Aktivitas keuangan, asuransi, profesional, ilmiah dan teknis/ Financial, insurance, professional, scientific and technical activities	2024	100,00	-	310	-
Dimiliki melalui PT POSB Infrastructure Indonesia/Held through PT POSB Infrastructure Indonesia							
PT Mahaka Industri Perdana	Tangerang Selatan/ South	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis dan perdagangan umum/ Mining, industry, agrobusiness and general trading	1994	51,25	-	1.504	-
Dimiliki melalui PT Kemilau Mulia Sakti/Held through PT Kemilau Mulia Sakti							
PT Cristian Eka Pratama	Tangerang Selatan/ South	Pertambangan batu bara/ Coal mining	2023	99,98	-	46.665	-
Dimiliki melalui PT Petrosea Infrastruktur Nusantara/Held through Petrosea Infrastruktur Nusantara							
PT Lintas Kelola Berlab	Jakarta Barat/ West	Pertambangan dan penggalian, aktivitas profesional ilmiah dan teknis/ Mining and quarrying, professional activities and technique	2024	51,00	-	310	-
PT Chandra Tirta Karian	Jakarta Barat/ West	Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, perusahaan holding/ Financial services, not insurance and pension fund, holding company	2024	35,00	-	929	-

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Tamtama Perkasa (TP)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 29 September 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0197836.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022. Para pemegang saham TP menyetujui perubahan susunan komisaris dan direksi serta ruang lingkup kegiatan TP menjadi pertambangan batu bara.

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0208069.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022, para pemegang saham setuju untuk memberikan persetujuan kepada Tn. Prajogo Pangestu untuk menjual sebagian saham miliknya pada TP, yaitu sebanyak 249 saham kepada Perusahaan.

PT Mareta Persada (MP)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 12 tanggal 22 November 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0234805.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 November 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan MP menjadi bidang perdagangan besar batu bara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MP melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI.

PT Equator Sumber Energi (ESE)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 29 September 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0260083.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, para pemegang saham ESE menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ESE menjadi aktivitas *holding*.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Tamtama Perkasa (TP)

Based on Notarial Deed No. 9 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 29 September 2022 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0197836.AH.01.11. Year 2022 dated 4 October 2022. TP's shareholders agreed to change the composition of the board of commissioners and directors and the scope of TP's activities to coal mining.

Based on Notarial Deed No.6 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 17 October 2022 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU-0208069.AH.01.11. Year 2022 dated 18 October 2022, the shareholders agreed to Mr. Prajogo Pangestu to partially sell his shares in TP amounting to 249 shares to the Company.

PT Mareta Persada (MP)

Based on Notarial Deed No. 12 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 22 November 2022 which was ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0234805.AH.01.11. Year 2022 dated 23 November 2022, the shareholders agreed to change the aims and objectives of MP to wholesale coal trading. To achieve these aims and objectives, MP carries out business activities of wholesale trading of solid, liquid and gas fuels and YBDI products.

PT Equator Sumber Energi (ESE)

Based on Notarial Deed No.7 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 29 September 2022 which was ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0260083.AH.01.11. Year 2022 dated 23 December 2022, the shareholders of ESE agreed to change the aims and objectives and business activities of ESE's to become a holding activity.

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Prima Mineral Investindo (PMI)

PT Prima Mineral Investindo (PMI)

Berdasarkan Akta Notaris Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., No. 01 tanggal 3 Agustus 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0149121.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023, Perusahaan dan TP, entitas anak, mendirikan entitas anak bernama PMI dengan kepemilikan saham sebesar 100,00% sebanyak 5.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.000.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PMI adalah aktivitas *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Based on Notarial Deed No. 01 of Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., dated 3 August 2023 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0149121.AH.01.11. Year 2023 dated 4 August 2023, the Company and TP, a subsidiary, established a subsidiary named PMI with 100.00% ownership of 5,000 shares with a nominal value of Rp 5,000,000,000. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of PMI's activities is holding activities and other management consulting activities.

PT Green Natural Investama (GNI)

PT Green Natural Investama (GNI)

Berdasarkan Akta Notaris Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., No. 02 tanggal 3 Agustus 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0149227.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023, Perusahaan dan TP, entitas anak, mendirikan entitas anak bernama GNI dengan kepemilikan saham sebesar 100,00% sebanyak 5.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.000.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan GNI adalah aktivitas *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Based on Notarial Deed No. 02 of Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., dated 3 August 2023 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0149227.AH.01.11. Year 2023 dated 4 August 2023, the Company and TP, a subsidiary, established a subsidiary named GNI with 100.00% ownership of 5,000 shares with a nominal value of Rp 5,000,000,000. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of GNI's activities are holding activities and other management consulting activities.

PT Kreasi Jasa Persada (KJP)

PT Kreasi Jasa Persada (KJP)

Berdasarkan Akta Notaris Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., No. 03 tanggal 3 Agustus 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0149318.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023, Perusahaan dan TP, entitas anak, mendirikan entitas anak bernama KJP dengan kepemilikan saham sebesar 100,00% sebanyak 5.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.000.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan KJP adalah aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

Based on Notarial Deed No. 03 of Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., M.H., dated 3 August 2023 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0149318.AH.01.11. Year 2023 dated 4 August 2023, the Company and TP, a subsidiary, established a subsidiary named KJP with 100.00% ownership of 5,000 shares with a nominal value of Rp 5,000,000,000. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of KJP's activities is other mining and excavation support activities.

PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)

PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)

BBBB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 12 November 2022 dari Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-00791701.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 14 November 2022.

BBBB was established based on Notarial Deed No. 55 dated 12 November 2022 of Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Public Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-00791701.AH.01.01. Year 2022 dated 14 November 2022.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Structure of the Group (Continued)

**PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)
(Lanjutan)**

**PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)
(Continued)**

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 06 tanggal 14 Mei 2024, oleh Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., Perusahaan dan PT Lamiplagema Perkasa (LP) telah melakukan transaksi jual beli saham sebanyak 99,99% atau 59.999 lembar saham sebesar Rp 79.018.193.000 (setara dengan US\$ 4.999).

Based on Deed of Sale and Purchase No. 06 dated 14 May 2024, by Notary Devi Yanti, S.H., M.Kn., the Company and PT Lamiplagema Perkasa (LP) have conducted sales and purchase of shares in the total of 99.99% or 59,999 shares amounting to Rp 79,018,193,000 (equivalent to US\$ 4,999).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 07 tanggal 14 Mei 2024, oleh Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., KJP, entitas anak dan Tuan Maichiardshen telah melakukan transaksi jual beli saham sebanyak 0,01% atau 1 lembar saham sebesar Rp 15.807.000 (setara dengan US\$ 1).

Based on Deed of Sale and Purchase No. 07 dated 14 May 2024, by Notary Devi Yanti, S.H., M.Kn., KJP, the subsidiary and Mr. Maichiardshen have conducted sales and purchase of shares in the total of 0.01% or 1 share amounting to Rp 15,807,000 (equivalent to US\$ 1).

PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

MUTU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 392 tanggal 17 November 1989 dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. 02-1542.HT.01.01-TH.90 tanggal 22 Maret 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 1866 tanggal 17 November 1990. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan MUTU terutama meliputi bidang pengelolaan batu bara.

MUTU was established based on Notarial Deed No. 392 dated 17 November 1989 of Benny Kristianto, S.H., Public Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. 02-1542.HT.01.01-TH.90 dated 22 March 1990 and was published in State Gazette No. 1866 dated 17 November 1990. In accordance with Article 3, the scope of MUTU's activities are mainly engage in coal processing.

Berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 76 tanggal 26 Februari 2024, oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan PT Indika Indonesia Resources (IIR) telah melakukan penjualan dan pengalihan atas saham yang dijual sebanyak 85,00% (delapan puluh lima persen) atau 1.923.575.000 lembar saham termasuk semua hak dan hak milik atas dan kepentingan dalam atau sehubungan dengan saham yang dijual yang berlaku efektif sejak tanggal akta ini. Perusahaan dan IIR telah mengakui harga pembelian sebesar Rp 2.695.694.660.000 (setara dengan US\$ 172.550).

Based on Deed of Acquisition No. 76 dated 26 February 2024, by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and PT Indika Indonesia Resources (IIR) have conducted sales and acquisition of the shares in the total of 85.00% (eighty five percent) or 1,923,575,000 shares, including all of the rights and ownership of and the interest associated with or concerning the shares which is effective from the date of this notarial deed. The Company and IIR has acknowledge purchase price of Rp 2,695,694,660,000 (equivalent to US\$ 172,550).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 77 tanggal 26 Februari 2024, oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan Indika Capital Investment Pte. Ltd. (ICI) telah melakukan transaksi jual beli saham sebanyak 15,00% (lima belas persen) atau 339.454.999 lembar saham sebesar Rp 476.030.924.367 (setara dengan US\$ 30.500). Selain itu, Perusahaan juga telah melakukan pembayaran kepada ICI atas imbalan Hak Pemasaran sebesar US\$ 15.000 pada tanggal 4 Maret 2024.

Based on Deed of Sale and Purchase No. 77 dated 26 February 2024, by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and Indika Capital Investment Pte. Ltd. (ICI) have conducted sales and purchase of shares in the total of 15.00% (fifteen percent) or 339,454,999 share amounting to Rp 476,030,924,367 (equivalent to US\$ 30,500). In addition, the Company has already paid to ICI the fee for Marketing Rights amounting to US\$ 15,000 on 4 March 2024.

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Armada Maritim Persada (AMP)

AMP didirikan berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 21 Desember 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0259772.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, Perusahaan dan MP, entitas anak, mendirikan entitas anak bernama AMP dengan kepemilikan saham sebesar 10.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, AMP bergerak dalam bidang angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang.

PT Borneo Berkat Kutai (BBK)

BBK didirikan berdasarkan Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 5 Mei 2011 di Bekasi. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-23983.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tahun 2012. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BBK terutama meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 6 November 2024, Perusahaan dan Bapak Heru Prasetya Hermawanto telah melakukan penjualan dan pengalihan atas saham yang dijual sebanyak 100,00% (seratus persen) atau 25.000.000 lembar saham termasuk semua hak dan hak milik atas dan kepentingan dalam atau sehubungan dengan saham yang dijual yang berlaku efektif sejak tanggal akta.

PT Intam (INTAM)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 29 September 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0198799.AH.01.11 tanggal 5 Oktober 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha INTAM menjadi pertambangan emas dan perak, perdagangan besar logam dan bijih logam.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Armada Maritim Persada (AMP)

AMP was established based on Notarial Deed No. 09 dated 21 December 2023 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0259772.AH.01.11. Year 2023 dated 22 December 2023, the Company and MP, a subsidiary, established a subsidiary named AMP with share ownership of 10,000 shares with a nominal value of Rp 10,000,000,000. In accordance with Article 3 related to Aims and Objectives also Business Activities, AMP is engaged in the field of domestic sea transportation of goods.

PT Borneo Berkat Kutai (BBK)

BBK was established based on Notarial Deed No. 09 dated 5 May 2011 of Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-23983.AH.01.01. Year 2011 dated 11 May 2011 and was published in State Gazette No. 71 in 2012. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of BBK's activities are mainly engage in other management consulting activities.

Based on Notarial Deed No. 9 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 6 November 2024, the Company and Mr. Heru Prasetya Hermawanto have conducted sales and acquisition of the shares in the total of 100.00% (a hundred percent) or 25,000,000 shares, including all of the rights and ownership of and the interest associated with or concerning the shares which is effective from the date of this deed.

PT Intam (INTAM)

Based on Notarial Deed No. 11 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 29 September 2022 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0198799.AH.01.11 dated 5 October 2022, the shareholders agreed to change the aims and objectives and business activities of INTAM to gold and silver mining, trading major metals and metal ores.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Bara International (BI)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 25 Januari 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006473.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, para pemegang saham BI menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BI menjadi bidang pertambangan batu bara.

PT Daya Bumindo Karunia (DBK)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 25 Januari 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DBK. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 0006458.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan utama DBK adalah dalam bidang pertambangan batu bara.

PT Petrosea Tbk (PTRO)

PTRO didirikan berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H., No. 75 tertanggal 21 Februari 1972 berdasarkan ketentuan Undang-Undang PMA tahun 1967. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 12 Tambahan No. 96 tanggal 9 Februari 1973.

Berdasarkan Akta Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., No. 4 tertanggal 4 Desember 2023 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 19 Desember 2023 terkait dengan perubahan Maksud dan Tujuan Perusahaan. Sesuai dengan Pasal 3 maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha, PTRO bergerak dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Bara International (BI)

Based on Notarial Deed No. 15 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 25 January 2022 which was ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0006473.AH.01.02.Year 2022 dated 26 January 2022, BI's shareholders agreed to change the aims and objectives and business activities of BI to become coal mining.

PT Daya Bumindo Karunia (DBK)

Based on Notarial Deed No.14 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 25 January 2022 regarding changes to the aims and objectives and business activities of DBK. This change was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0006458.AH.01.02.Year 2022 dated 26 January 2022. In accordance with Article 3 of the Articles of Association, DBK's main activity is in the coal mining sector.

PT Petrosea Tbk (PTRO)

PTRO was established under Deed of Notary by Djojo Muljadi, S.H., No. 75 dated 21 February 1972, within the framework of the Foreign Capital Investment Law of 1967. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice in Decision Letter No. Y.A.5/51/17 dated 30 November 1972 and was published in State Gazette No. 12 Supplement No. 96 dated 9 February 1973.

Based on Notarial Deed No. 4 of Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., dated 4 December 2023 which has received approval for changes to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 19 December 2023 related to the change in the Company's Purpose and Objectives. In accordance with Article 3 of the aims and objectives and business activities, PTRO is engaged in construction, mining and quarrying, processing industry, trade, transportation and warehousing, information and communication, professional, scientific and technical activities, rental activities and non-licensed leases. options, employment and education.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

Pada tanggal 19 Februari 2024, Perusahaan mengumumkan penyelesaian pengambilalihan saham oleh KJP, entitas anak. KJP telah menyelesaikan pembelian dari PT Caraka Reksa Optima (CRO) atas 342.925.700 saham yang mewakili 34,00% (tiga puluh empat persen) dari modal disetor dan ditempatkan di dalam PTRO pada tanggal 16 Februari 2024.

Pada tanggal 7 Juni 2024, KJP telah menambah kepemilikan saham sebanyak 75.836.700 saham yang mewakili 7,52% dari modal disetor dan ditempatkan milik PTRO, yang merupakan hasil divestasi yang dilakukan oleh CRO. Sehingga, kepemilikan saham KJP di PTRO sebesar 41,52%.

PT Silika Salut Jaya (SSJ)

SSJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 01 oleh Junianto, S.H., M.Kn., tanggal 1 November 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0190219.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 034160. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan SSJ adalah penggalian pasir kuarsa atau silika. Modal dasar SSJ berjumlah Rp 5.700.000.000 terbagi atas 5.700 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000. Modal yang telah ditempatkan sebesar Rp 5.700.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 05 tanggal 11 September 2023, SSJ mengubah statusnya menjadi PT Penanaman Modal Asing (PMA) dan telah menyesuaikan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, mengubah susunan Komisaris dan Direksi, persetujuan penjualan saham pemegang saham lama sebanyak 3.900 saham kepada PMI dan meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebanyak 5.700 saham menjadi 12.000 saham. Saham baru yang diterbitkan sebanyak 4.500 saham atau sebesar Rp 4.500.000.000 diambil oleh PMI. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0181233.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 September 2023.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

On 19 February 2024, the Company has announced the completion of share acquisition by KJP, a subsidiary. KJP has completed the purchase from PT Caraka Reksa Optima (CRO) of 342,925,700 shares representing 34.00% (thirty four percent) of the total issued and paid-up capital of PTRO on 16 February 2024.

On 7 June 2024, KJP increased its ownership by 75,836,700 shares, which represents 7.52% of paid-up and issued capital of PTRO, as a result of divestment carried out by CRO. Therefore, the share ownership of KJP in PTRO accounted 41.52%.

PT Silika Salut Jaya (SSJ)

SSJ was established based on Notarial Deed No. 01 of Junianto, S.H., M.Kn., dated 1 November 2021 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0190219.AH.01.11.Year 2021 dated 1 November 2021 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 89, Supplement No. 034160. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of SSJ activity is excavation of quartz or silicasand. SSJ's authorized capital amounted to Rp 5,700,000,000 divided into 5,700 shares, each share having a nominal value of Rp 1,000,000. The issued capital is Rp 5,700,000,000.

Based on Notarial Deed No. 05 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 11 September 2023, SSJ changes its status into Foreign Investment Company ("PMA") and has amended all of its Articles of Association based on Law No. 25 Year 2007, changes its composition of Commissioners and Directors, approval for sale of the previous shareholders' shares totaling to 3,900 shares to PMI and the increase of authorized, issued and fully paid shares from 5,700 shares to 12,000 shares. The new issued shares, totaling to 4,500 shares or amounting to Rp 4,500,000,000 was acquired mostly by PMI. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0181233.AH.01.11.Year 2023 dated 13 September 2023.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Borneo Bangun Banua (BBB)

BBB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 4 April 2019 dari Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021175.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 04 tanggal 13 Mei 2024, oleh Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., B4 dan LP telah melakukan transaksi jual beli saham sebanyak 70% atau 700 lembar saham sebesar Rp 700.000.000 (setara dengan US\$ 44).

PT Intan Bumi Persada (IBP)

IBP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 17 Januari 2007 dari Raden Johannes Sarwono, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-02768 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Maret 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 51 tanggal 26 Juni 2007. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan utama IBP adalah dalam bidang pertambangan batu bara.

Pada tanggal 6 November 2024, Perusahaan, IBP dan GCXIN Limited (GL) telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham Bersyarat sehubungan dengan penjualan saham milik GL di IBP.

PT Usaha Berlayar Lancar (UBL)

UBL didirikan berdasarkan Akta Notaris Marliansyah, S.H., No. 10 tanggal 28 Oktober 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0086389.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024, Perusahaan melalui AMP, entitas anak, mendirikan entitas anak bernama UBL dengan kepemilikan saham sebesar 4.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 4.000.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, UBL bergerak dalam bidang angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Borneo Bangun Banua (BBB)

BBB was established based on Notarial Deed No. 11 dated 4 April 2019 of Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0021175.AH.01.01.Year 2019 dated 24 April 2019.

Based on Deed of Sale and Purchase No. 04 dated 13 May 2024, by Notary Devi Yanti, S.H., M.Kn., B4 and LP have conducted sales and purchase of shares in the total of 70% or 700 shares amounting to Rp 700,000,000 (equivalent to US\$ 44).

PT Intan Bumi Persada (IBP)

IBP was established based on Notarial Deed No. 30 dated 17 January 2007 of Raden Johannes Sarwono, S.H., which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. W7-02768 HT.01.01-TH.2007 dated 20 March 2007 and was published in State Gazette No. 51 dated 26 June 2007. In accordance with Article 3 of the Articles of Association, IBP's main activity is in the coal mining sector.

On 6 November 2024, the Company, IBP and GCXIN Limited (GL) have signed a Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) in connection with the sale of shares owned by GL in IBP.

PT Usaha Berlayar Lancar (UBL)

UBL was established based on Notarial Deed No. 10 dated 28 October 2024 of Marliansyah, S.H., which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0086389.AH.01.01.Year 2024 dated 31 October 2024, the Company through AMP, a subsidiary, established a subsidiary named UBL with share ownership of 4,000 shares with a nominal value of Rp 4,000,000,000. In accordance with Article 3 related to Aims and Objectives also Business Activities, UBL is engaged in the field of domestic sea transportation of goods.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Pika Utama Resources (PUR)

Berdasarkan Akta Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 29 September 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0198837.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022, terdapat perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan susunan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PUR adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta aktivitas PUR merupakan industri produk dari batu bara.

PT Kinarya Bangun Sesama (KBS)

Pada tanggal 1 September 2021, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan dengan Akta Notaris No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Kalimantan resmi berubah nama menjadi KBS dan perubahan tempat kedudukan semula berkedudukan di Kota Balikpapan menjadi berkedudukan di Tangerang Selatan. Jumlah kepemilikan saham PTRO tidak berubah baik sebelum atau sesudah pergantian nama, yaitu 99,80%.

Pada tanggal 9 Februari 2022, melalui keputusan sirkuler para pemegang saham KBS, PTRO meningkatkan jumlah modal disetor KBS sebesar Rp 17,5 miliar sehingga total modal disetor menjadi Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1.251). Terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham PTRO pada KBS dari yang sebelumnya sebesar 99,80% menjadi sebesar 99,99%.

PT Rekarsa Karya Nusantara (RKN) dan PT Karya Bhumi Lestari (KBL)

Pada tanggal 24 Maret 2017, PTRO mendirikan entitas anak baru, RKN (dahulu PT Petrosea Rekayasa dan Konstruksi Indonesia (PRKI)) dan KBL dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,90% dan 99,00%, sisanya sebesar 0,10% saham RKN dan 1,00% saham KBL dimiliki oleh PT POSB Infrastructure Indonesia (PII).

Pada tanggal 27 Agustus 2021, melalui keputusan sirkuler para pemegang saham KBL, PTRO meningkatkan jumlah modal disetor KBL melalui skema inbreng benda bergerak sebesar US\$ 17.811 sehingga total modal disetor KBL menjadi US\$ 20.406. Kepemilikan saham PTRO pada KBL sebesar 99,99% dan sisa kepemilikan sebesar 0,01% tetap dimiliki oleh PII.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Pika Utama Resources (PUR)

Based on Notarial Deed No.13 of Devi Yanti, S.H., M.Kn., dated 29 September 2022 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0198837.AH.01.11.Year 2022 dated 5 October 2022, there is a change in the aims and objectives as well as business activities and the composition of the Commissioners and Directors. In accordance with Article 3 of Articles of Association, the scope of PUR's activities is wholesale trading of solid, liquid, gas and YBDI products and PUR's activities are industrial products from coal.

PT Kinarya Bangun Sesama (KBS)

On 1 September 2021, through the decision of the General Meeting of Shareholders ("RUPS) which was ratified by Notarial Deed No. 1 made before a Notary Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., PT Petrosea Kalimantan officially changed its name to KBS and the change of domicile, previously in Balikpapan City to be changed in South Tangerang. The PTRO's total shareholding did not change either before or after the name change, which was 99.80%.

On 9 February 2022, through a circular decision of the shareholders of KBS, PTRO increased the total paid-up capital of PTKBS by Rp 17.5 billion, hence the total paid-up capital of KBS is Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1,251). There is a change in the composition of the PTRO's share ownership in KBS from previously 99.80% to 99.99%.

PT Rekarsa Karya Nusantara (RKN) and PT Karya Bhumi Lestari (KBL)

On 24 March 2017, PTRO established new subsidiaries, RKN (formerly PT Petrosea Rekayasa dan Konstruksi Indonesia (PRKI)) and KBL with 99.90% and 99.00% ownership interest, respectively, the remaining ownership 0.10% shares of RKN and 1.00% shares of KBL were owned by PT POSB Infrastructure Indonesia (PII).

On 27 August 2021, through a circular decision of the shareholders of KBL, PTRO increased the total paid-up capital of KBL through the inbreng moving assets scheme amounting to US\$ 17,811, hence the total paid-up capital of KBL is US\$ 20,406. PTRO's share ownership in KBL is 99.99% and the remaining 0.01% remains owned by PII.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI)

Pada tanggal 28 Juni 2018, PTRO telah mengakuisisi 95% saham KPI, yang berdomisili di Jakarta Selatan.

Petros Solution Pty. Ltd. (PSA)

Pada tanggal 8 Maret 2021, PTRO mendirikan entitas anak baru, PSA yang berkedudukan di Australia dengan kepemilikan saham sebesar 100%.

PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dan PT Cristian Eka Pratama (CEP)

Pada tanggal 23 Juni 2023, PTRO dan KBL telah mengakuisisi 100,00% saham di KMS dan entitas anak, CEP yang berdomisili di Tangerang Selatan. Akuisisi dilakukan untuk memperkuat lini bisnis PTRO.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, PTRO akan menyetorkan dana kepada KMS sejumlah Rp 245 miliar (setara dengan US\$ 15.800), sehingga meningkatkan jumlah modal disetor kepada KMS sebesar Rp 280,6 miliar (setara dengan US\$ 18.300).

Pada tanggal 31 Agustus 2023, entitas anak, KMS, akan menyetorkan dana kepada CEP sejumlah Rp 245 miliar (setara dengan US\$ 15.800), sehingga meningkatkan jumlah modal disetor kepada CEP sebesar Rp 250 miliar (setara dengan US\$ 16.200).

Pada tanggal 28 Juni 2024, KMS telah melakukan setor modal sebesar Rp 245 miliar kepada CEP.

PT Mahaka Industri Persada (MIP)

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Agustus 2015, PTRO melalui entitas anak, PII, telah mengakuisisi 51,25% saham dari MIP, yang berdomisili di Tangerang Selatan. Akuisisi dilakukan untuk memperkuat lini bisnis PTRO.

PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN)

PIN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 83 tanggal 30 September 2024 dari Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0079017.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan utama PIN adalah sebagai perusahaan *subholding* untuk menunjang aktivitas *holding* dan konsultasi manajemen di bidang infrastruktur.

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI)

On 28 June 2018, PTRO has acquired 95% shares of KPI, domiciled in South Jakarta.

Petros Solution Pty. Ltd. (PSA)

On 8 March 2021, PTRO established a new subsidiary, PSA which is located in Australia with 100% ownership of shares.

PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dan PT Cristian Eka Pratama (CEP)

On 23 June 2023, PTRO and KBL acquired 100.00% shares in KMS and its subsidiary, CEP domiciled in South Tangerang. Acquisition was done to strengthen the PTRO's business lines.

On 31 August 2023, PTRO will deposit funds to KMS amounting to Rp 245 billion (equivalent to US\$ 15,800), thus increasing the total paid-up capital to KMS by Rp 280.6 billion (equivalent to US\$ 18,300).

On 31 August 2023, the subsidiary KMS will deposit funds to CEP in the amount of Rp 245 billion (equivalent to US\$ 15,800), thus increasing the total paid-up capital to CEP by Rp 250 billion (equivalent to US\$ 16,200).

On 28 June 2024, KMS injected the capital amounting to Rp 245 billion to CEP.

PT Mahaka Industri Persada (MIP)

Based on Deed No. 17 dated 6 August 2015, PTRO through its subsidiary, PII, has acquired 51.25% shares of MIP, domiciled in South Tangerang. Acquisition was done to strengthen the PTRO's business lines.

PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN)

PIN was established based on Notarial Deed No. 83 dated 30 September 2024 of Ungke Mulawati, S.H., M. Kn., which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0079017.AH.01.01.Year 2024 dated 8 October 2024. In accordance with Article 3 of the Articles of Association, PIN's main activity is as a sub holding company to support holding and management consulting activities in the infrastructure sector.

Ekshibit E/15

Exhibit E/15

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

PT Lintas Kelola Berlaba (LKB)

Pada tanggal 1 November 2024, PTRO melalui entitas anak, PIN, mendirikan entitas anak baru, PT Lintas Kelola Berlaba (LKB), dengan kepemilikan saham PIN 51%.

PT Chandra Tirta Karian (CTK)

Pada tanggal 22 November 2024, PTRO melalui entitas anak, PIN, mendirikan entitas asosiasi baru, PT Chandra Tirta Karian (CTK), dengan kepemilikan saham PIN 35%.

e. Izin Usaha Pertambangan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki izin usaha pertambangan sebagai berikut:

No.	Perusahaan/ Company	Nomor/ Number	Tanggal/ Date	Periode (Tahun)/ Period (Year)	Luas Wilayah (Hektar)/ Area (Hectares)	Lokasi/ Location
1.	PT Tamtama Perkasa	188.45/377/2011	3 Oktober 2011/ 3 October 2011	20	9.540	Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ North Barito District, Central Kalimantan Province
2.	PT Daya Bumindo Karunia	188.45/264/2009	30 Juli 2009/ 30 July 2009	20	14.800	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ Seribu Riam Sub-District, Murung Raya District, Central Kalimantan Province
3.	PT Bara International	188.45/205/2009	18 Juni 2009/ 18 June 2009	20	14.990	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ Seribu Riam Sub-District, Murung Raya District, Central Kalimantan Province
4.	PT Intam	503/02/IUP-OP/2015	22 Oktober 2015/ 22 October 2015	20	18.500	Kecamatan Lantung Ropang dan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat/ Lantung Ropang and Lenangguar Sub-District, Sumbawa District, West Nusa Tenggara Province
5.	PT Intan Bumi Persada	256/DISTAMBEN TAHUN 2012	21 Juni 2012/ 21 June 2012	20	5.000	Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah/ Kapuas Tengah Sub-District, Kapuas District, Central Kalimantan Province
6.	PT Christian Eka Pratama	503/7380/IUP-OP/ DPMPTSP/XII/2019	9 Desember 2019/ 9 December 2019	19	4.776	Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur/ Tereng Sub-District, Kutai Barat District, East Kalimantan Province
7.	PT Borneo Bangun Banua	570/43/DESDM- IUPOP/VI/DPMPTSP- 2019	12 Juni 2019/ 12 June 2019	18	3.918	Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ Lahei Sub-District, North Barito District, Central Kalimantan Province

1. GENERAL (Continued)

d. Structure of the Group (Continued)

PT Lintas Kelola Bersama (LKB)

On 1 November 2024, PTRO through its subsidiary, PTPIN, established a new subsidiary, PT Lintas Kelola Berlaba (LKB), with 51% ownership of PIN's shares.

PT Chandra Tirta Karian (CTK)

On 22 November 2024, PTRO through its subsidiary, PTPIN, established a new associate entity, PT Chandra Tirta Karian (CTK), with 35% ownership of PIN's shares.

e. Mining Business Permit

As of 31 December 2024 and 2023, the Group has the following mining business permits:

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. U M U M (Lanjutan)

**f. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B)**

Pada tahun 1997, MUTU menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan PKP2B, MUTU bertindak sebagai Kontraktor Pemerintah dan diberikan hak tunggal untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pemurnian dan pemrosesan, pengangkutan dan penjualan sumber daya di Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara dan Barito Timur, Kalimantan Tengah dengan area seluas 24.970 Ha selama 30 tahun dimulai dari tanggal 4 Mei 2009.

Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia tentang PKP2B dimana setelah berakhirnya masa PKP2B, Pemerintah dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Perusahaan dengan jangka waktu 2 kali secara bertahap masing-masing 10 tahun.

g. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Perusahaan tambang harus memperoleh IPPKH dari Kementerian Kehutanan apabila melakukan kegiatan pertambangan di daerah hutan. Grup memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut:

No.	Perusahaan/ Company	Nomor/ Number	Tanggal/ Date	Periode (Tahun)/ Period (Year)	Luas Wilayah (Hektar)/ Area (Hectares)	Lokasi/ Location
1.	PT Tamtama Perkasa	SK.349/Menlhk/ Setjen/Pla.2/8/2018	13 Agustus 2009/ 13 August 2009	13	990	Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ North Barito District, Central Kalimantan Province
2.	PT Daya Bumindo Karunia	SK.868/Menhut- II/2014	29 September 2014/ 29 September 2014	17	3.324	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ Seribu Riam Sub-District, Murung Raya District, Central Kalimantan Province
3.	PT Bara International	SK. 371/Menhut- II/2010	22 Juni 2010/ 22 June 2010	15	1.580	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ Seribu Riam Sub-District, Murung Raya District, Central Kalimantan Province
4.	PT Multi Tambangjaya Utama	SK. 819/Menhut- II/2013	19 November 2013/ 19 November 2013	14	3.115	Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ South Barito District, East Barito District and North Barito District, Central Kalimantan Province

1. GENERAL (Continued)

f. Coal Contract of Work (CCoW)

In 1997, MUTU signed CCoW with the Government of the Republic of Indonesia. Based on CCoW, MUTU acts as a Government Contractor and is granted the sole right in exploring, mining, purifying and processing, transporting and selling resources found in South, North and East, Province of Barito, Central Kalimantan with total exploration area of 24,970 Ha for 30 years starting from 4 May 2009.

On 18 September 2014, MUTU signed Memorandum of Understanding with the Government of the Republic of Indonesia regarding the amendment to the CCoW, where after the expiration of CCoW, the Government may grant Special Mining Operation Permit ("IUPK") to the Company, as much as two periods gradually, each for ten years period.

g. Borrow-to-Use Forest Area Permit ("IPPKH")

Mining companies must obtain IPPKH from the Ministry of Forestry if they carry out mining activities in forest areas. The Group has lease-to-use forest area permits as follows:

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

h. Sumber Daya dan Cadangan

h. Resources and Reserves

Informasi berikut adalah sumber daya batu bara berdasarkan laporan tenaga ahli.

The following information is coal resources based on expert reports.

Estimasi sumber daya batu bara yang diklasifikasikan dalam sumber daya tereka, tertunjuk dan terukur disajikan dalam tabel berikut ini:

Estimated coal resources classified into inferred, indicated and measured resources are presented in the following table:

No.	Perusahaan/ Company	Sumber daya (dalam jutaan ton)/ Resources (in million of tons)			Total
		Tereka/ Inferred	Tertunjuk/ Indicated	Terukur/ Measured	
1.	PT Tamtama Perkasa	4,14	10,55	45,56	60,25
2.	PT Bara International	7,60	4,00	15,70	27,30
3.	PT Daya Bumindo Karunia	105,20	65,10	55,80	226,10
4.	PT Christian Eka Pratama	34,38	57,95	42,20	134,53
5.	PT Multi Tambangjaya Utama	23,51	26,83	44,48	94,82
6.	PT Borneo Bangun Banua	38,63	3,42	22,80	64,85

Estimasi cadangan batu bara yang diklasifikasikan dalam cadangan terkira dan terbukti ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Estimated coal reserves classified into probable and proved reserves are shown in the following table:

No.	Perusahaan/ Company	Cadangan (dalam jutaan ton)/ Reserves (in million of tons)		Total
		Terkira/ Probable	Terbukti/ Proved	
1.	PT Tamtama Perkasa	1,99	3,60	5,59
2.	PT Bara International	3,00	13,90	16,90
3.	PT Daya Bumindo Karunia	51,00	48,50	99,50
4.	PT Christian Eka Pratama	37,26	35,67	72,93
5.	PT Multi Tambangjaya Utama	3,40	13,64	17,04
6.	PT Borneo Bangun Banua	3,54	0,30	3,84

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan

a. Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan.

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which is comprised of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and capital market regulatory regulation, namely Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. This policy has been consistently applied to all periods presented.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Grup menetapkan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah (Rp), namun memutuskan bahwa mata uang penyajian mulai tanggal 1 Januari 2024 untuk laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar Amerika Serikat (US\$).

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun-tahun sebelumnya adalah Rp yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Dampak dari perubahan kebijakan tersebut diungkapkan pada Catatan 51.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan SAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Grup untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup. Area di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

**Standar baru, amendemen dan penyesuaian
Standar Akuntansi Keuangan efektif
1 Januari 2024**

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi keuangan tahun sebelumnya, kecuali penyajian mata uang bagi pengadopsian standar dan amendemen baru yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan amendemen.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The Group determined that its functional currency is Rupiah (Rp) but decided that the presentation currency starting 1 January 2024 for the consolidated financial statements is United States Dollar (US\$).

The presentation currency used in the consolidated financial statements in previous years was the Rp which is also the functional currency of the Group. The effect of the changed in policy are disclosed in Note 51.

The preparation of the consolidated financial statements in compliance with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires Group management to exercise judgement in applying the Group's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are disclosed in Note 3.

Changes in Accounting Policies

**New standards, amendments and improvements
of Financial Accounting Standards effective from
1 January 2024**

Accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial year, except for the presentation currency adoption of the new standards and amendments that are effective on or after 1 January 2024. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and amendments.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (Lanjutan)**

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

**Standar baru, amendemen dan penyesuaian
Standar Akuntansi Keuangan efektif
1 Januari 2024 (Lanjutan)**

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, DSAK juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada *International Financial Reporting Standards (IFRS)* (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada *IFRS* (diawali dengan angka 3 dan 4).

- PSAK 207 (amendemen), Laporan Arus Kas dan PSAK 107 (amendemen), Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen ini memperjelas pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok, sehingga memungkinkan pengguna untuk menilai dampak fasilitas pembiayaan tersebut terhadap liabilitas, arus kas, dan likuiditas, serta dampaknya jika fasilitas pembiayaan tidak lagi tersedia.

Amendemen tersebut mengharuskan entitas untuk memberikan pengungkapan tertentu (kualitatif dan kuantitatif) yang terkait dengan pengaturan pembiayaan pemasok. Amendemen tersebut juga memberikan panduan tentang karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**b. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (Continued)**

Changes in Accounting Policies (Continued)

**New standards, amendments and improvements
of Financial Accounting Standards effective from
1 January 2024 (Continued)**

New standards and amendments issued and effective for the financial year at or after 1 January 2024 which do not have material impact on the consolidated financial statement are as follows:

- Changes in the Numbering of PSAK and ISAK in Indonesian Financial Accounting Standards

In line with the endorsement of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework on 12 December 2022, DSAK has also authorized changes to the numbering of PSAK and ISAK in Indonesian Financial Accounting Standards.

The change is to differentiate the numbering of PSAK and ISAK that refer to *International Financial Reporting Standards (IFRS)* (beginning with numbers 1 and 2) and those that do not refer to *IFRS* (beginning with numbers 3 and 4).

- PSAK 207 (amendment), Statement of Cash Flows and PSAK 107 (amendment), Financial Instrument: Disclosures regarding Supplier Finance Arrangements

These amendments clarify disclosures regarding supplier financing arrangements, allows users to assess the impact of the financing facility on liabilities, cash flow and liquidity, as well as the impact if the financing facility is no longer available.

The amendments require entities to provide certain specific disclosures (qualitative and quantitative) related to supplier finance arrangements. The amendments also provide guidance on characteristics of supplier finance arrangements.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (Lanjutan)**

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

**Standar baru, amendemen dan penyesuaian
Standar Akuntansi Keuangan efektif
1 Januari 2024 (Lanjutan)**

- PSAK 116 (amendemen), Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik

Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik, mencakup penjelasan bagaimana entitas mencatat penjualan dan penyewaan kembali setelah tanggal transaksi. Sebelum Amendemen, PSAK 116 tidak membuat persyaratan pengukuran khusus untuk kewajiban sewa yang mungkin memuat pembayaran sewa variabel yang timbul dalam transaksi jual dan sewa balik, seperti transaksi jual dan sewa kembali yang sebagian atau seluruh pembayaran sewanya merupakan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga, kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Dalam menerapkan persyaratan pengukuran kewajiban sewa berikutnya pada transaksi jual dan sewa balik, amendemen mengharuskan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa yang direvisi' sedemikian rupa sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui sejumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak pengguna yang dimiliki oleh penjual-penyewa.

- PSAK 201 (amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan sehingga kondisi yang harus dipatuhi suatu entitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan mempengaruhi klasifikasi suatu kewajiban yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**b. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (Continued)**

Changes in Accounting Policies (Continued)

**New standards, amendments and improvements
of Financial Accounting Standards effective from
1 January 2024 (Continued)**

- PSAK 116 (amendment), Leases regarding Lease Liabilities in Sale and Leaseback

This amendment regulates the subsequent measurement of sale and leaseback transactions, to explain how an entity records sales and leasebacks after the date of the transaction. Prior to the Amendments, PSAK 116 did not contain specific measurement requirements for lease liabilities that may contain variable lease payments arising in a sale and leaseback transaction, such as sale and leaseback transactions where some or all of the rental payments are variable rental payments that are not dependent on indexes or rates are likely to be impacted. In applying the subsequent measurement requirements of lease liabilities to a sale and leaseback transaction, the Amendments require a sellerlessee to determine 'lease payments' or 'revised lease payments' in a way that the seller-lessee would not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use retained by the seller-lessee.

- PSAK 201 (amendment), Presentation of Financial Statements regarding Long Term Liabilities with Covenant

This amendment provides that only covenants with which an entity is subject to compliance on or before the reporting date which an entity must comply within twelve months after the reporting period affect the classification of a liability, will affect the classification of liabilities as current or non-current and their disclosure.

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (Lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Standar, interpretasi dan amendemen baru yang
belum efektif

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

• PSAK 117, Kontrak Asuransi

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan pada perusahaan asuransi seperti pemisahan antara pendapatan yang diperoleh dari bisnis asuransi dan bisnis investasi, termasuk penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi

• PSAK 221 (amendemen), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran

Amendemen ini menjelaskan pengaturan pengungkapan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.

c. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan, atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

b. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Changes in Accounting Policies (Continued)

New standards, interpretations and amendments
that are not yet effective

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards, interpretations and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

• PSAK 117, Insurance Contracts

PSAK 117 regulates the relaxation of several provisions for insurance companies such as the separation between income derived from the insurance business and investment business, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, implementation of risk mitigation options and several modifications to transition provisions.

• PSAK 221 (amendment), Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on lack of convertibility

This amendment clarifies the provisions related to conditions when a currency is not convertible and its disclosure.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

c. Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading, or

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

c. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang (Lanjutan)

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila: (Lanjutan)

- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas dan bank kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Induk Perusahaan dan seluruh entitas anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1d. Pengendalian didapat ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki:

- kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Current and Non-Current Classification
(Continued)

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is: (Continued)

- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash on hand or in banks unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Parent Company and all the subsidiaries mentioned in Note 1d. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through power over the *investee*. Specifically, the Group controls an *investee* if and only if the Group has:

- power over the *investee* (i.e., existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the *investee*);
- exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- the ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Ketika Grup mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasilnya;
- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Grup dan hak suara potensial.

Grup menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Grup dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Grup. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Grup mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Grup berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Grup dan kepentingan non-pengendali (KNP), meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Principles of Consolidation (Continued)

When the Group has less than majority of the voting rights or similar rights to an *investee*, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- the ability to use its power over the *investee* to affect the amount of its returns;
- the contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*;
- rights arising from other contractual arrangements; and
- the Group's voting rights and potential voting rights.

The Group reassesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Subsidiaries are fully consolidated from the date control is transferred to the Group and cease to be consolidated from the date control is transferred out of the Group. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the statement of income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests (NCI), even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- derecognises the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- derecognises the carrying amount of any NCI;
- derecognises the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup: (Lanjutan)

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Principles of Consolidation (Continued)

In case of loss of control over a subsidiary, the Group: (Continued)

- *recognises the fair value of the consideration received;*
- *recognises the fair value of any investment retained;*
- *recognises the surplus or deficit in profit or loss in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognised as comprehensive income to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or direct to retained earnings, as appropriate.*

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in profit or loss.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which is presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

e. Business Combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212: Pajak Penghasilan dan PSAK 219: Imbalan Kerja;
- instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 102: Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi; dan
- aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan diukur sesuai dengan standar tersebut.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap KNP pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap KNP pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen, imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Business Combination (Continued)

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- *deferred tax assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212: Income Taxes and PSAK 219: Employee Benefits;*
- *liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquiree are measured in accordance with PSAK 102: Shared-Based Payment at the acquisition date; and*
- *assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 105: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations and are measured in accordance with that standard.*

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any NCI in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any NCI in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain on a bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Aset Keuangan

1. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika, dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

2. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Financial Assets

1. Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *financial assets at fair value (whether through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *financial assets measured at amortized cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is made. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has exercised the irrevocable choice upon initial recognition to record the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when, and only when, the business model for managing those assets changes.

2. Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Aset Keuangan (Lanjutan)

2. Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- **Biaya perolehan diamortisasi**

Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Penghasilan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berupa kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain jangka pendek, piutang lain-lain jangka panjang dan dana yang dibatasi penggunaannya.

- **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")**

Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Financial Assets (Continued)

2. Measurement (Continued)

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- **Amortized cost**

A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

The Group's financial assets measured at amortized cost include cash and cash equivalents, trade receivables, short-term other receivables, long-term other receivables and restricted funds.

- **Fair value through other comprehensive income (FVOCI)**

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI.

Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses).

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

f. Aset Keuangan (Lanjutan)

2. Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang (Lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") (Lanjutan)

Penghasilan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVOCI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

- Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau FVTPL diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan neto dalam laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL berupa aset keuangan lainnya.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut.

Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financial Assets (Continued)

2. Measurement (Continued)

Debt instrument (Continued)

- Fair value through other comprehensive income (FVOCI) (Continued)

Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.

The Group has no financial assets measured at FVOCI as of 31 December 2024 and 2023.

- Fair value through profit or loss (FVTPL)

Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVTPL are measured at fair value through profit or loss.

A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.

The Group's financial assets measured at FVTPL include other financial assets.

Equity instrument

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment.

Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Aset Keuangan (Lanjutan)

2. Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen ekuitas (Lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Grup tidak memiliki investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasi sebagai aset keuangan.

3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan penurunan nilai untuk piutang usaha diakui berdasarkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 109 menggunakan matriks provisi dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur.

Selama proses ini, probabilitas non-pembayaran piutang usaha dinilai. Probabilitas ini kemudian dikalikan dengan jumlah kerugian yang diharapkan yang timbul dari wanprestasi untuk menentukan perkiraan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk piutang usaha.

Ketentuan penurunan nilai piutang dari pihak pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak-pihak berelasi diakui berdasarkan model kerugian kredit ekspektasian. Metodologi yang digunakan untuk menentukan jumlah provisi didasarkan pada apakah telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal aset keuangan.

Aset keuangan yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan bersama dengan penghasilan bunga bruto diakui. Aset keuangan yang memiliki risiko kredit telah meningkat secara signifikan, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur bersama dengan penghasilan bunga bruto diakui.

Aset keuangan yang dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur serta penghasilan bunga secara neto diakui.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Financial Assets (Continued)

2. Measurement (Continued)

Equity instrument (Continued)

Changes in the fair value of financial assets at FVTPL are recognized in other gain/(losses) in the profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

The Group's does not have investment in equity instrument classified as financial assets.

3. Impairment of Financial Assets

Impairment provisions for trade receivables are recognised based on the simplified approach within PSAK 109 using a provision matrix in the determination of the lifetime expected credit losses.

During this process the probability of the non-payment of the trade receivables is assessed. This probability is then multiplied by the amount of the expected loss arising from default to determine the lifetime expected credit loss for the trade receivables.

Impairment provisions for other receivables are recognized based on a forward-looking expected credit loss model. The methodology used to determine the amount of the provision is based on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition of the financial asset.

Financial assets where the credit risk has not increased significantly since initial recognition of the financial asset, 12 months expected credit losses along with gross interest income are recognised. Financial assets for which credit risk has increased significantly, lifetime expected credit losses along with the gross interest income are recognised.

Financial assets that are determined to be credit impaired lifetime expected credit losses along with interest income on a net basis are recognised.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Aset Keuangan (Lanjutan)

4. Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya.

h. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dijaminkan atau telah ditentukan penggunaannya untuk jaminan reklamasi dicatat sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dan disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dana yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak akhir periode pelaporan disajikan dalam bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Financial Assets (Continued)

4. Derecognition

The Group derecognises financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Group transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Group are recognised as assets or liabilities separately.

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Group derecognises the assets if the Group do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate.

In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognise the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which the Group are exposed to changes in the value of the transferred assets.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits which have maturities of three (3) months or less at the time of placement and are not restricted in use.

h. Restricted Funds

Funds that are pledged or have been determined to be used for reclamation guarantees are recorded as "Restricted Funds" and are presented as part of non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Restricted funds which will be used to pay obligations maturing after one year from the end of the reporting period are presented under the current asset section of the consolidated statements of financial position.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

i. Piutang Usaha dan Lain-lain

Piutang usaha dan lain-lain adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan dan jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

j. Persediaan

Persediaan batu bara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan lainnya dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

k. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka diakui sebesar biaya perolehan pada saat pembayaran dilakukan untuk pembelian barang, jasa atau aset tetap yang belum diterima. Ketika barang, jasa atau aset tetap diterima, uang muka akan diterapkan ke utang terkait.

Beban dibayar dimuka dibebankan ke laba rugi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Trade and Other Receivables

Trade and other receivables are amounts payable from customers for sales and service rendered in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts payable arising from transactions outside the ordinary course of business. If receivables are expected to be collectible within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Trade and other receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

j. Inventories

Coal inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method which includes mining costs, direct labor costs, other direct costs, and the allocation of a portion of variable and fixed indirect costs related to mining activities. These fees do not include borrowing costs. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs required to make the sale.

Other inventories are valued at cost less provision for obsolete and slow-moving inventories. Cost is determined using the weighted average method. Provision for obsolete and slow-moving inventories is determined based on the estimated use or sale of each type of inventory in the future. Materials supporting maintenance activities are recorded as production expenses in the period they are used.

k. Advances and Prepaid Expenses

Advances are recognized at cost when payment is made for the purchase of goods, services or property, plant and equipment that has not been received. When goods, services or property, plant and equipment are received, the advance will be applied to the related payables.

Prepaid expenses are charged to profit or loss over their useful lives using the straight-line method.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

l. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama.
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama.
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama.
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas Grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Grup melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator bersama mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama yang entitas tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Grup tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Grup menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

l. Interest in Joint Operation

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

When a Group entity undertakes its activities under joint operations, the Group as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- *Its assets, including its share of any assets held jointly.*
- *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly.*
- *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation.*
- *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

When a Group entity transacts with a joint operation which a Group entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Group is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

When a Group entity transacts with a joint operation in which a Group entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Group does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak yang dianggap berelasi dengan Grup adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dirujuk sebagai "entitas pelapor"), sebagai berikut:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama) yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
 - c. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam paragraf 1;
 - g. orang yang diidentifikasi dalam sub-paragraf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - h. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Transactions with Related Parties

Parties considered to be related to the Group are those persons or entities related to the entity whom preparing financial statements (referred to as "reporting entity"), as follows:

- (1) A person or family member has a relationship with a reporting entity if that person:
 - a. has control or joint control over the reporting entity;
 - b. has significant influence over the reporting entity; or
 - c. key management personnel of the reporting entity or of the parent of the reporting entity.
- (2) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - a. the entity and the reporting entity are members of the same business group (i.e., a parent, subsidiaries, and entities associated with the next subsidiaries of another entity);
 - b. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture) of a member of a business group, which the other entity is a member;
 - c. both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. the entity has a post-employment benefits plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related entities to the reporting entity;
 - f. entities controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph 1;
 - g. person identified in subparagraph (1) (a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the entity's parent entity);
 - h. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

n. Liabilitas Keuangan

1. Klasifikasi dan Pengukuran

(i) Liabilitas keuangan diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

(ii) Liabilitas keuangan lainnya

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal. Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Transactions with Related Parties (Continued)

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

n. Financial Liabilities

1. Classification and Measurement

(i) Financial liabilities measured at FVTPL

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held-for-trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held-for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future.

Derivative liabilities are also classified as held-for-trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group does not have financial liabilities measured at FVTPL as of 31 December 2024 and 2023.

(ii) Other financial liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability. This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

n. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

1. Klasifikasi dan Pengukuran (Lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan lainnya (Lanjutan)

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Grup memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, beban akrual, utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang sukuk ijarah, utang derivatif dan liabilitas sewa.

2. Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

o. Instrumen Keuangan Derivatif

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

- (a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/*underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak;
- (b) tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

n. Financial Liabilities (Continued)

1. Classification and Measurement (Continued)

(ii) Other financial liabilities (Continued)

Other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method. At the date of the consolidated statements of financial position, accrued interest is recorded separately from the principal borrowings in the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized as well as through the amortization process using the effective interest rate method.

The Group has other financial liabilities in the form of short-term bank loans, trade payables, other payables, dividends payable, accrued expenses, long-term bank loans, bonds payable, sukuk ijarah payable, derivative liability and lease liabilities.

2. Derecognition

The Group derecognises financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

o. Derivative Financial Instruments

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:

- (a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the 'underlying');
- (b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini: (Lanjutan)

(c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi risiko suku bunga berasal dari pinjaman dengan suku bunga mengambang. Instrumen keuangan derivatif tersebut diakui pada nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif dibuat dan selanjutnya dinilai pada nilai wajar.

Laba rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif dicatat langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali untuk porsi efektif lindung nilai arus kas, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Grup telah memilih untuk menetapkan transaksi derivatifnya dalam akuntansi lindung nilai.

Instrumen derivatif diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar berdasarkan penilaian fakta dan keadaan tertentu (seperti dasar arus kas kontraktual). Ketika Grup mempunyai derivatif sebagai lindung nilai ekonomi dan tidak diterapkan sebagai lindung nilai akuntansi untuk periode diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan, derivatif diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

p. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

o. Derivative Financial Instruments (Continued)

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics: (Continued)

(c) it is settled at a future date.

The Group uses derivative financial instruments to hedge its interest rate risks arising from loans with floating interest rate. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value.

Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for the effective portion of cash flow hedges, which is recognized in other comprehensive income. The Group has designated its derivative transactions under hedge accounting.

Derivative instruments are classified as current or non-current based on an assessment of the facts and circumstances (i.e., the underlying contracted cash flows). When the Group will hold a derivative as an economic hedge and does not apply hedge accounting for a period beyond 12 months after the reporting date, the derivative is classified as non-current.

p. Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

p. Nilai Wajar (Lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pengungkapan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tanpa disesuaikan) di pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identik dan dapat diakses pada tanggal pengukuran
- Tingkat 2: *Input* selain harga kuotasian yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga)
- Tingkat 3: *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah transfer telah terjadi antara tingkat dalam hierarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Fair Value (Continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Disclosures of the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

- Level 1: *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date*
- Level 2: *Inputs other than quoted price included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g., prices) or indirectly (for example, derivatives prices)*
- Level 3: *Unobservable inputs for the asset or liability*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

p. Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi.

Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai “terdaftar” diperjualbelikan dalam pasar aktif. Bila Grup memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, Grup memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas exposure risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai.

Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi.

Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau sebanding) dan pendekatan penghasilan (misalnya mengkonversi jumlah masa depan ke suatu jumlah tunggal saat ini).

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hierarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

q. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Grup berintensinya untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Fair Value (Continued)

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.

Securities defined in these accounts as “listed” are traded in an active market. Where the Group has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, the Group has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate.

For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances.

Valuation techniques include the market approach (i.e., using prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable assets, liabilities or a group of assets and liabilities) and the income approach (i.e., converting future amounts to a single current amount).

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

q. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if and only if there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Group intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

q. Saling Hapus (Lanjutan)

Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap masa depan yang tidak dapat dihindari.

Setelah pengukuran awal, aset tetap, kecuali tanah, diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah apabila ada kemungkinan manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Grup, dan biayanya dapat diukur secara andal. Beban pemeliharaan dan perbaikan lainnya dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Bangunan dan prasarana	4 - 20
Pelabuhan dan dermaga	4 - 20
Mesin dan perlengkapan	4 - 8
Peralatan tambang dan eksplorasi	5 - 12
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	1 - 8
Kendaraan dan peralatan transportasi	2 - 8
Tongkang	16

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

q. Offsetting (Continued)

This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the consolidated statement of financial position.

r. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment initially are recognized at acquisition cost including acquisition cost and directly attributable costs to bring property, plant and equipment to the desired location and condition and ready to used and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, is recognized at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

The costs after initial acquisition are recognized as part of the carrying value or as a separate asset if it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the Group, and the cost of the asset can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation of property, plant and equipment is computed using the straight-line method, over the estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Buildings and infrastructures</i>
<i>Port and jetty</i>
<i>Machinery and equipments</i>
<i>Exploration and mining equipments</i>
<i>Fixtures, furniture and office equipments</i>
<i>Vehicles and transportation equipments</i>
<i>B a r g e</i>

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year-end and adjusted prospectively, if necessary.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

r. Aset Tetap (Lanjutan)

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setiap biaya tertentu lainnya sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu hak atas tanah atau masa manfaat tanah, mana yang lebih pendek.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2u).

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun "Aset tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

s. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

r. Property, Plant and Equipment (Continued)

Land is stated at cost and is not depreciated. Any other certain costs in connection with the acquisition or renewal of land rights are deferred and amortized over the term of the land rights or the useful lives of the land, whichever is shorter.

When an indication of impairment exists, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the assets carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2u).

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Constructions-in-progress are stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Property, plant and equipment" account when the construction is completed and ready for its intended use.

s. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation activities include searching for mineral resources after the Group has obtained legal rights to explore a certain area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of specific mineral resources.

Exploration and evaluation expenditure includes costs directly related to:

- *acquisition of rights for exploration;*
- *topographical, geological, geochemical, and geophysical studies;*
- *exploratory drilling;*
- *separation and sampling; and*
- *activities related to evaluating the technical and commercial feasibility of mining mineral resources.*

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

s. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (Lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau;
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukkan aset kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya aset terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "Properti pertambangan".

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

s. Exploration and Evaluation Assets (Continued)

Exploration and evaluation costs related to an area of interest are expensed when incurred unless these costs are capitalized and deferred, based on the area of interest, if one of the following conditions is met:

- (i) there is a right to explore and evaluate an area and these costs are expected to be recovered through the successful development and exploitation of the area of interest or through the sale of the area of interest; or
- (ii) exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage that allows the determination of proven reserves that are economically recoverable, and active and significant activities in or related to the area of interest are still ongoing.

Capitalized costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, excluding tangible assets which are recorded as property, plant and equipment. General and administrative expenses are allocated as exploration or evaluation assets only if they are directly related to operational activities in the relevant area of interest.

Capitalized exploration and evaluation expenditures are written off as the conditions mentioned above are no longer met.

Identified exploration and evaluation assets acquired in a business combination are initially recognized as assets at fair value upon acquisition and are subsequently measured at cost less any impairment losses. Exploration and evaluation expenditures incurred after the acquisition of exploration assets in a business combination are accounted for in accordance with the above accounting policies.

Because exploration and evaluation assets are not available for use, these assets are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are tested for impairment when facts and circumstances indicate an impairment loss. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment when commercial reserves are discovered, before the assets are transferred to "Mining properties".

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

s. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (Lanjutan)

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

Tambang dalam pengembangan direklasifikasi ke tambang yang memproduksi pada akun properti pertambangan pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut dapat beroperasi sesuai dengan maksud manajemen. Tambang dalam pengembangan tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi tambang yang memproduksi.

t. Properti Pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasi secara terpisah untuk setiap area of interest pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, yaitu pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

Tambang dalam pengembangan direklasifikasi ke tambang yang memproduksi pada akun properti pertambangan pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut dapat beroperasi sesuai dengan maksud manajemen. Tambang dalam pengembangan tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi tambang yang memproduksi.

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "tambang yang memproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

s. Exploration and Evaluation Assets (Continued)

Expenditures incurred before the entity obtained the legal rights to explore a specific area are expensed when incurred.

Mines under development are reclassified to mines in production under mining properties account at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management. Mines under development are not amortized until they are reclassified into producing mines.

t. Mining Properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and exclude physical assets and land rights (i.e. right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as property, plant and equipment.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mining under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

Mines under development are reclassified to mines in production under mining properties account at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management. Mines under development are not amortized until they are reclassified into producing mines.

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of the "mines in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

t. Properti Pertambangan (Lanjutan)

Tambang yang berproduksi (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. Tambang yang berproduksi didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

Properti pertambangan diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2u.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Grup.

u. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit-Penghasil-Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

t. Mining Properties (Continued)

Mines in production (including reclassified exploration, evaluation and any development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the unit-of-production method, with separate calculations being made for each area of interest. Mines in production will be depleted using a unit-of-production method on the basis of proven reserves.

Identifiable mining properties acquired in a business combination is initially recognized as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the policy outlined above.

Mining properties are tested for impairment in accordance with the accounting policies in Note 2u.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available-for-use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

At the date of this consolidated financial statements, the Group has deferred stripping costs during the production stage which have criteria to deferred as applied in the Group's accounting policy.

u. Impairment of Non-Financial Assets

An individual asset's recoverable amount is determined by the higher between the fair value asset or Cash-Generating-Unit's (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from assets or group of other assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written-down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized immediately in profit or loss.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

u. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuation or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the entity estimates the recoverable amount.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

v. Biaya Pengupasan Tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biaya pengembangan tambang dan akan didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Grup: (i) batu bara yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam tahun berjalan; dan (ii) peningkatan akses ke badan batu bara di periode berikutnya.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batu bara yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Perubahan pada ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batu bara yang teridentifikasi dinyatakan sebagai perubahan atas estimasi dan dicatat menggunakan basis prospektif.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebagai penambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehingga disajikan sebagai "Properti pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dimasukkan ke dalam basis biaya perolehan aset saat penentuan UPK dalam tujuan pengujian penurunan nilai.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Grup.

w. Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

v. Stripping Cost

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalised as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depleted using the units-of production method on the basis of proven and probable reserves.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits that accrue to the Group: (i) coal that is processed into inventory in the current year; and (ii) improved access to the coal body in future periods.

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less amortisation and impairment losses, if any. The stripping activity asset is amortised using the units-of-production method over the expected useful life of the identified component of the coal body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is more appropriate.

Changes to the expected useful life of the identified component of the coal body are considered changes in estimates and are accounted for on a prospective basis.

A stripping activity asset is accounted for as an addition to, or enhancement of, an existing asset, and therefore is presented as part of "mining properties" in the consolidated statements of financial position.

Any stripping activity asset is included in the cost base of assets when determining a CGU for impairment assessment purposes.

As of the date of these consolidated financial statements, the Group has stripping costs during the production phase which qualify for deferral in accordance with the Group's accounting policies.

w. Provision for Reclamation and Mine Closure

Restoration, rehabilitation and other environmental costs incurred during the production phase of exploration are expensed as part of production costs.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**w. Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang
(Lanjutan)**

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Kewajiban tersebut dicadangkan, sehingga penyisihan tersebut akan cukup untuk memenuhi liabilitas yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa operasi, penutupan tambang dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan lainnya.

Provisi untuk estimasi biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dicatat pada saat: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dimasa lalu; besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui pada laporan laba rugi sebagai beban keuangan. Perubahan atas estimasi waktu, jumlah pengeluaran atau tingkat diskonto diperlakukan sebagai perubahan atas nilai tercatat aset terkait. Pada kondisi di mana penurunan nilai provisi lebih besar daripada sisa nilai tercatat aset terkait yang belum disusutkan, nilai tercatat aset tersebut dikurangkan menjadi nol dan penyesuaian sisanya dicatat dalam laporan laba rugi.

Provisi untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum yang berkaitan dengan penarikan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penarikan aset tetap ini termasuk penjualan, peninggalan, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain, bukan dikarenakan penghentian sementara pemakaian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**w. Provision for Reclamation and Mine Closure
(Continued)**

The Group has certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are accrued, so that the accrual will be adequate to meet those obligations once the productions process is fully completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

The environmental obligations consist of costs associated with mine reclamation during mine operation, mine closure and decommissioning and demobilization of facilities and other closure activities.

Provision for estimated costs of mine reclamation and mine closure is recorded when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount can be reliably estimated.

Provision is measured at the present value of expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognized in profit or loss under finance charges. Changes in the estimated timing or amount of the expenditure or discount rate are accounted for as a change in the corresponding capitalized costs. At the time where a reduction in the provision is greater than the undepreciated capitalized cost of the related assets, the capitalized cost is reduced to nil and the remaining adjustment is recognized in profit or loss.

Provision for decommissioning, demobilization and restoration provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset includes its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner, other than temporary removal from service.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**w. Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang
(Lanjutan)**

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut dan kewajiban tersebut ada dan jumlahnya bisa diukur, Grup mencatat estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, Grup mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

x. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Goodwill tidak diamortisasi tetapi direviu untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap UPK dari Grup (atau kelompok UPK) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari *goodwill* termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

y. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis, diidentifikasi dan diakui terpisah dari *goodwill* apabila definisi aset takberwujud dipenuhi dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset takberwujud adalah nilai wajar pada tanggal perolehan.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis dilaporkan sebesar biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset takberwujud, selain yang di peroleh dari kombinasi bisnis, diamortisasi selama 4 - 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**w. Provision for Reclamation and Mine Closure
(Continued)**

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Group accrues for the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Group applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

x. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

Goodwill is not amortized but is reviewed for impairment at least annually. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's CGU (or Group of CGU) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

y. Intangible Assets

Intangible assets acquired in a business combination are identified and recognized separately from goodwill when they satisfy the definition of an intangible asset and their fair value can be measured reliably. The cost of such intangible assets is their fair value at the acquisition date.

Subsequent to initial recognition, intangible assets acquired in a business combination are reported at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Intangible asset, other than acquired from business combination, is amortized over 4 - 10 years using the straight-line method.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

y. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset takberwujud atas hak pertambangan yang diperoleh dari kombinasi bisnis diamortisasi selama umur perijinan tambang dengan menggunakan metode garis lurus.

z. S e w a

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa pada tanggal insepse kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait semua perjanjian sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Untuk kontrak sewa ini, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal awal sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap (termasuk secara substansi pembayaran tetap), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal awal sewa;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli, jika cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika Grup ketentuan sewa merefleksikan eksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

y. Intangible Assets (Continued)

Intangible assets, comprising of mining rights, acquired from business combination is amortized over the mining permit life using straight line method.

z. Leases

As lessee

The Group assess whether a contract is or contains a lease, at inception of the contract. The Group recognize a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognize the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group use the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price of purchase option, is it is reasonably certain to exercise the option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

z. Sewa (Lanjutan)

Sebagai penyewa (Lanjutan)

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (dengan menggunakan metode suku bunga efektif) dan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna terkait) apabila:

- Masa sewa dirubah atau terdapat kejadian signifikan atau perubahan keadaan yang mengakibatkan perubahan penilaian atas opsi membeli aset pendasar, dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian;
- Pembayaran sewa berubah akibat perubahan indeks atau suku bunga atau perubahan jumlah pembayaran yang diharapkan dalam nilai residual terjamin, yang dalam hal ini, liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto awal (kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan suku bunga mengambang, dalam hal ini digunakan tingkat diskonto revisian); atau
- Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tersebut tidak dicatat sebagai sewa terpisah, yang dalam hal ini liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian dengan tingkat diskonto revisian pada tanggal efektif modifikasi.

Grup tidak melakukan penyesuaian seperti itu selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal awal sewa dikurangi dengan insentif sewa diterima, dan biaya langsung awal. Selanjutnya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

z. Leases (Continued)

As lessee (Continued)

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever:

- The lease term has changed or there is a significant event or change in circumstances resulting in a change in the assessment of exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- A lease contract is modified, and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate at the effective date of the modification.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurement of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received and any initial direct costs. The right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

z. Sewa (Lanjutan)

Sebagai penyewa (Lanjutan)

Apabila Grup mempunyai kewajiban untuk biaya membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, sepanjang menyangkut aset hak-guna, maka biaya-biaya tersebut dimasukkan sebagai biaya perolehan, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Aset hak-guna didepresiasi selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka aset hak-guna didepresiasi selama masa manfaat aset pendasar. Depresiasi dimulai dari tanggal awal sewa.

Aset hak-guna disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup menerapkan PSAK 236, "Penurunan Nilai Aset" untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aset hak-guna dan pencatatan atas penurunan nilai aset tetap seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi atas penurunan aset.

Sewa variabel yang tidak tergantung pada suatu indeks atau suku bunga, tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran tersebut dicatat sebagai beban pada periode kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dimasukkan dalam beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai tindakan praktis, PSAK 116, "Sewa" memungkinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen non-sewa, dan sebagai gantinya memperhitungkan setiap sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai pengaturan tunggal. Grup belum menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa tambahan, Grup mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan kedudukan agregat harga-sendiri komponen non-sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

z. Leases (Continued)

As lessee (Continued)

Whenever the Group incur an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, to the extent the costs are related to a right-of-use asset, the costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying asset. If a lease transfers ownership of the underlying asset or the cost of the right-of-use asset reflects that the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position. The Group applies PSAK 236, "Impairment of Assets" to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurement of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occurs and are included in the line 'Other operating expenses' in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 116, "Leases" permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For a contract that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

z. Sewa (Lanjutan)

Jual dan sewa-balik

Pada saat Grup mengalihkan aset ke entitas lain dan menyewa kembali aset tersebut, Grup mencatat kontrak pengalihan aset dan sewa, dengan terlebih dahulu menerapkan persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset tersebut dapat diakui sebagai penjualan.

Jika pengalihan aset memenuhi persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

- Grup mengukur aset hak pakai yang timbul dari sewa-balik sebesar proporsi nilai tercatat sebelumnya dari aset yang terkait dengan hak-guna yang dimiliki oleh Grup. Oleh karena itu, Grup hanya mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan.

Jika nilai wajar imbalan penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran sewa tidak menggunakan harga pasar, Grup membuat penyesuaian berikut untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- Seluruh keadaan *below-market* diakui sebagai pembayaran dimuka; dan
- Seluruh keadaan *below-market* diakui sebagai tambahan pembiayaan dari pesewa kepada penyewa.

Jika pengalihan aset tidak memenuhi persyaratan PSAK 115, "Pendapatan dengan Kontrak dari Pelanggan" untuk dicatat sebagai penjualan, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan dan mengakui liabilitas keuangan yang setara dengan hasil transfer.

aa. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

z. *Leases (Continued)*

Sale and leaseback

When the Group transfers an asset to another entity and leases that asset back, the Group accounts for the transfer contract and the lease, by first applying the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" when a performance obligation is satisfied to determine whether the transfer of the asset is accounted for as a sale.

If the transfer of asset satisfies the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" to be accounted for as a sale, the transaction is accounted for as follows:

- *The Group measures the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use assets retained by the Group. Accordingly, the Group recognizes only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred.*

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Group makes the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *Any below-market terms accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *Any above-market terms accounted for as additional financing provided by the lessor to the lessee.*

If the transfer of asset does not satisfy the requirements of PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" to be accounted for as a sale, the Group continues to recognize the transferred asset and recognizes a financial liability equal to the transfer proceeds.

aa. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah is recognize initially at nominal value, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between the carrying amount and nominal value are recognize in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as sukuk ijarah issuance costs using the straight-line method during the period of sukuk ijarah.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

aa. Sukuk Ijarah (Lanjutan)

Sukuk ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

ab. Modal Saham

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan terhadap penerbitan saham biasa atau opsi biasa, setelah dikurangi pajak, diakui sebagai pengurang ekuitas.

Apabila modal saham Perusahaan dibeli kembali, maka imbalan yang dibayarkan, termasuk semua kenaikan biaya yang dapat diatribusikan langsung (setelah dikurangi pajak), dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan terhadap pemegang ekuitas Perusahaan sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Pembelian kembali saham diklasifikasikan sebagai saham treasuri dan disajikan dalam cadangan saham treasuri.

Apabila saham treasuri dijual dan selanjutnya diterbitkan kembali, semua imbalan yang diterima, diakui sebagai kenaikan di dalam ekuitas dan surplus atau defisit yang timbul pada transaksi tersebut disajikan sebagai agio saham.

ac. Tambahan Modal Disetor

Pada saat saham terjual pada premium, selisih antara penerimaan dan nilai nominal dikreditkan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat saham ditempatkan dengan kompensasi selain kas, penerimaan diukur dengan nilai wajar kompensasi yang diterima. Apabila saham ditempatkan untuk menghapus atau melunaskan liabilitas Grup, saham harus diukur baik pada nilai wajar saham yang ditempatkan atau nilai wajar liabilitas yang dilunasi, mana yang lebih dapat ditentukan secara andal.

Biaya langsung yang terjadi sehubungan dengan penerbitan ekuitas, seperti biaya *underwriting*, akuntansi dan legal, biaya percetakan dan pajak dapat dibebankan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

aa. Sukuk Ijarah (Continued)

Sukuk ijarah, *adjusted with premium or discount and unamortized transaction costs, is presented as part of liabilities.*

ab. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares or options, net of tax effects, are recognized as a deduction from the equity.

Where the Company's equity share are repurchased, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of any tax effects) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Repurchased shares are classified as treasury shares and are presented in the treasury share reserve.

When treasury shares are sold and subsequently reissued, any consideration received is recognized as an increase in equity and the resulting surplus or deficit on the transaction is presented within share premium.

ac. Additional Paid-In Capital

When the shares are sold at premium, the difference between the proceeds and the par value is credited to the "Additional paid-in capital" account in the consolidated statement of financial position. When shares are issued for a consideration other than cash, the proceeds are measured by the fair value of the consideration received. In case the shares are issued to extinguish or settle the liability of the Group, the shares shall be measured either at the fair value of the shares issued or fair value of the liability settled, whichever is more reliably determinable.

Direct costs incurred related to equity issuance, such as underwriting, accounting and legal fees, printing costs and taxes are chargeable to the "Additional paid-in capital" account in the consolidated statement of financial position.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ad. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Program Manfaat Pasti

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Penyisihan tersebut diestimasi berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected-Unit-Credit".

Liabilitas atau aset imbalan kerja neto adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset.

Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

Biaya imbalan pasti terdiri dari biaya jasa kini diakui dalam laba rugi, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, diakui dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, diakui dalam laba rugi, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja jangka panjang.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ad. Liabilities for Employee Benefits

Defined Benefit Plan

The Group recognised employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 on Job Creation. Perppu Cipta Kerja 2/2022 has been enacted into law on 31 March 2023, based on Law No. 6 of 2023.

The allowance is estimated based on independent actuarial calculations using the "Projected-Unit-Credit" method.

The net employee benefit liability or assets is the aggregate of the present value of the defined benefit liabilities at the end of the reporting period less the fair value of plan assets (if any), adjusted for the effect of limiting the net defined benefit assets to the asset ceiling.

The asset ceiling is the present value of the economic benefits available in the form of a refund from the plan or a reduction in future contributions.

Defined benefit cost consists of current service cost recognized in profit or loss, past service cost and gain or loss on settlement, recognized in profit or loss, net interest on the net defined benefit liability (asset), recognized in profit or loss, and remeasurement of the liability (asset) net defined benefit in other comprehensive income.

Other long-term benefits

The cost of providing long-term benefits is determined using the Projected-Unit-Credit method. Past service cost and actuarial gains or losses are recognized immediately in profit or loss.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the long-term employee benefits obligation.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ae. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup melakukan 5 langkah penilaian sebelum mengakui pendapatan sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ae. Revenue and Expenses Recognition

Revenue from contract with customers

The Group perform 5 steps assessment before recognizing revenue as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ae. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan jasa

Grup memperoleh pendapatan dari penyediaan jasa penambangan, termasuk penambangan kontrak, pemindahan lapisan penutup tanah, dan pengangkutan batubara ke sektor pertambangan. Grup juga memperoleh pendapatan dari penyediaan logistik dan layanan pendukung untuk sektor minyak dan gas.

Grup membuat kontrak layanan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan kontrak, Grup menambah aset yang dikendalikan pelanggan atau pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja Grup. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak jasa diakui sepanjang waktu berdasarkan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan.

Tingkat penyelesaian dapat ditentukan dengan metode yang dapat mengukur jasa secara andal jasa yang diberikan. Bergantung pada jenis jasa dan sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- a. Survei atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- b. Nilai pekerjaan yang diselesaikan ditentukan berdasarkan harga untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang mengidentifikasi nilai pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu nilai pendapatan harus diakui;
- c. Jasa yang dilakukan hingga saat ini sebagai persentase dari total jasa yang telah dilakukan; atau
- d. Proporsi biaya kontrak yang timbul untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai saat ini relatif terhadap estimasi total biaya kontrak.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ae. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligations that have been fulfilled.

Rendering of services

The Group generates revenue from the provision of mining services, including contract mining, overburden removal, and coal haulage to the mining sector. The Group also generates revenue from providing logistics and support services to the oil and gas sector.

The Group enters into short-term and long-term service contracts with customers. Under the terms of the contracts, the Group enhances assets which the customers control or the customers simultaneously receive and consume the benefit of the Group's performance. Revenue from service contracts is therefore recognized over time based on the stage of completion of the contract at the end of the reporting period.

The stage of completion may be determined based on methods that can reasonably measure the services performed. Depending on nature of the service contracts, the methods may include:

- a. Surveys of work performed;
- b. Value of work completed determined based on schedule of rates for each of the activities performed which identify value for the work performed and hence the value of the revenue to be recognized;
- c. Services performed to date as a percentage of total services to be performed; or
- d. The proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ae. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan dari kontrak konstruksi

Grup membuat kontrak konstruksi jangka panjang dengan pelanggan. Kewajiban pelaksanaan keseluruhan proyek, yang diatur dalam kontrak, mengingat bahwa jasa yang berbeda saling bergantung, terintegrasi, dan ditujukan untuk transfer proyek ke pelanggan secara keseluruhan, mewakili hasil gabungan yang terdapat di kontrak oleh pelanggan.

Berdasarkan persyaratan kontrak, Grup meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu dengan metode input biaya-ke-biaya, yaitu berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan hingga saat ini dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Manajemen menganggap bahwa metode ini adalah ukuran yang tepat untuk kemajuan dalam memenuhi kewajiban kinerja untuk kontrak konstruksi jangka panjang Grup.

Jika hasil dari kewajiban pelaksanaan tidak dapat diukur secara wajar, dan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan diperkirakan dapat dipulihkan, maka pendapatan diakui hanya sejumlah biaya yang terjadi.

Jika kemungkinan besar biaya yang terjadi untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan akan melebihi pendapatan kontrak, kerugian segera diakui.

Tidak terdapat komponen pembiayaan yang signifikan dalam kontrak konstruksi karena rata-rata jangka waktu kredit adalah di bawah 1 tahun.

Grup menyajikan saldo kontraknya, berdasarkan basis per kontrak, dalam posisi aset kontrak atau liabilitas bersih, secara terpisah dari piutang usaha. Aset kontrak dan piutang usaha keduanya merupakan hak atas imbalan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang telah dialihkan Grup kepada pelanggan. Namun, klasifikasi tersebut bergantung pada apakah hak tersebut hanya tergantung pada kondisi waktu (piutang usaha) atau apakah juga tergantung pada hal lain (aset kontrak), seperti pemenuhan kewajiban pelaksanaan selanjutnya berdasarkan kontrak. Liabilitas kontrak adalah jumlah kumulatif yang diterima dan piutang kontraktual oleh Grup yang melebihi hak imbalan yang dihasilkan dari kinerja Grup berdasarkan kontrak tertentu.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ae. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Rendering from construction contracts

The Group enters into long-term construction contracts with customers. The performance obligation is usually the entire project, as provided for in the contract, given that the different services are highly interdependent, integrated, and are aimed at transferring the project to the customer as a whole, representing the combined output for which the customer has contracted.

Under the terms of the contracts, the Group enhances assets which the customers control. Revenue from construction contracts is therefore recognized over time on a cost-to-cost input method, i.e. based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. Management considers that this input method is an appropriate measure of the progress towards complete satisfaction of these performance obligations for long-term construction contracts of the Group.

Where the outcome of a performance obligation cannot be reasonably measured, and the costs incurred in satisfying the performance obligation are expected to be recoverable, the revenue is recognized only to the extent of the costs incurred.

When it is probable that the cost incurred in satisfying a performance obligation will exceed the contract revenue, the expected loss is recognized immediately.

There is no significant financing component in construction contracts as the average credit term is below 1 year.

The Group presents its contract balances, on a contract-by-contract basis, in a net contract asset or liability position, separately from its trade receivables. Contract assets and trade receivables are both rights to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer; however, the classification depends on whether such right is only conditional on the passage of time (trade receivables) or if it is also conditional on something else (contract assets), such as the satisfaction of further performance obligations under the contract. A contract liability is the cumulative amount received and contractually receivable by the Group that exceeds the right to consideration resulting from the Group's performance under a given contract.

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

ae. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Penjualan batu bara

Grup memperoleh pendapatan dengan menambang dan kemudian menjual batubara ke pelanggan dengan berbagai persyaratan komersial.

Grup menjual beberapa batubara dengan *incoterm* tertentu, yang berarti bahwa Grup bertanggung jawab atas barang dan jasa lainnya pada titik dimana kepemilikan berpindah.

Grup mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dengan mengalihkan kontrol atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

B e b a n

i. Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115 dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

ii. Beban-beban lainnya

Beban-beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

af. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi. Pajak final tidak termasuk lingkup pajak penghasilan berdasarkan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

ae. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Sales of coal

The Group earns revenue by mining and subsequently selling coal to customers under arrange of commercial terms.

The Group sells certain of its coal on certain *incoterm*, which means that the Group is responsible for goods and other services at which title of the goods passes.

The Group recognize revenue when the performance obligation has been satisfied by transferring control of a promised goods or services to the customer.

Revenue is measured based on the consideration specified in the contract and excludes amounts collected on behalf of third parties.

Expenses

i. Expenses from contract with customers

Costs that are directly related to the contract, generating resources to fulfill the contract ("cost to fulfill") or incremental to obtain a contract ("cost to acquire") and expected to be recovered. These expenses thus meet the capitalization requirements based on PSAK 115 and recognized as an asset. These expenses are amortized on a systematic basis in line with the delivery of the goods or services associated with the asset.

ii. Other expenses

Other expenses are recognized when incurred.

af. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions. Final tax is scoped out from income tax based on PSAK 212, "Income Tax".

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

af. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Final (Lanjutan)

Beban pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subyek pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode/tahun berjalan dan dicatat sebagai beban pajak final. Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

i. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini di hitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum di bayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Pengakuan awal *goodwill*

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

af. Taxation (Continued)

Final Tax (Continued)

Tax expense related to income subject to final tax is recognised in proportion to total income recognised during the current period/year for accounting purposes and recorded as final tax expense. The differences between the final tax paid and the amount charged as final tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognised as prepaid tax or tax payable.

Income Tax Expense

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

i. Current Tax

The current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognised as a component of income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

ii. Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- *The initial recognition of goodwill*

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

af. Perpajakan (Lanjutan)

Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan)

ii. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena: (Lanjutan)

- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Grup mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Perusahaan yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

af. Taxation (Continued)

Income Tax Expense (Continued)

ii. Deferred Tax (Continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on: (Continued)

- *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and*
- *Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Group is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.*

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- *The same taxable company, or*
- *Different group entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

af. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui neto dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

Hal-hal perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika diajukan banding, pada saat hasil banding yang ditetapkan.

ag. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian setiap entitas individual Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu;
- Selisih nilai tukar yang muncul dari penjabaran kembali pos-pos non-moneter, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk pos-pos non-moneter tersebut, setiap keuntungan atau kerugian dari komponen pertukaran tersebut juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

af. Taxation (Continued)

Value Added Tax (VAT)

Revenue, expenses and assets are recognised net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the tax authority, in which case the VAT is recognised as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

Other Taxation Matter

Amendments to taxation obligations are recorded when a Tax Assessment Letter is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

ag. Foreign Currency Transactions and Translation

In preparing the consolidated financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transactions entered into in order to hedge certain foreign currency risks;
- Exchange differences arising on the retranslation of non-monetary items carried at fair value, of which gains and losses are recognized in other comprehensive income. For such non-monetary items, any exchange component of that gain or loss is also recognized in other comprehensive income.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**ag. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan
dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)**

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas, dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non-pengendali).

ah. Provisi

Provisi pembongkaran, reklamasi, dan penutupan tambang

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut timbul selama penambangan.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya pinjaman.

Provisi pembongkaran aset-aset tambang dan kegiatan pasca tambang terkait beserta peninggalan dan pembongkaran aset-aset berumur panjang dibentuk sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, fasilitas peremuk dan pengolahan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**ag. Foreign Currency Transactions and Translation
(Continued)**

For the purpose of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities are translated into US Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

ah. Provision

Provision for decommissioning, mine reclamation and mine closure

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of revenue when an obligation arising from the disturbance occurs as extraction progresses.

These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation has arisen from activities which have already been performed. This obligation is initially and subsequently measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate, which reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arise during production are also charged to the cost of revenue, while the increase in the provision due to the passage of time is recognised as borrowing cost.

Provision for decommissioning of mining assets and related post-mining activities, as well as the abandonment and decommissioning of other long lived assets, is made for the legal obligations associated with the retirement of mining related assets and other long-lived assets including the decommissioning of buildings, equipment, crushing and handling facilities, infrastructure and other facilities that resulted from the acquisition, construction or development of such assets.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ah. Provisi (Lanjutan)

Provisi pembongkaran, reklamasi, dan penutupan
tambang (Lanjutan)

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun periode. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi.

Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

Provisi lain-lain

Provisi untuk biaya restrukturisasi, tuntutan hukum, atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian aset, reklamasi, dan penutupan area pertambangan dan lainnya diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ah. Provision (Continued)

Provision for decommissioning, mine reclamation
and mine closure (Continued)

These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation.

The changes in the measurement of decommissioning obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g., cash flow) required to settle the obligations, or a change in the discount rate, will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss.

If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment losses incurred.

Other provisions

Provisions for restructuring costs, legal claims, or environmental issues that may not involve the retirement of an asset, reclamation and closure of mining areas and others are recognised when:

- *The Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;*
- *It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and*
- *The amount can be reliably estimated.*

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ah. Provisi (Lanjutan)

Provisi lain-lain (Lanjutan)

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya pinjaman.

ai. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode/tahun setelah mempertimbangkan efek pemecahan saham.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode/tahun setelah mempertimbangkan efek pemecahan saham ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan dikeluarkan pada saat obligasi konversi dikonversi menjadi saham biasa.

aj. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ah. Provision (Continued)

Other provisions (Continued)

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of an outflow in respect of any one item may be small, it may be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognised.

The provision is measured at the present value of management's best estimate of the expenditure expected to be required to settle the present obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as borrowing cost.

ai. Earnings per Share

Earnings per share is calculated by dividing net profit attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period/year after considering the effects of stock splits.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of shares outstanding during the period/year after considering the effect of stock splits plus the weighted average number of shares that will be issued when the convertible bonds are converted into common stock.

aj. Operating Segment

An operating segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

aj. Segmen Operasi (Lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen operasi termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasian.

ak. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontingensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Investasi dalam Saham

Perusahaan mempunyai 41,52% kepemilikan di PTRO melalui entitas anak, KJP, pada tanggal 31 Desember 2024. Akan tetapi, Perusahaan mengonsolidasikan PTRO dalam laporan keuangan Perusahaan karena KJP memiliki hak untuk mengendalikan PTRO berdasarkan surat *waiver* yang diberikan oleh PT Caraka Reksa Optima, pemegang saham yang memiliki 18,29% saham atas PTRO pada tanggal 31 Desember 2024.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

aj. Operating Segment (Continued)

Operating segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as items that can be allocated on an adequate basis to the segment. Operating segments are determined before inter-group balances and transactions are eliminated as part of the consolidation process.

ak. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements.

Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

Classification of Investment in Shares

The Company has 41.52% ownership over PTRO through subsidiary, KJP, as of 31 December 2024. However, the Company consolidated PTRO in its financial statements since KJP has right to control PTRO based on waiver letter provided by PT Caraka Reksa Optima, a shareholder that owns 18.29% ownership in PTRO as of 31 December 2024.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

Pertimbangan (Lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Pajak Penghasilan

Dalam menentukan total yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan total provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi" dan ISAK 123, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menginterpretasikan peraturan pajak yang kompleks mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Judgments (Continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. Management considers the currency that most influences revenues and expenses from the services provided and considers other indicators in determining the currency that best describes the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Income Taxes

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and ISAK 123, "Uncertainty over Income Tax Treatments".

The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

Significant judgment is involved in interpreting the complex tax regulation which lead to the uncertainty in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Estimates and Assumption

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

Fair Value of Financial Instruments

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Grup menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif, menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk diskon tarif dan perkiraan arus kas masa depan. Dalam hal itu, perkiraan nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat dibuktikan dengan perbandingan dengan pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak mampu disadari dengan segera.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 50.

Pengukuran Nilai Wajar dalam Kombinasi Bisnis

Di dalam suatu kombinasi bisnis, Grup perlu untuk menilai dan menentukan nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi, termasuk setiap potensi aset takberwujud, yang mengharuskan Manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi. Setiap kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar dari aset neto yang dipindahkan akan diakui sebagai *goodwill*.

Penilaian nilai wajar dalam kombinasi bisnis melibatkan adanya pertimbangan manajemen signifikan dalam mengidentifikasi adanya aset takberwujud dan estimasi sehubungan dengan penilaian nilai wajar atas aset yang diakuisisi, asumsi liabilitas dan aset takberwujud yang diidentifikasi. Estimasi utama yang digunakan dalam nilai wajar adalah tingkat diskonto dan proyeksi pendapatan.

Nilai wajar atas kombinasi bisnis diungkapkan dalam Catatan 45.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Fair Value of Financial Instruments (Continued)

The Group determines the fair value of financial instruments that are not traded in active markets, using valuation techniques. The technique is significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows. In such cases, reduced fair value estimates may not always be demonstrable by comparison with independent markets and, in many cases, may not be realized immediately.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial assets and liabilities are disclosed in Note 50.

Fair Value Measurement in Business Combination

In a business combination, the Group is required to assess and determine the fair value of the assets acquired, including any potential intangible assets, that the Management is required to make judgement and estimate. Any excess of the purchase consideration over the fair value of the net assets acquired is recognized as *goodwill*.

The fair value measurement in the business combination involves significant management's judgment in identifying any intangible assets and estimates in respect of determining the fair value of assets acquired, liabilities assumed and identified intangible assets. The key estimates used in the fair value are discount rate and revenue projection.

Fair value of business combination is disclosed in Note 45.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha
(Lanjutan)

Nilai tercatat dari piutang usaha Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 192.224 dan US\$ 1.583. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan
Persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

Nilai tercatat persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 69.212 dan US\$ 39.227. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 9.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 1 sampai 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 471.206 dan US\$ 36.926. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Tanggal Mulai Produksi

Grup Pertambangan Batu bara menilai kondisi setiap tambang dalam tahap pengembangan untuk menetapkan kapan suatu tambang dipindahkan ke tahap produksi yaitu saat dimana tambang tersebut secara substansial telah dikembangkan dan siap untuk berproduksi secara komersial. Kriteria yang digunakan untuk menentukan tanggal mulai produksi didasarkan pada kondisi masing-masing tambang, seperti kompleksitas dan lokasi tambang yang dimaksud.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables
(Continued)

The carrying amount of the Group's trade receivables as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 192,224 and US\$ 1,583, respectively. Further details are disclosed in Note 7.

Allowance for Decline in Market Value and Inventory
Obsolescence

Allowance for impairment of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of inventories on hand, market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs incurred for sales. Provisions are re-evaluated and adjusted if there is additional information that affects the estimated amount.

The carrying value of inventory as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 69,212 and US\$ 39,227, respectively. Further details are disclosed in Note 9.

Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these property, plant and equipment to be within 1 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Group's property, plant and equipment as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 471,206 and US\$ 36,926, respectively. Further details are disclosed in Note 16.

Production Start Date

The Coal Mining Group assesses the stage of each mine under development to determine when a mine moves into the production stage, being the time when the mine is substantially developed and ready for commercial production. The criteria used to assess the start date of production are determined based on the unique nature of each mine construction project, such as the complexity of mining site and its location.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Tanggal Mulai Produksi (Lanjutan)

Grup mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan kapan tahap produksi dapat dimulai dan mereklasifikasi nilai terkait dari “Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tambang Ditangguhkan Sehubungan dengan Daerah Pengembangan yang belum Mencapai Tahap Produksi Komersial” menjadi “Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tambang Ditangguhkan Sehubungan dengan Daerah Pengembangan (“Area of Interest”) yang telah Mencapai Tahap Produksi Kembali”.

Berikut beberapa kriteria yang digunakan, termasuk namun tidak terbatas:

- Besaran belanja modal yang telah terjadi dibandingkan dengan estimasi biaya konstruksi awal;
- Penyelesaian periode pengujian yang memadai atas tambang beserta peralatannya;
- Kemampuan untuk memproduksi hasil tambang dalam bentuk siap jual (dengan spesifikasi tertentu); dan
- Kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan produksi.

Pada saat sebuah tambang dalam tahap pengembangan/konstruksi dipindahkan ke tahap produksi, kapitalisasi biaya pengembangan tambang dihentikan dan biaya yang timbul dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan, kecuali untuk biaya yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sehubungan dengan penambahan atau pengembangan properti pertambangan atau pengembangan cadangan tambang. Pada tahap ini penyusutan/amortisasi dimulai.

Estimasi Cadangan

Cadangan batu bara adalah perkiraan jumlah batu bara yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batu bara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Australian Joint Ore Reserves Committee untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih (“JORC”). Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan batu bara, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, belanja modal di masa depan, kewajiban biaya penutupan dan nilai tukar.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Production Start Date (Continued)

The Group considers various relevant criteria to assess when the production phase is considered to commence and all related amounts are reclassified from “Deferred Mining Exploration and Development Costs Related to Area of interest which have not yet Reached the Commercial Production Stage” to “Deferred Mining Exploration and Development Costs related to Areas of Interest which have Reached the Commercial Production Stage”.

Some of the criteria used will include, but are not limited to, the following:

- Level of capital expenditure incurred compared to the original construction cost estimates;
- Completion of the reasonable period of testing of the mine plant and equipment;
- Ability to produce metal in saleable form (within specifications); and
- Ability to sustain ongoing production.

When a mine development/construction project moves into the production stage, the capitalization of certain mine development/construction costs ceases and costs are either regarded as forming part of the cost of revenue, except for costs that qualify for capitalization relating to mining assets additions or improvements or mineable reserve development. It is also at this point that depreciation/amortization commences.

Reserve Estimates

Coal reserves are estimates of the amount of coal that can be economically and legally extracted from Group property. The Group determines and reports its coal reserves under the principle incorporated with the Australian Joint Ore Reserves Committee (JORC). In estimating the coal reserves, there are some factors that need to be considered related to geological, technical and economic factors, including production quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices, future capital expenditures, liabilities for mine closure and exchange rate.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi Cadangan (Lanjutan)

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batu bara membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan batu bara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti “uji petik” sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat memengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan, selain Goodwill

Grup menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai semua aset non-keuangan, selain goodwill, pada setiap tanggal pelaporan. Aset non-keuangan diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini memerlukan estimasi nilai unit penghasil kas.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Reserve Estimates (Continued)

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal seams or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- Asset carrying amounts may be affected due to changes in the estimated future cash.
- Depreciation, depletion and amortization charged to profit or loss may change where such charges are determined based on the unit-of-production method or where the economic useful lives of assets change.
- Provisions for mine closure may change if changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying amount of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the probability that tax benefits will be recovered.

Impairment of Non-Financial Assets, other than Goodwill

The Group assess whether there are any indications of impairment for all non-financial assets, other than goodwill, at each reporting date. Non-financial assets are tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable. This requires an estimation of the value in use of the cash generating units.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan, selain Goodwill
(Lanjutan)

Estimasi nilai mengharuskan Grup untuk membuat perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan dari Unit Penghasil Kas dan juga memilih tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut. Apabila terdapat nilai yang tidak bisa diestimasi secara andal, jumlah yang dapat dipulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan.

Penilaian Nilai Goodwill

Grup disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai goodwill telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas.

Jumlah goodwill pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar US\$ 19.768 dan nihil. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 19.

Pajak Tangguhan

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam Catatan 27f.

Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang

Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") mengatur aktivitas reklamasi dan pasca-tambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri No. 26/2018 mengatur prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Grup menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78 tersebut.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Impairment of Non-Financial Assets, other than
Goodwill (Continued)

Value estimation requires the Group to make estimates of the expected future cash flows from the Cash Generating Units and select an appropriate discount rate to calculate the present value of those cash flows. If a value cannot be estimated reliably, the recoverable amount is based on fair value less costs to sell.

Impairment of Goodwill

The Group is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value-in-use calculations. The use of this method requires the estimation of future cash flows and the determination of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows.

The carrying value of goodwill as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 19,768 and nil. Further details are disclosed in Note 19.

Deferred Tax

Significant estimation by management is required in determining the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the timing and level of taxable income and future tax planning strategies.

The carrying value of deferred tax assets and liabilities recognized as of 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 27f.

Provision for Mine Reclamation and Closure

Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") deals with reclamation and post-mining activities for both Mining Business Licence ("IUP")-Exploration and IUP-Production Operation holders and Ministerial Regulation No. 26/2018 deals with proper mining principles and supervision in mineral and coal mining activities. The transitional provisions in GR No. 78 make it clear that CCA/CCoW holders are also required to comply with this regulation. Therefore, the Group have calculated provisions for reclamation and mine closure based on GR No. 78.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang
(Lanjutan)

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat memengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

Nilai tercatat atas provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 10.730 dan US\$ 391. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 33.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 29.397 dan US\$ 164. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 32.

**3. MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
(Continued)**

Estimates and Assumption (Continued)

Provision for mine reclamation and closure (Continued)

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of revenue when the obligation arising from the disturbance occurs as extraction progresses. The reclamation of disturbed areas and decommissioning of mining assets and other long-lived assets will be undertaken several years into the future and precise requirements are constantly changing to satisfy political, environmental, safety and public expectations. As such, the timing and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. Changes in the expected future costs could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

The carrying amount of the Group's provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 10,730 and US\$ 391, respectively. Further details are disclosed in Note 33.

Employee Benefits

The determination of the Group employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, future annual salary increase, retirement age, annual employee turn-over rate and mortality rate. Actual results that differ from the Group assumptions are recognised immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as and when they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group actual experiences or significant changes in the Group assumptions may materially affect its liability for employee benefits and net employee benefits expense.

The carrying amount of the Group estimated liabilities for employee benefits as of 31 December 2024 and 2023 amounted to US\$ 29,397 and US\$ 164, respectively. Further details are disclosed in Note 32.

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
K a s			Cash on hand
Dalam Rupiah	101	17	In Rupiah
Dalam Dolar AS	20	-	In US Dollar
Sub-total	121	17	Sub-total
Kas di bank			Cash in banks
<u>Dalam Rupiah</u>			<u>In Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	123.673	32.111	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	38.044	15.251	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.883	696	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	1.019	-	PT Bank HSBC Indonesia
Citibank, NA.	554	-	Citibank, NA.
PT Bank CIMB Niaga Tbk	205	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	147	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	10	116	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	5	2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	-	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltimara	1	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kaltimara
PT Bank Mestika Dharma Tbk	-	111	PT Bank Mestika Dharma Tbk
<u>Dalam Dolar AS</u>			<u>In US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.888	5.406	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.292	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	7.345	7.208	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	547	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Citibank, NA.	117	-	Citibank, NA.
PT Bank HSBC Indonesia	98	-	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	4	1	PT Bank DBS Indonesia
<u>Dalam Dolar Australia</u>			<u>In Australian Dollar</u>
Westpac Banking Corporation	47	-	Westpac Banking Corporation
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	3	-	PT Bank HSBC Indonesia
<u>Dalam Dolar Singapura</u>			<u>In Singapore Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Dalam Euro</u>			<u>In Euro</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub-total	241.096	60.902	Sub-total

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Deposito berjangka			Time deposits
<u>Dalam Rupiah</u>			<u>In Rupiah</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.760	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<u>Dalam Dolar AS</u>			<u>In US Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<u>Dalam Dolar Australia</u>			<u>In Australian Dollar</u>
PT Bank HSBC Indonesia	12	-	PT Bank HSBC Indonesia
Sub-total	31.774	-	Sub-total
T o t a l	272.991	60.919	T o t a l
Tingkat suku bunga per tahun Deposito berjangka	1,00% - 6,25%	-	Interest rate per annum Time deposits

Pada bulan 12 Juli 2023, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) yang efektif berlaku pada 1 Agustus 2023. Peraturan ini mewajibkan eksportir hasil pertambangan untuk memasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau bank. Penempatan DHE SDA wajib untuk eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US\$ 250 atau ekuivalennya. DHE SDA wajib ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam jangka waktu paling singkat tiga bulan dalam Rekening Khusus DHE SDA.

Manajemen yakin bahwa Grup telah patuh terhadap ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan diatas.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas pinjaman Grup.

On 12 July 2023, the Government of Indonesia released a regulation regarding Foreign Exchange Export Proceeds from utilizing, managing, and processing of natural resources ("DHE SDA") which is effective on 1 August 2023. This Regulation requires mining exporter to deposit DHE SDA into Indonesia's financial system through Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia or bank. Placement of DHE SDA is required for exporter with export amount on Export Customs Declaration ("PPE") minimum US\$ 250 or equivalent. DHE SDA placement is required at least 30% for minimum three months placement in Current Account DHE SDA.

Management believes that the Group has complied with requirements of the regulations mentioned above.

There are no balances of cash and cash equivalents held by related parties.

There are no balances of cash and cash equivalents used as the collateral for the Group's loans.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

5. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Dalam Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.530
PT Bank Central Asia Tbk	3.613
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	925
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	299
Dalam Dolar AS	
PT Bank Central Asia Tbk	3.760
T o t a l	19.794
Bagian lancar	(7.739)
Bagian tidak lancar	12.055

Dana yang dibatasi penggunaannya - Lancar

Dana yang dibatasi penggunaannya lancar adalah rekening penampung sementara dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS untuk menampung dana cadangan pinjaman pembayaran utang jangka panjang pihak ketiga yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun (Catatan 31).

Dana yang dibatasi penggunaannya - Tidak lancar

Dana yang dibatasi penggunaannya tidak lancar adalah rekening penampung sementara dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS dimana Grup menempatkan deposit untuk jaminan reklamasi tambang dan pascatambang (Catatan 33).

6. ASET KEUANGAN LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset keuangan lainnya terdiri atas:

- Investasi pada institusi non-keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan diukur pada FVTPL sebesar US\$ 25.211.
- Investasi pada obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dengan tingkat suku bunga sebesar 4,30% dan diukur pada FVTPL sebesar US\$ 5.961.

5. RESTRICTED FUNDS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
		In Rupiah
	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	-	PT Bank Central Asia Tbk
	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	632	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	307	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
		In US Dollar
	-	PT Bank Central Asia Tbk
T o t a l	939	T o t a l
	-	Current portion
	939	Non-current portion

Restricted funds - Current

Current portion of the restricted funds are temporary holding bank accounts in Rupiah and US Dollar which is used to deposit the reserve funds for the repayments of third party long-term debt that will mature in less than one year (Note 31).

Restricted funds - Non-current

Non-current portion of the restricted funds are temporary bank accounts in Rupiah and US Dollar where the Group deposit their mine reclamation and post mining guarantee (Note 33).

6. OTHER FINANCIAL ASSETS

As of 31 December 2024, other financial assets consist of:

- Investment in non-financial institutions that are classified as financial assets and measured at FVTPL amounting to US\$ 25,211.
- Investment in bond that is classified as financial assets with an interest rate of 4.30% and measured at FVTPL amounting to US\$ 5,961.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Pihak ketiga			Third parties
PT Freeport Indonesia	31.750	-	PT Freeport Indonesia
PT Kideco Jaya Agung	23.569	-	PT Kideco Jaya Agung
PT Kartika Selabumi Mining	17.995	-	PT Kartika Selabumi Mining
PT Kedap Sayaaq	15.640	-	PT Kedap Sayaaq
IMI Fuels, LLC	12.418	-	IMI Fuels, LLC
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	11.487	-	Flame Asia Resources Pte. Ltd.
PT Hardaya Mining Energy	11.130	-	PT Hardaya Mining Energy
PT Masmino Dwi Area	8.702	-	PT Masmino Dwi Area
PT Indo Bara Pratama	5.212	-	PT Indo Bara Pratama
PT Sumberdaya Arindo	5.094	-	PT Sumberdaya Arindo
PT Pasir Bara Prima	3.361	-	PT Pasir Bara Prima
PT Obsidian Stainless Steel	2.687	-	PT Obsidian Stainless Steel
Glencore International AG	2.585	-	Glencore International AG
Vitol Asia Pte. Ltd.	2.519	-	Vitol Asia Pte. Ltd.
PT Global Bara Mandiri	2.470	-	PT Global Bara Mandiri
PT Xiang Yu Trading Indonesia	1.788	-	PT Xiang Yu Trading Indonesia
Bulk Trading Far East Pte. Ltd.	1.455	-	Bulk Trading Far East Pte. Ltd.
PT Triasih Nawasena Bumi			PT Triasih Nawasena Bumi
Sejahtera	1.086	-	Sejahtera
BP Berau Ltd.	972	-	BP Berau Ltd.
PT Lipe Metal Industry	-	1.039	PT Lipe Metal Industry
PT Angel Nickel Industry	-	544	PT Angel Nickel Industry
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$ 500)	1.384	-	Others (each below US\$ 500)
Sub-total	163.304	1.583	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai piutang	(86)	-	Allowance for impairment of receivable
Pihak ketiga - neto	163.218	1.583	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 44)	29.006	-	Related party (Note 44)
T o t a l	192.224	1.583	T o t a l

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, analisa umur
piutang usaha di atas adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2024 and 2023, the aging analysis
of the above trade receivables are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Belum jatuh tempo	127.706	1.583	Not yet due
Jatuh tempo:			Past due:
1 - 30 hari	44.415	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	8.248	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	4.038	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	7.817	-	More than 90 days
T o t a l	192.224	1.583	T o t a l

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Saldo awal	-	-
Penyisihan penurunan nilai piutang dari akuisisi entitas anak	24	-
Penambahan (Catatan 42)	62	-
Saldo akhir	86	-

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, rincian piutang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Rupiah	159.785	1.583
Dolar AS	32.525	-
Sub-total	192.310	1.583
Penyisihan penurunan nilai piutang	(86)	-
T o t a l	192.224	1.583

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tahun 2024, piutang usaha yang dijadikan jaminan atas fasilitas utang bank jangka panjang adalah sebesar US\$ 93.624 (Catatan 31) dan US\$ 34.000 untuk utang bank jangka pendek (Catatan 28).

7. TRADE RECEIVABLES (Continued)

The movements in allowance for impairment of receivable are as follows:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Beginning balance	-	-
Allowance for impairment of receivables from the acquisition of subsidiaries	24	-
Additions (Note 42)	62	-
Ending balance	-	-

As of 31 December 2024 and 31 December 2023, the details of trade receivables, by type of currency are as follows:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Rupiah	159.785	1.583
US Dollar	32.525	-
Sub-total	192.310	1.583
Allowance for impairment of receivables	(86)	-
T o t a l	192.224	1.583

Management believes that the allowance for impairment on trade receivable is adequate to cover any possible losses on uncollectible accounts.

In 2024, trade receivables used as collateral for the long term bank loan facility amounted to US\$ 93,624 (Note 31) and US\$ 34,000 for short-term bank loan (Note 28).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
<u>Piutang lain-lain jangka pendek</u>		
Pihak ketiga		
Nanore Group Co., Limited	5.515	-
PT Mitra Barito	5.145	-
PT Riung Mitra Lestari	4.769	-
PT Bina Karya Bersama Mandiri	4.611	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$ 500)	2.839	101
Sub-total	22.879	101
Pihak berelasi (Catatan 44)	96	-
Sub-total (Dipindahkan)	22.975	101

8. OTHER RECEIVABLES

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
<u>Short-term other receivables</u>		
Third parties		
Nanore Group Co., Limited	5.515	-
PT Mitra Barito	5.145	-
PT Riung Mitra Lestari	4.769	-
PT Bina Karya Bersama Mandiri	4.611	-
Others (each below US\$ 500)	2.839	101
Sub-total	22.879	101
Related party (Note 44)	96	-
Sub-total (Brought forward)	22.975	101

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Piutang lain-lain jangka pendek (Lanjutan)	
Sub-total (Pindahan)	22.975
Piutang lain-lain jangka panjang	
Pihak ketiga	13.275
T o t a l	36.250

Piutang lain-lain jangka pendek merupakan kelebihan pembayaran biaya tongkang dan kontraktor kepada pemasok pihak ketiga berdasarkan faktur terakhir.

Piutang lain-lain jangka panjang dari PT Insan Global Pawulang sebesar US\$ 12.832 merupakan piutang pihak ketiga sehubungan dengan tagihan terkait pengakhiran proyek. Pada tanggal 28 Juni 2024, disepakati jangka waktu pembayaran diperpanjang sampai dengan 2027 dengan biaya denda keterlambatan pembayaran 9,5% per tahun. Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai aset tidak lancar, sisanya merupakan piutang kepada karyawan yang tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang lain-lain, manajemen Grup berkeyakinan bahwa semua piutang lain-lain dapat tertagih, dengan demikian tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

8. OTHER RECEIVABLES (Continued)

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
		<i>Short-term other receivables (Continued)</i>
	101	<i>Sub-total (Carried forward)</i>
		<i>Long-term other receivables</i>
	-	<i>Third party</i>
T o t a l	101	T o t a l

Short-term other receivables represent overpayments of barging and contractor costs to third party suppliers based on the final invoice.

Long-term other receivables from PT Insan Global Pawulang amounting to US\$ 12,832 represents third party receivables related to invoices associated with project termination. On 28 June 2024, the repayment period is extended up to 2027 with late penalty fee of 9.5% per annum. Therefore, as of 31 December 2024, it is presented as a non-current asset, the remaining balances are related to non-interest bearing employee receivables.

Based on the review of the status of other receivables, the Group's management believes that all other receivables are collectible, hence, no allowance for impairment loss is necessary.

9. PERSEDIAAN

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Batu bara (Catatan 39)	49.525
Suku cadang dan bahan pembantu	19.008
Bahan bakar dan minyak pelumas	1.387
Sub-total	69.920
Penyisihan persediaan usang	(708)
T o t a l	69.212

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Saldo awal	-
Penyisihan persediaan usang dari akusisi entitas anak	313
Penambahan (Catatan 42)	395
Saldo akhir	708

9. INVENTORIES

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	38.940	<i>Coal (Note 39)</i>
	132	<i>Spare parts and supplies</i>
	155	<i>Fuel and lubricant</i>
Sub-total	39.227	<i>Sub-total</i>
	-	<i>Allowance for inventory obsolescence</i>
T o t a l	39.227	T o t a l

The movements in allowances for stock obsolescence on inventories are as follows:

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	-	<i>Beginning balance</i>
	-	<i>Allowance for stock obsolescence from the acquisition of subsidiaries</i>
	-	<i>Additions (Note 42)</i>
Saldo akhir	-	Ending balance

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

9. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang tersebut adalah cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2024, sebagian besar persediaan, termasuk batu bara termal, telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak ketiga, atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar US\$ 16.418. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan atas persediaan yang diasuransikan.

9. INVENTORIES (Continued)

Management believes that the allowance for stock obsolescence on inventories is adequate.

As of 31 December 2024, most of inventories, included thermal coal, were insured with PT Lippo General Insurance Tbk, a third party, to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 16,418. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

10. ASET KONTRAK

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Kontrak konstruksi - pihak ketiga	<u>3.869</u>

Jumlah yang berkaitan dengan kontrak konstruksi adalah tagihan pelanggan berdasarkan kontrak konstruksi yang timbul pada saat Grup menerima pembayaran dari pelanggan sejalan dengan serangkaian tonggak pelaksanaan. Grup sebelumnya akan mengakui aset kontrak untuk setiap pekerjaan yang dilakukan.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha pada saat ditagih kepada pelanggan.

10. CONTRACT ASSETS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Construction contracts - third parties	<u>-</u>

Amounts relating to construction contracts are balances due from customers under construction contracts that arise when the Group receives payments from customers in line with a series of performance-related milestones. The Group initially will recognize a contract asset for any work performed.

Any amount previously recognized as a contract asset is reclassified to trade accounts receivable at the point at which it is invoiced to the customer.

11. UANG MUKA INVESTASI

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
PT Sepekat Salut Sejahtera	559
PT Silika Salut Borneo	72
PT Petrosea Tbk (PTRO) (Catatan 45)	-
PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) (Catatan 45)	-
PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB) (Catatan 45)	-
T o t a l	<u>631</u>

Pada tahun 2024, uang muka investasi pada PTRO, MUTU dan BBBB telah direalisasikan sebagai penyertaan saham pada entitas anak (Catatan 48).

11. ADVANCES FOR INVESTMENTS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023
PT Sepekat Salut Sejahtera	162
PT Silika Salut Borneo	-
PT Petrosea Tbk (PTRO) (Note 45)	30.609
PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) (Note 45)	10.023
PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB) (Note 45)	3.041
T o t a l	<u>43.835</u>

In 2024, the advances for investment in PTRO, MUTU and BBBB has been realized as investment in subsidiaries (Note 48).

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

12. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Uang muka proyek	18.748
Pembayaran di muka biaya penerbitan utang	5.722
Uang muka pembelian persediaan	5.453
Uang muka royalti	2.091
Asuransi dibayar di muka	1.357
Uang muka pembiayaan penjualan	1.342
Lain-lain	3.751
T o t a l	38.464

Grup harus membayar royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tarif royalti batu bara yang berlaku bila kalori di atas atau sama dengan 5.200 kkal/kg untuk tambang batu bara terbuka adalah 13,50% dimulai dari bulan Agustus 2022 hingga sekarang.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh uang muka dan beban dibayar di muka tersebut dapat dipulihkan.

Uang muka dan beban dibayar di muka lain-lain terdiri dari uang muka pengiriman, pemeliharaan, jasa keagenan dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

12. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	6.336	Advance for projects
	2.951	Prepayment of debt issuance costs
	1.057	Advances fo inventory purchases
	1.139	Advances for royalties
	-	Prepaid insurances
	-	Advances selling cost
	737	Others
T o t a l	12.220	T o t a l

The Group has to pay royalties based on Government Regulation No. 26 of 2022 concerning types and rates for types of non-tax state revenue that apply to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The coal royalty rate that applies when the calories are above or equal to 5,200 kcal/kg for open-pit coal mines is 13.50% starting from August 2022 until now.

Management believes that all the advances and prepaid expenses are recoverable.

Other advances and prepaid expenses are composed of advances for shipping, maintenance, agency fees and other numerous transactions with minimal amounts.

13. ASET LAINNYA

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Aset lancar lainnya	
Deposit	5.215
Biaya pemenuhan kontrak	651
Sub-total	5.866
Aset tidak lancar lainnya	
Biaya pinjaman jangka panjang yang ditangguhkan	3.100
Letter of credit	1.400
Biaya pemenuhan kontrak	1.376
Asuransi	1.311
Deposit	57
Lain-lain	2.910
Sub-total	10.154
T o t a l	16.020

Deposit merupakan estimasi atas nilai tukar tambah komponen bekas unit aset yang rusak dan akan dikurangi tagihan penggantian komponen baru dari pemasok, dan juga jaminan atas sewa gedung dan apartemen.

13. OTHER ASSETS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	-	Other current assets
	-	Deposits
	-	Costs to fulfill a contract
Sub-total	-	Sub-total
	-	Other non-current assets
	-	Deferred long-term loan cost
	-	Letter of credit
	-	Costs to fulfill a contract
	-	Insurance
	15	Deposits
	-	Others
Sub-total	15	Sub-total
T o t a l	15	T o t a l

The deposits represent an estimate of the trade-in value of used components of damaged asset units and would be reduced by the replacement bill for new components from the suppliers, and also a guarantee for rent of buildings and apartments.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

13. ASET LAINNYA (Lanjutan)

Aset tidak lancar lain-lain terdiri dari biaya langganan tambahan atas perangkat lunak dan bank garansi atau *stand-by letter of credit* yang realisasinya lebih dari 12 bulan.

13. OTHER ASSETS (Continued)

Other non-current assets consist of additional subscription cost of software and bank guarantee or *stand-by letter of credit* that are realized in more than 12 months.

14. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Mesin dan peralatan	306
Peralatan tambang dan eksplorasi	173
Tongkang	112
Bangunan dan prasarana	36
T o t a l	627

Uang muka perolehan aset tetap merupakan pembayaran uang muka perolehan aset tetap kepada pihak ketiga oleh Grup.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian uang muka perolehan aset tetap.

14. ADVANCES FOR ACQUISITIONS OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	-	Machinery and equipments
	1.094	Exploration and mining equipments
	-	B a r g e
	-	Building and improvements
T o t a l	1.094	T o t a l

Advances for acquisition of property, plant and equipment represents prepayment of property, plant and equipment to third parties by the Group.

Management believes that there are no obstacles that could affect the settlement of advances for acquisition of property, plant and equipment.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Perizinan	26.095
Pengeboran	18.295
Biaya tenaga ahli	2.333
Gaji dan upah	1.297
Bahan bakar minyak	740
Logistik	567
Akomodasi dan transportasi	500
Penelitian umum	399
Tenaga kerja harian	288
S e w a	244
Geologi dan geofisika	216
Lain-lain	2.727
T o t a l	53.701

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	9.943	Licensing
	1.444	Drilling
	160	Expert fees
	1.729	Salaries and wages
	334	Fuel oil
	928	Logistics
	1.211	Accommodation and transportation
	414	General research
	374	Daily labor
	137	R e n t
	1.056	Geology and geophysics
	444	Others
T o t a l	18.174	T o t a l

Entitas anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
PT Borneo Bangun Banua	Muara Teweh, Kalimantan Tengah/ Muara Teweh, Central Kalimantan	21.071	-
PT Daya Bumindo Karunia	Murung Raya, Kalimantan Tengah/ Murung Raya, Central Kalimantan	10.454	8.753
PT Intan Bumi Persada	Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ Lahei Sub-District, North Barito District, Central Kalimantan Province	5.750	-
PT Bara International	Murung Raya, Kalimantan Tengah/ Murung Raya, Central Kalimantan	5.178	5.024
PT Multi Tambangjaya Utama	Barito Utara and Barito Selatan, Kalimantan Tengah/North Barito and South Barito, Central Kalimantan	4.401	-

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS (Continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
PT Intam	Sumbawa, Nusa Tenggara Barat/ Sumbawa, West Nusa Tenggara	3.600	3.431
PT Tamtama Perkasa	Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ North Barito District, Central Kalimantan Province	3.155	966
PT Silika Salut Jaya	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur/ Kutai Kartanegara, East Kalimantan	92	-
T o t a l		53.701	18.174

Aset eksplorasi dan evaluasi lain-lain terdiri dari penggunaan atas perlengkapan, peralatan dan jalan transportasi dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

Other exploration and evaluation assets are composed of usage of supplies, equipments and hauling roads and other numerous transactions with minimal amounts.

Pada tahun 2024, Grup telah mereklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$ 16.742 ke properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah (Catatan 17).

In 2024, the Group have reclassified exploration and evaluation assets amounting to US\$ 16,742 to mining properties (Note 17).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi.

As of 31 December 2024 and 2023, the Group's management believes that there are no events or circumstances that indicate an impairment in the value of exploration and evaluation assets.

16. ASET TETAP

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
Biaya perolehan Kepemilikan langsung								Cost Direct ownership
T a n a h	26.989	12.257	-	-	2.941 (	1.246)	40.941	L a n d
Bangunan dan prasana	9.668	84.531	136	-	20.962 (	426)	114.871	Buildings and
Pelabuhan dan dermaga	2.037	3.886	269	-	- (	94)	6.098	Infrastructures
Mesin dan peralatan	3.057	7.048	369	158	2.942 (	141)	13.117	Port and jetty
Peralatan tambang dan eksplorasi	5.209	651.264	814	37.990	106.086 (	980)	724.403	Machinery and equipments
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	245	17.067	186	-	52 (	25)	17.525	Exploration and mining equipments
Kendaraan dan peralatan transportasi	1.376	3.386	765	-	- (	63)	5.464	Fixtures, furniture and office equipments
Tongkang	133	138	-	-	- (	6)	265	Vehicle and transportation equipments
Sub-total	48.714	779.577	2.539	38.148	132.983 (	2.981)	922.684	Bar g e
Aset dalam pembangunan	831	64.974	141.632	-	107.342 (	414)	99.681	Construction in-progres
T o t a l	49.545	844.551	144.171	38.148	25.641 (	3.395)	1.022.365	T o t a l

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

16. ASET TETAP (Lanjutan)

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung								Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan dan prasana	7.992	49.179	4.926	-	- (	368)	61.729	Buildings and Infrastructures
Pelabuhan dan dermaga	881	2.187	479	-	- (	43)	3.504	Port and jetty
Mesin dan peralatan	2.580	5.515	730	158	- (	124)	8.543	Machinery and equipments
Peralatan tambang dan eksplorasi	646	446.348	36.416	36.932	14.437	833	461.748	Exploration and mining equipments
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	195	11.337	460	-	-	11	12.003	Fixtures, furniture and office equipments
Kendaraan dan peralatan transportasi	314	3.182	104	-	- (	16)	3.584	Vehicle and transportation equipments
Tongkang	11	30	8	-	- (	1)	48	Barge
T o t a l	12.619	517.778	43.123	37.090	14.437	292	551.159	T o t a l
Nilai tercatat	36.926						471.206	Carrying amount
31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Biaya perolehan Kepemilikan langsung								C o s t Direct ownership
Tanah	26.449	-	-	-	-	540	26.989	Land
Bangunan dan prasana	9.443	-	32	-	-	193	9.668	Buildings and Infrastructures
Pelabuhan dan dermaga	1.720	-	285	-	-	32	2.037	Port and jetty
Mesin dan peralatan	2.950	-	47	-	-	60	3.057	Machinery and equipments
Peralatan tambang dan eksplorasi	1.439	-	3.780	-	- (	10)	5.209	Exploration and mining equipments
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	391	-	44	196	-	6	245	Fixtures, furniture and office equipments
Kendaraan dan peralatan transportasi	825	-	540	-	-	11	1.376	Vehicle and transportation equipments
Tongkang	131	-	-	-	-	2	133	Barge
Sub-total	43.348	-	4.728	196	-	834	48.714	Sub-total
Aset dalam pembangunan	642	-	177	-	-	12	831	Construction in-progres
T o t a l	43.990	-	4.905	196	-	846	49.545	T o t a l
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung								Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan dan prasana	7.337	-	510	-	-	145	7.992	Buildings and Infrastructures
Pelabuhan dan dermaga	775	-	94	-	-	12	881	Port and jetty
Mesin dan peralatan	2.172	-	368	-	-	40	2.580	Machinery and equipments
Peralatan tambang dan eksplorasi	204	-	442	-	-	-	646	Exploration and mining equipments
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	370	-	12	196	-	9	195	Fixtures, furniture and office equipments
Kendaraan dan peralatan transportasi	96	-	218	-	-	-	314	Vehicle and transportation equipments
Tongkang	3	-	8	-	-	-	11	Barge
T o t a l	10.957	-	1.652	196	-	206	12.619	T o t a l
Nilai tercatat	33.033						36.926	Carrying amount

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

16. ASET TETAP (Lanjutan)

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

Analisa rugi atas penjualan aset tetap sebagai berikut:

An analysis of the loss on sale of property, plant and
equipment are as follows:

	2 0 2 4	2 0 2 3	
Biaya perolehan	38.148	-	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(37.090)	-	Accumulated depreciation
Nilai tercatat	1.058	-	Carrying amount
Harga jual	106	-	Selling price
Kerugian pelepasan aset tetap (Catatan 42)	(952)	-	Loss on sale of property, plant and equipment (Note 42)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai
berikut:

Property, plant and equipment depreciation expenses
is allocated as follow:

	2 0 2 4	2 0 2 3	
Beban pokok pendapatan (Catatan 39)	60.590	1.639	Cost of revenues (Note 39)
Beban umum dan administrasi (Catatan 41)	675	13	General and administrative expenses (Note 41)
T o t a l	61.265	1.652	T o t a l

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rincian aset
dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2024 and 2023, the details of
construction-in-progress are as follows:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	
31 Desember 2024				31 December 2024
Mesin dan peralatan	74%	2025 - 2026	93.336	Machinery and equipments
Bangunan dan prasarana	87%	2025 - 2026	5.109	Buildings and infrastructures
Tongkang	81%	2025 - 2026	1.236	B a r g e
T o t a l			99.681	T o t a l
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	
31 Desember 2023				31 December 2023
Tongkang	99%	2025 - 2026	831	B a r g e

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen
Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau
keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai
aset tetap.

As of 31 December 2024 and 2023, the Group's
management believes that there are no events or
circumstances that indicate an impairment in the
value of property, plant and equipment.

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

16. ASET TETAP (Lanjutan)

PTRO, entitas anak, memiliki beberapa bidang tanah di Nusa Tenggara Barat, Balikpapan, Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Timika seluas 438.272 meter persegi dengan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun dan 30 tahun, masing-masing sampai tahun 2028, 2029, 2030, 2037, 2038, 2043, 2048, 2051, 2052 dan 2053. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak tersebut karena hak tersebut diperoleh secara sah dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga, atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar masing-masing US\$ 603.207 dan US\$ 1.466. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Sebagian alat berat, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 28 dan 31).

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

PTRO, a subsidiary, owns several parcels of land located in West Nusa Tenggara, Balikpapan, Kabupaten Paser East Kalimantan and Timika measuring 438,272 square meters with "Building Use Rights" for a period of 20 and 30 years, until 2028, 2029, 2030, 2037, 2038, 2043, 2048, 2051, 2052 and 2053, respectively. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since they were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

As of 31 December 2024 and 31 December 2023, property, plant and equipment were insured with PT Lippo General Insurance Tbk and PT Asuransi Central Asia, third parties, to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 603,207 and US\$ 1,466, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Some heavy equipment, equipment and vehicles are used as collateral for bank loans (Notes 28 and 31).

**17. PROPERTI PERTAMBANGAN DAN ASET AKTIVITAS
PENGUPASAN LAPISAN TANAH**

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications (Catatan 15/ Note 15)	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan						
Tambang yang berproduksi						
Muara Pari, Rahaden, Bengahon	6.426	-	-	- (	297)	6.129
Kananai, Malintut, Siung Malopot	-	226.917	-	4.941	-	231.858
Swalang AB	-	-	-	2.749	-	2.749
Biaya eksplorasi dan pengembangan sehubungan dengan area of interest yang telah mencapai tahap produksi secara komersial	2.953	178.457	2.002	9.052 (	138)	192.326
Biaya penghentian aset	-	-	8.610	-	-	8.610
T o t a l	9.379	405.374	10.612	16.742 (	435)	441.672
Akumulasi deplesi						
Tambang yang berproduksi						
Muara Pari, Rahaden, Bengahon	3.331	-	650	- (	167)	3.814
Kananai, Malintut, Siung Malopot	-	33.242	917	-	-	34.159
Swalang AB	-	-	86	-	-	86
Biaya eksplorasi dan pengembangan sehubungan dengan area of interest yang telah mencapai tahap produksi secara komersial	-	40.893	4.215	-	-	45.108
T o t a l	3.331	74.135	5.868	- (	167)	83.167
Nilai tercatat	6.048					358.505

**17. MINING PROPERTIES AND STRIPPING ACTIVITY
ASSETS**

31 December 2024	Cost
Mines in production	
Muara Pari, Rahaden, Bengahon	6,129
Kananai, Malintut, Siung Malopot	231,858
Swalang AB	2,749
Deferred exploration and development expenditures related to area of interest which have reached the commercial production stage	192,326
Asset retirement cost	8,610
T o t a l	441,672
Accumulated depletion	
Mines in production	
Muara Pari, Rahaden, Bengahon	3,814
Kananai, Malintut, Siung Malopot	34,159
Swalang AB	86
Deferred exploration and development expenditures related to area of interest which have reached the commercial production stage	45,108
T o t a l	83,167
Carrying amount	358,505

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

17. PROPERTI PERTAMBANGAN DAN ASET AKTIVITAS
PENGUPASAN LAPISAN TANAH (Lanjutan)

17. MINING PROPERTIES AND STRIPPING ACTIVITY
ASSETS (Continued)

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications (Catatan 15/ Note 15)	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Biaya perolehan Tambang yang berproduksi Muara Pari, Rahaden, Bengahon	6.222	-	88	-	116	6.426	Cost Mines in production Muara Pari, Rahaden, Bengahon
Biaya eksplorasi dan pengembangan sehubungan dengan area of interest yang telah mencapai tahap produksi secara komersial	-	-	2.985	-	(32)	2.953	Deferred exploration and development expenditures related to area of interest which have reached the commercial production stage
Total	6.222	-	3.073	-	84	9.379	Total
Akumulasi deplesi Tambang yang berproduksi Muara Pari, Rahaden, Bengahon	2.652	-	632	-	47	3.331	Accumulated depletion Mines in production Muara Pari, Rahaden, Bengahon
Nilai tercatat	3.570					6.048	Carrying amount

Seluruh properti pertambangan adalah milik TP, MUTU dan CEP, entitas anak, yang berlokasi di Kabupaten Barito Utara dan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

All mining properties are owned by TP, MUTU and CEP, subsidiaries, which is located in North and South Barito District, Central Kalimantan Province and Kutai District, East Kalimantan.

Beban deplesi properti pertambangan dialokasikan sebagai beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US\$ 14.852 dan US\$ 632 (Catatan 39).

Mining property depletion expense is allocated as cost of revenue for the year ended 31 December 2024 and 2023 amounting to US\$ 14,852 and US\$ 632, respectively (Note 39).

Berdasarkan penelaahan manajemen Grup atas properti pertambangan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian yang mengidentifikasi adanya penurunan nilai properti pertambangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the Group's management review of mining properties, the Group's management believes that there were no events that would identify an impairment in the value of mining properties as of 31 December 2024 and 2023.

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Grup menyewa beberapa aset termasuk gedung atau gudang, alat berat, peralatan dan kendaraan dan tanah. Rata-rata masa sewa adalah 2 - 15 tahun.

Groups leases several assets including building or warehouses, plant, equipment and vehicles and parcels of land. The average lease term is 2 - 15 years.

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
Biaya perolehan Tanah	-	3.450	23	-	-	-	3.473	Cost Land
Gedung atau gudang	-	267	-	-	-	-	267	Building or warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	-	66.382	8.500	6.842	(25.215)	44	42.869	Plant, equipment and vehicles
Aset dalam pembangunan	-	430	-	-	(426)	6	10	Construction in-progress
Total	-	70.529	8.523	6.842	(25.641)	50	46.619	Total

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
Akumulasi penyusutan Tanah	-	1.821	215	23	-	-	2.013	Accumulated depreciation Land
Gedung atau gudang	-	170	-	-	-	-	170	Building or warehouse
Alat berat, peralatan dan kendaraan	-	34.433	10.441	5.620	(14.437)	(244)	24.573	Plant, equipment and vehicles
T o t a l	-	36.424	10.656	5.643	(14.437)	(244)	26.756	T o t a l
Nilai tercatat	-						19.863	Carrying amount

Beban depresiasi aset hak-guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of right-of-use assets expense is allocated as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 39)	10.343	-	Cost of revenue (Note 39)
Beban umum dan administrasi (Catatan 41)	313	-	General and administrative expenses (Note 41)
T o t a l	10.656	-	T o t a l

Liabilitas sewa terdiri atas:

Lease liabilities consist of:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Analisis jatuh tempo:			Maturity analysis:
Tahun 1	10.627	-	Year 1
Tahun 2	7.610	-	Year 2
Tahun 3	4.131	-	Year 3
Tahun 4	1.546	-	Year 4
Tahun 5	941	-	Year 5
Lebih dari 5 tahun	604	-	More than 5 years
Sub-total	25.459	-	Sub-total
Beban keuangan yang ditangguhkan	(3.167)	-	Deferred interest expenses
T o t a l	22.292	-	T o t a l
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(8.622)	-	Less current maturities
Liabilitas sewa - neto setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	13.670	-	Lease liabilities - net of current maturities

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)

Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:

Detail of lease liabilities based on lessor:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Pihak ketiga			Third parties
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	6.258	-	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia
PT Mandiri Tunas Finance	4.071	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Putra Otomona Jaya	1.978	-	PT Putra Otomona Jaya
PT Dokindo Aimas Papua	1.698	-	PT Dokindo Aimas Papua
PT Hexa Finance Indonesia	1.209	-	PT Hexa Finance Indonesia
PT Chandra Sakti Utama Leasing	873	-	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Wiera Mineral Investama	802	-	PT Wiera Mineral Investama
PT Caterpillar Finance Indonesia	759	-	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT SMFL Leasing Indonesia	665	-	PT SMFL Leasing Indonesia
PT Radios Apirja Sorong	654	-	PT Radios Apirja Sorong
PT Bagong Dekaka Makmur	635	-	PT Bagong Dekaka Makmur
PT Buana Jaya Rentama	559	-	PT Buana Jaya Rentama
CV Aditya Karya	449	-	CV Aditya Karya
PT Gatra Kaltim Jaya	302	-	PT Gatra Kaltim Jaya
PT Indo Nuansa Abadi	270	-	PT Indo Nuansa Abadi
PT KDB Tifa Finance Tbk	270	-	PT KDB Tifa Finance Tbk
PT Gelora Lintas Maharitas	173	-	PT Gelora Lintas Maharitas
PT Transkon Jaya	105	-	PT Transkon Jaya
Lainnya (masing-masing dibawah US\$100)	562	-	Others (each below US\$100)
T o t a l	22.292	-	T o t a l

PT Petrosea Tbk (PTRO)

PT Petrosea Tbk (PTRO)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

Pada tanggal 8 Mei 2019, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 5.272. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 24 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On 8 May 2019, PTRO and MHCI entered into credit facility for lease which PTRO was granted lease facility amounted to US\$ 5,272. PTRO has withdrawn lease facility on 24 May 2019. This lease facility is effective until 25 May 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three months SOFR term. The loan facility was fully settled on 24 May 2024. This facility is not being extended.

Pada tanggal 28 Mei 2019, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa Dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 648. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Mei 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 28 Mei 2024. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On 28 May 2019, PTRO and MHCI entered into credit facility for lease which PTRO was granted lease facility amounted to US\$ 648. PTRO has lease facility on 28 May 2019 where the lease facility will end on 28 May 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three months SOFR term. The loan facility was fully settled on 28 May 2024. This facility is not being extended.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)
(Lanjutan)

Pada tanggal 19 September 2022, PTRO dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa. PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1.000) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp 32,1 miliar (setara dengan US\$ 2.000) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 3 November 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp 26,7 miliar (setara dengan US\$ 1.700) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp 13,8 miliar (setara dengan US\$ 890) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp 30 miliar (setara dengan US\$ 1.900) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2028. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PTRO mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 26 April 2023 sebesar Rp 41,8 miliar (setara dengan US\$ 2.700) dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 27 April 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 9,9% per tahun.

PT KDB Tifa Finance Tbk (KDB TIFA)

Pada tanggal 7 November 2023, PTRO dan KDB TIFA menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa di mana PTRO diberikan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 5,65 miliar (setara dengan US\$ 366). Tingkat bunga fasilitas ini adalah 11% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 7 November 2027.

**18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)
(Continued)

On 19 September 2022, PTRO and MHCI entered into credit facility for lease which PTRO was granted lease facility. PTRO has utilized the lease facility on 28 October 2022 amounted to Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1,000) where the lease term will end on 28 October 2027. The interest rate of credit facility is 9.9% per annum.

PTRO utilized the lease facility on 3 November 2022 amounted to Rp 32.1 billion (equivalent to US\$ 2,000) with the lease term will end on 3 November 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PTRO utilized the lease facility on 23 December 2022 amounted to Rp 26.7 billion (equivalent to US\$ 1,700) with the lease term will end on 23 December 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PTRO utilized the lease facility on 30 January 2023 amounted to Rp 13.8 billion (equivalent to US\$ 890) with the lease term will end on 30 January 2028. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PTRO utilized the lease facility on 16 February 2023 amounted to Rp 30 billion (equivalent to US\$ 1,900) with the lease term will end on 16 February 2028. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PTRO utilized the lease facility on 26 April 2023 amounted to Rp 41.8 billion (equivalent to US\$ 2,700) with the lease term will end on 27 April 2027. The facility's interest rate is 9.9% per annum.

PT KDB Tifa Finance Tbk (KDB TIFA)

On 7 November 2023, PTRO and KDB TIFA entered into a lease credit facility which PTRO was granted a lease facility amounted to Rp 5.65 billion (equivalent to US\$ 366). The facility's interest rate is 11% per annum. The facility matured on 7 November 2027.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

Pada tanggal 30 September 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13,23 miliar (setara dengan US\$ 874). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2027.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, PTRO dan MTF menandatangani dua perjanjian fasilitas kredit untuk sewa masing masing sebesar Rp 14,46 miliar (setara dengan US\$ 915). Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2028.

Pada tanggal 29 November 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13,68 miliar (setara dengan US\$ 846). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO dan MTF menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 12,29 miliar (setara dengan US\$ 761). PTRO telah mencairkan fasilitas ini. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2029.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI)

Pada tanggal 5 Februari 2025, PTRO dan MLCI menandatangani perjanjian fasilitas kredit untuk sewa sebesar Rp 13,06 miliar (setara dengan US\$ 808). Fasilitas ini telah dicairkan oleh PTRO pada tanggal 7 Februari 2025. Tingkat bunga dari fasilitas ini adalah 8,75% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2029.

PT Karya Bhumi Lestari (KBL)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

Pada tanggal 13 Mei 2019, KBL, anak Perusahaan, dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 3.768. KBL mencairkan fasilitas sewa tersebut pada tanggal 24 Mei 2019. Fasilitas sewa berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

**18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

On 30 September 2024, PTRO and MTF signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 13.23 billion (equivalent to US\$ 874). PTRO has withdrawn this facility. The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on 23 September 2027.

On 31 October 2024, PTRO and MTF signed two credit facility agreements for leasing amounted to Rp 14.46 billion (equivalent to US\$ 915), respectively. PTRO has withdrawn this facility. The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on 23 October 2028.

On 29 November 2024, PTRO and MTF signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 13.68 billion (equivalent to US\$ 846). PTRO has withdrawn this facility. The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on 23 November 2029.

On 31 December 2024, PTRO and MTF signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 12.29 billion (equivalent to US\$ 761). PTRO has withdrawn this facility. The interest rate for this facility is 7.99% per annum. This facility will mature on 23 December 2029.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI)

On 5 February 2025, PTRO and MLCI signed a credit facility agreement for leasing amounted to Rp 13.06 billion (equivalent to US\$ 808). PTRO has withdrawn this facility on 7 February 2025. The interest rate for this facility is 8.75% per annum. This facility will mature on 5 February 2029.

PT Karya Bhumi Lestari (KBL)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)

On 13 May 2019, KBL, a subsidiary, and MHCI entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to US\$ 3,768. KBL has withdrawn lease facility on 24 May 2019. This lease facility is effective until 25 May 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three months SOFR term. This facility is not being extended.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

**18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Lanjutan)

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Continued)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)
(Lanjutan)

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (MHCI)
(Continued)

Pada tanggal 12 Juli 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 177. KBL mencairkan fasilitas sewa pada 12 Juli 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak terdapat perpanjangan atas fasilitas ini.

On 12 July 2019, KBL and MHCI entered credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to US\$ 177. KBL has utilized lease facility on 12 July 2024. The interest rate of credit facility is 2.30% plus three-months SOFR term. As of the issuance date of the consolidated financial statements, there is no extension to this facility.

Pada tanggal 7 November 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 3.389. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 7 November 2019. Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 7 November 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan.

On 7 November 2019, KBL and MHCI entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to US\$ 3,389. KBL has withdrawn lease facility on 7 November 2019. This lease facility is effective until 7 November 2024. The facility's interest rate is 2.30% plus three months SOFR term.

Pada tanggal 9 Desember 2019, KBL dan MHCI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa di mana KBL diberikan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 1.653. KBL mencairkan fasilitas sewa pada tanggal 9 Desember 2019 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 2,30% ditambah term SOFR tiga bulan.

On 9 December 2019, KBL and MHCI entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to US\$ 1,653. KBL has utilized the lease facility on 9 December 2019 where the lease facility will end on 9 December 2024. The facility's interest rate is 2.30% plus three-months SOFR term.

Pada tanggal 3 Juli 2023, KBL dan MHCI menandatangani amendemen fasilitas kredit tersebut atas tingkat bunga yang berlaku adalah tarif per tahun berdasarkan 3 bulan term SOFR ditambah tarif *Spread Adjustment* ditambah 2,30%. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

On 3 July 2023, KBL and MHCI entered into amendment of the credit facility for the interest rate is rate per annum based on 3 months term SOFR plus spread adjustment rate plus 2.30%. This facility is not being extended.

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

PT SMFL Leasing Indonesia (SMFL)

Pada tanggal 24 Juni 2022, KBL dan SMFL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 18 miliar (setara dengan US\$ 1.100). Pada tanggal 26 Juli 2022, KBL mencairkan fasilitas sewa tersebut sebesar Rp 6,5 miliar (setara dengan US\$ 418). Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 26 Juli 2027. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,75% per tahun.

On 24 June 2022, KBL and SMFL entered credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounting to Rp 18 billion (equivalent to US\$ 1,100). On 26 July 2022, KBL has withdrawn lease facility amounted to Rp 6.5 billion (equivalent to US\$ 418). This lease facility is effective until 26 July 2027. The interest rate of credit facility is 7.75% per annum.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp 6,8 miliar (setara dengan US\$ 437) pada tanggal 30 September 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

KBL has utilized the lease facility amounted to Rp 6.8 billion (equivalent to US\$ 437) on 30 September 2022 where the lease facility will end on 30 September 2027. The facility's interest rate is 8.75% per annum.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar Rp 4,5 miliar (setara dengan US\$ 290) pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 8,75% per tahun.

KBL has utilized the lease facility amounted to Rp 4.5 billion (equivalent to US\$ 290) on 28 October 2022 where the lease facility will end on 28 October 2027. The facility's interest rate is 8.75% per annum.

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Lanjutan)

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL)

Pada tanggal 21 Oktober 2022, KBL dan CSUL menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar US\$ 2.000. Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 21 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah 7,19% per tahun.

Pada tanggal 26 Oktober 2022, KBL mencairkan fasilitas kredit *sales dan leaseback* sebesar US\$ 1.060 dengan masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

KBL mencairkan fasilitas sewa sebesar US\$ 750 pada tanggal 4 November 2022 dengan masa sewa yang akan berakhir pada 4 Oktober 2026. Tingkat bunga fasilitas adalah *term* SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 3,20% per tahun.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

Pada tanggal 5 September 2023, KBL dan CFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 59 miliar (setara dengan US\$ 3.800). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 14 September 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *sales and lease-back* sebesar Rp 15,3 miliar (setara dengan US\$ 985). Fasilitas sewa berlaku berakhir pada tanggal 14 September 2028. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 11,5% per tahun.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

Pada tanggal 21 Agustus 2023, KBL dan HFI menandatangani fasilitas kredit untuk sewa dimana KBL mendapatkan fasilitas kredit sewa sebesar Rp 34,8 miliar (setara dengan US\$ 2.200). Fasilitas sewa berakhir pada tanggal 3 Januari 2024. Tingkat bunga fasilitas adalah 10% per tahun. Fasilitas ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 3 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 5,7 miliar (setara dengan US\$ 367) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 3 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

**18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Continued)

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL)

On 21 October 2022, KBL and CSUL entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounting to US\$ 2,000. This lease facility is effective until 21 September 2026. The interest rate of credit facility is 7.19% per annum.

On 26 October 2022, KBL has utilized the lease facility of sales and leaseback credit facility amounted to US\$ 1,060 where the lease facility will end on 26 September 2026. The facility's interest rate is three-months SOFR term plus margin of 3.20% per annum.

KBL has utilized the lease facility amounted to US\$ 750 on 4 November 2022 where the lease facility will end on 4 October 2026. The facility's interest rate is threemonths SOFR term plus margin of 3.20% per annum.

PT Caterpillar Finance Indonesia (CFI)

On 5 September 2023, KBL and CFI entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to Rp 59 billion (equivalent to US\$ 3,800). This lease facility has been ended on 31 May 2024. The facility's interest rate is 11.5% per annum. This facility is not being extended.

On 14 September 2023, KBL has withdrawn lease facility sales and leaseback amounted to Rp 15.3 billion (equivalent to US\$ 985) where the lease facility will end on 14 September 2028. The facility's interest rate is 11.5% per annum.

PT Hexa Finance Indonesia (HFI)

On 21 August 2023, KBL and HFI entered into credit facility for lease which KBL was granted lease facility amounted to Rp 34.8 billion (equivalent to US\$ 2,200). This lease facility ended on 3 January 2024. The facility's interest rate is 10% per annum. This facility is not being extended.

On 3 October 2023, KBL has utilized the direct lease amounted to Rp 5.7 billion (equivalent to US\$ 367) where the lease facility will end on 3 October 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Lanjutan)

PT Hexa Finance Indonesia (HFI) (Lanjutan)

Pada tanggal 20 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 5,7 miliar (setara dengan US\$ 367) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 20 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 2,9 miliar (setara dengan US\$ 187) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 1 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 2,9 miliar (setara dengan US\$ 187) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 1 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Pada tanggal 30 November 2023, KBL mencairkan fasilitas kredit *direct lease* sebesar Rp 8,6 miliar (setara dengan US\$ 553) dengan masa sewa yang akan berakhir pada 30 November 2027. Tingkat suku bunga fasilitas adalah 10% per tahun.

Syarat dan ketentuan atas perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

- PTRO dan KBL tidak diperbolehkan untuk menjual, meminjamkan, melakukan sewa kembali, atau melepaskan atau, menghentikan pengendalian langsung atas, aset hak-guna; dan
- PTRO dan KBL tidak diperbolehkan menggunakan aset hak-guna sebagai jaminan, termasuk jaminan deposito, atau garansi kepada pesewa lainnya.

19. GOODWILL

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>
PT Kemilau Mulia Sakti	18.987
PT POSB Infrastructure Indonesia	781
T o t a l	19.768
Saldo awal periode	–
Goodwill berasal dari akuisisi entitas anak	19.768
Nilai tercatat neto	19.768

**18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
(Continued)**

PT Karya Bhumi Lestari (KBL) (Continued)

PT Hexa Finance Indonesia (HFI) (Continued)

On 20 October 2023, KBL has withdrawn lease facility *Direct Lease* amounted to Rp 5.7 billion (equivalent to US\$ 367). This lease facility is effective until 20 October 2027. The interest rate of credit facility is 10% per annum.

On 23 October 2023, KBL has utilized the *direct lease* amounted to Rp 2.9 billion (equivalent to US\$ 187) where the lease facility will end on 23 October 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

On 1 November 2023, KBL has utilized the *direct lease* amounted to Rp 2.9 billion (equivalent to US\$ 187) where the lease facility will end on 1 November 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

On 30 November 2023, KBL has utilized the *direct lease* amounted to Rp 8.6 billion (equivalent to US\$ 553) where the lease facility will end on 30 November 2027. The facility's interest rate is 10% per annum.

Significant general terms and conditions of the leases are as follows:

- PTRO and KBL is prohibited to sell, lend, sublease, or otherwise dispose of or, cease to exercise direct control over, right-of-use assets; and
- PTRO and KBL is prohibited to provide securities/ collateral, including security deposit, or guarantee to other lessors over right-of-use assets.

19. GOODWILL

As of 31 December 2024 and 2023, *goodwill* arising from the acquisitions of subsidiaries is as follows:

	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
PT Kemilau Mulia Sakti	–
PT POSB Infrastructure Indonesia	–
T o t a l	–
Balance at beginning of period	–
Goodwill from the acquisition of subsidiaries	–
Net carrying value	–

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

19. GOODWILL (Lanjutan)

Goodwill telah dialokasikan untuk tujuan pengujian penurunan nilai ke unit penghasil kas berupa pertambangan batubara.

Pengujian penurunan nilai atas goodwill dilakukan secara tahunan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai ("VIU") yang menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan anggaran keuangan untuk jangka waktu sampai dengan masa ijin pertambangan, dan tingkat diskonto sebesar 11,75% per tahun untuk tahun 2024 dan 13,05% per tahun untuk tahun 2023.

Tidak ada kelebihan ("headroom") jika tingkat diskonto ditetapkan sebesar 20,53%.

Setelah penilaian penurunan nilai selesai, manajemen telah menyimpulkan bahwa terdapat ruang yang cukup sehingga tidak terdapat kerugian penurunan nilai yang diakui pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

19. GOODWILL (Continued)

Goodwill has been allocated for impairment testing purposes to the cash-generating unit of coal mining.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

The recoverable amount of this cash-generating unit is determined based on a value-in-use (VIU) calculation which uses cash flow projections based on financial budgets over the mining permit rights, and a discount rate of 11.75% per annum in 2024 and 13.05% per annum in 2023.

There will be no headroom if discount rate is set at 20.53%.

Upon completion of the impairment assessment, management has concluded that there is adequate headroom resulting no impairment losses to be recognized for the years ended on 31 December 2024 and 2023.

20. KEPEMILIKAN DALAM OPERASI BERSAMA

Operasi Bersama Fluor-Petrosea

Pada tanggal 11 Maret 2020, PTRO, entitas anak melakukan kerja sama operasi dengan PT Fluor Daniel Indonesia (FLUOR) yang dikenal dengan nama Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) Dimana dilaksanakan pengendalian bersama.

Bagian PTRO, entitas anak dalam kerja sama ini secara keseluruhan adalah 40% sehubungan dengan *Mill Optimization for Underground Ores Project* untuk PT Freeport Indonesia. Grup berhak atas proporsional bagian dari penghasilan konstruksi dan rekayasa yang diterima dan menanggung bagian proporsional dari biaya operasi bersama.

Ringkasan keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

	<u>31 December 2024/ 31 December 2024</u>
Jumlah aset	47.046
Jumlah liabilitas	48.071
	<u>2 0 2 4</u>
Jumlah pendapatan	161.796
Jumlah beban	154.289

20. INTEREST IN JOINT OPERATION

Fluor-Petrosea Join Operation

On 11 March 2020, PTRO, a subsidiary entered into an unincorporated joint operation agreement with PT Fluor Daniel Indonesia (FLUOR) known as the Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) in which joint control is exercised.

PTRO's portion in FPJO altogether is 40% related to *Mill Optimization for Underground Ores Project* for PT Freeport Indonesia. The Group is entitled to a proportionate share of the engineering and construction income received and bears a proportionate share of joint operation's expenses.

The summarized financial information below represents amounts shown in the joint operation's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards:

	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
	31.658	Total assets
	30.240	Total liabilities
	<u>2 0 2 3</u>	
	66.040	Total revenue
	62.307	Total expenses

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

21. ASET TAKBERWUJUD

21. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
Biaya perolehan							Cost
Perangkat lunak komputer	2	44.704	145	(2)	(8)	44.841	Computer software
Aset takberwujud berasal dari akuisisi entitas anak	-	89.086	-	-	-	89.086	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Aset takberwujud dalam pengembangan	-	1.669	93	(1.322)	-	440	Intangible assets under development
Hubungan pelanggan	-	18.783	-	-	-	18.783	Customer relationship
Kontrak pelanggan	-	4.892	-	-	-	4.892	Customer contract
Total	2	159.134	238	(1.324)	(8)	158.042	Total
Akumulasi amortisasi							Accumulated amortization
Perangkat lunak komputer	-	21.606	5.680	(238)	(2)	27.046	Computer software
Aset takberwujud berasal dari akuisisi entitas anak	-	4.171	4.937	-	-	9.108	Intangible assets from the acquisition of subsidiaries
Hubungan pelanggan	-	1.957	-	-	-	1.957	Customer relationship
Kontrak pelanggan	-	510	-	-	-	510	Customer contract
Total	-	28.244	10.617	(238)	(2)	38.621	Total
Nilai tercatat	<u>2</u>					<u>119.421</u>	Carrying amount
31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Biaya perolehan							Cost
Perangkat lunak komputer	-	-	2	-	-	2	Computer software
Akumulasi amortisasi							Accumulated amortization
Perangkat lunak komputer	-	-	-	-	-	-	Computer software
Nilai tercatat	<u>-</u>					<u>2</u>	Carrying amount

Beban diamortisasi dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense was allocated to the following:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 39)	9.993	-	Cost of revenues (Note 39)
Beban umum dan administrasi (Catatan 41)	3.091	-	General and administrative expenses (Note 41)
Total	13.084	-	Total

22. UTANG USAHA

22. TRADE PAYABLES

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Pihak ketiga			Third parties
PT Trakindo Utama	14.120	-	PT Trakindo Utama
PT United Tractors	8.944	-	PT United Tractors
PT Indo Traktor Utama	5.021	-	PT Indo Traktor Utama
Sub-total (Dipindahkan)	28.085	-	Sub-total (Brought forward)

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

22. UTANG USAHA (Lanjutan)

22. TRADE PAYABLES (Continued)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Pihak ketiga (Lanjutan)			Third parties (Continued)
Sub-total (Pindahan)	28.085	-	Sub-total (Carried forward)
PT Titian Servis Indonesia	4.768	-	PT Titian Servis Indonesia
PT Sefas Pelindotama	3.285	-	PT Sefas Pelindotama
PT Samudera Energi Tangguh	2.652	-	PT Samudera Energi Tangguh
PT Buma Perindahindo	2.539	-	PT Buma Perindahindo
PT AKR Corporindo	1.855	-	PT AKR Corporindo
PT Liebherr Indonesia Perkasa	1.826	-	PT Liebherr Indonesia Perkasa
PT Indoraya Megah Teknik	1.735	-	PT Indoraya Megah Teknik
PT Hanwha Mining Services Indonesia	1.617	-	PT Hanwha Mining Services Indonesia
PT Sinar Alam Duta Perdana II	1.375	-	PT Sinar Alam Duta Perdana II
PT Pelayaran Tanjung Kumawa	1.210	-	PT Pelayaran Tanjung Kumawa
PT Riung Mitra Lestari	1.209	-	PT Riung Mitra Lestari1
PT Triguna Internusa Pratama	1.205	-	PT Triguna Internusa Pratama
PT Harapan Wahyu Abadi	1.174	-	PT Harapan Wahyu Abadi
PT Tata Bara Utama	1.147	-	PT Tata Bara Utama
PT Gemilang Sarana Sakti	1.146	-	PT Gemilang Sarana Sakti
PT Hexindo Adiperkasa	1.143	-	PT Hexindo Adiperkasa
PT Pacific Firsttrack Indonesia	948	-	PT Pacific Firsttrack Indonesia
PT Putra Otomona Jaya	935	-	PT Putra Otomona Jaya
PT Eka Dharma Jaya Sakti	837	-	PT Eka Dharma Jaya Sakti
PT Indotruck Utama	752	-	PT Indotruck Utama
PT Pangansari Utama	691	-	PT Pangansari Utama
PT Sehati Mandiri Utama	621	-	PT Sehati Mandiri Utama
PT Linda Hanta Wijaya	586	-	PT Linda Hanta Wijaya
PT Sinomast Mining	561	280	PT Sinomast Mining
PT Pelayaran Duta Lintas Samudera	554	-	PT Pelayaran Duta Lintas Samudera
PT Mandiri Herindo Adiperkasa	508	-	PT Mandiri Herindo Adiperkasa
PT KTC Metal Mining Engineering	-	6.497	PT KTC Metal Mining Engineering
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$ 500)	66.013	1.948	Others (each below US\$ 500)
Sub-total	130.977	8.725	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 44)	212	-	Related party (Note 44)
T o t a l	131.189	8.725	T o t a l

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, analisa umur
utang usaha di atas adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2024 and 2023, the aging analysis
of the above trade payables are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Belum jatuh tempo	103.432	-	Not yet due
Jatuh tempo:			Past due:
1 - 30 hari	4.356	8.725	1 - 30 days
31 - 60 hari	4.747	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	2.711	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	15.943	-	More than 90 days
T o t a l	131.189	8.725	T o t a l

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

22. UTANG USAHA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rincian utang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Rupiah	112.653	8.725
Dolar AS	17.461	-
Dolar Australia	1.029	-
E u r o	45	-
Dolar Singapura	1	-
T o t a l	131.189	8.725

22. TRADE PAYABLES (Continued)

As of 31 December 2024 and 2023, the details of trade payables, by type of currency are as follows:

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
8.725		Rupiah
-		US Dollar
-		Australian Dollar
-		E u r o
-		Singapore Dollar
8.725		T o t a l

23. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Pihak ketiga		
PT Prima Unggul Persada	83	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	6.178
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	-	124
Lain-lain	919	-
Sub-total	1.002	6.302
Pihak berelasi (Catatan 44)	21	-
T o t a l	1.023	6.302

23. OTHER PAYABLES

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
-		Third parties
6.178		PT Prima Unggul Persada
124		Ministry of environment and Forestry
-		Directorate General of Mineral and Coal
-		Others
6.302		Sub-total
-		Related party (Note 44)
6.302		T o t a l

Utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan timbul dikarenakan Grup melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, sehingga Grup berkewajiban untuk membayar iuran IPPKH sesuai dengan jumlah yang ditagihkan pada surat tagihan.

The payables to the Ministry of Environment and Forestry arise because the Group conducts mining activities in forest areas; therefore, Group is obliged to pay IPPKH fees in accordance with the amount billed in the invoice letter.

Utang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara timbul dikarenakan Grup belum melakukan pembayaran iuran IUP.

The payables to the Directorate General of Mineral and Coal arose because the Group had not paid the IUP fee.

Rincian utang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Details of debts to the Ministry of Environment and Forestry are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Entitas anak		
PT Daya Bumindo Karunia	-	3.836
PT Bara International	-	2.342
T o t a l	-	6.178

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
3.836		Subsidiaries
2.342		PT Daya Bumindo Karunia
		PT Bara International
6.178		T o t a l

Ekshibit E/97

Exhibit E/97

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

23. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Rincian utang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Entitas anak	
PT Bara International	-

23. OTHER PAYABLES (Continued)

Details of debts to the Directorate General of Mineral
and Coal are as follows:

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	Subsidiary
	124	PT Bara International

24. UTANG DIVIDEN

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2024, pemegang
saham PTRO menyetujui pembagian dividen tunai
final untuk tahun buku 2023 sebesar US\$ 3.050 atau
US\$ 0,00308 per lembar saham. Dividen kas dibayar
pada tanggal 30 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang dividen kas
sebesar US\$ 879.

24. DIVIDENDS PAYABLE

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Based on the GMS dated 29 April 2024, PTRO's
stockholders approved the distribution of final
cash dividends for financial year 2023 amounted
to US\$ 3,050 or US\$ 0.00308 per share. The cash
dividends were paid on 30 May 2024.

As of 31 December 2024, cash dividends payable
amounted to US\$ 879.

25. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Kontraktor	40.275
Gaji dan bonus	16.687
Kewajiban pasar domestik	5.268
Tanggung jawab sosial perusahaan	1.355
Cuti tahunan	1.115
Bunga	747
Cuti berimbang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 32)	547
Jasa profesional	334
Pajak kendaraan	219
Solar	7
Lain-lain	5.301
Total	71.855

Beban akrual lain-lain terdiri dari biaya perawatan,
biaya keamanan dan berbagai transaksi lainnya dalam
jumlah minimal.

25. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	17.545	Contractor
	-	Salaries and bonuses
	-	Domestic market obligation
	-	Corporate social responsibilities
	-	Annual leave
	119	Interest
	-	Current maturities of long service leave (Note 32)
	240	Professional fee
	-	Vehicle tax
	205	Fuel
	105	Others
Total	18.214	Total

Other accrued expenses are composed of maintenance
expense, security expense and other numerous
transactions with minimal amounts.

26. LIABILITAS KONTRAK

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Kontrak konstruksi - pihak ketiga	20.833

26. CONTRACT LIABILITIES

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
	-	Construction contracts - third parties

Ekshibit E/98

Exhibit E/98

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

26. LIABILITAS KONTRAK (Lanjutan)

Liabilitas kontrak adalah saldo terutang yang berkaitan dengan kontrak konstruksi dan jasa kontraktor pertambangan kepada pelanggan selama kontrak. Hal ini muncul jika tonggak pembayaran tertentu melebihi pendapatan yang diakui hingga saat ini berdasarkan metode biaya-ke-biaya.

Jumlah pendapatan yang diakui terkait kontrak dengan pelanggan dengan liabilitas kontrak bawaan sebesar US\$ 29.408. Tidak ada pendapatan yang diakui pada tahun berjalan yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi di tahun lalu.

26. CONTRACT LIABILITIES (Continued)

Contract liabilities are balances due to customers relating to construction contracts and mining under contracts. These arise if a particular milestone payment exceeds the revenue recognized to date under the cost-to-cost method.

Total of the revenue recognized relates to contract with customers with brought forward contract liabilities amounted to US\$ 29,408. There was no revenue recognized in the current year that related to performance obligations that were satisfied in a prior year.

27. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	33	-
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	32.515	7.158
T o t a l	32.548	7.158

b. Utang Pajak

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Perusahaan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	21	9
Pasal 23	5	-
Sub-total	26	9
Entitas anak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	422	3
Pasal 15	84	5
Pasal 21	559	3
Pasal 22	28	-
Pasal 23	1.437	540
Pasal 25	974	-
Pasal 26	11	-
Pasal 29	79	-
P P N	445	-
Pajak bumi dan bangunan	147	291
Sub-total	4.186	842
T o t a l	4.212	851

27. TAXATION

a. Prepaid Taxes

The Company
Value Added Tax

Subsidiaries
Value Added Tax

T o t a l

b. Taxes Payable

Company
Income Taxes:
Article 21
Article 23

Sub-total

Subsidiaries
Income Taxes:
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29

V A T

Land and building tax

Sub-total

T o t a l

Ekshibit E/99

Exhibit E/99

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (Lanjutan)

27. TAXATION (Continued)

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Corporate Income Tax

Beban pajak penghasilan Grup terdiri dari:

The income tax expense of the Group is consisting
of the following:

	2024	2023	
Beban pajak kini			Current tax expense
Beban pajak untuk tahun berjalan			Current tax for the year
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(10.669)	(4.438)	Subsidiaries
Pajak tangguhan			Deferred tax
Pajak tangguhan untuk tahun berjalan			Deferred tax for the year
Perusahaan	50	1	The Company
Entitas anak	9.549	99	Subsidiaries
T o t a l	(1.070)	(4.338)	T o t a l

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak serta perhitungan beban pajak kini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated profit before income tax expense according to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income and calculation of current tax expense for the year ended 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	171.040	19.588	Consolidated profit before income tax
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak dan eliminasi	184.697	18.827	Profit before tax of the subsidiaries and elimination
(Rugi) laba sebelum pajak - Perusahaan	(13.657)	761	(Loss) profit before tax - The Company
Ditambah (dikurangi):			Add (deduct):
Rugi selisih kurs mata uang asing - neto	1.191	65	Loss foreign exchange - net
Beban pajak	487	-	Tax expense
Pendapatan keuangan	(414)	(732)	Finance income
Hiburan	356	4	Entertainment
Penyisihan atas bonus	220	-	Provision for bonus
Biaya tunjangan karyawan	9	5	Employee benefit expense
Biaya bank	-	99	Bank charges
Beban lainnya	43	4	Other expenses
Sub-total	1.892	(555)	Sub-total
Taksiran rugi kena pajak tahun berjalan - Perusahaan (Dipindahkan)	(11.765)	206	Estimated taxable loss for the current year - The Company (Brought forward)

Ekshibit E/100

Exhibit E/100

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (Lanjutan)

27. TAXATION (Continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

c. Corporate Income Tax (Continued)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Taksiran rugi kena pajak tahun berjalan - Perusahaan (Pindahan)	(11.765)	206	Estimated taxable loss for the current year - The Company (Carried forward)
Kompensasi rugi fiskal tahun:			Compensation fiscal loss year:
2022	(1.295)	(1.295)	2022
2019	(679)	(885)	2019
Akumulasi rugi fiskal	(13.739)	(1.974)	Accumulated fiscal losses
Beban pajak kini	-	-	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar di muka:			Less prepaid tax
Pasal 23	(442)	(509)	Article 23
Taksiran klaim pajak penghasilan - Pasal 28a	442	509	Estimated claims for tax refund

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semua 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On 7 October 2021, the Government ratified the Draft Law on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law No. 7 of 2021 which stipulates, among other things, an increase in the rate of Value-Added Tax (VAT) from all 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% starting on 1 January 2025. In addition, canceling the reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from the original 20% down to a fixed 22% which will take effect in the 2022 fiscal year.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable profit resulting from the reconciliation becomes the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

d. Taksiran Klaim Pajak Penghasilan

d. Estimated Claim for Tax Refund

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Perusahaan			Company
2024	442	-	2024
2023	509	509	2023
Sub-total	951	509	Sub-total
Entitas anak	20.182	1.190	Subsidiaries
Total	21.133	1.699	Total

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

27. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak

PT Tamtama Perkasa (TP)

Pada tanggal 15 Maret 2024, TP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPN untuk masa Desember 2022 sebesar Rp 29.492.302.891 (setara dengan US\$ 1.861), setelah dikurangi kompensasi SKPKB atas PPN masa Januari - November 2022 dan STP atas PPN dengan nilai total sebesar Rp 4.021.978.659 (setara dengan US\$ 254).

Pada tanggal 21 Mei 2024, TP menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas PPN masa Maret 2024 sebesar Rp 85.348.507.248 (setara dengan US\$ 5.386).

Pada tanggal 20 Juni 2024, TP menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas PPN masa April 2024 sebesar Rp 13.240.862.580 (setara dengan US\$ 836).

PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

Pada tahun 2024 dan 2023, MUTU, entitas anak, menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atas PPN untuk masa pajak 2023, 2022 dan 2021. MUTU telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 162.531.021.687 (setara dengan US\$ 10.347.363 (nilai penuh)) pada tahun 2024 dan Rp 139.652.565.809 (setara dengan US\$ 9.334.269 (nilai penuh)) pada tahun 2023.

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Pada tahun 2023, PTRO memiliki kelebihan atas pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) sebesar US\$ 2.358 yang telah dicatat sebagai klaim pajak penghasilan. Pada tanggal 11 Desember 2024, PTRO menerima SKPLB dengan surat No. 00003/406/23/091/24 sebesar US\$ 2.268 (setara dengan Rp 36 miliar) yang dicatat sebagai klaim pengembalian pajak. PTRO mengajukan pengembalian atas lebih bayar pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2024 dan akan menerima kelebihan pembayaran tersebut pada tanggal 13 Januari 2025. Selisih atas klaim tersebut sebesar US\$ 90 telah dicatat pada laporan laba rugi tahun berjalan.

27. TAXATION (Continued)

e. Tax Assessment Letter

PT Tamtama Perkasa (TP)

On 15 March 2024, TP received a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPLB") VAT period December 2022 amounting to Rp 29,492,302,891 (equivalent to US\$ 1,861), after deducted with compensation of SKPLB for VAT period January - November 2022 and STP for PPN amounting to Rp 4,021,978,659 (equivalent to US\$ 254).

On 21 May 2024, TP received a Preliminary Refund of Tax Overpayment for VAT period March 2024 amounting to Rp 85,348,507,248 (equivalent to US\$ 5,386).

On 20 June 2024, TP received a Preliminary Refund of Tax Overpayment for VAT period April 2024 amounting to Rp 13,240,862,580 (equivalent to US\$ 836).

PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

In 2024 and 2023, MUTU, a subsidiary, received several tax assessments and tax bills for the VAT of 2023, 2022 and 2021 tax periods. MUTU has received tax refund amounting to Rp 162,531,021,687 (equivalent to US\$ 10,347,363 (full amount)) in 2024 and Rp 139,652,565,809 (equivalent to US\$ 9,334,269 (full amount)) in 2023.

PT Petrosea Tbk (PTRO)

In 2023, PTRO has an overpayment for Corporate Income Tax (CIT) amounted to US\$ 2,358 that has been recorded as claim for tax refund. On 11 December 2024, PTRO received a SKPLB No. 00003/406/23/091/24 amounted to US\$ 2,268 (equivalent to Rp 36 billion) which recorded as claims for tax refund. PTRO submitted refund of that tax overpayment on 19 December 2024 and will receive the overpayment on 13 January 2025. The difference on that claim amounted to US\$ 90 has been recorded in the current year's profit or loss.

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (Lanjutan)

27. TAXATION (Continued)

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
Aset (liabilitas) pajak tanggunghan Perusahaan								Deferred tax (liabilities) assets The Company
Penyisihan imbalan kerja karyawan	5	-	-	2	2 (	2)	7	Provision for employee benefits
B o n u s	-	-	-	48	-	-	48	B o n u s
Sub-total	5	-	-	50	2 (	2)	55	Sub-total
Entitas anak								Subsidiaries
Penyisihan imbalan kerja karyawan	31	6.381 (	270)	574 (	25)(	517)	6.174	Provision for employee benefits
Liabilitas sewa	-	2.111 (	-	886	-	-	2.997	Lease liabilities
Beban masih harus dibayar	-	1.569	-	683	-	-	2.252	Accrued expenses
Persediaan	-	61	-	81	- (	220)(	78)	Inventories
Piutang usaha	-	5	-	10	-	-	15	Trade receivables
Aset takberwujud	- (	22.519)	-	2.335	-	- (	20.184)	Intangible assets
Aset tetap	- (	12.873)(	1.553)	142	-	- (	14.284)	Property, plant and equipment
Aset hak-guna	- (	1.778)	- (	823)	-	- (	2.601)	Right-of-use assets
B o n u s	-	- (	46)(	42)	-	- (	88)	B o n u s
Kombinasi bisnis	- (	105.544)	-	7.164	-	- (	98.380)	Business combinations
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	86	-	-	408	-	-	494	Provision for mine reclamation and closure
Sub-total	117 (	132.587)	1.869)	11.418 (	25)(	737)	123.683)	Sub-total
T o t a l	122 (	132.587)	1.869)	11.468 (	23)(	739)	123.628)	T o t a l
	31 Desember 2022/ 31 December 2022	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Aset pajak tanggunghan Perusahaan								Deferred tax assets The Company
Penyisihan imbalan kerja karyawan	-	-	-	1	4	-	5	Provision for employee benefits

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (Lanjutan)

27. TAXATION (Continued)

f. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

f. Deferred Tax (Continued)

	31 Desember 2022/ 31 December 2022	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penyesuaian/ Adjustment	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Translation adjustment	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Aset pajak tangguhan Entitas anak								Deferred tax assets Subsidiaries
Penyisihan imbalan kerja karyawan	26	-	-	12 (	7)	-	31	Provision for employee benefits
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	-	63	24	- (	1)	86	Provision for mine reclamation and closure
Sub-total	26	-	63	36 (	7)(	1)	117	Sub-total
T o t a l	26	-	63	37 (	3)(	1)	122	T o t a l

28. UTANG BANK JANGKA PENDEK

28. SHORT-TERM BANK LOAN

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Rupiah			Rupiah
Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi			Syndicated Credit Facilities Agreement
Tranche A	24.595	12.811	Tranche A
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	34.121	-	PT Bank Central Asia Tbk
T o t a l	58.716	12.811	T o t a l

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi

Syndicated Credit Facilities Agreement

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai kreditur adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

The parties involved in this syndicated credit facilities as creditors are the Company with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai Debitur adalah Perusahaan sebagai Peminjam, MP sebagai Co-Borrower dan TP, BBBB, PT Borneo Bangun Banua (BBB) dan MUTU sebagai Subsequent Co-Borrower setelah memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Penawaran Pemberian Kredit.

The parties involved in this syndicated credit facilities as Debtors are the Company as Borrower, MP as Co-Borrower and TP, BBBB, PT Borneo Bangun Banua (BBB) and MUTU as Subsequent Co-Borrower after fulfilling the requirements stated in the Credit Offering Letter.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., terdapat fasilitas utang berupa pinjaman jangka pendek (Tranche A - Term Loan Revolving) dan pinjaman jangka panjang (Tranche B dan C - Long Term) (Catatan 31).

Based on Syndicated Credit Facility Agreement Deed No. 155 dated 14 December 2023 made by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., there are loan facilities consist if short-term loan (Tranche A - Term Loan Revolving) and long-term loan (Tranche B and C - Long Term) (Note 31).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

28. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi (Lanjutan)

Tranche A - Term Loan Revolving

Fasilitas Tranche A bersifat *revolving* dan *committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp 400.000.000.000, dengan tujuan untuk memenuhi belanja modal dan modal kerja Perusahaan.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (PK).

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") 3 bulan + 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perusahaan melakukan penarikan sepenuhnya dari fasilitas *Term Loan Tranche A* sebesar Rp 400.000.000.000 dan telah melakukan pembayaran kembali pada 13 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas No. CBG.CB4/11373/2024 tanggal 16 Desember 2024, Perusahaan melakukan penarikan lagi dari fasilitas *Term Loan Tranche A* sebesar Rp 400.000.000.000.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 397.500.000.000 dan Rp 197.500.000.000 setara dengan US\$ 24.595 dan US\$ 12.811 (setelah dikurangi biaya penerbitan langsung sebesar Rp 2.500.000.000).

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 29 Mei 2024, Grup dan BCA menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas *time loan revolving* sebesar US\$ 70 juta, dengan jatuh tempo 2 tahun dan tingkat suku bunga term *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR") tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun untuk Dolar AS dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) tiga bulan ditambah margin sebesar 1,75% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai modal kerja Grup. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP. Utang bank ini jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai US\$ 34.000.

28. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

Syndicated Credit Facilities Agreement (Continued)

Tranche A - Term Loan Revolving

The Tranche A facility is revolving and committed, has a plafond of Rp 400,000,000,000, that is intended to finance the Company's capital expenditure and working capital.

The time period of the loan facility is maximum 12 (twelve) months from the date of signing the Credit Agreement (CA).

The interest rate charged is *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) 3 months + 1.75% (one point seventy five percent) per annum.

The repayment of loan principal and interest is paid quarterly in March, June, September and December.

As of 23 February 2024, the Company has fully drawdown from *Term Loan Tranche A* facility amounting to Rp 400,000,000,000 and made full repayment in 13 December 2024.

Based on the Facility Withdrawal Application Letter No. CBG.CB4/11373/2024 dated 16 December 2024, the Company made another withdrawal from the *Term Loan Tranche A* facility amounted to Rp 400,000,000,000.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 and 2023 amounted to Rp 397,500,000,000 and Rp 197,500,000,000, equivalent with US\$ 24,595 and US\$ 12,811, respectively, (net of direct issue costs amounting to Rp 2,500,000,000).

PT Bank Central Asia Tbk

On 29 May 2024, the Group and BCA signed an agreement related to *time loan revolving* facility amounted to US\$ 70 million, with a tenure of 2 years and an interest rate of three-months *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR") term plus margin of 2% per annum for US Dollar and three months *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") plus margin of 1.75% per annum for Rupiah. The purpose of this facility is to finance the Group's working capital. This facility can only be used by PTRO, KBL and CEP. This loan will mature on 11 March 2025.

On 31 December 2024, borrowings from this facility are collateralized by trade receivable amounted to US\$ 34,000.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

28. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 34.121.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan PTRO menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai US\$ 30.000. Fasilitas ini diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan yang terakhir di 9 Oktober 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar term *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR") tiga bulan ditambah *Credit Adjustment Spread* ("CAS") tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2024, PTRO membayar fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar US\$ 10.000 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun

Pada tanggal 12 dan 21 Juni 2024, PTRO melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dari Mandiri sebesar US\$ 20.000 dan US\$ 10.000 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah CAS tiga bulan dan margin sebesar 3% per tahun. Dana untuk pelunasan pinjaman ini berasal dari pinjaman dari BCA.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Mandiri telah mengakhiri fasilitas KMK yang diberikan kepada PTRO.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

Pada tanggal 13 April 2022, PTRO dan HSBC menandatangani perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja sebesar US\$ 15.000.

Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 23 Januari 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2% per tahun atau dengan tingkat suku bunga sebesar term *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") ditambah margin sebesar 1,38% per tahun.

Pada tanggal 6 dan 23 Maret 2024, PTRO melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dari HSBC masing-masing sebesar US\$ 3.000 and US\$ 4.000 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR ditambah margin sebesar 2% per tahun. Tidak ada perpanjangan atas fasilitas ini.

Pada tanggal 22 Maret 2024, fasilitas kredit ini telah diakhiri.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 sebesar US\$ 4.860.

28. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (Continued)

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 amounted to US\$ 34,121.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

On 9 October 2018, Mandiri and PTRO agreed to have a new Working Capital Credit facility (WCC) amounting to US\$ 30,000. The facility extended several times with the latest extension on 9 October 2024 with interest rate of three months Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") term plus three months Credit Adjustment Spread ("CAS") and margin of 3% per annum.

On 22 March 2024, PTRO paid the short-term loan facility from Mandiri amounting to US\$ 10,000 with an interest rate of the three-month SOFR Term plus CAS and a margin of 3% per annum.

On 12 and 21 June 2024, PTRO fully repaid the short-term loan facility from Mandiri amounted to US\$ 20,000 and US\$ 10,000 with an interest rate of the three-month SOFR Term plus CAS and a margin of 3% per annum. The funds for the repayment of this loan come from a loan from BCA.

On 21 June 2024, Mandiri has terminated the WCC facility granted to PTRO.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

On 13 April 2022, PTRO and HSBC signed working capital facility amounting to US\$ 15,000.

This facility has been extended until 23 January 2024 with interest rate of SOFR term plus margin of 2% per annum or with an interest rate of the Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") term plus a margin of 1.38% per annum.

On 6 and 23 March 2024, PTRO fully repaid the short-term loan facility from HSBC amounting to US\$ 3,000 and US\$ 4,000, respectively with an interest rate of the SOFR term plus a margin of 2% per annum. The facility is not extended.

On 22 March 2024, this credit facility has been terminated.

The interest incurred on short-term bank loans for the year ended 31 December 2024 amounted to US\$ 4,860.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

29. UTANG OBLIGASI

29. BONDS PAYABLE

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I 2024	61.874	Petrosea Continuous Registration Bonds I Phase I 2024
Biaya transaksi belum diamortisasi	(570)	Unamortized transaction cost
Bunga masih harus dibayar	267	Accrued Interest
T o t a l	61.571	T o t a l
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (	3.175)	Current maturities
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	<u>58.396</u>	Bond payable - net of current maturities

Pada tanggal 6 Desember 2024, PTRO, entitas anak, memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-162/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun (setara dengan US\$ 185.621). PTRO telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US\$ 92.811).

On 6 December 2024, PTRO, a subsidiary, obtained an effective statement from the OJK through letter No. S-162/D.04/2024 to conduct the Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah I with target fund Rp 3 trillion (equivalent to US\$ 185,621). PTRO has published and offered Continuous Bonds I Phase I Year 2024 with principal amounted to Rp 1.5 trillion (equivalent to US\$ 92,811).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, PTRO telah menerbitkan:

In connection with the Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah I, PTRO has issued:

	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Seri C/ Series C	Seri D/ Series D	Jumlah/ T o t a l
	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000
Obligasi Tahap I/ Bond Phase I	47.000	171.640	465.400	315.960	1.000.000

Atau pada tanggal 31 Desember 2024 setara dengan:

Or as of 31 December 2024 equivalent to:

	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Seri C/ Series C	Seri D/ Series D	Jumlah/ T o t a l
	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000
Obligasi Tahap I/ Bond Phase I	2.908	10.620	28.796	19.550	61.874

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D masing-masing sebesar 6,50%, 8,00%, 8,75% dan 9,50% yang dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu obligasi untuk Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D masing-masing adalah 367 hari, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak tanggal emisi.

The annual interest rates of Serie A, Serie B, Serie C and Serie D Bonds are 6.50%, 8.00%, 8.75% and 9.50%, respectively, that are paid on a quarterly basis. The period of bonds for Series A, Series B, Series C, and Series D are 367 days, 3 years, 5 years, and 7 years, respectively, from emission date.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 September 2024.

The bond obtained a rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO") based on confirmation letter related to rating on 12 September 2024.

Obligasi diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja PTRO dan telah dicatatkan di BEI.

The bonds were issued for the purpose of PTRO's working capital and have been registered on the BEI.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

29. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PTRO diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap kewajiban bunga dan cicilan tidak kurang dari 115%, rasio utang berbunga terhadap ekuitas tidak melebihi 300%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang obligasi.

Obligasi ini tidak dijaminkan dengan agunan khusus.

Beban bunga utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 267.

29. BONDS PAYABLE (Continued)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

PTRO is required to maintain the following financial ratios such as maintaining the current ratio not less than 100%, the EBITDA to interest plus installments ratio not less than 115%, and the interest-bearing debt to equity ratio not exceeding 300%, calculated based on the annually consolidated financial statements.

As of 31 December 2024, PTRO is in compliance with the terms and conditions of all the bonds payable.

The bonds are not secured by specific collateral.

The interest expenses incurred from bonds payable on 31 December 2024, amounted to US\$ 267.

30. UTANG SUKUK IJARAH

30. SUKUK IJARAH PAYABLE

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Sukuk ijarah berkelanjutan I Petrosea Tahap I 2024	30.937
Biaya transaksi belum diamortisasi	(341)
Imbal hasil yang masih harus dibayar	130
T o t a l	30.726
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.172)
Utang sukuk ijarah - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	28.554

*Petrosea Continuoius Registration
Sukuk Ijarah I Phase I 2024
Unamortized transaction cost
Accrued of returns*

T o t a l

Current maturities

*Sukuk ijarah payable -
net of current maturities*

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, PTRO telah menerbitkan:

In connection with the Public Offering of Continuous Bonds and Sukuk Ijarah I, PTRO has issued:

	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Seri C/ Series C	Seri D/ Series D	Jumlah/ T o t a l
	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000	'Rp 000.000
Sukuk Ijarah Tahap I/ Sukuk Ijarah Phase I	33.000	128.360	254.600	84.040	500.000

Atau pada tanggal 31 Desember 2024 setara dengan:

Or as of 31 December 2024 equivalent to:

	Seri A/ Series A	Seri B/ Series B	Seri C/ Series C	Seri D/ Series D	Jumlah/ T o t a l
	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000	'US\$ 000
Sukuk Ijarah Tahap I/ Sukuk Ijarah Phase I	2.042	7.942	15.753	5.200	30.937

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

30. UTANG SUKUK IJARAH (Lanjutan)

Tingkat imbalan ijarah per tahun untuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D masing-masing sebesar 6,50%, 8,00%, 8,75% dan 9,50%, yang dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu sukuk ijarah untuk Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D masing-masing adalah 367 hari, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak tanggal emisi.

Sukuk ijarah ini memperoleh pemeringkatan "A+" dari PEFINDO berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 12 September 2024.

Sukuk ijarah diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja PTRO dan telah dicatatkan di BEI.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PTRO diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 100%, rasio EBITDA terhadap kewajiban bagi hasil dan cicilan tidak kurang dari 115%, rasio utang bagi hasil terhadap ekuitas tidak melebihi 300%, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap tahunan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTRO telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang sukuk ijarah.

Sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Objek ijarah yang mendasari penerbitan sukuk ijarah berasal dari manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh PTRO.

30. SUKUK IJARAH PAYABLE (Continued)

The annual ijarah return rates of Series A, Series B, Series C and Series D Bonds are 6.50%, 8.00%, 8.75% and 9.50%, respectively, that are paid on a quarterly basis. The period of sukuk ijarah for Series A, Series B, Series C, and Series D are 367 days, 3 years, 5 years, and 7 years, respectively, from emission date.

The sukuk ijarah obtained a bond rating of "A+" from PEFINDO based on confirmation letter related to rating on 12 September 2024.

Sukuk ijarah were issued for the purpose of PTRO's working capital and have been registered on the BEI.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

PTRO is required to maintain the following financial ratios such as maintaining the current ratio not less than 100%, the EBITDA to profit sharing plus installments ratio not less than 115%, and the profit-sharing debt to equity ratio not exceeding 300%, calculated based on the annually consolidated financial statements.

As of 31 December 2024, PTRO is in compliance with the terms and conditions of all the sukuk ijarah payable.

Sukuk ijarah is not secured by specific collateral.

Ijarah objects that underlie the issuance of sukuk ijarah is derived from beneficiary of mining services conducted by PTRO.

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	178.993
Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi	170.307
PT Bank Central Asia Tbk	128.108
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.203
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sindikasi	20.719
Sub-total (Dipindahkan)	541.330

31. BANK LOANS LONG-TERM

	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.162
Syndicated Credit Facilities Agreement	-
PT Bank Central Asia Tbk	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Syndicated PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Sub-total (Brought forward)	61.162

Ekshibit E/109

Exhibit E/109

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Rupiah (Lanjutan)	
Sub-total (Pindahan)	541.330
Dolar AS	
PT Bank Central Asia Tbk	104.824
T o t a l	646.154
Biaya utang jangka panjang yang belum diamortisasi (	3.517)
Bunga yang masih harus dibayar	432
T o t a l	643.069
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (	44.517)
Bagian jangka panjang	598.552

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai kreditur adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Para pihak yang terkait dalam fasilitas kredit sindikasi ini sebagai Debitur adalah Perusahaan sebagai Peminjam, MP sebagai Co-Borrower dan TP, BBBB, BBB dan MUTU sebagai Subsequent Co-Borrower setelah memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Penawaran Pemberian Kredit.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 155 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., terdapat fasilitas utang berupa pinjaman jangka pendek (Tranche A - Term Loan Revolving) (Catatan 28) dan pinjaman jangka panjang (Tranche B dan C - Long Term).

1. Tranche B - Term Loan

Fasilitas Tranche B bersifat non-revolving dan committed, dan memiliki plafon sebesar Rp 200.000.000.000 atau setara dengan US\$ 12.000 pada saat dilakukan penarikan, mana yang lebih rendah, dengan tujuan untuk membiayai akuisisi Debitur terhadap kepemilikan saham BBBB secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan secara efektif sebesar 100% (seratus persen).

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) per tahun.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Rupiah (Continued)		
Sub-total (Carried forward)	61.162	
US Dollar		
PT Bank Central Asia Tbk	-	
T o t a l	61.162	T o t a l
Unamortized long-term loan fees	-	
Accrued interest	-	
T o t a l	61.162	T o t a l
Less current maturities	-	
Long-term portion	61.162	

Syndicated Credit Facilities Agreement

The parties involved in this syndicated credit facilities as creditors are the Company with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

The parties involved in this syndicated credit facilities as Debtors are the Company as Borrower, MP as Co-Borrower and TP, BBBB, BBB and MUTU as Subsequent Co-Borrower after fulfilling the requirements stated in the Credit Offering Letter.

Based on Syndicated Credit Facility Agreement Deed No. 155 dated 14 December 2023 made by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., there are loan facilities consist if short-term loan (Tranche A - Term Loan Revolving) (Note 28) and long-term loan (Tranche B and C - Long Term).

1. Tranche B - Term Loan

The Tranche B facility is non-revolving and committed, has a plafond of Rp 200,000,000,000 or equivalent with US\$ 12,000 at the time of withdrawal, whichever is lower, that is intended to finance Debtor's acquisition value of BBBB share ownership directly or indirectly with effective ownership of 100% (one hundred percent).

The time period of the loan facility is maximum 60 (sixty) months from the Date of Signing the CA. The interest rate charged is JIBOR 3 months + 1.95% (one point ninety five percent) per annum.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi (Lanjutan)

1. Tranche B - Term Loan (Lanjutan)

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 13 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan Tranche B* sebesar Rp 132.073.200.000. Fasilitas utang ini digunakan untuk pembiayaan 70% dari nilai akuisisi Perusahaan terhadap kepemilikan saham BBBB.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 105.658.560.000 setara dengan US\$ 6.537.

2. Tranche C - Term Loan

Fasilitas *Tranche C* bersifat *non-revolving* dan *committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp 2.906.724.800.000 atau setara dengan US\$ 174.400 pada saat dilakukan penarikan, mana yang lebih rendah, dengan tujuan untuk membiayai maksimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai akuisisi Debitur terhadap kepemilikan saham MUTU secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan secara efektif sebesar 100% (seratus persen).

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perusahaan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan Tranche C* sebesar Rp 2.728.697.280.000. Fasilitas utang ini digunakan untuk pembiayaan 80% dari nilai akuisisi Perusahaan terhadap kepemilikan saham MUTU.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.646.836.361.600 setara dengan US\$ 163.770.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

Syndicated Credit Facilities Agreement (Continued)

1. Tranche B - Term Loan (Continued)

The repayment of loan principal and interest is paid quarterly in March, June, September and December.

On 13 March 2024, the Company has drawdown from Term Loan Tranche B facility amounting to Rp 132,073,200,000. This facility is used for financing 70% of the Company's acquisition value of BBBB shares ownership.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 amounted to Rp 105,658,560,000 equivalent with US\$ 6,537.

2. Tranche C - Term Loan

The Tranche C facility is non-revolving and committed, has a plafond of Rp 2,906,724,800,000 or equivalent with US\$ 174,400 at the time of withdrawal, whichever is lower, that is intended to finance a maximum of 80% (eighty percent) of the Debtor's acquisition value of MUTU share ownership directly or indirectly with effective ownership of 100% (one hundred percent).

The time period of the loan facility is maximum 72 (seventy two) months from the date of signing the CA. The interest rate charged is JIBOR 3 months + 1.95% (one point ninety five percent) per annum.

The repayment of loan principal and interest is paid quarterly in March, June, September and December.

On 23 February 2024, the Company has drawdown from Term Loan Tranche C facility amounting to Rp 2,728,697,280,000. This facility is used for financing 80% of the Company's acquisition value of MUTU shares ownership.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 amounted to Rp 2,646,836,361,600 equivalent with US\$ 163,770.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi (Lanjutan)

Syndicated Credit Facilities Agreement (Continued)

2. Tranche C - Term Loan (Lanjutan)

2. Tranche C - Term Loan (Continued)

Fasilitas kredit sindikasi dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah yang terdaftar atas nama TP dan MP (Catatan 16), kepemilikan saham TP dan MP yang dimiliki oleh Perusahaan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), akta kuasa untuk menjual saham yang dimiliki oleh Perusahaan pada TP dan MP, rekening bank atas nama Perusahaan, TP dan MP, akta kuasa untuk penarikan dana atas nama Perusahaan, TP dan MP, fidusia atas piutang usaha, mesin dan peralatan, serta klaim asuransi yang diberikan Perusahaan, TP dan MP sehubungan dengan polis asuransi atas aset-aset yang dijadikan agunan pada Agunan Tahap 1.

The syndicated credit facilities are secured by land registered in the names of TP and MP (Note 16), TP and MP's share ownership owned by the Company amounting to 99.99% (ninety nine point ninety nine percent), deed of power of attorney to sell shares owned by the Company to TP and MP, bank accounts registered in the names of the Company, TP and MP, deed of power of attorney to withdraw the funds under the name of the Company, TP and MP, fiduciary for trade receivables, machines and equipment owned by the Company, TP and MP and also insurance claims provided by the Company, TP and MP in relation to insurance policies on assets used as collateral in Phase 1 Collateral.

Fasilitas kredit sindikasi juga dijamin dengan rekening bank yang dimiliki oleh BBBB, BBB dan MUTU, kepemilikan saham BBB yang dimiliki oleh BBBB sampai dengan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), kepemilikan saham BBBB dan MUTU yang dimiliki oleh Perusahaan sampai dengan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

The syndicated credit facilities also are secured by bank accounts owned by BBBB, BBB and MUTU, BBB's share ownership owned by BBBB up to 99.99% (ninety nine point ninety nine percent), BBBB and MUTU's share ownership owned by the Company up to 99.99% (ninety nine point ninety nine percent).

Akta kuasa untuk penarikan dana atas nama BBBB, BBB dan MUTU, akta kuasa untuk menjual saham yang dimiliki oleh Perusahaan pada BBBB dan MUTU, dan saham yang dimiliki oleh BBBB pada BBB, *corporate guarantee* dari BBBB, BBB dan MUTU, fidusia atas piutang usaha, mesin dan peralatan, serta klaim asuransi yang diberikan BBBB, BBB dan MUTU sehubungan dengan polis asuransi atas aset-aset yang dijadikan agunan pada Agunan Tahap 2.

Deed of power of attorney for withdrawing funds in the name of BBBB, BBB and MUTU, deed of power of attorney to sell shares owned by the Company to BBBB and MUTU, and shares owned by BBBB to BBB, *corporate guarantee* from BBBB, BBB and MUTU, fiduciary for trade receivables, machines and equipment, also insurance claims provided by BBBB, BBB and MUTU in relation to insurance policies on assets used as collateral in Phase 2 Collateral.

Fasilitas kredit sindikasi mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Syndicated credit facilities contain certain covenants including financial covenants.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

The Company are required to comply with the consolidated financial ratio covenants as follows:

- *Debt to Equity* rasio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted current* rasio lebih dari atau sama dengan 1,0x.

- *Debt to Equity* ratio maximum of 300% (three hundred percent);
- *Adjusted DSCR* ratio minimum of 300% (three hundred percent);
- *Adjusted current* ratio more than or equal to 1.0x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perusahaan.

As of 31 December 2024, all financial ratios required were met by the Company.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

**Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (BNI)**

Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 219 oleh Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perusahaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan fasilitas berupa:

1. Tranche Fasilitas *Term Loan* - Fasilitas Kredit *Revolving*

Fasilitas *Term Loan* bersifat *revolving* dan memiliki plafon sebesar Rp 950.000.000.000, dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perusahaan, termasuk akuisisi saham Perusahaan terbuka.

Pada bulan Februari 2024, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas *term loan* dengan plafon sebesar Rp 400.000.000.000. dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perusahaan, termasuk akuisisi saham perusahaan terbuka.

Jangka waktu fasilitas peminjaman tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan PK dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan No. 383, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas *term loan Revolving B* dengan plafon sebesar Rp 775.000.000.000 dengan tujuan untuk membiayai kegiatan Perusahaan secara umum (*General Corporate purposes*).

Jangka waktu fasilitas *Revolving B* adalah 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,90% per tahun.

Pembayaran pokok dilakukan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo akhir.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.117.875.000.000 dan Rp 942.875.000.000 setara dengan US\$ 131.041 dan US\$ 61.162 (setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar Rp 11.525.000.000).

2. Fasilitas *Treasury Line*

Fasilitas *Treasury Line* bersifat *revolving uncommitted facility* memiliki plafon sebesar Rp 15.000.000.000.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

**Credit Facilities Agreement PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (BNI)**

On 27 October 2023, a Deed of Credit Facility Agreement No. 219 by Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., between the Company and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with facilities in the form of:

1. Term Loan Facility - Revolving Credit Facility

The Term Loan facility is revolving and has a ceiling of Rp 950,000,000,000, with the need to fulfill the Company's general objectives, including acquisition of public company.

In February 2024, the Company received additional term loan facility with ceiling of Rp 400,000,000,000, with the need to fulfill the Company's general objectives, including acquisition of public company.

The term of the loan facility is 60 (sixty) months from the signing of the CA and interest rate charged is JIBOR 3 months + margin 1.75% per annum.

Based on the Amendment Agreement No. 383, the Company obtained an additional term loan Revolving B facility with ceiling of Rp 775,000,000,000 for the purpose of financing general corporate purposes.

The term of the loan facility is 36 months from the signing of the agreement and interest rate charged is JIBOR 3 months + margin 1.90% per annum.

Principal payments will be made in lump-sum on the final maturity date.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 and 2023 amounted to Rp 2,117,875,000,000 and Rp 942,875,000,000 equivalent with US\$ 131,041 and US\$ 61,162, respectively (net of issue costs amounting to Rp 11,525,000,000).

2. Treasury Line Facility

The Treasury Line facility is a revolving uncommitted facility with a ceiling of Rp 15,000,000,000, with the aim of hedging proceeds from coal sales.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

**Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (BNI) (Lanjutan)**

2. Fasilitas *Treasury Line* (Lanjutan)

Kewajiban keuangan:

- *Debt to Equity* rasio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen)

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perusahaan.

Agunan dan Pengikatan

Adanya penanggungan Perusahaan yang akan diberikan oleh MP dan KJP dengan gadai saham atas saham-saham Perusahaan terbuka yang dimiliki oleh KJP.

Terdapat kuasa untuk menjual saham atas saham-saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh KJP serta kuasa yang tidak dapat ditarik Kembali yang akan diterbitkan oleh KJP.

Pada tanggal 21 November 2023, Perusahaan dan BNI telah menandatangani suatu Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI) sehubungan dengan transaksi derivatif di Indonesia (Catatan 48).

3. Fasilitas *Term Loan* - Fasilitas Kredit *Aflopend*

Pada tanggal 30 Agustus 2024 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 319 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perusahaan dengan BNI.

Fasilitas *Term Loan* bersifat *aflopended*, dan memiliki plafon sebesar Rp 775.000.000.000 atau setara dengan US\$ 50.000 pada saat dilakukan penarikan, dengan keperluan untuk memenuhi tujuan umum Perusahaan termasuk untuk membiayai pembelian saham PTRO.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 2,00% per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

Credit Facilities Agreement PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (Continued)

2. *Treasury Line Facility* (Continued)

Financial covenants:

- *Debt to Equity* ratio maximum of 300% (three hundred percent);
- *Adjusted DSCR* ratio minimum of 300% (three hundred percent)

As of 31 December 2024, all financial ratios required were met by the Company.

Collateral and Binding

There is company guarantee which will be provided by MP and KJP with a share pledge for the shares of the public company owned by KJP.

There is a power to sell shares in public company shares owned by KJP as well as an irrevocable power of attorney that will be issued by KJP.

On 21 November 2023, the Company and BNI also signed an Indonesian Derivative Master Agreement ("PIDI") in connection with derivative transaction in Indonesia (Note 48).

3. *Term Loan Facility - Aflopended Credit Facility*

On 30 August 2024, a Deed of Credit Facility Agreement No. 319 by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., between the Company and BNI.

Term Loan facility is aflopended, has a plafond of Rp 775,000,000,000 or the equivalent of US\$ 50,000 at the time of withdrawal, with the need to fulfill the Company's general objectives including purchase of PTRO shares.

The term of the loan facility is 72 (seventy-two) months from the signing of the LA. The interest rate charged is JIBOR 3 months + margin 2.00% per annum.

The repayment of loan principal and interest is paid quarterly in March, June, September and December.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

**Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (BNI) (Lanjutan)**

**3. Fasilitas Term Loan - Fasilitas Kredit Aflopend
(Lanjutan)**

Pada tanggal 5 September 2024, Perusahaan melakukan penarikan dari fasilitas Term Loan sebesar Rp 775.000.000.000 atau setara dengan US\$ 50.000.

Fasilitas kredit mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Debt to Equity ratio maksimal 300% (tiga ratus persen);
- Adjusted DSCR ratio minimal 300% (tiga ratus persen);
- Adjusted current ratio lebih dari atau sama dengan 1,0x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perusahaan.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 775.000.000.000 dan nihil setara dengan US\$ 47.952 dan nihil.

Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 29 Mei 2024, BCA dan bersama-sama PTRO, KBL, dan CEP, entitas anak, telah menyetujui beberapa pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman tunai

i. Kredit Investasi 1 (KI 1)

Fasilitas ini senilai setara US\$ 107 ribu, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk Dolar AS dan JIBOR tiga bulan ditambah 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mengambilalih fasilitas Term Loan I, II, III dan Senior Secured Term Loan di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO dan KBL.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 1 ini telah digunakan oleh PTRO dan KBL sebesar US\$ 97.180. Fasilitas KI 1 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2032.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

Credit Facilities Agreement PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (Continued)

**3. Term Loan Facility - Aflopend Credit Facility
(Continued)**

On 5 September 2024, the Company has drawdown from Term Loan facility amounting to Rp 775,000,000,000 or equivalent with US\$ 50,000.

Credit facilities contain certain covenants including financial covenants.

The Company are required to comply with the consolidated financial ratio covenants as follows:

- Debt to Equity ratio maximum of 300% (three hundred percent);
- Adjusted DSCR ratio minimum of 300% (three hundred percent);
- Adjusted current ratio more than or equal to 1.0x.

As of 31 December 2024, all financial ratios required were met by the Company.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 and 2023 amounted to Rp 775,000,000,000 and nil equivalent with US\$ 47,952 and nil, respectively.

Credit Facilities Agreement PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On 29 May 2024, BCA, together with PTRO, KBL and CEP, subsidiaries, approved several bank facility provisions as follows:

a. Cash loan facilities

i. Investment Credit 1 ("KI 1")

These facilities amount to the equivalent of US\$ 107 thousand, with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum for US Dollar and three months JIBOR plus margin of 1.95% per annum for Rupiah. The purpose of using these facilities is to take over Term Loan I, II, III and the Senior Secured Term Loan at Mandiri. These facilities can only be used by PTRO and KBL.

As of 31 December 2024, this KI 1 facility had been utilized by PTRO and KBL amounted to US\$ 97,180. This KI 1 facility will mature on 21 June 2032.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (Lanjutan)

a. Fasilitas pinjaman tunai (Lanjutan)

ii. Kredit Investasi 2 (KI 2)

Fasilitas ini senilai setara US\$ 83 ribu, dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun untuk Dolar AS dan JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mengambilalih fasilitas *Senior Secured Term Loan* di Mandiri. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO dan KBL.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 2 ini telah digunakan oleh PTRO sebesar US\$ 81.698. Fasilitas KI 2 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2034.

iii. Kredit Investasi 3 (KI 3)

Fasilitas ini senilai Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 30,4 ribu), dengan tenor 10 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun untuk Rupiah. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur CEP yang terletak di dekat tambang CEP. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 3 ini telah digunakan oleh CEP sebesar Rp 138 miliar (setara dengan US\$ 8.512). Fasilitas KI 3 ini akan jatuh tempo pada 21 Juni 2034.

iv. Kredit Investasi 4 (KI 4)

Fasilitas ini senilai US\$ 50 ribu, dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,25% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 29 Juli 2024, PTRO mengajukan permohonan untuk pengalihan limit dari KI 4 ke fasilitas Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar US\$ 25 ribu, permohonan ini telah disetujui oleh pihak BCA.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, belum ada penggunaan atas fasilitas KI 4.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (Continued)

a. Cash loan facilities (Continued)

ii. Investment Credit 2 ("KI 2")

This facility amounted to the equivalent of US\$ 83 thousand, with a tenure of 10 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum for US Dollar and three-months JIBOR plus 1.95% per annum for Rupiah. The purpose of using these facilities is to take over the Senior Secured Term Loan at Mandiri. This facility can only be used by the PTRO and KBL.

As of 31 December 2024, this KI 2 facility had been utilized by PTRO for an amount of US\$ 81,698. This KI 2 facility will mature on 21 June 2034.

iii. Investment Credit 3 ("KI 3")

This facility amounted to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 30.4 thousand), with a tenure of 10 years, and an interest rate of three-months JIBOR plus margin of 1.95% per annum for Rupiah. The purpose of using this facility is to finance the construction of CEP's infrastructure located near CEP's site. This facility can only be used by CEP.

As of 31 December 2024, this KI 3 facility had been utilized by CEP for an amount of Rp 138 billion (equivalent to US\$ 8,512). This KI 3 facility will mature on 21 June 2034.

iv. Investment Credit 4 ("KI 4")

This facility amounted to US\$ 50 thousand, with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months SOFR term plus margin of 2.25% per annum. The purpose of using this facility is to finance the purchase of plant and/or new machinery, including components for the plant. This facility can only be used by PTRO, KBL and CEP.

On 29 July 2024, PTRO submitted a request to transfer the limit from KI 4 to the Multi Facility Credit (MFC) amounted to US\$ 25 thousand. This request has been approved by BCA.

As of 31 December 2024, there has been no utilization of the KI 4 facility.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (Lanjutan)

a. Fasilitas pinjaman tunai (Lanjutan)

iv. Kredit Investasi 4 (KI 4) (Lanjutan)

Sampai pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, PTRO telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 136 miliar (setara dengan US\$ 8.393). Fasilitas KI 4 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2032.

v. Kredit Investasi 5 (KI 5)

Fasilitas ini senilai Rp 800 miliar (setara dengan US\$ 48,7 ribu), dengan tenor 8 tahun, dan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 1,95% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin baru termasuk dengan komponen atas alat berat. Fasilitas ini hanya dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas KI 5 ini telah digunakan oleh PTRO dan KBL masing-masing sebesar Rp 785,4 miliar (setara dengan US\$ 48.595) dan Rp 14,5 miliar (setara dengan US\$ 897). Fasilitas KI 5 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2032.

Setelah periode pelaporan, PTRO telah menambahkan penggunaan fasilitas ini sebesar Rp 312 miliar (setara dengan US\$ 19.328).

b. Fasilitas pinjaman non-tunai

i. Kredit Multi Fasilitas (KMF)

Fasilitas ini senilai setara US\$ 100 ribu, dengan tenor fasilitas 1 tahun. Fasilitas ini dapat digunakan untuk *Letter of Credit* (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri (SKBDN), *Forex Forward Line*, dan Bank Garansi (BG) atau *Stand by Letter of Credit* ("SBLC"). Fasilitas ini dapat digunakan oleh PTRO, KBL dan CEP.

Pada tanggal 31 Desember 2024, porsi yang telah digunakan sebesar US\$ 86.455 untuk penerbitan SBLC atas BG/SBLC dan LC/SKBDN.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman dari fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai US\$ 72.274 (Catatan 7).

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (Continued)

a. Cash loan facilities (Continued)

iv. Investment Credit 4 ("KI 4") (Continued)

Until the issuance of these consolidated financial statements, PTRO has utilized this facility amounted to Rp 136 billion (equivalent US\$ 8,393). This KI 4 facility will mature on 21 June 2032

v. Investment Credit 5 ("KI 5")

This facility amounted to Rp 800 billion (equivalent to US\$ 48.7 thousand), with a tenure of 8 years, and an interest rate of three-months JIBOR plus 1.95% per annum. The purpose of using this facility is to finance the purchase of plant and/or new machinery, including components for the plant. This facility can only be used by PTRO, KBL and CEP.

As of 31 December 2024, the KI 5 facility has been utilized by PTRO and KBL amounted to Rp 785.4 billion (equivalent to US\$ 48,595 and Rp 14.5 billion (equivalent to US\$ 897). The KI 5 facility will mature on 21 June 2032.

After the reporting period, PTRO has increased the utilize of this facility amounted to Rp 312 billion (equivalent to US\$ 19,328).

b. Non-cash loan facility

i. Multi Facility Credit (MFC)

This facility amounted to equivalent of US\$ 100 thousand, with a tenure of 1 year. The facilities can be used for Letter of Credit (LC) or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri ("SKBDN"), Forex Forward Line and Bank Guarantee (BG) or Stand by Letter of Credit (SBLC). These facilities can be used by PTRO, KBL and CEP.

On 31 December 2024, the utilized portion amounted to US\$ 86,455 for issuing SBLC against the BG/SBLC and LC/SKBDN.

On 31 December 2024, borrowings from this facility are collateralized by trade receivables amounted to US\$ 72,274 (Note 7).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (Lanjutan)

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan penyesuaian rasio lancar tidak kurang dari 1x, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 1,15x, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5x, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit setiap tahunan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan rasio tersebut.

Pada tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan Surat No. 10526/GBK/2024, BCA telah memberikan persetujuan terkait dengan adanya rencana Perusahaan untuk penambahan fasilitas pinjaman sindikasi Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar ekuivalen US\$ 200 ribu.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan
PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) Sindikasi**

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Berjangka tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali tanggal 13 September 2024, BNI bersama dengan Mandiri menyetujui pengajuan Fasilitas Kredit Berjangka Senior kepada PTRO sebesar Rp 3,1 triliun (setara dengan US\$ 192.000) dengan suatu opsi *accordion* hingga Rp 775 miliar (setara dengan US\$ 48.000), yang akan digunakan untuk membiayai *capital expenditure* dari bisnis PTRO. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dengan bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin sebesar 1,90% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas Kredit Berjangka Senior ini telah digunakan oleh PTRO sebesar Rp 337,4 miliar (setara dengan US\$ 20.870). Fasilitas akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2032.

Fasilitas Kredit Berjangka Senior ini mencakup persyaratan keuangan seperti mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 1:1, rasio EBITDA terhadap utang dan kewajiban bunga tidak kurang dari 115%, rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5:1, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian setiap triwulanan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan tersebut.

Setelah periode pelaporan, PTRO telah menambahkan penggunaan fasilitas ini sebesar Rp 295 miliar (setara dengan US\$ 18.273).

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (Continued)

The loan facilities with BCA include financial requirements such as maintaining an adjusted current ratio of not less 1 time, an EBITDA to interest-bearing debt ratio of not less than 1.15 times, and a debt to equity ratio not exceeding 2.5 times, calculated based on the annually audited consolidated financial statements. As of 31 December 2024, the Group has complied with these covenant ratios.

On 23 July 2024, based on Letter No. 10526/GBK/2024, BCA has granted approval for the Company's plan to add facilities at syndicated loan of Mandiri and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) amounted equivalent to US\$ 200 thousand.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) and
PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) Syndication**

Based on the Senior Term Loan Facility Agreement dated 30 August 2024, as amended and restated on 13 September 2024, BNI, together with Mandiri, approved the application for a Senior Term Loan Facility to PTRO amounted to Rp 3.1 trillion (equivalent to US\$ 192,000), with an accordion option of up to Rp 775 billion (equivalent to US\$ 48,000). This facility will be used to finance the PTRO's capital expenditure. The term of the facility is 96 months, with an interest rate of threemonths JIBOR plus a margin of 1.90% per annum.

On 31 December 2024, the Senior Term Loan Facility has been utilized by PTRO amounted to Rp 337.4 billion (equivalent to US\$ 20,870). The facility will mature on 23 September 2032.

This Senior Term Loan Facility includes financial covenants such as maintaining a current ratio of not less than 1:1, an EBITDA-to-debt and interest obligations ratio of not less than 115%, and a debt to equity ratio not exceeding 2.5:1, calculated based on the consolidated financial statements on a quarterly basis. As of 31 December 2024, the Group has complied with these covenants.

After the reporting period, PTRO has increased the utilize of this facility amounted to Rp 295 billion (equivalent to US\$ 18,273).

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

1. Perusahaan

Fasilitas Term Loan - Fasilitas Kredit Non-Revolving

Pada tanggal 13 September 2024 telah dibuatkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 91 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., antara Perusahaan dan KJP dengan Mandiri.

Fasilitas *Term Loan* bersifat *non-revolving and committed*, dan memiliki plafon sebesar Rp 700.000.000.000 dengan keperluan untuk memenuhi *Cashflow Gap* Perusahaan.

Jangka waktu fasilitas utang tersebut selama 60 (enam puluh dua) bulan sejak Tanggal Penandatanganan PK. Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok utang dan bunga dibayarkan secara triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada tanggal 19 September 2024, Perusahaan melakukan penarikan dari fasilitas *Term Loan* sebesar Rp 700.000.000.000 (setara dengan US\$ 46,2 ribu).

Fasilitas kredit mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- *Debt to Equity ratio* maksimal 300% (tiga ratus persen);
- *Adjusted DSCR* rasio minimal 300% (tiga ratus persen);

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan telah dipenuhi oleh Perusahaan.

Saldo terutang fasilitas utang ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 698.250.000.000 (setara dengan US\$ 43.203).

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

1. The Company

Term Loan Facility - Non-Revolving Credit Facility

On 13 September 2024, a Deed of Credit Facility Agreement No. 91 by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., between the Company and KJP and Mandiri.

Term Loan facility is non-revolving and committed, has a plafond of Rp 700,000,000,000 with the need to fulfill the Company's Cashflow Gap.

The term of the loan facility is 60 (sixty) months from the signing of the CA. The interest rate charged is JIBOR 3 months + margin 1.75% per annum.

The repayment of loan principal and interest is paid quarterly in March, June, September and December.

On 19 September 2024, the Company has drawdown from Term Loan facility amounting to Rp 700,000,000,000 (equivalent to US\$ 46.2 thousand).

Credit facilities contain certain covenants including financial covenants.

The Company are required to comply with the consolidated financial ratio covenants as follows:

- *Debt to Equity ratio* maximum of 300% (three hundred percent);
- *Adjusted DSCR* ratio minimum of 300% (three hundred percent);

As of 31 December 2024, all financial ratios required were met by the Company.

Outstanding balance of this loan facility as of 31 December 2024 amounted to Rp 698,250,000,000 (equivalent to US\$ 43,203).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Lanjutan)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO)

Mandiri dan PTRO telah menyetujui pemberian fasilitas bank sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman non-tunai

Mandiri dan PTRO menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman non tunai *non-revolving* untuk BG dan/atau SBLC dan/atau LC dan/atau SKBDN pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar US\$ 30.000. Pada tanggal 27 Desember 2017, fasilitas *non-revolving* ditambah menjadi US\$ 50.000. Tingkat suku bunga fasilitas *non-revolving* ini adalah 1% per tahun dari nilai BG/SBLC yang diterbitkan. Pada tanggal 10 Juli 2020, PTRO dan Mandiri mengubah fasilitas *non-cash non-revolving loan letter of credit*/SKBDN menjadi 360 hari.

Pada tanggal 8 Desember 2021, PTRO merubah fasilitas *non-revolving* LC/SKBDN menjadi *global line* dengan KBL. Pada tanggal 22 Juni 2023, PTRO mengubah fasilitas *non-revolving* menjadi *revolving* LC/SKBDN. Mandiri dan PTRO telah beberapa kali menyetujui perubahan fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk LC/SKBDN dengan tenor 180 hari dan 9 Juli 2023 dengan tenor 360 hari.

Pada tanggal 20 Maret 2024, PTRO menerima surat dari Mandiri mengenai persetujuan perubahan ketentuan perjanjian kredit dan dokumen jaminan. Dalam surat ini, Mandiri juga telah menyetujui permohonan peningkatan limit fasilitas menjadi US\$ 100.000 untuk BG/SBLC dan US\$ 50.000 untuk LC/SKBDN.

b. Fasilitas *treasury line* 1 - lindung nilai mata uang asing

Mandiri dan PTRO menandatangani perjanjian fasilitas *treasury line* pada tanggal 29 Desember 2014 dengan limit fasilitas sebesar US\$ 5.000. Pada tanggal 27 Desember 2017, limit fasilitas dinaikkan menjadi US\$ 15.000 dan pada tanggal 5 Februari 2020, limit fasilitas juga meningkat menjadi US\$ 50.000. Mandiri dan PTRO telah beberapa kali menyetujui perubahan dan limit fasilitas yang tersedia, yang terakhir pada tanggal 10 Oktober 2022 terkait dengan perpanjangan dan perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 5.000 untuk melakukan transaksi *forward buy and sale*, dan opsi guna mengurangi risiko kurs (lindung nilai), berlaku sampai dengan 9 Oktober 2024.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Continued)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO)

Mandiri and PTRO agreed to have bank facilities, as follows:

a. Non-cash loan facility

Mandiri and PTRO entered into non-cash loan non-revolving facility agreement for and/or SBLC and/or LC and/or SKBDN on 29 December 2014 amounted to US\$ 30,000. On 27 December 2017, the non-revolving facility was increased to US\$ 50,000. The interest rate of this non-revolving facility is 1% per annum from the published BG/SBLC value. On 10 July 2020, PTRO and Mandiri converted non-cash non-revolving loan facility letter of credit to 360 days.

On 8 December 2021, PTRO converted LC/SKBDN non-revolving facility to global line with KBL. On 22 June 2023, PTRO changes the non-revolving to revolving LC/SKBDN. Mandiri and PTRO has agreed to amend several available facilities, with the last amendment on 9 October 2023 for LC/SKBDN with 180 days tenor and on 9 July 2023 with 360 days tenor.

On 20 March 2024, PTRO received a letter from Mandiri related to the approval of the credit agreement term changes and guarantee documents. Within this letter, Mandiri also has approved the request to increase the limit facility to US\$ 100,000 for BG/SBLC and US\$ 50,000 for LC/SKBDN.

b. Treasury line facility 1 - foreign exchange hedging

Mandiri and PTRO entered into treasury line facility agreement on 29 December 2014 with the limit amounted to US\$ 5,000. On 27 December 2017, the facility limit was increased to US\$ 15,000 and on 5 February 2020, the facility limit also updated to US\$ 50,000. Mandiri and PTRO has agreed to amend the available facility several times, with the last amendment on 10 October 2022 related to the extension and changes of facility limit to US\$ 5,000 to conduct forward buy and sale, and option transactions to reduce foreign exchange risk (hedging), valid until 9 October 2024.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Continued)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

c. Fasilitas *treasury line 2 - interest rate swap*

c. Treasury line facility 2 - interest rate swap

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Mandiri dan PTRO menyetujui pemberian fasilitas *treasury line 2 - interest rate swap* dengan limit fasilitas sebesar US\$ 60.000. Fasilitas ini bertujuan untuk melakukan lindung nilai arus kas terkait *interest rate swap*. Pada tanggal 10 Juni 2020, limit atas fasilitas tersebut dinaikkan menjadi US\$ 267.000. Perpanjangan fasilitas ini sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.

On 9 October 2018, Mandiri and PTRO agreed to have a treasury line facility 2 - interest rate swap with the limit of US\$ 60,000. This facility is for the interest rate swap cashflow hedging. On 10 June 2020, the limit of such facility was increased to US\$ 267,000. The facility has been extended until 9 June 2025.

d. Fasilitas pinjaman tunai

d. Cash loan facilities

i. Term loan I

i. Term loan I

Pada tanggal 10 Juni 2020, PTRO dan Mandiri telah menandatangani perjanjian fasilitas *non-revolving Term Loan I* senilai US\$ 50.000 dengan tingkat suku bunga 1,85% ditambah *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") tiga bulan untuk Dolar AS atau 3,75% ditambah JIBOR tiga bulan untuk Rupiah. Fasilitas *non-revolving* ini bertujuan untuk pembiayaan modal alat berat dan mesin PTRO.

On 10 June 2020, PTRO and Mandiri have signed Term Loan I non-revolving facility amounting US\$ 50,000 with interest rate 1.85% plus three months London Interbank Offered Rate ("LIBOR") for US Dollar or 3.75% plus three months JIBOR for Rupiah. This non-revolving facility aims to finance PTRO's heavy equipment and machinery capital expenditure.

Pada tanggal 22 Desember 2020, PTRO bersama-sama dengan KBL dan Mandiri menandatangani perubahan ketentuan fasilitas *Term Loan I*. Perubahan ini terkait penambahan debitur KBL.

On 22 December 2020, PTRO together with KBL and Mandiri signed an amendment of the Term Loan I facility. This change is related to the addition of a debtor, KBL.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri menaikkan tingkat suku bunga sehubungan dengan transaksi perubahan pemegang saham PTRO menjadi sebesar term SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 2,85% per tahun.

On 23 August 2022, Mandiri increased the interest rate in relation to the change in PTRO's shareholder to three-months SOFR term plus CAS and margin of 2.85% per annum.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan I* dari Mandiri sebesar setara US\$ 4.976.

On 21 June 2024, PTRO fully repaid the Term Loan I facility from Mandiri amounted equivalent to US\$ 4,976.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Lanjutan)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

d. Fasilitas pinjaman tunai (Lanjutan)

ii. Term loan II

Pada tanggal 22 Desember 2020, PTRO dan Mandiri menandatangani fasilitas *non-revolving Term Loan II*, senilai US\$ 41.500, dengan suku 2% ditambah LIBOR tiga bulan. Fasilitas *non-revolving* ini bertujuan untuk pembiayaan *cashflow gap* sehubungan dengan pelunasan pinjaman pihak berelasi. Pada tanggal 23 Agustus 2022, Mandiri meresolusi tingkat suku bunga menjadi sebesar term SOFR tiga bulan ditambah CAS dan margin sebesar 3,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas *non-revolving* telah sepenuhnya dipakai oleh PTRO. Fasilitas *non-revolving* ini akan jatuh tempo pada 23 Desember 2025.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan II* dari Mandiri sebesar setara US\$ 20.666.

iii. Senior Secured Term Loan

Pada tanggal 21 Maret 2023, PTRO dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit (*senior secured term loan facility*) senilai US\$ 91.500 dengan suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun dan Rp 1,4 triliun dengan suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan usaha melalui akuisisi dan investasi aset tambang serta memperkuat modal kerja PTRO.

Pada tanggal 30 Maret 2023, PTRO mencairkan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja PTRO sebesar Rp 1,2 triliun (setara dengan US\$ 78.000) dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PTRO mencairkan fasilitas untuk membiayai akuisisi dan investasi PTRO sebesar US\$ 91.500 dengan tingkat suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Continued)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

d. Cash loan facilities (Continued)

ii. Term loan II

On 22 December 2020, PTRO and Mandiri signed a *Term Loan II non-revolving facility* amounting to US\$ 41,500, with an interest rate of 2% plus three months LIBOR. This *non-revolving facility* aims to finance the *cashflow gap* in connection with the repayment of related party loans. On 23 August 2022, Mandiri resolve the interest rate to three months SOFR term plus CAS and margin of 3.00% per annum. As of 31 December 2024, the *non-revolving facility* has been fully utilized by PTRO. The *non-revolving facility* will mature on 23 December 2025.

On 21 June 2024, PTRO fully repaid the *Term Loan II facility* from Mandiri amounted equivalent to US\$ 20,666.

iii. Senior Secured Term Loan

On 21 March 2023, PTRO and Mandiri signed a *credit facility agreement (senior secured term loan facility)* amounting to US\$ 91,500 with an interest rate of three months SOFR term plus margin of 2.85% per annum and Rp 1.4 trillion with an interest rate of three months JIBOR plus margin of 2.45% per annum with 60 months tenor. The facility will be used for funding business development through acquisition and investment of mining properties as well as strengthening PTRO's working capital.

On 30 March 2023, PTRO disbursed the facility to finance PTRO's working capital needs of Rp 1.2 trillion (equivalent to US\$ 78,000) with an interest rate of the three months JIBOR term plus a margin of 2.45% per annum.

On 26 June 2023, PTRO disbursed the facility to finance the PTRO's acquisition and investment of US\$ 91,500 with an interest rate of the three months SOFR term plus a margin of 2.85% per annum.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Lanjutan)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Lanjutan)

d. Fasilitas pinjaman tunai (Lanjutan)

iii. Senior Secured Term Loan (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Senior Secured Term Loan* dari Mandiri sebesar setara US\$ 149.384.

iv. Term Loan III

Pada tanggal 28 Juli 2023, PTRO, KBL dan Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas kredit *Term Loan III* senilai US\$ 48.200 dengan suku bunga sebesar term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun untuk Dolar AS dan sebesar JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun dengan tenor 60 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk mendanai pembelian alat berat/mesin yang digunakan untuk izin bisnis PTRO.

Pada tanggal 7 Agustus 2023, PTRO melakukan pencairan fasilitas sebesar US\$ 690, dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, KBL melakukan pencairan fasilitas sebesar Rp 13,2 miliar (setara dengan US\$ 804), dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,45% per tahun.

Pada tanggal 30 Oktober 2023, PTRO melakukan pencairan fasilitas sebesar US\$ 2.280, dengan tenor 60 bulan dengan suku bunga term SOFR tiga bulan ditambah margin sebesar 2,85% per tahun. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Juni 2028.

Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO melunasi seluruhnya fasilitas *Term Loan III* dari Mandiri sebesar US\$ 3.029.

Beban bunga pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar US\$ 38.755.

Sebagian alat berat, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 16).

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (Continued)

2. PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

d. Cash loan facilities (Continued)

iii. Senior Secured Term Loan (Continued)

On 21 June 2024, PTRO fully repaid the *Senior Secured Term Loan* facility from Mandiri amounted to the equivalent of US\$ 149,384.

iv. Term Loan III

On 28 July 2023, PTRO, KBL and Mandiri signed a credit facility agreement *Term Loan III* amounting to US\$ 48,200 with an interest rate of three months SOFR term plus margin of 2.85% per annum for US Dollar and three months JIBOR plus margin of 2.45% per annum with 60 months tenor. The purpose of the facility will be used for funding business development through acquisition and heavy vehicle/machine for the permitted PTRO business.

On 7 August 2023, PTRO disbursed the facility amounting to US\$ 690, with 60 months tenor with an interest rate of three months SOFR term plus margin of 2.85% per annum. This facility matured on 23 June 2028.

On 8 August 2023, KBL disbursed the facility amounting to Rp 13.2 billion (equivalent to US\$ 804) with 60 months tenor with three months JIBOR plus margin of 2.45% per annum.

On 30 October 2023, PTRO disbursed the facility amounting to US\$ 2,280, with 60 months tenor with three months SOFR plus margin of 2.85% per annum. This facility matured on 23 June 2028.

On 21 June 2024, PTRO fully repaid the *Term Loan III* facility from Mandiri amounted to the equivalent of US\$ 3,029.

The interest expense incurred from long-term loan from third parties for the year ended 31 December 2024 amounting to US\$ 38,755.

Some heavy equipment, equipment and vehicles are used as collateral for long term bank loans (Note 16).

Ekshibit E/123

Exhibit E/123

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 27 Desember 2024, BNI telah memberikan beberapa fasilitas (A, B dan C) kepada ESE dan DBK, entitas anak, sebesar US\$ 150.195. Fasilitas-fasilitas ini ditujukan untuk mendukung biaya proyek DBK. Fasilitas ini berjangka waktu 120 bulan sejak tanggal penarikan pertama masing-masing fasilitas dengan suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah margin 2,00% - 2,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas tersebut belum digunakan oleh ESE dan DBK.

31. BANK LOANS LONG-TERM (Continued)

Credit Facilities Agreement PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

On 27 December 2024, BNI have granted several facilities (A, B and C) to ESE and DBK, subsidiaries, amounted to US\$ 150,195. These facilities are intended to supports DBK's project costs. This facility has a term of 120 months from the date of first drawdown each facility with an interest rate of three months JIBOR plus a margin of 2.00% - 2.25% per annum.

As of 31 December 2024, these facilities has not been utilized by ESE and DBK.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWANYAN

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Imbalan pasca kerja	23.777
Cuti berimbalan jangka panjang	6.167
T o t a l	29.944
Cuti berimbalan jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 25)	(547)
Bagian jangka panjang	29.397

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan tahun 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nurichwan dan KKA Steven & Mourits, aktuaris independent dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Imbalan pasca kerja

a. Beban Imbalan Kerja Karyawan Neto

	2024
Beban jasa kini	4.471
Beban bunga	1.545
T o t a l	6.016

Keuntungan aktuaria yang dibebankan ke laba rugi disebabkan oleh perubahan faktor-faktor sebagai berikut:

	2024	2023
Penyesuaian pengalaman	(1.628)	-
Perubahan asumsi keuangan	(281)	(14)
T o t a l	(1.909)	(14)

32. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Post employee benefits	164	
Long service leave	-	
T o t a l	164	T o t a l
Current-maturities of long services leave (Note 25)	-	
Long-term portion	164	Long-term portion

The estimated liabilities for employee benefits in 2024 and 2023 was calculated by Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nurichwan and KKA Steven & Mourits, an independent actuaries using the "Projected Unit Credit" method.

Post employee benefits

a. Net Employee Benefits Expenses

	2023	
Current service cost	48	
Interest cost	9	
T o t a l	57	T o t a l

Actuarial gains charged to profit or loss are due to changes in the following factors:

	2023	
Experinces adjustment	-	
Changes in financial assumption	(14)	
T o t a l	(14)	T o t a l

Ekshibit E/124

Exhibit E/124

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWYAN (Lanjutan)

32. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

Imbalan pasca kerja (Lanjutan)

Post employee benefits (Continued)

b. Liabilitas Imbalan Kerja

b. Liabilities for Employee Benefits

Liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah
sebagai berikut:

Liabilities for employee benefits of the Group are
as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	23.777	164	Present value of liabilities for employee benefits
Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:			Movements in the liabilities for employee benefits of the Group's employees are as follows:
	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Saldo awal tahun	164	119	Balance at beginning of the year
Liabilitas imbalan kerja berasal dari akuisisi entitas anak	23.102	-	Liabilities for employee benefits from the acquisition of subsidiaries
Keuntungan aktuarial	(1.909)	(14)	Actuarial gain
Penyisihan imbalan kerja selama tahun berjalan	6.016	57	Provision for employee benefits during the year
Pembayaran manfaat	(2.062)	-	Benefits paid
Biaya jasa masa lalu	(72)	-	Past service cost
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1.462)	2	Currency translation adjustment
Saldo akhir tahun	23.777	164	Balance at end of the year

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan
liabilitas imbalan kerja berdasarkan metode
"Projected Unit Credit" adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining the
employee benefits obligation based on the "Projected
Unit Credit" method are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Tingkat diskonto	7,10% - 7,15%	6,82% - 7,07%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8% - 10%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI IV	100% TMI4	Mortality rate
Tingkat cacat	5% dari mortalitas/ 5.00% of mortality	5,00% dari mortalitas/ 5.00% of mortality	Defect rate
Umur pensiun normal	55 - 56	56	Normal retirement age

Ekshibit E/125

Exhibit E/125

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWAYAN (Lanjutan)

Imbalan pasca kerja (Lanjutan)

b. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang memungkinkan untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Tingkat diskonto:		
Kenaikan 1%	1.645	147
Penurunan 1%	1.854	184
Tingkat kenaikan gaji per tahun:		
Kenaikan 1%	1.940	182
Penurunan 1%	1.757	148

c. Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Saldo awal	608	587
Keuntungan aktuarial	1.909	14
Pajak yang terkait dengan keuntungan aktuarial	(23)	(3)
Keuntungan aktuarial yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	(2.026)	10
Saldo akhir	468	608

Cuti Berimbalan Jangka Panjang

a. Beban Cuti Berimbalan Jangka Panjang

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Beban jasa kini	1.236	-
Beban bunga	349	-
Keuntungan aktuarial	49	-
T o t a l	1.634	-

32. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

Post employee benefits (Continued)

b. Liabilities for Employee Benefits (Continued)

The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible changes of each significant assumption on the present value of the defined benefit obligation as of the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	Discount rates:
		Increase 1%
		Decrease 1%
		Annual salary increase:
		Increase 1%
		Decrease 1%

c. Actuarial gain on defined benefit pension plan

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Beginning balance	587	
Actuarial gain	14	
Taxes related to actuarial gain	(3)	
Actuarial gain attributable to non-controlling interests	10	
Ending balance	608	

Long Service Leave

a. Long Service Leave Expense

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Current service cost	-	
Interest cost	-	
Actuarial gain	-	
T o t a l	-	

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARWAYAN (Lanjutan)

32. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (Continued)

Cuti Berimbalan Jangka Panjang (Lanjutan)

Long Service Leave (Continued)

b. Liabilitas Cuti Berimbalan Jangka Panjang

b. Liabilities for Long Service Leave

Liabilitas cuti berimbalan jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:

Liabilities for long service leave benefits of the Group are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Nilai kini liabilitas cuti berimbalan jangka panjang	6.167	-	Present value of long service leave benefits
Mutasi cuti berimbalan jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:			Movements in the liabilities for long service leave benefits of the Group are as follows:
	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Saldo awal tahun	-	-	Balance at beginning of the year
Liabilitas cuti berimbalan jangka panjang berasal dari akuisisi entitas anak	5.766	-	Liabilities for long service leave benefits from the acquisition of subsidiaries
Pembayaran manfaat (365)	(365)	-	Benefit paid
Beban cuti berimbalan jangka panjang selama periode berjalan	1.634	-	Long service leave benefits during the period
Selisih kurs atas program dalam valuta asing (246)	(246)	-	Exchange differences on foreign plans
Keuntungan aktuarial (623)	(623)	-	Actuarial gain
Penyesuaian mutasi karyawan	1	-	Adjustment due to transfer to employee
Saldo akhir tahun	6.167	-	Balance at end of the year

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas cuti berimbalan jangka panjang berdasarkan metode "Projected-Unit-Credit" adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining the liabilities for long service leave benefits based on the "Projected-Unit-Credit" method are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Tingkat diskonto:			Discount rates:
Kenaikan 1%	21.912	-	Increase by 1%
Penurunan 1%	25.561	-	Decrease by 1%
Tingkat kenaikan gaji per tahun:			Annual salary increase:
Kenaikan 1%	25.642	-	Increase 1%
Penurunan 1%	21.808	-	Decrease 1%

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

33. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

	31 Desember 2024/ 31 December 2024
Saldo awal	391
Penambahan melalui bisnis kombinasi	1.245
Kenaikan provisi yang disebabkan oleh berlalunya waktu	103
Penambahan	8.991
Saldo akhir	10.730

Grup membuat provisi penuh untuk biaya rehabilitasi lokasi tambang di masa depan berdasarkan basis diskonto atas pengembangan tambang. Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan nilai kini dari biaya rehabilitasi yang berkaitan dengan lokasi tambang yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Provisi ini dibentuk berdasarkan estimasi internal Grup. Asumsi-asumsi, berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, telah dibuat yang menurut manajemen merupakan dasar yang wajar untuk mengestimasi liabilitas masa depan. Estimasi ini ditelaah secara berkala untuk memperhitungkan perubahan material terhadap asumsi-asumsi tersebut. Namun, biaya rehabilitasi aktual pada akhirnya akan bergantung pada harga pasar di masa depan untuk pekerjaan penonaktifan yang diperlukan, yang akan mencerminkan kondisi pasar pada waktu yang relevan. Selain itu, waktu pelaksanaan rehabilitasi akan bergantung pada saat tambang berhenti berproduksi pada tingkat yang layak secara ekonomi. Hal ini, pada gilirannya, akan bergantung pada harga batubara di masa depan, yang pada dasarnya tidak pasti.

33. PROVISION FOR MINE RECLAMATION AND CLOSURE

	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Saldo awal	277	Beginning balance
Penambahan melalui bisnis kombinasi	-	Addition through business combination
Kenaikan provisi yang disebabkan oleh berlalunya waktu	114	Increase in provision due to the passage of time
Penambahan	-	Addition
Saldo akhir	391	Ending balance

The Group makes a full provision for the future cost of rehabilitating the mine site on a discounted basis on the development of mine. The provision for mine reclamation and closure represents the present value of rehabilitation costs relating to mine site, which is expected to be incurred in the future. These provisions have been created based on the Group's internal estimates. Assumptions, based on the current economic environment, have been made which management believes are a reasonable basis upon which to estimate the future liability. These estimates are reviewed regularly to take into account any material changes to the assumptions. However, actual rehabilitation costs will ultimately depend upon future market prices for the necessary decommissioning works required which will reflect market conditions at the relevant time. Furthermore, the timing of rehabilitation is likely to depend on when the mine ceases to produce at economically viable rates. This, in turn, will depend upon future coal prices, which are inherently uncertain.

34. MODAL SAHAM

Perusahaan mendaftarkan seluruh sahamnya pada BEI. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan yaitu PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

34. SHARE CAPITAL

The Company listed all of its shares in BEI. Based on the records maintained by the share register, PT Datindo Entrycom, the composition of the Company's shareholders as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	T o t a l	Shareholders
Pemegang saham				
Tuan Prajogo Pangestu	9.551.765.000	84,966	139.678	Mr. Prajogo Pangestu
Tuan Erwin Ciputra	1.550.000	0,014	23	Mr. Erwin Ciputra
Tuan Kartika Hendrawan	168.800	0,002	2	Mr. Kartika Hendrawan
Tuan Michael	131.900	0,001	2	Mr. Michael
Tuan Agus Salim Pangestu	125.000	0,001	2	Mr. Agus Salim Pangestu
Nyonya Diana Arsiyanti	50.000	0,000	1	Mrs. Diana Arsiyanti
Masyarakat	1.688.099.300	15,016	24.684	Public
T o t a l	11.241.890.000	100,00	164.392	T o t a l

Ekshibit E/128

Exhibit E/128

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

34. MODAL SAHAM (Lanjutan)

34. SHARE CAPITAL (Continued)

<u>Pemegang saham</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>		<u>T o t a l</u>	<u>Shareholders</u>
	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and paid</u>	<u>Persentase kepemilikan (%) / Percentage of ownership (%)</u>		
Tuan Prajogo Pangestu	9.564.182.700	85,076	139.859	Mr. Prajogo Pangestu
Tuan Erwin Ciputra	800.000	0,007	12	Mr. Erwin Ciputra
Tuan Agus Salim Pangestu	125.000	0,001	2	Mr. Agus Salim Pangestu
Tuan Michael	72.000	0,001	1	Mr. Michael
Masyarakat	1.676.710.300	14,915	24.518	Public
T o t a l	11.241.890.000	100,00	164.392	T o t a l

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 23 tanggal 4 Mei 2023 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023, mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perusahaan. Para pemegang saham menyetujui meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari semula 9.551.890.000 saham menjadi 11.241.890.000 saham atau tambahan 1.690.000.000 saham sebesar Rp 371.800.000.000.

Based on Notarial Deed No. 23 by Aulia Taufani, S.H., dated 4 May 2023 which has received and recorded in the Legal Entity Administration System by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0062333 dated 10 May 2023, regarding changes in the increase of the Company's issued/paid-in capital. The shareholders agreed to increase issued and paid-up capital from the beginning 9,551,890,000 shares to 11,241,890,000 shares or additional 1,690,000,000 shares amounting to Rp 371,800,000,000.

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Biaya emisi saham merupakan biaya transaksi yang timbul dari aktivitas Penawaran Umum Perdana, antara lain mencakup biaya pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, jasa yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan dan lain-lain.

Share issuance costs are transaction costs arising from the Initial Public Offering, which includes registration fees and other regulatory fees, service fees paid to legal counsel, accountants, and others.

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana	2.201	2.201	Premium on paid-in capital on Initial Public Offering
Biaya emisi saham	(512)	(512)	Share issuance costs
T o t a l	1.689	1.689	T o t a l

36. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

36. OTHER COMPONENT OF EQUITY

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	20.381	(1.042)	Difference in value arising from transactions with non-controlling interest

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

36. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (Lanjutan)

Akun ini merupakan selisih transaksi yang timbul atas perubahan kepemilikan dengan kepentingan non-pengendali tanpa adanya perubahan pengendalian (Catatan 1d).

36. OTHER COMPONENT OF EQUITY (Continued)

This account represents the difference in transactions arising from changes in ownership with non-controlling interests without any change in control (Note 1d).

37. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>
PT Petrosea Tbk	248.212
PT Equator Sumber Energi	11.411
PT Borneo Berkat Kutai	125
PT Tamtama Perkasa	—
T o t a l	259.748

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak merupakan bagian pemegang saham minoritas atas aset bersih entitas anak yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Grup.

Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dengan jumlah material adalah sebagai berikut:

	<u>Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Entitas anak			
PT Petrosea Tbk		41,52	—
PT Equator Sumber Energi		35,00	35,00

Ringkasan informasi keuangan pada masing-masing entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup:

PT Equator Sumber Energi (ESE)

Ringkasan laporan posisi keuangan ESE adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>
Aset lancar	193	132
Aset tidak lancar	44.058	43.174
Liabilitas jangka pendek	(1.465)	(6.356)
Liabilitas jangka panjang	(3)	(50)
Total ekuitas	42.783	36.900

37. NON-CONTROLLING INTEREST

The details of the non-controlling interests in the equity of the consolidated subsidiaries are as follows:

	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
PT Petrosea Tbk	—	PT Petrosea Tbk
PT Equator Sumber Energi	11.955	PT Equator Sumber Energi
PT Borneo Berkat Kutai	—	PT Borneo Berkat Kutai
PT Tamtama Perkasa	32	PT Tamtama Perkasa
T o t a l	11.987	T o t a l

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries represent the minority shareholders' share of the net assets of subsidiaries whose shares are not wholly owned by the Group.

The proportion of share ownership held by non-controlling interests with a material amount is as follows:

	<u>Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	Subsidiaries
				PT Petrosea Tbk
				PT Equator Sumber Energi

Summarized financial information in respect of each of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interests is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations:

PT Equator Sumber Energi (ESE)

The summary of ESE's statement of financial position is as follows:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
Aset lancar	193	132	Current assets
Aset tidak lancar	44.058	43.174	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(1.465)	(6.356)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(3)	(50)	Long-term liabilities
Total ekuitas	42.783	36.900	Total equity

Ekshibit E/130

Exhibit E/130

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

37.KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

37. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

PT Equator Sumber Energi (ESE) (Lanjutan)

PT Equator Sumber Energi (ESE) (Continued)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain ESE adalah sebagai berikut:

The summary of ESE's statement of profit or loss and
other comprehensive income is as follows:

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>	
Pendapatan	-	-	Revenue
Beban pokok pendapatan	-	-	Cost revenue
Beban umum dan administrasi	(503)	(881)	General and administrative expense
Beban operasi lainnya	-	(7)	Other operating expense
Rugi usaha	(503)	(888)	Operating loss
Pendapatan keuangan	2	1	Finance income
Beban keuangan	(1)	-	Finance expenses
Rugi sebelum pajak penghasilan	(502)	(887)	Loss before income tax
Beban pajak penghasilan	2	2	Income tax expenses
Rugi netto tahun berjalan	(500)	(885)	Net loss for the year
Rugi komprehensif lain	(1.826)	(14.959)	Other comprehensive loss
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(2.326)	(15.844)	Total comprehensive loss for the year

Ringkasan laporan arus kas ESE adalah sebagai berikut:

The summary of ESE's statement of cash flow is as follows:

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>	
Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi	(8.107)	(948)	Cash flow used in operating activities
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(70)	-	Cash flow used in investing activities
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.209	-	Cash flow provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) dalam kas dan setara kas	32	(948)	Increase (decrease) in cash and cash equivalent

PT Petrosea Tbk (PTRO)

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Ringkasan laporan posisi keuangan PTRO adalah sebagai berikut:

The summary of PTRO's statement of financial position is as follows:

	<u>31 Desember 2024/ 31 December 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ 31 December 2023</u>	
Aset lancar	356.198	-	Current assets
Aset tidak lancar	511.067	-	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(228.249)	-	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(389.266)	-	Long-term liabilities
Total Ekuitas	249.750	-	Total Equity

Ekshibit E/131

Exhibit E/131

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

37. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

37. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

PT Petrosea (PTRO) (Lanjutan)

PT Petrosea (PTRO) (Continued)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain PTRO adalah sebagai berikut:

The summary of PTRO's statement of profit or loss and
other comprehensive income is as follows:

	2024	2023	
Pendapatan	591.030	-	Revenue
Beban pokok pendapatan	(506.086)	-	Cost revenue
Beban penjualan	(18.646)	-	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(25.889)	-	General and administrative expenses
Beban pajak final	(8.912)	-	Final tax expense
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	1.883	-	Other operating income (expense) - net
Laba usaha	33.380	-	Operating profit
Pendapatan keuangan	848	-	Finance income
Beban keuangan	(21.965)	-	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	12.263	-	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan	1.842	-	Income tax benefit
Laba neto tahun berjalan	14.105	-	Net profit for the year
Rugi komprehensif lain	(361)	-	Other comprehensive loss
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	13.744	-	Total comprehensive income for the year

Ringkasan laporan arus kas PTRO adalah sebagai berikut:

The summary of PTRO'S statement of cash flow is as
follows:

	2024	2023	
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	27.936	-	Cash flow provided in operating activities
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(129.465)	-	Cash flow used in investing activities
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	146.154	-	Cash flow provided by financing activities
Kenaikan dalam kas dan setara kas	44.625	-	Increase in cash and cash equivalent

38. PENDAPATAN

38. REVENUES

	2024	2023	
Pada waktu tertentu			At point in time
Penjualan batubara	278.345	97.943	Sale of coal
Sepanjang waktu			Overtime
Konstruksi dan rekayasa	250.408	-	Construction and engineering
Penambangan	243.173	-	Mining
J a s a	27.607	-	Services
Lain-lain	2.190	-	Others
T o t a l	801.723	97.943	T o t a l

Ekshibit E/132

Exhibit E/132

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

38. PENDAPATAN (Lanjutan)

Pendapatan lain-lain merupakan layanan tenaga kerja yang diberikan kepada pihak ketiga.

Rincian pelanggan dengan transaksi lebih dari 10% dari total nilai pendapatan konsolidasian:

	2024
Pihak ketiga	
PT Freeport Indonesia	144.173
PT Kideco Jaya Agung	108.606
IMI Fuels, LLC	81.636
Flame Asia Resources Pte. Ltd.	59.349
San Miguel Energi Corporation	-
Bulk Trading SA	-
PT Bara Makmur Dwitama	-

Pendapatan dengan pihak berelasi masing-masing sebesar US\$ 65.285 dan nihil untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 44).

38. REVENUES (Continued)

Other revenues represent labor service provided to third parties.

Details of customers having transactions of more than 10% of total consolidated revenues:

	2023	
		Third parties
-		PT Freeport Indonesia
-		PT Kideco Jaya Agung
-		IMI Fuels, LLC
46.199		Flame Asia Resources Pte. Ltd.
16.006		San Miguel Energi Corporation
12.193		Bulk Trading SA
11.931		PT Bara Makmur Dwitama

Revenues to related party amounted to US\$ 65,295 and nil for the years ended 31 December 2024 and 2023, respectively (Note 44).

39. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2024
<u>Biaya langsung</u>	
Jasa pertambangan dan biaya Pengangkutan batubara	203.898
<u>Biaya overhead</u>	
Gaji dan tunjangan karyawan	119.314
Pengoperasian pabrik dan peralatan	108.454
Penyusutan (Catatan 16 dan 18)	70.933
Bahan baku	38.827
Pengiriman	35.232
Royalti batu bara	28.364
Sewa	25.649
Deplesi (Catatan 17)	14.852
Bahan bakar	14.784
Amortisasi (Catatan 21)	9.993
Sistem informasi manajemen	8.342
Perijinan	1.776
Lain-lain	4.781
Sub-total	685.199

<u>Persediaan batubara</u>	
Saldo awal periode	38.940
Akuisisi dari entitas anak	11.003
Saldo akhir periode (Catatan 9)	(49.525)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1.760)
Persediaan digunakan	(1.342)
Beban pokok penjualan	683.857

Beban pokok pendapatan lain-lain merupakan biaya perjalanan dan transportasi, biaya pemeliharaan dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

39. COST OF REVENUES

	2023	
		<u>Direct cost</u>
49.778		Coal services and hauling cost
		<u>Overhead cost</u>
1.272		Salaries and allowance
-		Operation of plant and equipment
1.639		Depreciation (Notes 16 and 18)
-		Material
9.826		Shipping
15.830		Royalty on coal
247		Rental
632		Depletion (Note 17)
235		Fuel
-		Amortization (Note 21)
-		Management information system
1.752		Permits
1.884		Others
Sub-total	83.095	Sub-total

		<u>Coal inventory</u>
61.310		At beginning of the period
-		Acquisition of subsidiaries
38.940		At end of the period (Note 9)
-		Currency translation adjustment
22.370		Inventories used
60.725		Cost of revenues

Other cost of revenues are composed of traveling and transportation expense, maintenance expense and other numerous transactions with minimal amounts.

Ekshibit E/133

Exhibit E/133

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

39. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

Rincian pemasok yang melebihi 10% dari total beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2024
PT KTC Metal Mining Engineering	-

39. COST OF REVENUES (Continued)

Details of supplier that exceed 10% of total cost of revenues are as follows:

	2023
PT KTC Metal Mining Engineering	46.619

40. BEBAN PENJUALAN

	2024
Kapal tongkang	26.150
Biaya kelebihan waktu berlabuh	3.089
Insentif	1.913
Mesin derek apung	1.749
Kewajiban pasar domestik	827
Biaya pelabuhan dan tempat berlabuh	688
Lain-lain	1.098
Total	35.514

Beban penjualan lain-lain terdiri dari biaya pemasaran dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

40. SELLING EXPENSES

	2023	
	5.850	Barging cost - barge
	235	Demurrage
	4.892	Incentives
	1.417	Barging cost - floating crane
	-	Domestic market obligation
	-	Port charges and anchorage
	767	Others
Total	13.161	Total

Other selling expense are composed of marketing expense and other numerous transactions with minimal amounts.

41. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	22.007
Perijinan	11.234
Honorarium tenaga ahli	3.616
Amortisasi (Catatan 21)	3.091
Sumbangan dan jamuan	2.189
Perlengkapan kantor	1.451
Beban sewa	1.415
Depresiasi (Catatan 16 dan 18)	988
Transportasi	784
Asuransi	617
Keamanan	587
Sistem informasi manajemen	537
Lain-lain	4.884
Total	53.400

Beban umum dan administrasi lain-lain terdiri dari deadrent, biaya keamanan, donasi dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

Beban umum dan administrasi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar US\$ 5 dan nihil untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 44).

41. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2023	
	1.644	Salaries, wages and employee benefit
	348	Licensing
	1.132	Expert honorarium
	-	Amortization (Note 21)
	535	Donation and entertainment
	111	Office supplies
	83	Rent expense
	13	Depreciation (Notes 16 and 18)
	87	Transportation
	-	Insurance
	-	Security
	-	Management information system
	-	Others
Total	3.953	Total

Other general and administrative expenses are composed of deadrent, security expense, donation and other numerous transactions with minimal amounts.

General and administrative expenses to related party amounted to US\$ 5 and nil for the years ended 31 December 2024 and 2023, respectively (Note 44).

Ekshibit E/134

Exhibit E/134

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

42. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

	2024
Keuntungan dari pembelian dengan diskon (Catatan 45)	176.241
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto	14.348
Kerugian pelepasan aset tetap (Catatan 16)	(952)
Provisi persediaan usang (Catatan 9)	(395)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih (Catatan 7)	(62)
Lain-lain	7.028
Total	196.208

Pendapatan (beban) operasi lain-lain - neto terdiri dari laba atas perubahan nilai wajar investasi pada aset keuangan yang belum direalisasi, penerimaan atas *warranty claim*, beban pajak dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

42. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

	2023	
	-	Gain on bargain purchase (Note 45)
	(1.270)	Gain (loss) on foreign exchange - net
	-	Loss on disposal of property and equipment (Note 16)
	-	Provision for stock obsolescence (Note 9)
	-	Allowance for impairment losses on trade receivable (Note 7)
	888	Others
Total	(382)	Total

Other operating income (expenses) - net are composed of gain on fair value changes of investment in financial assets, receipt of warranty claim, tax expense and other numerous transactions with minimal amounts.

43. BEBAN KEUANGAN

	2024
Beban bunga - Bank	43.971
Beban bunga - Sewa	1.889
Biaya jasa bank	320
Lain-lain	2.786
Total	48.966

Beban keuangan lain-lain terdiri dari biaya pengakhiran pinjaman, beban bunga atas obligasi dan sukuk, beban akresi dan berbagai transaksi lainnya dalam jumlah minimal.

43. FINANCE EXPENSES

	2023	
	954	Interest expense - Bank
	-	Interest expense - Lease
	188	Bank service charges
	110	Others
Total	1.252	Total

Other finance expenses are composed of loan termination fee, interest expense on bond and sukuk, accretion expense and other numerous transactions with minimal amounts.

44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Perusahaan tersebut mempunyai hubungan berelasi karena mempunyai kesamaan kepemilikan dan/atau pengurus dengan Grup.

44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group has engaged in transactions with related parties, which are conducted based on the agreed terms and conditions. These entities are related because they have the same ownership and/or management with the Group.

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Relationships	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions
Fluor Petrosea Joint Organization	Proyek kerjasama antara anak perusahaan dengan pihak ketiga/ Joint operation between the subsidiary and third party	Piutang usaha dan pendapatan/ Trade receivables and revenue

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)**

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Relationships	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions
PT Trisetia Cita Graha PT Meranti Sembada	Afiliasi/Affiliated Afiliasi/Affiliated	Piutang lain-lain/ Other receivables Utang usaha dan beban umum dan administrasi/ Trade payable and general and administrative expenses
PT Barito Pacific Tbk	Afiliasi/Affiliated	Utang lain-lain/Other payable
	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023
Piutang Usaha (Catatan 7)		Trade Receivables (Note 7)
Fluor Petrosea Joint Organization	29.006	Fluor Petrosea Joint Organization
Persentase total aset	1,63%	Percentage of total assets
Piutang lain-lain (Catatan 8)		Other receivables (Note 8)
Trisetia Cita Graha	96	Trisetia Cita Graha
Persentase total aset	0,01%	Percentage of total assets
Utang usaha (Catatan 22)		Trade payables (Note 22)
PT Meranti Sembada	212	PT Meranti Sembada
Persentase total liabilitas	0,02%	Percentage of total liabilities
Utang lain-lain (Catatan 23)		Other payables (Note 23)
PT Barito Pacific Tbk	21	PT Barito Pacific Tbk
Persentase total liabilitas	0,00%	Percentage of total liabilities
	2 0 2 4	2 0 2 3
Pendapatan (Catatan 38)		Revenue (Note 38)
Fluor Petrosea Joint Organization	65.285	Fluor Petrosea Joint Organization
Persentase total pendapatan	8,14%	Percentage of total revenue
Beban umum dan administrasi (Catatan 41)		General and administration expenses (Note 41)
PT Meranti Sembada	5	PT Meranti Sembada
Persentase total beban umum dan administrasi	0,00%	Percentage of total general and administration expenses

Operasi Bersama Fluor-Petrosea (FPJO)

Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO)

Pada tanggal 11 Maret 2020, PTRO, entitas anak dengan PT Fluor Daniel Indonesia telah membentuk suatu kerjasama organisasi (FPJO) untuk melaksanakan Proyek Optimalisasi Pabrik Bijih Bawah Tanah (Mill Optimization for Underground Ores Project) untuk PT Freeport Indonesia.

On 11 March 2020, PTRO, a subsidiary together with PT Fluor Daniel Indonesia have formed a collaborative organization (FPJO) to implement Mill Optimization for Underground Ores Project for PT Freeport Indonesia.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**44. SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Operasi Bersama Fluor-Petrosea (FPJO) (Lanjutan)

Selanjutnya, FPJO bersama dengan PT Freeport Indonesia menandatangani *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

Pada tanggal 3 November 2020, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* No. TP1900216-002 untuk Proyek SAG3 dengan nilai estimasi total US\$ 100.122.

Pada 12 November 2021 sampai dengan 10 Oktober 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Change Order* No. 001-010 untuk Proyek SAG3. Melalui *Change Order* ini, durasi proyek diperpanjang hingga tanggal 30 Mei 2024, dengan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 92.733.

Pada periode 30 November 2021 sampai dengan 1 Agustus 2023, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Limited Notice to Proceed* ("LNTP") dan *Supplement Agreement* untuk Proyek *Copper Cleaner Circuit Construction Services* ("CUCL"). Proyek ini akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023, dengan nilai total kontrak sebesar Rp 802.087 juta (setara dengan US\$ 52.029).

Pada tanggal 15 Januari 2024, PT Freeport Indonesia telah menunjuk FPJO untuk mengerjakan Proyek *Redundant Conveyor* ("RECON") *Construction Services* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 66.122 juta melalui LNTP No. TP1900216-007. LNTP ini berlaku efektif dari tanggal 15 Januari 2024 hingga 30 April 2024.

Pada tanggal 10 Maret 2024, FPJO dan PT Freeport Indonesia menandatangani *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 untuk Proyek CUCL. Melalui *Supplement Agreement* ini, Proyek CUCL diperpanjang hingga tanggal 31 Agustus 2024 dan mendapatkan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 1.614 miliar (setara dengan US\$ 105.000).

Pada tanggal 18 Juni 2024, PT Freeport Indonesia telah menerbitkan LNTP kepada FPJO untuk menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi di SAG2. Nilai LNTP ini adalah Rp 25,9 miliar (setara dengan US\$ 1,6 juta) dan berlaku hingga ditandatanganinya *Supplement Agreement* untuk pekerjaan ini.

**44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTY (Continued)**

Fluor-Petrosea Joint Organization (FPJO) (Continued)

Furthermore, FPJO together with PT Freeport Indonesia executed the *Engineering, Procurement, Construction and Construction Management Master Agreement*.

On 3 November 2020, FPJO and PT Freeport Indonesia signed the *Supplement Agreement* No. TP1900216-002 for SAG3 Project with a total estimated value of US\$ 100,122.

On 12 November 2021 until 10 October 2023, FPJO and PT Freeport Indonesia executed the *Change order* No. 001-010 for SAG3 Project. Through this *Change Order*, the duration of the project is extended up to 30 May 2024, with the additional contract value amounted to US\$ 92,733.

On 30 November 2021 until 1 August 2023, FPJO and PT Freeport Indonesia executed the *Limited Notice to Proceed* (LNTP) and *Supplement Agreement* for *Copper Cleaner Circuit Construction Services* (CUCL) Project. This project will be completed on 31 December 2023 with the total contract value amounted to Rp 802,087 million (equivalent with US\$ 52,029).

On 15 January 2024, PT Freeport Indonesia has nominated FPJO to execute *Redundant Conveyor* (RECON) *Construction Services* with the contract value amounting to Rp 66,122 million through LNTP No. TP1900216-007. This LNTP shall be effective from 15 January 2024 up to 30 April 2024.

On 10 March 2024, FPJO and PT Freeport Indonesia executed *Supplement Agreement* No. TP1900216-005 CUCL. Under this *Supplement Agreement*, CUCL Project is extended up to 31 August 2024 and obtained an additional contract value amounting to Rp 1,614 billion (equivalent to US\$ 105,000).

On 18 June 2024, PT Freeport Indonesia has issued LNTP to FPJO for the provision of labour and equipment to support the construction works at SAG2. The Value of this LNTP is Rp 25.9 billion (equivalent to US\$ 1.6 million) and shall be valid up to the *Supplement Agreement* for this work is executed.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

45. AKUISISI ENTITAS ANAK

Perusahaan

a. Akuisisi PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)

Pada bulan Mei 2024, Perusahaan membeli 99,99% atau sebanyak 59.999 lembar saham BBBB dengan harga perolehan US\$ 4.999. Untuk sisa 0,01% atau sebanyak 1 lembar saham BBBB dibeli oleh KJP sebesar US\$ 1, sehingga secara Grup kepemilikan atas BBBB adalah 100%.

BBBB diakuisisi sebagai pengembangan lini bisnis pada industri pertambangan batubara.

Pada saat tanggal akuisisi BBBB, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas adalah sebagai berikut:

Total aset	11.811
Total liabilitas	8.052

Nilai wajar aset neto yang di peroleh	3.759

Nilai aset neto yang dapat teridentifikasi dari BBBB bersifat sementara yang disebabkan oleh penilaian independen dilakukan atas aset-aset tertentu belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan.

Goodwill dan arus kas keluar neto yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	5.000
Kepentingan non-pengendali	6
Dikurangi:	
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	3.759

<i>Goodwill</i> yang timbul dari akuisisi - dibebankan	1.247

Imbalan kerja yang dibayarkan tunai	5.000
Kas dan setara kas yang diperoleh	(158)

Arus kas keluar neto pada saat akuisisi	4.842
Uang muka investasi yang dibayarkan di 2023 (Catatan 11)	(3.041)

Arus kas keluar tahun 2024	1.801

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian utama.

45. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES

The Company

a. Acquisition of PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)

In May 2024, the Company purchased 99.99% equity ownership or 59,999 shares of BBBB at acquisition cost of US\$ 4,999. The remaining 0,01% equity ownership or 1 share of BBBB were purchased by KJP at US\$ 1, so that the Group's ownership of BBBB is 100%.

BBBB were acquired as a business line development in the coal mining industry.

As of BBBB's acquisition date, the fair value of assets acquired and liabilities are as follows:

Total assets	11.811
Total liabilities	8.052

Fair value of net assets acquired	3.759

The value of the identifiable assets and liabilities of BBBB had only been determined on a provisional basis since, an independent valuation process have not yet been carried out as of the date of the consolidation financial statements were issued.

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

Considered transferred	5.000
Non-controlling interest	6
Less:	
Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities	3.759

<i>Goodwill</i> arising from acquisition - charged to expense	1.247

Consideration paid in cash	5.000
Cash and cash equivalent acquired	(158)

Net cash outflow on acquisition	4.842
Advances for investment paid in 2023 (Note 11)	(3.041)

Net cash outflow in 2024	1.801

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

45. AKUISISI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

**a. Akusisi PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB)
(Lanjutan)**

Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif tidak termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset takberwujud tertentu. Manfaat ini diakui terpisah dari *goodwill* karena manfaat tersebut memenuhi kriteria pengakuan untuk aset takberwujud yang dapat diidentifikasi.

b. Akuisisi PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

Pada bulan Februari 2024, Perusahaan membeli 99,99% atau sebanyak 2.263.029.999 lembar saham MUTU dengan harga perolehan US\$ 217.999. Untuk sisa 0,01% atau sebanyak 1 lembar saham MUTU dibeli oleh KJP sebesar US\$ 1, sehingga secara Grup kepemilikan atas MUTU adalah 100%.

MUTU diakuisisi sebagai pengembangan lini bisnis pada industri pertambangan batubara.

Berdasarkan hasil penilaian independen oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2025, nilai wajar aset teridentifikasi MUTU pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Total aset	396.362
Total liabilitas	78.885

Nilai wajar aset neto yang diperoleh	<u>317.477</u>

Keuntungan dari pembelian dalam diskon dan arus kas keluar neto yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	218.000
Dikurangi:	
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	<u>317.477</u>

Keuntungan dari pembelian dengan diskon (Catatan 42)	(<u>99.477</u>)

Imbalan kerja yang dibayarkan tunai	218.000
Kas dan setara kas yang diperoleh	(<u>101.308</u>)

Arus kas keluar neto pada saat akuisisi	116.692
Uang muka investasi yang dibayarkan di 2023 (Catatan 11)	(<u>10.023</u>)

Arus kas keluar tahun 2024	<u>106.669</u>

45. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

The Company (Continued)

a. Acquisition of PT Borneo Bangun Banua Bestari (BBBB) (Continued)

In addition, the consideration paid for the combination effectively not included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development, assembled workforce and certain intangible assets. These benefits are recognized separately from goodwill because they meet the recognition criteria for identifiable intangible assets.

b. Acquisition of PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

In February 2024, the Company purchased 99.99% equity ownership or 2,263,029,999 shares of MUTU at acquisition cost of US\$ 217,999. The remaining 0.01% equity ownership or 1 share of MUTU were purchased by KJP at US\$ 1, so that the Group's ownership of MUTU is 100%.

MUTU were acquired as a business line development in the coal mining industry.

Based on the result of the independent appraisal by KJPP Ruky, Safrudin & Partners, as expressed in their report dated 24 February 2025, the fair values of the identified assets of MUTU as of the acquisition date are as follows:

Total assets	396.362
Total liabilities	78.885

Fair value of net assets acquired	<u>317.477</u>

Gain on bargain purchase and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

Considered transferred	218.000
Less:	

Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities	<u>317.477</u>

Gain on bargain purchase (Note 42)	(<u>99.477</u>)

Consideration paid in cash	218.000
Cash and cash equivalent acquired	(<u>101.308</u>)

Net cash outflow on acquisition	116.692
Advances for investment paid in 2023 (Note 11)	(<u>10.023</u>)

Net cash outflow in 2024	<u>106.669</u>

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

45. AKUISISI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

c. Akuisisi Borneo Berkat Kutai (BBK)

Pada bulan November 2024, Perusahaan dan KJP membeli 99,99% dan 0,01% kepemilikan saham BBK masing-masing dengan total harga pembelian sebesar US\$ 1.738

BBK diakuisisi sebagai pengembangan lini bisnis pada industri pertambangan batubara.

Pada saat tanggal akuisisi BBK, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas adalah sebagai berikut:

Total aset	1.764
Total liabilitas	132
Nilai wajar aset netto yang di peroleh	1.632

Nilai aset bersih yang dapat teridentifikasi dari BBK bersifat sementara yang disebabkan oleh penilaian independen dilakukan atas aset-aset tertentu belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan.

Goodwill dan arus kas keluar netto yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	1.738
Kepentingan non-pengendali	326
Dikurangi:	
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	1.632

Goodwill yang timbul dari akuisisi - dibebankan	432

Imbalan kerja yang dibayarkan tunai	1.738
Kas dan setara kas yang diperoleh	(5)

Arus kas keluar netto pada saat akuisisi	1.733

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian utama.

Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif tidak termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset takberwujud tertentu. Manfaat ini diakui terpisah dari goodwill karena manfaat tersebut memenuhi kriteria pengakuan untuk aset takberwujud yang dapat diidentifikasi.

45. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

The Company (Continued)

c. Acquisition of PT Borneo Berkat Kutai (BBK)

In November 2024, the Company and KJP purchased 99.99% and 0.01% equity ownership of BBK, respectively, for a total consideration of US\$ 1,738.

BBK were acquired as a business line development in the coal mining industry.

As of BBK's acquisition date, the fair value of assets acquired and liabilities are as follows:

Total assets	1.764
Total liabilities	132
Fair value of net assets acquired	1.632

The value of the identifiable assets and liabilities of BBK had only been determined on a provisional basis since, an independent valuation process have not yet been carried out as of the date of the consolidation financial statements were issued.

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

Considered transferred	1.738
Non-controlling interest	326
Less:	
Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities	1.632

Goodwill arising from acquisition - charged to expense	432

Consideration paid in cash	1.738
Cash and cash equivalent acquired	(5)

Net cash outflow on acquisition	1.733

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium.

In addition, the consideration paid for the combination effectively not included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development, assembled workforce and certain intangible assets. These benefits are recognized separately from goodwill because they meet the recognition criteria for identifiable intangible assets

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

45. AKUISISI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

Entitas anak

PT Kreasi Jasa Persada (KJP)

a. Akuisisi PT Petrosea Tbk (PTRO)

Pada bulan Februari 2024, KJP membeli 34,00% atau sebanyak 342.925.700 lembar saham PTRO dengan harga pembelian sebesar Rp 940.000.000.000 atau setara dengan US\$ 59.976, sehingga secara grup kepemilikan atas PTRO adalah 34,00%.

PTRO dan entitas anak diakuisisi sebagai pengembangan lini bisnis pada industri pertambangan batubara.

Berdasarkan hasil penilaian independen oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2025, nilai wajar aset teridentifikasi PTRO pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Total aset	949.609
Total liabilitas	543.252
Nilai wajar aset neto yang diperoleh	406.357

Keuntungan dari pembelian dalam diskon dan arus kas keluar neto yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	59.976
Kepentingan non-pengendali	269.617
Dikurangi:	
Nilai wajar aset neto yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	406.357

Keuntungan dari pembelian dengan diskon (Catatan 42)	(76.764)

Imbalan kerja yang dibayarkan tunai	59.976
Kas dan setara kas yang diperoleh	(47.684)

Arus kas keluar neto pada saat akuisisi	12.292
Uang muka investasi yang dibayarkan di 2023 (Catatan 11)	(30.609)

Arus kas masuk neto tahun 2024	(18.317)

45. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

Subsidiaries

PT Kreasi Jasa Persada

a. Acquisition of PT Petrosea Tbk (PTRO)

In February 2024, KJP purchased 34.00% equity ownership or 342,925,700 shares of PTRO at purchase price of Rp 940,000,000,000 or equivalent to US\$ 59,976, so that the Group's ownership of PTRO is 34.00%.

PTRO and its subsidiary were acquired as a business line development in the coal mining industry.

Based on the result of the independent appraisal by KJPP Ruky, Safrudin & Partners, as expressed in their report dated 18 February 2025, the fair values of the identified assets of PTRO as of the acquisition date are as follows:

Total assets	949.609
Total liabilities	543.252

Fair value of net assets acquired

Gain on bargain purchase and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

Considered transferred	59.976
Non-controlling interest	269.617
Less:	

Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities

Gain on bargain purchase (Note 42)

Consideration paid in cash Cash and cash equivalent acquired

Net cash outflow on acquisition Advances for investment paid in 2023 (Note 11)

Net cash inflow in 2024

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

45. AKUISISI ENTITAS ANAK (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

PT Petrosea Tbk (PTRO)

a. Akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti (KMS)

Pada saat tanggal akuisisi KMS dan entitas anak, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas adalah sebagai berikut:

Total aset	91.387
Total liabilitas	260

Nilai wajar aset netto yang diperoleh	91.127

Nilai aset netto yang diambil diperoleh - setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 19.550	71.577

Goodwill dan arus kas keluar netto yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	90.564
Dikurangi:	
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan	71.577

Goodwill yang timbul dari akuisisi	18.987

Imbalan kerja yang dibayarkan tunai	90.564
Kas dan setara kas yang diperoleh	(22)

Arus kas keluar netto pada saat akuisisi	90.542

Estimasi nilai wajar atas aset berwujud netto dan liabilitas diterapkan dengan menggunakan metode penyesuaian aset netto, sedangkan estimasi nilai wajar atas aset takberwujud diterapkan dengan menggunakan metode kelebihan pendapatan yang dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan.

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian utama.

Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif tidak termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset takberwujud tertentu. Manfaat ini diakui terpisah dari goodwill karena manfaat tersebut memenuhi kriteria pengakuan untuk aset takberwujud yang dapat diidentifikasi.

45. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

Subsidiaries (Continued)

PT Petrosea Tbk (PTRO) (Continued)

a. Acquisition of PT Kemilau Mulia Sakti (KMS)

As of date of the acquisition of KMS and its subsidiary, the fair value of assets acquired and liabilities are as follows:

Total assets	91.387
Total liabilities	260

Fair value of net assets acquired	91.127

Net assets value acquired - net of deferred tax liabilities amounting to US\$ 19,550	71.577

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

Considered transferred	90.564
Less:	
Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities	71.577

Goodwill arising from acquisition	18.987

Consideration paid in cash	90.564
Cash and cash equivalent acquired	(22)

Net cash outflow on acquisition	90.542

The fair value estimation of net tangible assets and liabilities were determined by applying the adjusted net asset method, meanwhile, the fair value estimation of intangible assets determined by applying the multi period excess earnings method by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan.

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a contropremium.

In addition, the consideration paid for the combination effectively not included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development, assembled workforce and certain intangible assets. These benefits are recognized separately from goodwill because they meet the recognition criteria for identifiable intangible assets.

Ekshibit E/142

Exhibit E/142

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

46. LABA PER SAHAM

	2024
Total laba netto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	160.785
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (nilai penuh)	11.241.890.000
Laba per saham dasar	0,014

46. EARNINGS PER SHARE

	2023	
Total net profit attributable to owners of the parent entity	15.621	
The weighted average number of ordinary shares outstanding (full amount)	10.678.556.667	
Earnings per share	0,001	

47. SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup, dalam mengambil keputusan strategis.

Grup menggolongkan segmen usaha dalam tiga segmen utama yaitu pertambangan, penyediaan jasa, rekayasa dan konstruksi.

Segmen pertambangan meliputi kontrak pertambangan secara menyeluruh mulai dari pengupasan lapisan penutup tanah, pengeboran, peledakan, pengangkutan, penggalan, jasa penambangan, kerja sama pertambangan dan penjualan batubara.

Segmen jasa meliputi penyediaan fasilitas pangkalan logistik dan jasa pelabuhan.

Segmen rekayasa dan konstruksi menyediakan layanan multidisiplin yang menyeluruh di bidang jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi untuk minyak dan gas bumi (daratan dan lepas pantai), infrastruktur, industri dan manufaktur serta utilitas. Segmen ini juga termasuk penyediaan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan.

47. OPERATING SEGMENT

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, who have been identified as the Group's main operational decision maker, in making strategic decisions.

The Group is organised into three principal business segments of mining, services, engineering and construction.

The mining segment covers comprehensive mining contract including overburden stripping, drilling, blasting, lifting, hauling, mine services, mine partnering and sales of coal.

The services segment covers supply base facilities and port services.

The engineering and construction segment provides a comprehensive range of multi-disciplinary engineering, procurement and construction services to oil and gas (onshore and offshore), infrastructure, industrial and manufacturing and utilities sectors. The segment also includes supply of skilled trade personnel and equipment hire services.

Ekshibit E/143

Exhibit E/143

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

47. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

47. OPERATING SEGMENT (Continued)

		31 Desember 2024/ 31 December 2024							
		Pertambangan/ Mining	Rekayasa dan konstruksi/ Engineering and construction	Jasa/ Service	Lain-lain/ Others	Eliminasi/ Elimination	T o t a l / T o t a l		
Pendapatan		529.268	250.408	59.752	2.196	(39.901)	801.723	Revenue	
Laba bruto		125.700	51.651	3.282	(27.058)	(35.709)	117.866	Gross profit	
Beban penjualan	(	51.267)	-	-	-	15.753	(35.514)	Selling expenses	
Beban umum dan administrasi	(	48.423)	(13.788)	(5.338)	(1.738)	15.887	(53.400)	General and administrative expenses	
Beban pajak final	(	-	(8.790)	(122)	-	-	(8.912)	Final tax expenses	
Beban operasi lainnya		11.190	2.698	14.850	74.042	93.428	196.208	Other operating loss	
Laba usaha		37.200	31.771	12.672	45.246	89.359	216.248	Operating profit	
Pendapatan keuangan		2.610	4	3.093	633	(2.582)	3.758	Finance income	
Beban keuangan	(	17.986)	(6.169)	(27.271)	(122)	2.582	(48.966)	Finance expenses	
Laba sebelum pajak penghasilan		21.824	25.606	(11.506)	45.757	89.359	171.040	Profit before income tax	
Beban pajak penghasilan	(	7.687)	-	(65)	4.182	2.500	(1.070)	Income tax expenses	
Laba netto untuk tahun berjalan		14.137	25.606	(11.571)	49.939	91.859	169.970	Net profit for the year	
Depresiasi, deplesi dan amortisasi		92.779	5.042	2.015	1	-	99.857	Depreciation, depletion and amortization	
Aset segmen		1.203.039	257.690	710.153	46.787	(439.873)	1.777.796	Segment assets	
Liabilitas segmen		514.116	267.429	510.624	3.869	(84.141)	1.211.897	Segment liabilities	

		31 Desember 2023/ 31 December 2023					
		Pertambangan dan perdagangan batu bara/ Coal mining and trade	Lain-lain/ Other	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total		
Pendapatan		97.943	-	-	97.943	Revenue	
Laba bruto		37.218	-	-	37.218	Gross profit	
Beban penjualan	(	13.161)	-	-	(13.161)	Selling expenses	
Beban umum dan administrasi	(	3.673)	(280)	-	(3.953)	General and administrative expenses	
Beban operasi lainnya	(	382)	-	-	(382)	Other operating expenses	
Laba (rugi) usaha		20.002	(280)	-	19.722	Operating profit (loss)	
Pendapatan keuangan		1.118	-	-	1.118	Finance income	
Beban keuangan	(	1.252)	(-)	-	(1.252)	Finance expenses	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan		19.868	(280)	-	19.588	Profit (loss) before income tax	
Beban pajak penghasilan	(	4.338)	-	-	(4.338)	Income tax expense	
Laba (rugi) netto untuk tahun berjalan		15.530	(280)	-	15.250	Net profit (loss) for the year	
Depresiasi, deplesi dan amortisasi		2.274	10	-	2.284	Depreciation, depletion and amortization	
Aset segmen		420.644	5.361	(195.943)	230.062	Segment assets	
Liabilitas segmen		150.845	59	(41.544)	109.360	Segment liabilities	

Pendapatan antar segmen dilakukan berdasarkan pada harga di dalam kontrak. Pendapatan dari pihak eksternal yang dilaporkan kepada Direksi diukur dengan cara yang sama sebagaimana disampaikan pada laba rugi.

Inter-segment revenues are made based on the price in the contract. Revenue from external parties reported to the Board of Directors is measured in the same way as presented in profit or loss.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI

Perusahaan

1. Perjanjian Interest Rate Swap

Pada tanggal 21 November 2023, Perusahaan menerima surat perjanjian dengan Nomor Referensi Transaksi 363 tentang transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dari BNI.

IRS merupakan perjanjian antara dua pihak berdasarkan kesepakatan untuk melakukan pembayaran periodik kepada masing-masing pihak dalam waktu yang disepakati, sesuai dengan jumlah nosional tertentu. Swap ini mengizinkan Perusahaan untuk mengkonversi kewajiban bunga mengambang menjadi kewajiban bunga tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, nilai wajar derivatif yang timbul dari transaksi ini adalah masing-masing sebesar Rp 22.306.055.814 (setara dengan US\$ 1.380) dan Rp 11.415.218.630 (setara dengan US\$ 740). Derivatif ini ditujukan sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi risiko suku bunga yang timbul dari utang Grup dengan suku bunga mengambang. Oleh karena itu, perubahan nilai wajar derivatif tersebut dicatat secara langsung di ekuitas pada "Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat (PPJB) Kepemilikan Saham di PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

Pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan, PT Indika Indonesia Resources (IIR) dan Indika Capital Investment Pte. Ltd. (ICI) telah menandatangani PPJB sehubungan dengan penjualan saham milik IIR dan ICI di MUTU dengan jumlah keseluruhan sebesar 2.263.030.000 lembar saham, termasuk Hak Pemasaran terkait yang dimiliki oleh ICI dengan total nilai sebesar US\$ 218.000.

Penyelesaian rencana transaksi ini tunduk pada pemenuhan beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam PPJB. Pada tanggal 26 Februari 2024, Perusahaan telah mengakuisisi MUTU sehingga uang muka investasi sebesar Rp 154.518.000.000 (setara dengan US\$ 10.023) telah direalisasi sebagai investasi (Catatan 11).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY

The Company

1. Interest Rate Swap Agreement

On 21 November 2023, the Company received a letter of agreement with Transaction Reference Number 363 regarding the Interest Rate Swap (IRS) transaction from BNI.

IRS is an agreement between two parties based on an agreement to make periodic payments to each party within an agreed time, according to a certain notional amount. This swap allows the Company to convert floating interest obligations into fixed interest obligations.

As of 31 December 2024 and 31 December 2023, the fair value of the derivative arising from this transaction amounted to Rp 22,306,055,814 (equivalent in US\$ 1,380) and Rp 11,415,218,630 (equivalent in US\$ 740), respectively. The derivative was designated as a hedging instrument to hedge the interest rate risk arising from the Group's loan with floating interest. As a result, the change in the fair value of the derivative was recorded directly in equity under "Loss on hedging instrument in a cash flow hedge" in the consolidated statements of financial position.

2. Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) for Shares Ownership in PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)

On 22 September 2023, the Company, PT Indika Indonesia Resources (IIR) dan Indika Capital Investment Pte. Ltd. (ICI) have signed a CSPA in connection with the sale of all shares owned by IIR and ICI in MUTU totaling to 2,263,030,000 shares, which includes the associated Marketing Rights owned by ICI, for a total consideration of US\$ 218,000.

Completion of the proposed transaction will be subject to fulfillment of condition as governed under CSPA. On 26 February 2024, the Company has acquired MUTU therefore the advance for investment amounting to Rp 154,518,000,000 (equivalent to US\$ 10,023) has been realized as investment (Note 11).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Perusahaan (Lanjutan)

**3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat (PPJB)
Kepemilikan Saham di PT Borneo Bangun Banua
Bestari (PT BBBB) (Lanjutan)**

Berdasarkan PPJB Saham No. L/193 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan notaris RA Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., menyatakan bahwa:

i. Tn. Maichiardshen (Pihak Pertama) sepakat untuk menjual dan mengalihkan seluruh saham miliknya dalam BBBB, baik yang sekarang telah dimiliki maupun yang akan datang setelah terjadinya peningkatan modal, kepada Perusahaan (Pihak Kedua), dan Pihak Kedua sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan atas saham yang dijual dari Pihak Pertama.

ii. Setelah PPJB Saham ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Pertama berjanji kepada Pihak Kedua untuk bersama-sama dengan pemegang saham BBBB lainnya:

- Melakukan peningkatan modal sehingga susunan permodalan BBBB menjadi sebagai berikut:
 - Modal dasar: Rp 60.000.000.000
 - Modal disetor dan ditempatkan: Rp 60.000.000.000

- Melakukan penerbitan saham-saham baru sebagai akibat dari peningkatan modal sesuai dengan susunan permodalan sebagaimana ditentukan di atas, di mana penerbitan saham-saham baru tersebut akan dilakukan sesuai porsi sebagai berikut:

- Sebanyak 59.999 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham baru akan diterbitkan untuk pemegang saham BBBB lainnya; dan
- Sebanyak 1 (satu) lembar saham baru akan diterbitkan untuk Pihak Pertama.

Pada tanggal 14 Mei 2024, Perusahaan dan KJP, entitas anak, telah mengakuisisi BBBB sehingga uang muka investasi sebesar Rp 46.872.000.000 (setara dengan US\$ 2.957) telah direalisasi sebagai investasi (Catatan 11).

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (Continued)

The Company (Continued)

3. Conditional Sale Purchase Agreement (CSPA) for Shares Ownership in PT Borneo Bangun Banua Bestari (PT BBBB) (Continued)

Based on the CSPA of Shares No. L/193 dated 9 December 2022 made before a notary RA Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., stated that:

i. Mr. Maichiardshen (First Party) agrees to sell and transfer all of his shares in BBBB, both currently owned and in the future after the capital increase, to the Company (Second Party), and the Second Party agrees to purchase and accept the transfer of the shares held sold from First Party.

ii. After the CSPA of Shares were signed by the Parties, the First Party promised to the Second Party together with other BBBB's shareholders:

- Increasing its capital so that BBBB's capital structure became as follows:

- Authorized capital: Rp 60,000,000,000
- Issued and fully paid-up capital: Rp 60,000,000,000

- Issuing new shares as a result of the increase in capital in accordance with the capital structure as specified above, in which the issuance of the new shares will be carried out according to the following portion:

- A total of 59,999 (fifty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) new shares will be issued for other BBBB's shareholders; and
- A total of 1 (one) new share will be issued for the First Party.

On 14 May 2024, the Company and KJP, a subsidiary, have acquired BBBB therefore the advance for investment amounting to Rp 46,872,000,000 (equivalent to US\$ 2,957) has been realized as investment (Note 11).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak

PT Prima Mineral Investindo (PMI)

4. Akuisisi PT Silika Salut Jaya (SSJ)

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 06 dan 07, keduanya tertanggal 11 September 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., PMI melakukan transaksi akuisisi saham sebanyak 85,00% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam SSJ.

SSJ saat ini sedang dalam proses akhir untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) pasir silika di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk wilayah kerja seluas 461,49 Ha.

5. Akuisisi PT Sepekat Salut Sejahtera (SSS)

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., PMI telah melakukan transaksi akuisisi saham sebanyak 85,00% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam SSS.

SSS saat ini telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pasir silika di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk wilayah kerja seluas 98,61 Ha.

PT Tamtama Perkasa (TP)

6. Perjanjian dan Pertambangan

Pada 4 Januari 2018, TP mengadakan perjanjian 7 tahun atas jasa pertambangan dengan PT KTC Metal Mining Engineering (KTC) untuk pemindahan lapisan batuan penutup, pengangkutan batu bara dan pemeliharaan jalan tambang.

7. Perjanjian Sewa Alat Pertambangan

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 4 Januari 2018, TP menandatangani perjanjian jasa penyewaan tambang selama 7 tahun dengan KTC.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries

PT Prima Mineral Investindo (PMI)

4. Acquisition of PT Silika Salut Jaya (SSJ)

Based on Deed of Sale and Purchase No. 06 and 07, both dated 11 September 2023, made before Notary Devi Yanti, S.H., M.Kn., PMI have acquired shares amounting to 85.00% (eighty five percent) of the total shares issued in SSJ.

SSJ is currently in the final process to obtain the approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources, for the issuance of an Exploration Mining Business License ("IUP" Exploration) for silica sand located at Kutai Kartanegara, East Kalimantan, with a total working area of 461.49 Ha.

5. Acquisition of PT Sepekat Salut Sejahtera (SSS)

Based on Deed of Sale and Purchase No. 12 dated 30 October 2023, made before Notary Devi Yanti, S.H., M.Kn., PMI have acquired shares amounting to 85.00% (eighty five percent) of the total shares issued in SSS.

SSS has currently obtained Mining Business Permit ("IUP") for a silica sand in Kutai Kartanegara, East Kalimantan, for a working area of 98.61 Ha.

PT Tamtama Perkasa (TP)

6. Mining Service Agreement

On 4 January 2018, TP entered into a 7 years mining services an agreement with PT KTC Metal Mining Engineering (KTC) for overburden removal, coal hauling and mine road maintenance.

7. Mining Equipment Rental Agreement

Based on the agreement dated 4 January 2018, TP entered into a rental services agreement with KTC. The term of this agreement is for 7 years

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

PT Kreasi Jasa Persada (KJP)

8. Akuisisi PT Petrosea Tbk (PTRO)

Pada tanggal 7 November 2023, KJP dan PT Caraka Reksa Optima (CRO) telah menandatangani suatu PPJB sehubungan dengan penjualan saham milik CRO di PTRO sebesar 34,00%. Penyelesaian rencana transaksi ini tunduk pada pemenuhan beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam PPJB.

KJP berkewajiban untuk membayar Rp 940.000.000.000 kepada CRO sebagai harga pembelian atas penjualan saham tersebut.

Pada tanggal 16 Februari 2024, KJP telah mengakuisisi PTRO; sehingga uang muka investasi sebesar Rp 471.875.000.000 (setara dengan US\$ 30.609) telah direalisasi sebagai investasi (Catatan 11).

Pada tanggal 7 Juni 2024, KJP telah menambah kepemilikan saham sebanyak 75.836.700 saham yang mewakili 7,52% dari modal disetor dan ditempatkan milik PTRO, yang merupakan hasil divestasi yang dilakukan oleh CRO. Sehingga, kepemilikan saham KJP di PTRO sebesar 41,52%.

PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya

- a. Mulai 1 Januari 2011, PTRO memberikan jasa pemindahan tanah penutup dan penambangan batubara dan jasa konstruksi kepada PT Kideco Jaya Agung (KJA).

Pada tanggal 22 Oktober 2010, PTRO dan KJA, menandatangani Kontrak Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara senilai US\$ 216 juta di SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur. Perjanjian ini efektif mulai 1 Januari 2011.

Pada tanggal 10 Mei 2013, PTRO dan KJA menandatangani Kontrak Sewa Peralatan (Wet Rental) di wilayah SM Popor, Area Suara, Tambang Pasir, Kalimantan Timur.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

PT Kreasi Jasa Persada (KJP)

8. Acquisition of PT Petrosea Tbk (PTRO)

On 7 November 2023, KJP and PT Caraka Reksa Optima (CRO) have signed a CSPA in connection with the sale of shares owned by CRO in PTRO amounting to 34.00%. Completion of the proposed transaction will be subject to fulfillment of condition as governed under CSPA.

KJP is obligated to pay Rp 940,000,000,000 to CRO as the purchase price of the sale of shares.

On 16 February 2024, KJP has acquired PTRO; therefore, the advance for investment amounting to Rp 471,875,000,000 (equivalent to US\$ 30,609) has been realised as investment (Note 11).

On 7 June 2024, KJP increased its ownership by 75,836,700 shares, which represents 7.52% of paid-up and issued capital of PTRO, as a result of divestment carried out by CRO. Therefore, the share ownership of KJP in PTRO amounts to 41.52%.

PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries

- a. Starting on 1 January 2011, PTRO provided waste removal and coal production services and construction services to PT Kideco Jaya Agung (KJA).

On 22 October 2010, PTRO and KJA, entered into a Contract Agreement for Waste Removal & Coal Production amounted to US\$ 216 million at SM Popor, Suara Area, Pasir Mine, East Kalimantan. This agreement is valid until 1 January 2011.

On 10 May 2013, PTRO and KJA entered into Contract of Equipment Wet Rental at SM Popor Area, Suara Area, Pasir Mine East Kalimantan.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

Baik perjanjian terkait Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup dan Produksi Batubara maupun Kontrak Sewa Peralatan (Wet Rental) telah beberapa kali perubahan. PTRO dan KJA menandatangani perubahan terakhir atas Perjanjian Pemindahan Tanah Penutup tersebut melalui perubahan ke-13 pada tanggal 20 Mei 2024 perihal perubahan volume kontrak, harga kontrak terbaru dan kompensasi lumpur, dimana target volume produksi untuk tahun 2024 sebesar 43.471 juta bcm untuk tanah penutup dan 11.238 juta ton untuk tonase batubara. Perjanjian ini akan berakhir pada Desember 2028.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2015, KPI mengadakan perubahan perjanjian untuk pemberian jasa kepada PTFI yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, KPI akan mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas yang dijelaskan dalam perjanjian hanya untuk pemberian jasa tersebut dan akan memberikan jasa secara eksklusif untuk kepentingan PTFI. Sebagai kompensasi, KPI akan menerima sebagai berikut:

- Beban KPI yang akan diganti terdiri dari semua cash costs, expenses, charges, fees dan jumlah lain, baik capital, ordinary or extraordinary in nature, kecuali extraordinary expenses seperti yang didefinisikan dalam perjanjian, yang dikeluarkan oleh KPI dalam menjalankan kegiatannya di bawah dan sehubungan dengan perjanjian tersebut
- Biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi sejumlah US\$ 142 ribu ditambah 7,5% dari biaya tenaga kerja langsung dari karyawan KPI yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan atau sebagai biaya gaji terkait untuk bulan tersebut, dan insentif keamanan dengan jumlah sampai dengan 2,5% dari biaya yang disepakati. Insentif akan dihitung dan diakui bulanan dan dibayarkan setiap enam bulan.

Pada tanggal 1 Januari 2020, berdasarkan surat pemberitahuan dari PTFI tanggal 22 Oktober 2019, dilakukan pengurangan biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi dari sebesar US\$ 142 ribu menjadi US\$ 42 ribu. Pada tahun 2021, biaya bulanan tetap atas pelabuhan dan jasa operasi disesuaikan kembali menjadi sebesar US\$ 142 ribu. Tidak terdapat perubahan atas manfaat lainnya yang diperoleh KPI dari PTFI.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

Both agreements pertaining to Waste Removal & Coal Production and Contract of Equipment Wet Rental have been amended several times PTRO and KJA have signed the latest amendment of Waste Removal through the 13th amendment on 10 May 2024, regarding changes in contract volume, latest contract price rate and mud compensation, where the production volume target for 2024 is 43,471 million bcm for overburden and 11,238 million tonnes of coal tonnage. The agreement will be ended in December 2028.

- b. *On 15 June 2015, KPI entered into an amendment to the service agreement with PTFI, which valid until 31 December 2021. Under this agreement, KPI shall operate and utilize the facilities described in the agreement solely in connection with the performance of the service and shall perform the service exclusively for the benefit of PTFI. As a compensation, KPI will receive the following:*

- *KPI's reimbursable expenses consist of all cash costs, expenses, charges, fees and other amounts, whether capital ordinary or extraordinary in nature excluding extraordinary expenses as defined in the agreement, incurred by KPI in carrying out its activities under and in connection with the agreement.*
- *Port and operating services fee shall be fixed monthly amount of US\$ 142 thousand plus an amount equal to 7.5% of direct labor costs of the KPI's employees that are paid either directly to employees or as payroll related costs for the month (agreed costs), and safety incentive of an amount up to 2.5% of the agreed costs. The safety incentive will be calculated and accrued monthly and paid semiannually.*

On 1 January 2020, based on the notification letter from PTFI dated 22 October 2019, there was a cost reduction of port and operating services fee from US\$ 142 thousand to US\$ 42 thousand. In 2021, the cost of port and operating services fee was adjusted back to US\$ 142 thousand. There is no change in other benefit that the KPI obtain from PTFI.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

Pada tanggal 27 Desember 2023, PTKPI dan PTFI telah menandatangani perpanjangan perjanjian jasa sampai dengan 31 Agustus 2025.

- c. Pada tanggal 23 Juni 2017, PTRO dan BP Berau Ltd. telah menandatangani kontrak untuk Jasa Supply Base di Sorong. Nilai kontrak adalah sebesar Rp 734 miliar (setara dengan US\$ 52 juta) dengan masa kontrak selama 5 tahun sampai dengan 22 Juni 2022, dengan opsi perpanjangan tiap tahun selama 3 tahun setelah durasi kontrak.

Pada tanggal 22 Juni 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian ini dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 73,4 miliar (setara dengan US\$ 4,7 juta) sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 807,6 miliar (setara dengan US\$ 52 juta).

Pada tanggal 1 Juni 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 6 atas perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir pada 22 Juni 2025.

- d. Pada tanggal 24 Mei 2017, PTRO dan PTFI menandatangani *Master Services Agreement* untuk jasa pertambangan Grasberg Wanagon di Papua. Nilai kontrak adalah sebesar US\$ 44 juta dengan masa kontrak selama 25 bulan yang terdiri dari 5 *Work Assignment*.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 5 Oktober 2023 kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga tanggal 31 Desember 2025

- e. Pada tanggal 15 Juni 2022, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen Perjanjian untuk Proyek *Levee Stockpile Project Extension* dengan nilai kontrak sebesar US\$ 125,16 juta. Proyek ini memiliki durasi penyelesaian hingga tanggal 30 Juni 2026.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan kontrak No. 020. Perubahan ini memberikan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 477,3 ribu.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

On 27 December 2023, PTKPI and PTFI have executed the extension of service agreement until 31 August 2025.

- c. On 23 June 2017, PTRO and BP Berau Ltd. entered into contract for Sorong Supply Base Services. The contract value is Rp 734 billion (equivalent to US\$ 52 million) with contract duration for 5 years valid until 22 June 2022, with option to extend annually up to 3 years after the contract duration.

On 22 June 2023, both parties executed an Amendment No. 5 to this contract with additional value amounted to Rp 73.4 billion equivalent to US\$ 4.7 million) therefore the total contract value is Rp 807.6 billion equivalent to US\$ 52 million).

On 1 June 2024, both parties executed a Amendment No. 6 to this contract. The contract will be ended on 22 June 2025.

- d. On 24 May 2017, PTRO and PTFI entered into Master Services Agreement for Grasberg Wanagon Mining Services in Papua. The contract value is US\$ 44 million with contract duration for 25 months which consist of 5 Work Assignments.

This agreement has been amended several times, the latest was on October 5, 2023, both parties have agreed to extend the contract up to 31 December 2025.

- e. On 15 June 2022, PTRO and PTFI have executed the document of Agreement for Levee Stockpile Project Extension with contract value is US\$ 125.16 million. This project has a duration for completion up to 30 June 2026.

This agreement has been amended several times, the latest was on 28 October 2024 with No. 020. This amendment provides an additional contract value in the amount of US\$ 477.3 thousand.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

- f. Pada tanggal 10 April 2018, PTRO dan CSTS Joint Operation menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemuatan & Pembongkaran dan Penyimpanan di POSB Sorong dengan nilai kontrak sebesar Rp 14,3 miliar (setara dengan US\$ 872 ribu). Pada tanggal 17 Februari 2020, PTRO dan CSTS Joint Operation telah menandatangani Perubahan No. 5 atas perjanjian tersebut dengan nilai kontrak menjadi Rp 236 miliar (setara dengan US\$ 16,7 juta).

Pada tanggal 9 Oktober 2024, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 20 atas perjanjian *Loading Unloading & Storage Services Contract* di POSB Sorong. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada perpanjangan atas perjanjian ini.

- g. Pada tanggal 27 Juni 2021, PTRO PT Masmino Dwi Area dan PT Indika Energy Tbk sebagai penjamin pembayaran telah menandatangani *Umbrella Service Agreement* dengan durasi sampai dengan 31 Oktober 2021 di mana PTRO bertindak sebagai kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan yang akan disepakati kemudian untuk memastikan proses implementasi Proyek Awak Mas.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022, PTRO dan PT Masmino Dwi Area juga telah menandatangani *Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract* dengan nilai Rp 95.009 juta (setara dengan US\$ 6.040 ribu). Periode pekerjaan berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

- h. Pada 23 Oktober 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 3 atas perjanjian *Marine Agency* di POSB Sorong. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Pada 5 Desember 2023, kedua belah pihak telah menandatangani Perubahan No. 4 atas perjanjian *Marine Agency* di POSB Sorong. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. PTRO dan MBN telah mengakhiri kerja sama ini.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

- f. On 10 April 2018, PTRO and CSTS Joint Operation entered into Agreement for Provision of Loading Unloading and Storage at POSB Sorong with a contract value of Rp 14.3 billion (equivalent to US\$ 872 thousand). On 17 February 2020, PTRO and CSTS Joint Operation agreed an Amendment No. 5 to the agreement, which amend the contract value to Rp 236 billion (equivalent to US\$ 16.7 million).

On 9 October 2024, both parties executed Amendment No. 20 to Loading Unloading & Storage Services Contract at POSB Sorong. The contract ended on 31 October 2024. No extension for this agreement.

- g. On 27 June 2021, PTRO, PT Masmino Dwi Area and PT Indika Energy Tbk as payment guarantors have signed an Umbrella Service Agreement with a duration of up to 31 October 2021 in which PTRO acts as a contractor to carry out work which will be agreed later in order to ensure the progress of the implementation of the Awak Mas Project.

The agreement has been amended several times. The latest amendment on 7 October 2022, PTRO and PT Masmino Dwi Area have signed the Early Works Contract for The Construction and Project Management Works Contract with the value of Rp 95,009 million (equivalent to US\$ 6,040 thousand). The period of the works based on the agreement is up to 31 August 2025.

- h. On 23 October 2023, both parties executed an Amendment No. 3 to Marine Agency Contract at POSB Sorong. The contract ended on 31 March 2024.

On 5 December 2023, both parties executed Amendment No. 4 to Marine Agency Contract at POSB Sorong. The contract ended on 30 June 2024. PTRO and MBN have terminated the cooperation.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

- i. Pada tanggal 29 Desember 2020, PTRO dan PT Kartika Selabumi Mining (KSM) dan PT Palm Mas Asri (sebagai pihak penjamin KSM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan volume produksi lapisan penutup tanah sebesar 80,1 juta bcm dan batubara sebesar 3,95 juta ton yang kemudian dialihkan kepada entitas anak, KBL.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

Pada tanggal 6 April 2021, KBL menandatangani *Plant Hire Agreement* dengan KSM dan PT Palm Mas Asri sebagai pihak penjamin dari KSM untuk penyewaan peralatan bergerak dan penyediaan tenaga kerja di Lokasi tambang KSM. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2027.

- j. Pada tanggal 30 Oktober 2023, 28 Juni 2024, 11 Juli 2024, dan 16 Desember 2024, Mekko telah membayar masing-masing sebesar Rp 31,9 miliar (setara dengan US\$ 2.000 ribu) Rp 1 miliar (setara dengan US\$ 60.898) Rp 32 miliar (setara dengan US\$ 1.944 ribu), dan Rp 31,8 miliar (setara dengan US\$ 2.005 ribu) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakhiran Kerja Sama untuk Proyek Bauksit.

PTRO mendukung pengembangan pembangunan *smelter* sebesar US\$ 1 juta pada PIM dimana PTRO dapat menagihkan kembali biaya pengembangan tersebut atau dapat dikonversikan menjadi saham entitas anak PIM, PT Perkasa Alumina Indonesia (PAI).

Pada tanggal 17 Februari 2025, PTRO menerima surat konfirmasi dari PIM atas pengembalian dana pengembangan pembangunan *smelter* yang akan diterima selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.

- k. Pada tanggal 10 Oktober 2021, KBL menandatangani *Mining Service Agreement* dengan PT Hardaya Mining Energy (HME) dan PT Central Cipta Murdaya (CCM) sebagai pihak penjamin dari HME. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian diakhiri pada tanggal 31 Desember 2024.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

- i. On 29 December 2020, PTRO and PT Kartika Selabumi Mining (KSM) and PT Palm Mas Asri (as guarantor of KSM) has signed term-sheet of the mining services with production volume 80.1 million bcm of overburden and 3.95 million tonnes of coal which awarded to a subsidiary, KBL.

On 6 April 2021, KBL signed a Mining Service Agreement with KSM and PT Palm Mas Asri as guarantor of KSM. This agreement is valid until 2027.

On 6 April 2021, PTKBL signed a Plant Hire Agreement with KSM and PT Palm Mas Asri as guarantor of KSM for mobile plant and labor supply at KSM mine site. This agreement is valid until 2027.

- j. On 30 October 2023, 28 June 2024, 11 July 2024 and 16 December 2024 Mekko has paid Rp 31.9 billion (equivalent to US\$ 2,000 thousand), Rp 1 billion (equivalent to US\$ 60,898), Rp 32 billion (equivalent to US\$ 1,944 thousand), and Rp 31.8 billion (equivalent to US\$ 2,005 thousand) respectively, in accordance with the Statement of Termination of Cooperation for the Bauxite Project.

PTRO supported the development of a smelter construction of US\$ 1 million at PIM where PTRO could bill the development costs or converted into shares in PIM's subsidiary, PT Perkasa Alumina Indonesia (PAI).

On 17 February 2025, PTRO received confirmation letter from PIM related to the refund of smelter construction development that will be received at the latest by 31 December 2026.

- k. On 10 October 2021, KBL signed a Mining Service Agreement with PT Hardaya Mining Energy (HME) and PT Central Cipta Murdaya (CCM) as guarantor of HME. This agreement is valid until 31 December 2025. Based on both parties agreement, the agreement is terminated on 31 December 2024.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

- l. Pada tanggal 31 Mei 2022, PTRO, PT Cipta Djaya Selaras Mining (CDSM) dan PT Agung Pratama Mineral (APM) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur tambang, PTRO sebagai kontraktor akan memberikan jasa pengembangan infrastruktur tambang dengan durasi pekerjaan selama 12 bulan dan nilai kontrak sebesar Rp 55 miliar (setara dengan US\$ 3,8 juta).

Pada tanggal 3 Juni 2022, PTRO, CDSM dan APM telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana PTRO akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek CDSM dengan ketentuan tanggal operasi penambangan akan dimulai setelah seluruh kondisi-kondisi dalam perjanjian telah terjadi. Perjanjian ini berlaku hingga Juli 2026. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, kontrak ini masih dalam tahap review lebih lanjut.

- m. Pada tanggal 18 Juli 2022, PTRO dan PT Santana Rekso Nidhana (SRN) telah menandatangani Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengolahan Tailing, Dimana PTRO akan bertindak sebagai kontraktor untuk membangun dan menyediakan pabrik pengolahan tailing yang beroperasi untuk menghasilkan emas. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar US\$ 55 juta yang didasarkan pada biaya pembangunan pabrik.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perizinan, tahapan sebelum konstruksi pabrik pengolahan, tahapan konstruksi dan tahapan operasi. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 52 bulan sejak tanggal efektif pabrik pengolahan beroperasi atau dapat memproduksi 263.000 oz dore emas dan perak, yang mana yang lebih dulu terjadi di mana para pihak bersepakat untuk membicarakan kembali kesepakatan jika produksi melebihi 263.000 oz dore emas.

Pada tanggal 28 September 2022, PTRO dan SRN menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengolahan Tailing sehubungan dengan kewajiban utama dan juga termin pembayaran antara PTRO dan SRN dengan nilai kontrak sebesar US\$ 130.892 ribu. Perjanjian ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal efektif pabrik pengolahan beroperasi.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

- l. On 31 May 2022, PTRO, PT Cipta Djaya Selaras Mining (CDSM) and PT Agung Pratama Mineral (APM) have signed a Mining Infrastructure Development Services Agreement, PTRO as a contractor will provide mining infrastructure development services with a work duration of 12 months and a contract value of Rp 55 billion (equivalent to US\$ 3.8 million).

On 3 June 2022, PTRO, CDSM and APM have signed a Mining Operation Services Agreement, whereby PTRO will act as a contractor for mining operations at the CDSM project site provided that the mining operation date will commence after all conditions in the agreement have occurred. This agreement is valid until July 2026. As of the issuance date of the consolidated financial statements, this contract is still on further review.

- m. On 18 July 2022, PTRO and PT Santana Rekso Nidhana (SRN) signed a Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement, whereby PTRO will act as contractor to build and provide a tailing processing plant that operates to produce gold. The total contract value is US\$ 55 million which is based on factory construction costs.

The scope of work includes licensing, stages prior to construction of a processing plant stages of construction and stages of operation. The agreement is valid for a period of 52 months from the effective date the processing plant operates or can produce 263,000 oz of gold and silver dore, whichever occurs first where the parties agreed to renegotiate the agreement if production exceeds 263,000 oz gold dore.

On 28 September 2022, PTRO and SRN signed the Amendment and Restatement of the Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement in relation to the main obligations also payment terms between PTRO and SRN with contract value of US\$ 130,892 thousand. This agreement is valid for 48 months from the effective date the processing plant operates.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

Pada tanggal 4 Agustus 2023, PTRO dan SRN telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Manajemen dan Pemeliharaan Pabrik Pengelolaan Tailing.

- n. Pada tanggal 23 September 2022, PTRO dan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) menandatangani perjanjian operasi Bersama pertambangan untuk periode satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 133.890 juta (setara dengan US\$ 8.906 ribu).

Pada tanggal 4 Agustus 2023, PTRO dan NHM telah menandatangani perjanjian penyelesaian operasi bersama pelaksanaan pertambangan ore emas.

- o. Pada tanggal 20 September 2022, PTRO telah mendapatkan proyek untuk Pekerjaan Tanah, Beton dan Utilitas yang Ditanam dari PT Freeport Manyar Refinery (FMR). Nilai total kontrak awal untuk Proyek ini adalah Rp 218,9 miliar (setara dengan US\$ 14,6 juta) dan telah mengalami beberapa penambahan kontrak menjadi sebesar Rp 369,2 miliar (setara dengan US\$ 23,3 juta) melalui beberapa Perintah Perubahan ("CO") dari FMR. Kontrak tersebut berlaku dari tanggal efektif hingga tanggal 9 Oktober 2023. Proyek ini diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024, dan diperpanjang kembali hingga tanggal 9 Maret 2024 melalui Perubahan No. 001. Tidak ada perpanjangan atas kontrak ini.

- p. Pada tanggal 6 Juni 2023, telah diterbitkan LNTP dari FMR kepada PTRO untuk tambahan paket pekerjaan CM002 - Struktural, Mekanikal, Perpipaan, Elektrikal dan Instrumen untuk *Main Process Building, Balance of Plant, dan High Security Building*. Nilai total LNTP ini adalah sebesar Rp 356.760 juta (setara dengan US\$ 23,1 juta). Nilai dari LNTP ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan nilai kontrak dari paket pekerjaan tersebut, sebesar Rp 870,64 miliar (setara dengan US\$ 56,5 juta) dengan durasi penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Juni 2024.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

On 4 August 2023, PTRO and SRN have signed a Settlement Agreement related to Tailings Treatment Plant Management and Maintenance Agreement.

- n. On 23 September 2022, PTRO and PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) signed mining joint operation agreement for one year with a contract value of Rp 133,890 million (equivalent to US\$ 8,906 thousand).

On 4 August 2023, PTRO and NHM have signed a settlement agreement of ore gold mining joint operation.

- o. On 20 September 2022, PTRO has awarded the project for Earthworks, Concrete and Buried Utilities from PT Freeport Manyar Refinery (FMR). The initial total Value of the Contract for this Project is Rp 218.9 billion (equivalent to US\$ 14.6 million) and had several additional contracts reaching Rp 369.2 billion (equivalent to US\$ 23.3 million) through several Change Orders ("CO") from FMR. The contract shall be valid from the effective date up to 19 October 2023. This Project is extended up to 7 February 2024, and then re-extended up to 9 March 2024 through Amendment No. 001. There is no contract renewals related to this contract.

- p. On 6 June 2023, LNTP has been released by FMR to Company for the additional work package of CM002 - Structural, Mechanical Piping, Electrical and Instrument for Main Process Building, Balance of Plant, and High Security Building. The total amount of this LNTP is Rp 356,760 million (equivalent to US\$ 23.1 million). This LNTP value is as part of the whole of contract value of aforementioned work package, in the amount of Rp 870.64 billion (equivalent to US\$ 56.5 million) with the duration for completion of the work up to 30 June 2024.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

Pada tanggal 2 Oktober 2024, PTRO telah menerima surat pemberitahuan dari klien (Surat No. PMR-DD-0000-DCM-LTR-8450) yang menyatakan bahwa efektif per tanggal 1 Oktober 2024 PTFMR digabungkan ke dalam PTFI.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 14 Desember 2024, PTFI telah menerbitkan dokumen *Change Order* No. 007 kepada PTRO dengan jumlah nilai sebesar Rp 20,99 miliar (setara dengan US\$ 1.299 ribu).

- q. Pada tanggal 17 April 2023, PTRO dan PT Kedap Sayaaq (KS) menandatangani surat perikatan untuk jasa konsultasi.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tanggal 22 Maret 2024, dimana PTRO dan KS telah menandatangani perubahan kedua atas perjanjian No. PTP/AGR/2023/IV-0003 dengan perubahan tarif, perubahan biaya infrastruktur dan mobilisasi/demobilisasi, dan penambahan pasal mengenai jaminan pembayaran. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2028.

- r. Pada tanggal 19 September 2023, PTRO dan PT Sumberdaya Arindo (SDA) telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi Penambangan, di mana PTRO akan bertindak sebagai kontraktor untuk kegiatan operasi penambangan di lokasi proyek SDA dengan nilai kontrak Rp 1.090 miliar (setara dengan US\$ 70.347 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 22 September 2026.

- s. Pada tanggal 25 Mei 2022, PTRO dan PTFI telah menandatangani Perjanjian Rental Alat Berat (Proyek VPA3) No. 2200036-001. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.876 juta (setara dengan US\$ 1.710 ribu).

Perjanjian ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tanggal 15 Juli 2024 PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen CO No. 005 untuk menyelesaikan nilai kontrak atas CO No. 001-005. Tidak terdapat perpanjangan atas kontrak ini.

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

On 2 October 2024, Company has received a notification letter from Client (Letter No. PMR-DD-0000-DCM-LTR-8450) stating that effective on 1 October 2024, PTFMR has merged into PTFI.

This contract has been amended several times, the latest was on 14 December 2024, PTFI has releases the document of Change Order No. 007 to PTRO with the total value of Rp 20.99 billion (equivalent to US\$ 1,299 thousand).

- q. On 17 April 2023, PTRO and PT Kedap Sayaaq (KS) signed the engagement letter for advisory services.

This agreement has been amended several times, the latest was on 22 March 2024, where PTRO and KS have signed the second amendment of the contract No. PTP/AGR/2023/IV-0003 with rates revision, infrastructure and mobilization/demobilization cost revision, and additional article related to payment guarantee. This agreement is valid until 31 December 2028.

- r. On 19 September 2023, PTRO and PT Sumberdaya Arindo (SDA) have signed a Mining Operation Services Agreement, whereby PTRO will act as a contractor for mining operations at the SDA project site with contract value Rp 1,090 billion (equivalent to US\$ 70,347 thousand). This agreement is valid until 22 September 2026.

- s. On 25 May 2022, PTRO and PTFI have signed the Rental Agreement of Heavy Equipment (VPA3 Project) No. 2200036-001 This Agreement has been completed on 30 June 2023, with the contract value of Rp 24,876 million (equivalent to US\$ 1,710 thousand).

This agreement has been amended several times, the latest was on 15 July 2024, PTRO and PTFI have signed CO No. 005 to complete the contract value of CO No. 001-005. There is no extension for this contract.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

- t. Pada tanggal 1 Februari 2024, PTRO dan BP Berau Ltd. telah menandatangani kontrak untuk Proyek Onshore Early Works Engineering, Procurement and Construction (EPC) untuk Ubadari, Tangguh EGR/CCUS, dan Tangguh Onshore Compression (UCC). Nilai kontrak adalah sebesar Rp 4.660 miliar (setara dengan US\$ 302 juta) dengan masa kontrak berlaku mulai dari 1 Februari 2024 sampai dengan 25 November 2025.
- u. Pada tanggal 3 Juli 2024, PTRO dan PT Vale Indonesia Tbk menandatangani perjanjian atas Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Tambang Blok Pomalaa dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,8 triliun (setara dengan US\$ 175 juta) dengan estimasi durasi proyek selama 24 bulan.
- v. Pada Tanggal 5 Juni 2024, PTRO dan PT Global Bara Mandiri (GBM) menandatangani Lembar Kesepakatan Jasa Pertambangan dengan estimasi nilai kontrak sebesar US\$ 230 juta untuk periode 8 tahun.
- w. Pada tanggal 21 Juni 2024, PTRO dan GI telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun.
- x. Pada tanggal 9 Agustus 2024, PTRO dan PT Pasir Bara Prima (PBP) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan yang berlaku hingga cadangan batubara dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") dan yang dapat ditambang habis sepanjang umur tambang (*life of mine*) dengan total sekitar 52 juta ton, dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp 17,4 triliun (setara dengan US\$ 1,08 miliar). Perjanjian ini berlaku sampai dengan cadangan batubara yang ditambang habis (*life of mine*).
- y. Pada tanggal 2 September 2024, PTRO dan PT GBM telah menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan untuk Kontraktor Jasa Pertambangan dengan jumlah volume sebesar 65 juta bcm dan jangka waktu sampai 31 Desember 2032.
- z. Pada tanggal 1 Juli 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani Perjanjian Rental Alat Berat untuk area Portsited, Amamapare, Papua, Indonesia. Nilai Perjanjian ini adalah sebesar Rp 8,1 miliar (setara dengan US\$ 501 ribu).

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

- t. On 1 February 2024, PTRO and BP Berau Ltd. entered into contract for Onshore Early Works Engineering, Procurement and Construction (EPC) for Ubadari, Tangguh EGR/CCUS, and Tangguh Onshore Compression (UCC) Project. The contract value is Rp 4,660 billion (equivalent to US\$ 302 million) with contract duration valid from 1 February 2024 until 25 November 2025.
- u. On 3 July 2024, PTRO and PT Vale Indonesia Tbk have signed agreement on Procurement and Construction on Pomalaa Block Mine with contract value amounted to Rp 2.8 trillion (equivalent to US\$ 175 million) for estimated project duration of 24 months.
- v. On 5 June 2024, PTRO and PT Global Bara Mandiri (GBM) signed Termsheet for Mining Services Agreement with estimated contract value amounted to US\$ 230 million for period of 8 years.
- w. On 21 June 2024, PTRO GI have signed a Lease Agreement for Wisma Barito Pacific Jakarta with 2 years of lease period.
- x. On 9 August 2024, PTRO and PT Pasir Bara Prima (PBP) signed Mining Services Agreement which valid until the coal reserves in Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") and that can be fully extracted along life of mine with the total about 52 million tonnes, with estimated contract value of Rp 17.4 trillion (equivalent to US\$ 1.08 billion). This agreement is valid until the coal reserves are fully extracted (life of mine).
- y. On 2 September 2024, PTRO and PT GBM signed a Mining Services Agreement for Mining Service Contractors with a total volume of 65 million bcm and a term until 31 December 2032.
- z. On 1 July 2024, Company and PTFI have signed Heavy Equipment Rental Agreement for Portsited area, Amamapare, Papua, Indonesia. The Value of this Agreement is Rp 8.1 billion (equivalent to US\$ 501 thousand).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**48. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINGENSI
(Lanjutan)**

Entitas Anak (Lanjutan)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) dan entitas anaknya
(Lanjutan)**

Pada tanggal 9 Oktober 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 001 untuk penambahan peralatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.2 miliar (setara dengan US\$ 136 ribu).

Pada tanggal 20 November 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani dokumen *Change Order* No. 002. *Change Order* ini dimaksudkan untuk menambahkan sejumlah anggaran di dalam Perjanjian atas penambahan alat sebesar Rp 12,02 miliar (setara dengan US\$ 744 ribu) dan memperpanjang periode perjanjian hingga tanggal 7 November 2025.

aa. Pada tanggal 27 Desember 2024, PTRO dan PTFI telah menandatangani perjanjian *Site Preparation, Sheet Piling* dan *Firewater*. Nilai perjanjian ini sebesar Rp 71,79 miliar (setara dengan US\$ 4.441 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 15 November 2025.

ab. Pada tanggal 8 April 2019, PTRO dan PTFI menandatangani perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja dan Alat (*Corrosion Project*) senilai Rp 54,55 miliar (setara dengan US\$ 3.375 ribu dengan estimasi penyelesaian sampai dengan 31 Agustus 2020.

Selama bulan Agustus 2020 hingga Desember 2024, PTRO dan PTFI menandatangani beberapa *Contract Change Order* (CCO-001 sampai dengan CCO-013) dengan tambahan nilai sebesar Rp 132,16 miliar (setara dengan US\$ 8.177 ribu). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2025.

ac. Pada tanggal 26 Februari 2025, PTRO, PT Niaga Jasa Dunia dan PT Bara Prima Mandiri (BPM) menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan. Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 5 November 2024 sampai tanggal 31 Desember 2032 dengan total OB volume 135,5 mbcm dan volume batu bara 7,5 mton dengan estimasi kontrak sebesar Rp 4,03 miliar setara dengan US\$ 231 juta).

**48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCY (Continued)**

Subsidiaries (Continued)

**PT Petrosea Tbk (PTRO) and its subsidiaries
(Continued)**

On 9 October 2024, Company and PTFI have signed *Change Order* No. 001 document for adding the equipment with the contract value of Rp 2.2 billion (equivalent to US\$ 136 thousand).

On 20 November 2024, Company and PTFI have signed *Change Order* No. 002 document. This *Change Order* is intended to allow the additional budget amount in the Agreement for additional equipment amounted to Rp 12.2 billion (equivalent to US\$ 744 thousand) and to extend the period of agreement up to 7 November 2025.

aa. On 27 December 2024, Company and PTFI have signed the Agreement of *Site Preparation, Sheet Piling* and *Firewater*. The value of this agreement is Rp 71.79 billion (equivalent to US\$ 4,441 thousand). This Agreement shall be valid up to 15 November 2025.

ab. On 8 April 2019, PTRO and PTFI signed the agreement for *Manpower and Equipment Supply (Corrosion Project)* of Rp 54.55 billion (equivalent to US\$ 3,375 thousand) with estimation of completion finish until 31 August 2020.

During August 2020 to December 2024, PTRO and PTFI signed various *Contract Change Order* (CCO-001 up to CCO-013) with additional value amounted to Rp 132.16 billion (equivalent to US\$ 8,177 thousand). This Agreement shall be valid up to 31 December 2025.

ac. On 26 February 2025, PTRO, PT Niaga Jasa Dunia and PT Bara Prima Mandiri (BPM) signed an agreement of *Mining Services Agreement*. The effective date started on 5 November 2024 until 31 December 2032 with total OB volume 135.5 mbcm and Coal volume 7.5 mton, with estimated contract amounted to Rp 4.03 billion (equivalent to US\$ 231 million).

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan manajemen risiko keuangan bertujuan memberikan *early warning* kepada manajemen atas risiko-risiko keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional Grup. Kebijakan ini akan memberikan arahan dalam melakukan identifikasi dan analisa atas risiko-risiko yang dihadapi dan memberikan batasan-batasan dalam menentukan rencana mitigasi yang akan dilaksanakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko-risiko yang ada.

Dewan Direksi memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Dewan Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Grup. Risiko keuangan yang paling signifikan terhadap Grup dijelaskan di bawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak untuk instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan untuk pihak lain dengan tidak melepaskan kewajiban. Karena aktivitas Grup investasi dan operasi, Grup terkena potensi kerugian terkait kredit yang mungkin terjadi sebagai akibat dari *counterparty*, individu atau penerbit tidak mampu atau tidak ingin untuk menghormati kewajiban kontrak.

Eksposur risiko kredit Grup terutama timbul dari pengelolaan piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan.

Untuk mengelola risiko kredit yang berhubungan dengan kepemilikan kas dan bank, Grup mendiversifikasi tempat penyimpanan kas dan bank di beberapa institusi keuangan.

Tabel di bawah ini merangkum paparan maksimum gross risiko kredit dari setiap kategori aset keuangan sebelum memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya pada 31 Desember 2024 dan 2023:

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The financial risk management policy aims to provide an *early warning* to management on financial risks owned and managed by management in carrying out the Group's operational activities. This policy will provide direction in identifying and analyzing the risks faced and providing limitations in determining the mitigation plan that will be implemented to reduce or eliminate the negative impacts of existing risks.

The Board of Directors has overall responsibility for establishing and overseeing the risk management framework. The Board of Directors has established a finance function that is responsible for developing and monitoring the Group's risk management policies. The most significant risk to the Group are described below.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss to another party by not releasing an obligation. Due to the Group's investment and operating activities, the Group is credited with potential losses that may occur as a result of the counterparty, individual or issuer being unable or unwilling to honor contractual obligations.

The Group's exposure to credit risk primarily arises from the management of trade receivables. The Group monitors the collectibility of trade receivables so that collections can be received in a timely manner and also conducts periodic reviews of individual customer receivables to assess the potential for collection failures.

To manage the credit risk associated with cash and bank holdings, the Group has diversified its cash and bank deposits in several financial institutions.

The table below summarizes the maximum gross credit risk exposure for each category of financial assets before taking into account collateral or other credit support as of 31 December 2024 and 2023:

Ekshibit E/158

Exhibit E/158

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023	
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Kas dan setara kas*	272.870	60.902	Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	192.224	1.583	Trade receivables
Piutang lain-lain jangka pendek	22.975	101	Short-term other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	19.794	939	Restricted funds
Piutang lain-lain jangka panjang	13.275	–	Long-term other receivables
Sub-total	521.138	63.525	Sub-total
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Aset keuangan lainnya	31.172	–	Other financial assets
T o t a l	552.310	63.525	T o t a l

* Tidak termasuk kas masing-masing sebesar US\$ 121 dan US\$ 17 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

* Excluding cash on hand amounting to US\$ 121 and US\$ 17 as of 31 December 2024 and 2023, respectively.

Analisis umur aset keuangan Grup pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The analysis of the ages of the Group's financial assets as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	<30 Hari/Days	31-60 Hari/Days	61-90 Hari/Days	>90 Hari/Days	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	T o t a l
Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost							
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	272.870	–	–	–	–	–	272.870
Piutang usaha/ Trade receivables	127.706	44.415	8.248	4.038	7.817	–	192.224
Piutang lain-lain jangka pendek/ Short-term other receivables	22.975	–	–	–	–	–	22.975
Dana yang dibatasi penggunaannya/ Restricted funds	19.794	–	–	–	–	–	19.794
Piutang lain-lain jangka panjang/ Long-term other receivables	13.275	–	–	–	–	–	13.275
Sub-total	456.620	44.415	8.248	4.038	7.817	–	521.138
Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit or loss							
Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	31.172	–	–	–	–	–	31.172
T o t a l	487.792	44.415	8.248	4.038	7.817	–	552.310

Ekshibit E/159

Exhibit E/159

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

31 Desember 2023/ 31 December 2023						
	Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	<30 Hari/Days	31-60 Hari/Days	61-90 Hari/Days	>90 Hari/Days	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired
						T o t a l
Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost						
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	60.902	-	-	-	-	60.902
Piutang usaha/ Trade receivables	1.583					1.583
Piutang lain-lain jangka pendek/ Short-term other receivables	101	-	-	-	-	101
Dana yang dibatasi penggunaannya/ Restricted funds	939	-	-	-	-	939
T o t a l	63.525	-	-	-	-	63.525

Berikut adalah klasifikasi aset keuangan Grup yang
tidak lewat jatuh tempo atau penurunan nilai.

The following describes the classification of the
Group's financial assets that are neither past due
nor impaired.

31 Desember 2024	Tingkat Atas/ High Grade	Tingkat Standar/ Standard Grade	T o t a l	31 December 2024
Biaya perolehan diamortisasi				Amortised cost
Kas dan setara kas	272.870	-	272.870	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	127.706	127.706	Trade receivables
Piutang lain-lain jangka pendek	-	22.975	22.975	Short-term other receivables
Piutang lain-lain jangka panjang	-	13.275	13.275	Long-term other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	19.794	-	19.794	Restricted funds
Sub-total	292.785	264.724	456.620	Sub-total
Nilai wajar melalui laba rugi				Fair value through profit or loss
Aset keuangan lainnya	31.172	-	31.172	Other financial assets
T o t a l	323.957	264.724	487.792	T o t a l

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Tingkat Atas/ High Grade</u>	<u>Tingkat Standar/ Standard Grade</u>	<u>T o t a l</u>	<u>31 December 2023</u>
Biaya perolehan diamortisasi				Amortised cost
Kas dan setara kas	60.902	–	60.902	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	–	1.583	1.583	Trade receivables
Piutang lain-lain jangka pendek	–	101	101	Short-term other receivables
Dana yang dibatasi penggunaannya	939	–	939	Restricted funds
T o t a l	61.841	1.684	63.525	T o t a l

Grup telah menilai kualitas kredit kas dan setara kas dan dana yang dibatasi penggunaannya sebagai kelas tinggi karena ini disimpan di/atau dilakukan dengan bank terkemuka yang memiliki probabilitas rendah kebangkrutan.

The Group has assessed the credit quality of its cash and cash equivalents and in banks and restricted funds as high grade since these are deposited in/or transacted with reputable banks which have low probability of insolvency.

Aset keuangan lain Grup dikategorikan berdasarkan pengalaman penagihan Grup kepada rekanan. Definisi dari peringkat yang digunakan oleh Grup untuk mengevaluasi risiko kredit rekanan adalah sebagai berikut:

The Group's other financial assets are categorized based on the Group's collection experience with the counterparties. Definitions of the ratings being used by the Group to evaluate credit risk of its counterparties is as follows:

- (1) Tingkat atas - Pelunasan diperoleh dengan mengikuti aturan dalam kontrak tanpa banyak usaha penagihan.
- (2) Tingkat standar - Beberapa pengingat tindak lanjut dilakukan untuk memperoleh pelunasan dari pihak lawan.

- (1) High grade - Repayment is obtained by following the rules in the contract without much collection effort.
- (2) Standard grade - Several follow-up reminders were made to obtain repayment from the counterparty.

b. Risiko Likuiditas

b. Liquidity Risk

Risiko likuiditas timbul apabila Grup bertemu kesulitan dalam mewujudkan asetnya atau mengumpulkan dana untuk memenuhi komitmen terkait dengan liabilitas keuangannya.

Liquidity risk arises when the Group encounters difficulties in realizing its assets or raising funds to meet commitments related to its financial liabilities.

Grup mengelola likuiditas dengan membuat rencana penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk perencanaan arus kas secara periodik dan melakukan monitoring atas realisasinya. Grup menempatkan kelebihan atas kas dalam instrumen keuangan dengan risiko yang rendah namun memberikan imbal hasil yang memadai pada lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas dan *rating* yang dapat dipertanggungjawabkan.

The Group manages liquidity by planning receipts and disbursements in the form of periodic cash flow planning and monitoring its realization. The Group places excess cash in financial instruments with low risk but provides adequate returns to financial institutions that have credibility and an accountable rating.

Ekshibit E/161

Exhibit E/161

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

b. Liquidity Risk (Continued)

Tabel di bawah menunjukkan jatuh tempo kewajiban keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below shows the maturity of Group's financial obligations based on undiscounted contractual payments as of 31 December 2024 and 2023:

	Permintaan segera atau antara satu tahun/ <i>Immediate demand or between one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	T o t a l	
<u>31 Desember 2024</u>				<u>31 December 2024</u>
Biaya perolehan diamortisasi				<i>Amortised cost</i>
Utang bank jangka pendek	58.716	–	58.716	<i>Short-term bank loan</i>
Utang usaha	131.189	–	131.189	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	1.023	–	1.023	<i>Other payables</i>
Beban akrual	71.855	–	71.855	<i>Accrued expenses</i>
Utang obligasi	3.175	58.396	61.571	<i>Bonds payable</i>
Utang sukuk ijarah	2.172	28.554	30.726	<i>Sukuk ijarah payable</i>
Liabilitas derivatif	–	1.380	1.380	<i>Derivative liability</i>
Liabilitas sewa	8.622	13.670	22.292	<i>Lease liability</i>
Utang bank	44.517	598.552	643.069	<i>Bank loans</i>
T o t a l	321.269	700.552	1.021.821	T o t a l
	Permintaan segera atau antara satu tahun/ <i>Immediate demand or between one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	T o t a l	
<u>31 Desember 2023</u>				<u>31 December 2023</u>
Biaya perolehan diamortisasi				<i>Amortised cost</i>
Utang bank jangka pendek	12.811	–	12.811	<i>Short-term bank loan</i>
Utang usaha	8.725	–	8.725	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	6.302	–	6.302	<i>Other payables</i>
Beban akrual	18.214	–	18.214	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas derivatif	–	740	740	<i>Derivative liability</i>
Utang bank	–	61.162	61.162	<i>Bank loans</i>
T o t a l	46.052	61.902	107.954	T o t a l

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Mata Uang Asing

c. Foreign Exchange Risk

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

Risiko nilai tukar mata uang asing Grup berasal dari utang yang diperoleh Grup dalam mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing atas Dolar AS dikendalikan melalui pengawasan lingkungan politik dan ekonomi.

The Group's foreign exchange risk stems from loans obtained by the Group in foreign currencies. Foreign exchange rate risk against the US Dollar is controlled by monitoring the political and economic environment.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain mata uang fungsional sebagai berikut:

As of 31 December 2024 and 2023, the Group had monetary assets and liabilities in currencies other than functional currency as follows:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024		31 Desember 2023/ 31 December 2023		
	Mata uang lain/ Other currencies '000	Setara dengan US\$/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang lain/ Other currencies '000	Setara dengan US\$/ Equivalent in US\$ '000	
Aset					Assets
Kas dan setara kas					Cash and cash equivalents
Rupiah	3.045.001.610	188.405	744.633.065	48.304	Rupiah
Dolar Australia	168	105	-	-	Australian Dollar
Dolar Singapura	26	19	-	-	Singapore Dollar
Euro	13	14	-	-	Euro
Piutang usaha					Trade receivables
Rupiah	2.582.445.170	159.785	24.396.040	1.583	Rupiah
Piutang lain-lain jangka pendek					Short-term other receivables
Rupiah	585.872.500	22.975	1.557.232	101	Rupiah
Aset keuangan lainnya					Other financial assets
Rupiah	9.429.600	583	-	-	Rupiah
Dana yang dibatasi penggunaannya					Restricted funds
Rupiah	259.141.508	16.034	14.476.104	939	Rupiah
Piutang lain-lain jangka panjang					Long-term other receivables
Rupiah	214.550.550	13.275	-	-	Rupiah
Total aset		401.195		50.927	Total assets

Ekshibit E/163

Exhibit E/163

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Mata Uang Asing (Lanjutan)

c. Foreign Exchange Risk (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain mata uang fungsional sebagai berikut: (Lanjutan)

As of 31 December 2024 and 2023, the Group had monetary assets and liabilities in currencies other than functional currency as follows: (Continued)

<u>Liabilitas</u>					<u>Liabilities</u>	
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loan	
Rupiah	397.504.390	24.595	197.500.000	12.811	Rupiah	
Utang usaha					Trade payables	
Rupiah	1.820.251.429	112.653	134.497.774	8.725	Rupiah	
Dolar Australia	7.150	1.029	-	-	Australian Dollar	
Euro	2.321	45	-	-	Euro	
Dolar Singapura	7	1	-	-	Singapore Dollar	
Utang lain-lain					Other payables	
Rupiah	16.194.324	1.002	97.152.794	6.302	Rupiah	
Utang dividen					Dividends payable	
Rupiah	14.206.398	879	-	-	Rupiah	
Beban akrual					Accrued expenses	
Rupiah	1.184.561.466	71.855	286.811.547	18.214	Rupiah	
Liabilitas derivatif					Derivative liability	
Rupiah	22.303.560	1.380	11.415.219	740	Rupiah	
Utang bank jangka panjang					Long-term bank loan	
Rupiah	8.748.975.460	541.330	942.875.000	61.162	Rupiah	
Utang obligasi					Bonds payable	
Rupiah	995.094.340	61.571	-	-	Rupiah	
Utang sukuk ijarah					Sukuk ijarah payable	
Rupiah	496.609.774	30.726	-	-	Rupiah	
Liabilitas sewa					Lease liabilities	
Rupiah	360.283.304	22.292	-	-	Rupiah	
Total liabilitas		869.358		107.954	Total liabilities	
(Liabilitas) Aset - Neto	(454.888)			57.027	(Liabilities) Asset - Net	

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas yang memiliki kemungkinan terjadi perubahan dalam kurs mata uang asing dengan asumsi semua variabel adalah tetap, terhadap laba sebelum pajak dan ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The table below shows the sensitivity to a reasonable possible change in foreign exchange rates assuming all other variables are fixed, to the profit before income tax and equity of the Group as of 31 December 2024 and 2023.

		Kenaikan (penurunan)/ Increase (decrease)			
		31 Desember 2024/ 31 December 2024	31 Desember 2023/ 31 December 2023		
<u>Nilai tukar meningkat 5%</u>				<u>Exchange rate increase by 5%</u>	
Laba sebelum pajak				Profit before income tax	
penghasilan	(23.408)		3.104	Equity	
Ekuitas	(18.258)		2.224		
<u>Nilai tukar menurun 5%</u>				<u>Exchange rate decrease by 5%</u>	
Laba sebelum pajak				Profit before income tax	
penghasilan	23.408 (		3.104)	Equity	
Ekuitas	18.258 (		2.224)		

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Mata Uang Asing (Lanjutan)

Perubahan nilai mata uang didasarkan pada perkiraan Grup terbaik dari perubahan yang diharapkan mempertimbangkan tren historis. Tidak ada dampak lain pada ekuitas Grup selain yang sudah memengaruhi laba sebelum pajak penghasilan.

d. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka panjang Grup dengan suku bunga mengambang. Instrumen keuangan tingkat bunga mengambang keuangan mengacu pada risiko tingkat suku bunga arus kas.

Grup selalu melakukan analisis atas dampak dari tingkat suku bunga terhadap biaya operasional dan kemampuan Grup sebelum menyetujui pinjaman tersebut. Grup mengelola risiko suku bunga dengan melakukan analisis pergerakan suku bunga dalam menentukan komposisi portofolio pinjaman suku bunga tetap dan variabel.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga utang bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Dengan semua variabel lainnya tetap konstan, laba Grup sebelum pajak dipengaruhi melalui dampak atas tarif mengambang utang bank sebagai berikut:

	Kenaikan/penurunan suku bunga/ Increase/decrease in interest rates	Efek pada laba sebelum pajak/ Effect on income before tax	
<u>31 Desember 2024</u>	+1,00% (	7.018)	<u>31 December 2024</u>
	-1,00%	7.018	
<u>31 Desember 2023</u>	+1,00% (	740)	<u>31 December 2023</u>
	-1,00%	740	

e. Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Foreign Exchange Risk (Continued)

Changes in currency values are based on the Group's best estimate of the expected changes taking into account historical trends. There are no other impacts on the Group's equity other than those already affecting profit before income tax.

d. Interest Rate Risk Management

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's long-term bank loans with floating interest rates. Floating rate financial instruments are subject to cash flows interest rate risk.

The Group always performs an analysis of the impact of interest rates on operating costs and the ability of the Group before approving the loan. The Group manages its interest rate risk by analyzing the movement of interest rates in determining the composition of the loan portfolio of fixed and variable interest rates.

The table below demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on the bank loans as of 31 December 2024 and 2023. With all other variables held constant, the Group's income before tax is affected through the impact on floating rate of bank loans as follows:

e. Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support the smooth running of its business and maximize shareholder value.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Manajemen Permodalan (Lanjutan)

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Capital Management (Continued)

The Group manages its capital structure and makes adjustments, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Group may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through loans. There were no changes to objectives, policies or processes as of 31 Desember 2024 and 2023.

50. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Ditetapkan di bawah ini adalah perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar semua instrumen keuangan Grup:

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
	Nilai tercatat/ Value amount	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	272.991	272.991
Piutang usaha	192.224	192.224
Piutang lain-lain jangka pendek	22.975	22.975
Aset keuangan lainnya	31.172	31.172
Dana yang dibatasi penggunaannya	19.794	19.794
Piutang lain-lain jangka panjang	13.275	13.275
T o t a l	552.431	552.431

	31 Desember 2024/ 31 December 2024	
	Nilai tercatat/ Value amount	Nilai wajar/ Fair value
Liabilitas keuangan		
Utang bank jangka pendek	58.716	58.716
Utang usaha	131.189	131.189
Utang lain-lain	1.023	1.023
Utang dividen	879	879
Beban akrual	71.855	71.855
Liabilitas derivatif	1.380	1.380
Liabilitas sewa	22.292	22.292
Utang obligasi	61.571	61.571
Utang sukuk ijarah	30.726	30.726
Utang bank jangka panjang	643.069	643.069
T o t a l	1.022.700	1.022.700

50. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Set out below is the comparison between the carrying and fair values of all the Group's financial instruments:

	31 Desember 2023/ 31 December 2023		
	Nilai tercatat/ Value amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	60.919	60.919	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	1.583	1.583	Trade receivables
Piutang lain-lain jangka pendek	101	101	Short-term other receivables
Aset keuangan lainnya	-	-	Other financial assets
Dana yang dibatasi penggunaannya	939	939	Restricted funds
Piutang lain-lain jangka panjang	-	-	Long-term other receivables
T o t a l	63.542	63.542	T o t a l

	31 Desember 2023/ 31 December 2023		
	Nilai tercatat/ Value amount	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang bank jangka pendek	12.811	12.811	Short-term bank loan
Utang usaha	8.725	8.725	Trade payables
Utang lain-lain	6.302	6.302	Other payables
Utang dividen	-	-	Dividend payables
Beban akrual	18.214	18.214	Accrued expense
Liabilitas derivatif	740	740	Derivative liability
Liabilitas sewa	-	-	Lease liability
Utang obligasi	-	-	Bonds payable
Utang sukuk ijarah	-	-	Sukuk ijarah payable
Utang bank jangka panjang	61.162	61.162	Long-term bank loan
T o t a l	107.954	107.954	T o t a l

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

50. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Nilai tercatat dari dana yang dibatasi penggunaannya dan utang bank jangka panjang mendekati nilai wajarnya disebabkan oleh pemakaian suku bunga mengambang atas instrumen tersebut, di mana Tingkat suku bunga tersebut selalu disesuaikan dengan pasar.
3. Nilai wajar derivatif liabilitas diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan.
4. PSAK 113, "Pengukuran nilai wajar" tidak memasukkan liabilitas sewa dari persyaratan pengukuran dan pengungkapan.
5. Nilai wajar aset keuangan lainnya berdasarkan harga pasar yang dipublikasikan.

51. REKLASIKASI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023/ 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah disajikan kembali.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b, Grup mengubah kebijakan akuntansi mengenai mata uang penyajian.

Grup memutuskan bahwa mata uang penyajian mulai tanggal 1 Januari 2024 untuk laporan keuangan konsolidasian adalah US\$ yang sebelumnya adalah Rp.

Sebagai tambahan, reklasifikasi tertentu telah dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

50. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each group of the Group's financial instruments:

1. Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other financial assets, short-term bank loan, trade payables, other payables, dividend payables and accrued expenses approximate their carrying values due to their short-term nature.
2. The carrying amount of restricted funds and long-term bank loan approximate to its fair value due to the use of floating interest rates on the instrument, where the interest rate is always adjusted to the market.
3. The fair values of derivative liability is estimated by discounting future cash flows.
4. PSAK 113, "Fair value measurement" exclude lease liabilities from measurement and disclosure requirements.
5. The fair value of other financial assets are based on the published market price.

51. RECLASSIFICATION AND RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated statements of financial position as of 31 December 2023 and 1 January 2023/ 31 December 2022, and consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2023 have been restated.

As described in Note 2b, the Group changed its accounting policy regarding their presentation currency.

The Group decided that the presentation currency starting 1 January 2024 for the consolidated financial statements is US\$ which was previously Rp.

In addition, certain reclassifications have been made to the prior year's consolidated financial statements to enhance comparability with the current year's consolidated financial statements.

Ekshibit E/167

Exhibit E/167

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

51. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)

Tabel berikut ini merangkum dampak perubahan
kebijakan akuntansi dan kesalahan periode lalu
terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

The following tables summarize the impact of the
change in accounting policy and prior period error on
the consolidated financial statements of the Group.

		31 Desember/December 2023		
		Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements	
A S E T				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	939.116.119.373		60.919	Cash and cash equivalents
Piutang usaha -				Trade receivables -
Pihak ketiga	24.396.043.555		1.583	Third parties
Piutang lain-lain -				Other receivables -
Pihak ketiga	1.557.232.420		101	Third parties
Persediaan	604.726.647.672		39.227	Inventories
Pajak dibayar di muka	110.342.144.490		7.158	Prepaid taxes
Uang muka investasi	675.765.000.000		43.835	Advances for investments
Uang muka dan				Advances and
beban dibayar di muka	188.385.196.066		12.220	prepaid expenses
Total Aset Lancar	2.544.288.383.576		165.043	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Dana yang dibatasi penggunaannya	14.476.104.116		939	Restricted funds
Uang muka pembelian				Advances for acquisitions
aset tetap	16.866.002.738		1.094	of property, plant and equipment
Aset eksplorasi dan evaluasi	265.278.516.392		18.174	Exploration and evaluation assets
Aset tetap	569.280.861.281		36.926	Property, plant and equipment
Properti pertambangan dan aset				Mining properties and
aktivitas pengupasan lapisan tanah	108.134.126.825		6.048	stripping activity assets
Aset takberwujud	-		2	Intangible assets
Aset pajak tangguhan	1.884.044.356		122	Deferred tax assets
Taksiran klaim pajak penghasilan	26.189.530.914		1.699	Estimated claim for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	231.416.400		15	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	1.002.340.603.022		65.019	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	3.546.628.986.598		230.062	TOTAL ASSETS

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**51. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

Tabel berikut ini merangkum dampak perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan periode lalu terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

The following tables summarize the impact of the change in accounting policy and prior period error on the consolidated financial statements of the Group: (Continued)

		31 Desember/December 2023			
		Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements		
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS				LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES	
Utang bank jangka pendek		197.500.000.000	12.811	Short-term bank loans	
Utang usaha - Pihak ketiga		134.497.773.771	8.725	Trade payables - Third parties	
Utang lain-lain - Pihak ketiga		97.152.793.796	6.302	Other payables - Third parties	
Utang pajak		13.118.067.173	851	Taxes payable	
Beban akrual		286.811.547.128	18.214	Accrued expenses	
Total Liabilitas Jangka Pendek		729.080.181.868	46.903	Total Current Liabilities	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES	
Liabilitas derivatif		11.415.218.630	740	Derivative liability	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:	
Utang bank		942.875.000.000	61.162	Bank loans	
Liabilitas imbalan kerja karyawan		2.530.742.395	164	Liabilities for employee benefits	
Provisi atas penghentian pengoperasian aset		-	391	Provision for asset retirement	
Total Liabilitas Jangka Panjang		956.820.961.025	62.457	Total Non-Current Liabilities	
Total Liabilitas		1.685.901.142.893	109.360	Total Liabilities	
EKUITAS				EQUITY	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity	
Modal saham				Share capital	
Modal dasar - 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham				Authorized - 30,000,000,000 shares with par value of Rp 200 shares	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 11.241.890.000 saham		2.248.378.000.000	164.392	Issued and fully paid-up capital - 11,241,890,000 shares	
Tambahan modal disetor		25.937.075.000	1.689	Additional paid-in capital	
Komponen ekuitas lainnya (15.896.736.067) (			1.042)	Other component of equity	
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (11.415.218.630) (			740)	Loss on hedging instrument in a cash flow hedge	
Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun		9.558.878.500	608	Actuarial gain on defined benefit pension plan	
Selisih penjabaran laporan keuangan		- (	19.535)	Foreign currency translation adjustment	
Defisit (584.051.168.613) (			36.657)	Deficits	
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.672.510.830.190	108.715	Total equity attributable to owners of the parent entity	
Kepentingan non-pengendali		188.217.013.515	11.987	Non-controlling interest	
Total Ekuitas		1.860.727.843.705	120.702	Total Equity	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		3.546.628.986.598	230.062	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Tabel berikut ini merangkum dampak perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan periode lalu terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

51. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

The following tables summarize the impact of the change in accounting policy and prior period error on the consolidated financial statements of the Group: (Continued)

	2 0 2 3		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements	
PENDAPATAN	1.494.125.816.458	97.943	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(684.875.769.950)	(60.725)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	809.250.046.508	37.218	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(442.260.335.077)	(13.161)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(60.296.913.613)	(3.953)	General and administrative expenses
Beban pajak final	-	-	Final tax expense
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	(5.826.494.579)	(382)	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	300.866.303.239	19.722	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	17.062.682.796	1.118	Finance income
Beban keuangan	(19.102.936.220)	(1.252)	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	298.826.049.815	19.588	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
K i n i	(67.709.513.520)	(4.438)	Current
Tangguhan	1.519.135.163	100	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(66.190.378.357)	(4.338)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO TAHUN BERJALAN	232.635.671.458	15.250	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	-	1.411	Exchange differences on translation of financial statements
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(11.415.218.630)	(740)	Loss on hedging instrument in a cash flow hedge
Keuntungan aktuarial atas program pensiun manfaat pasti	207.115.174	14	Actuarial gain on defined benefit pension plan
Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(45.565.339)	(3)	Tax relating to item that will not be reclassified
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(11.253.668.795)	682	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	221.382.002.663	15.932	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Ekshibit E/170

Exhibit E/170

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

51. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Tabel berikut ini merangkum dampak perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan periode lalu terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

The following tables summarize the impact of the change in accounting policy and prior period error on the consolidated financial statements of the Group: (Continued)

	2023		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements	
Laba neto yang diatribusikan kepada:			Net profit attributable to:
Pemilik entitas induk	238.327.371.773	15.621	Owners of the parent company
Kepentingan non-pengendali	(5.691.700.315)	(371)	Non-controlling interest
T o t a l	232.635.671.458	15.250	T o t a l
Total penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	227.230.327.797	15.271	Owners of the parent company
Kepentingan non-pengendali	(5.848.325.134)	661	Non-controlling interest
T o t a l	221.382.002.663	15.932	T o t a l
LABA PER SAHAM DASAR	22	0,001	BASIC EARNINGS PER SHARE

	1 Januari/January 2023		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements	
A S E T			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	254.738.656.853	16.193	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - Pihak ketiga	133.838.817.485	8.508	Trade receivables - Third parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	658.792.762	42	Third parties
Pihak berelasi	59.873.028.180	3.806	Related party
Persediaan	261.027.222.422	16.593	Inventories
Pajak dibayar di muka	45.113.476.282	2.868	Prepaid taxes
Uang muka investasi	46.872.000.000	2.980	Advances for investments
Uang muka dan beban dibayar di muka	115.501.838.824	7.342	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar	917.623.832.808	58.332	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Dana yang dibatasi penggunaannya	14.167.943.055	901	Restricted funds
Aset eksplorasi dan evaluasi	233.028.853.798	14.813	Exploration and evaluation assets
Aset tetap	519.647.950.538	33.033	Property, plant and equipment
Properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah	56.159.507.924	3.570	Mining properties and stripping activity assets
Aset pajak tangguhan	410.474.532	26	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	231.416.400	15	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	823.646.146.247	52.358	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	1.741.269.979.055	110.690	TOTAL ASSETS

Ekshibit E/171

Exhibit E/171

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

**51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

**51. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

Tabel berikut ini merangkum dampak perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan periode lalu terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

The following tables summarize the impact of the change in accounting policy and prior period error on the consolidated financial statements of the Group: (Continued)

	1 Januari/January 2023		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatements	Setelah penyajian kembali/ After restatements	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	12.546.452.329	798	Trade payables - Third parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak ketiga	96.689.347.780	6.146	Third parties
Pihak berelasi	325.000.000	21	Related party
Utang pajak	121.697.196.854	7.736	Taxes payable
Beban akrual	232.737.422.725	14.519	Accrued expenses
Total Liabilitas Jangka Pendek	463.995.419.688	29.220	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.865.793.325	119	Liabilities for employee benefits
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	277	Provision for mine reclamation and closure
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.865.793.325	396	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	465.861.213.013	29.616	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham			Share capital
Modal dasar -			Authorized -
30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham			30,000,000,000 shares with par value of Rp 200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.551.890.000 lembar saham	1.910.378.000.000	142.385	Issued and fully paid-up capital - 9,551,890,000 shares
Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pensiun	9.240.703.846	587	Actuarial gain on defined benefit pension plan
Selisih penjabaran laporan keuangan	- (	20.946)	Foreign currency translation adjustment
Defisit	(822.378.540.386)	(52.278)	Deficits
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.097.240.163.460	69.748	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	178.168.602.582	11.326	Non-controlling interest
Total Ekuitas	1.275.408.766.042	81.074	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.741.269.979.055	110.690	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

52. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan

	2024	2023
Akuisisi aset tambang melalui provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	8.610	-
Akuisisi aset hak-guna melalui liabilitas sewa	8.523	-
Akuisisi aset tetap melalui uang muka	467	2
Akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi melalui provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	381	-
Akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi melalui utang	-	377

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

52. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing activities

Acquisition of mining properties through provision for mine reclamation and closure	-
Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities	-
Acquisition of property, plant and equipment through advances	2
Acquisition of exploration and evaluation assets through provision for mine reclamation and closure	-
Acquisition of exploration and evaluation assets through payables	377

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes		Lain-lain/ Others	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2024
			Akuisisi melalui kombinasi bisnis/ Acquisition through business combination	Akuisisi aset hak-guna melalui liabilitas sewa/ Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities			
31 Desember 2024							
Utang bank jangka pendek	12.811	9.796	33.542	-	2.567	58.716	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	61.162	407.351	188.783	-	14.227	643.069	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	-	9.845	23.614	8.523	-	22.292	Lease liabilities
Utang sukuk	-	30.790	-	-	63	30.727	Sukuk payable
Utang obligasi	-	61.564	-	-	6	61.570	Bonds payable
Total	73.973	499.656	245.939	8.523	(11.717)	816.374	Total

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)

52. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (Lanjutan)

52. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CONSOLIDATED
STATEMENT OF CASH FLOWS (Continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities (Continued)

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes		Lain-lain/ Others	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
			Akuisisi melalui kombinasi bisnis/ Acquisition through business combination	Akuisisi aset hak-guna melalui liabilitas sewa/ Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities			
Utang bank jangka pendek	-	12.811	-	-	-	12.811	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	-	61.162	-	-	-	61.162	Long-term bank loans
T o t a l	-	73.973	-	-	-	73.973	T o t a l

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Penandatanganan Akad Wakalah bi al-Istitsmar

Pada tanggal 13 Maret 2025, Perusahaan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menandatangani akad Wakalah bi al-Istitsmar dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Wakalah dalam jumlah sebesar Rp 350.000.000.000, yang terdiri dari:

- Sukuk Wakalah Seri A, dengan jangka waktu 367 hari;
- Sukuk Wakalah Seri B, dengan jangka waktu 3 tahun; dan
- Sukuk Wakalah Seri C, dengan jangka waktu 5 tahun.

Cadangan Umum

Pada RUPS Luar Biasa dan Tahunan Perusahaan tanggal 21 April 2025, pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar 1,00% dari laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 (sebesar US\$ 1.608)

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Company

Signing a contract of Wakalah bi al-Istitsmar

On 13 March 2025, the Company and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has entered into a contract of Wakalah bi al-Istitsmar in relation to the Public Offering of Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025.

The Company will issue and offer the Sukuk Wakalah amounting to Rp 350,000,000,000, consisting of:

- Sukuk Wakalah Series A, with a term of 367 days;
- Sukuk Wakalah Series B, with a term of 3 years; and
- Sukuk Wakalah Series C, with a term of 5 years.

General Reserve

At the Company's Annual and Extraordinary GMS held on 21 April 2025, the shareholders approved the establishment a general reserve amounting to 1.00% of net profit attributable to owners of the parent entity in 2024 (amounted to US\$ 1,608).

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada RUPS Luar Biasa dan Tahunan Perusahaan tanggal 21 April 2025, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2 0 2 5
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama :	Erwin Ciputra
Komisaris :	Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris Independen :	Henky Susanto
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama :	Michael
Direktur :	Daniel Jr. Lopez Laurente
Direktur :	Diana Arsiyanti
Direktur :	Kartika Hendrawan
Direktur :	Lim Hendra Gunawan

Pinjaman Bank Sindikasi

Pada tanggal 5 Juni 2025, Perusahaan dan beberapa anak usaha Perusahaan diantaranya BBB, BBBB, KJP, MP, MUTU dan TP menandatangani fasilitas-fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., berkedudukan di Jakarta, No. 509/CN.NOT/VI/2025 terkait penandatanganan akta-akta berikut:

1. Akta Perjanjian Fasilitas TP sebesar Rp 400.000.000.000, No. 80;
2. Akta Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka Bergulir KJP sebesar Rp 5.000.000.000.000, No. 81;
3. Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka MUTU sebesar Rp 2.544.510.213.600, No. 82;
4. Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka B3 sebesar Rp 166.981.700.000, No. 83; dan
5. Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas-Fasilitas kepada Grup, No. 84.

Tujuan fasilitas-fasilitas pinjaman ini untuk:

- i. melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan Fasilitas Sindikasi Tranche A, B, C, fasilitas pinjaman Bilateral di Mandiri dan fasilitas pinjaman Bilateral di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- ii. tujuan umum Perusahaan;
- iii. khusus fasilitas PJK dan atau KJP juga termasuk untuk pembiayaan investasi dan/atau pengeluaran modal oleh Perusahaan atau *equity injection* untuk akuisisi atau investasi jangka panjang kepada anak perusahaan.

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

The Company (Continued)

Changes the Composition of the Board of Commissioners and Directors

At the Company's Annual and Extraordinary GMS held on 21 April 2025, there were changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors as follows:

	2 0 2 4		<u>Board of Commissioners</u>
Erwin Ciputra :	Erwin Ciputra	:	President Commissioner
- :	-	:	Commissioner
Henky Susanto :	Henky Susanto	:	Independent Commissioner
<u>Directors</u>			
Michael :	Michael	:	President Director
Daniel Jr. Lopez Laurente :	Daniel Jr. Lopez Laurente	:	Director
Diana Arsiyanti :	Diana Arsiyanti	:	Director
Kartika Hendrawan :	Kartika Hendrawan	:	Director
- :	-	:	Director

Syndicated Bank Loan

On 5 June 2025, the Company and some of its subsidiaries including BBB, BBBB, KJP, MP, MUTU and TP signed syndicated loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on a Certificate made by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., domiciled in Jakarta, No. 509/CN.NOT/VI/2025 related to the signing of the following deeds:

1. Deed of TP Facility Agreement amounting to Rp 400,000,000,000, No. 80;
2. Deed of Agreement of KJP Revolving Term Facilities amounting to Rp 5,000,000,000,000, No. 81;
3. Deed of Agreement of MUTU Term Facility amounting to Rp 2,544,510,213,600, No. 82;
4. Deed of Agreement of B3 Term Facility amounting to Rp 166,981,700,000, No. 83; and
5. Agreement on General Provisions in Connection with Facilities to the Group, No. 84.

The purpose of these loan facilities is to:

- i. to repay all outstanding amounts under the Syndicated Facility Tranche A, B, C, Bilateral loan facility at Mandiri and Bilateral loan facility at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- ii. general purposes of the Company;
- iii. specifically the PJK and or KJP facilities also include to finance investment and/or capital expenditure by the Company or equity injection for acquisition or long-term investment to the Company's subsidiaries.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

Pendirian Entitas Anak Baru

Establishment of a New Subsidiary

PTRO bersama-sama dengan RKN, entitas anak, mendirikan entitas anak baru yaitu PT Petrosea Engineering Procurement Construction (PEPC) berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 15 April 2025, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0029476.AH.01.01.Tahun 2025 tanggal 15 April 2025.

PTRO together with RKN, a subsidiary, established a new subsidiary namely PT Petrosea Engineering Procurement Construction (PEPC) based on Deed No. 09 dated 15 April 2025, made before Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, and have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0029476.AH.01.01.Year 2025 dated 15 April 2025.

Berdasarkan Akta, dari modal dasar sejumlah Rp 20.000.000 ribu (setara dengan US\$ 1,21 ribu), yang terbagi menjadi 20.000 lembar saham, telah ditempatkan oleh para pemegang saham dan disetor dengan penuh sebanyak 5.000 lembar saham atau sejumlah Rp 5.000.000 ribu (setara dengan US\$ 301,24), di mana sebanyak 4.995 lembar saham atau sejumlah Rp 4.995.000 ribu (setara dengan US\$ 301,12) dimiliki oleh PTRO, serta sebanyak 5 lembar saham atau sejumlah Rp 5.000 ribu (setara dengan US\$ 1) dimiliki oleh RKN.

According to the Deed, from the authorized capital of Rp 20,000,000 thousand (equivalent to US\$ 1.21 thousand), which divided into 20,000 shares, have been issued and fully paid for 5,000 shares or amounting to Rp 5,000,000 thousand (equivalent to US\$ 301.24), of which 4,995 shares or amounting to Rp 4,995,000 thousand (equivalent to US\$ 301.12) is owned by PTRO, as well as 5 shares or amounting to Rp 5,000 thousand (equivalent to US\$ 1) is owned by RKN.

Ruang lingkup kegiatan PEPC meliputi aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Scope of PEPC's activities includes financial and insurance activities, as well as professional, scientific and technical activities.

Dividen

Dividends

Pada RUPS Luar Biasa dan Tahunan PTRO tanggal 21 April 2025, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar US\$ 10.000 atau US\$ 0,00099147 per lembar saham. Dividen kas akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2025.

At PTRO's Annual and Extraordinary GMS held on 21 April 2025, the shareholders approved the distribution of cash dividends for the financial year 2024 amounted to US\$ 10,000 or US\$ 0.00099147 per share. The cash dividend is due on 22 May 2025.

Penyetoran Modal untuk Saham Baru PT Maha Raja Mineral (MRM)

Subscription of New Shares of PT Maha Raha Mineral (MRM)

PTRO melalui anak perusahaannya, PIN, telah melakukan penyetoran saham baru atas 40% saham MRM, dengan nilai penyetoran modal sebesar Rp 56.628.457.304 untuk 535.104.000 saham, berdasarkan Akta Notaris No. 56 tanggal 29 April 2025, dibuat di hadapan Yulia, S.H., telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0118042 tanggal 30 April 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar.

PTRO through its subsidiary, PIN, has subscribed to 40% of the new shares of MRM, with the capital contribution value of Rp 56,628,457,304 for 535,104,000 shares, based on Notary Deed No. 56 dated 29 April 2025, made before Yulia, S.H., was received and recorded in the Legal Entity Administration System by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0118042 dated 30 April 2025 regarding the Receipt of Notification and Amendment to the Articles of Association.

Ruang lingkup kegiatan MRM meliputi perdagangan komoditas batubara, nikel dan bijih besi di Indonesia.

The scope of MRM's activities includes trading of coal, nickel and iron ore commodities in Indonesia.

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of US Dollar,
unless otherwise stated)**

54. PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah difinalkan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2025.

54. COMPLETION FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements which have been finalized and approved for publication on 16 June 2025.

55. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Perubahan tersebut yaitu pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan 8, 16, 17, 21 dan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

55. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the proposed Public Offering of Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 and Public Offering of Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, the Company and its subsidiaries have reissued the consolidated financial statements for the years then ended 31 December 2024 and 2023. The changes in consolidated statement of financial position, consolidated statement of changes in equity and notes 8, 16, 17, 21 and 53 to consolidated financial statements.

The original report is in the Indonesian language

No. : 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025

No. : 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Jakarta

The Stockholders, Board of Commissioner and Directors
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Alokasi Harga Pembelian PT Multi Tambangjaya Utama dan PT Petrosea Tbk dan Anak Perusahaan

Selama tahun berjalan, Grup melakukan sejumlah akuisisi, akuisisi yang paling signifikan adalah PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) dan PT Petrosea Tbk dan Entitas Anaknya (PTRO) dengan nilai total masing-masing sebesar US\$ 218 juta dan US\$ 60 juta.

Kami menganggap audit atas akuntansi untuk akuisisi ini sebagai hal audit utama karena ini adalah transaksi signifikan selama tahun berjalan yang memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan mengenai alokasi harga beli atas aset dan liabilitas yang diakuisisi dan penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi entitas yang baru diakuisisi dengan kebijakan akuntansi Grup. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menentukan nilai wajar aset dan liabilitas yang diperoleh dan mengidentifikasi aset takberwujud yang diperoleh dalam akuisisi tersebut.

Sebagai bagian dari audit kami, kami telah, antara lain, melakukan prosedur-prosedur berikut, juga dengan dukungan dari para Ahli Penilaian kami:

- membaca perjanjian pembelian untuk mendapatkan pemahaman tentang transaksi dan istilah-istilah penting;
- melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam meninjau metodologi penilaian yang digunakan oleh manajemen dan ahli penilaian eksternal dalam penilaian wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi;
- menilai kewajaran asumsi-asumsi penilaian seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan dengan membandingkan asumsi-asumsi tersebut dengan data sumber dan data pasar;
- menilai kompetensi dan pengalaman yang relevan dari para ahli yang dilibatkan oleh manajemen; dan
- menilai kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan mengenai akuisisi ini dalam Catatan 45.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Purchase Price Allocation of PT Multi Tambangjaya Utama and PT Petrosea Tbk and its Subsidiaries

During the year, the Group made a number of acquisitions, the most significant acquisitions were PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) and PT Petrosea Tbk and its Subsidiaries (PTRO) for a total consideration of US\$ 218 million and US\$ 60 million, respectively.

We considered the audit of accounting for these acquisitions to be a key audit matter as these are significant transactions during the year which require significant management judgement regarding the allocation of the purchase price to the assets and liabilities acquired and adjustments made to align accounting policies of the newly acquired entities with those of the Group. This exercise also require management to determine the fair value of the assets and liabilities acquired and to identify intangible assets acquired in the acquisition.

As part of our audit we have, among other things, carried out the following procedures, also with the support of our Valuation Experts:

- *read the purchase agreements to obtain an understanding of the transactions and the key terms;*
- *involved our internal specialist to assist us in reviewing the valuation methodologies used by management and the external valuation expert in the fair valuation of acquired assets and liabilities;*
- *assessed the reasonableness of the valuation assumptions such as discount and growth rates by comparing these assumptions to source data and market data;*
- *assessed the competence and relevant experience of the experts engaged by management; and*
- *assessed the adequacy of the related disclosures in the financial statements regarding these acquisitions in Note 45.*

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut: (Lanjutan)

Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang

Grup terlibat dalam operasi penambangan batubara di berbagai wilayah. Terdapat risiko yang melekat bahwa operasi-operasi tersebut dapat menimbulkan kewajiban yang signifikan terkait dengan restorasi lokasi, reboisasi dan pekerjaan perbaikan lainnya. Kewajiban potensial tersebut tergantung pada lingkungan di mana Grup beroperasi dan perubahan dalam lingkungan politik dan legislatif yang relevan.

Mengestimasi dan menghitung kewajiban-kewajiban ini dan kemungkinan terjadinya kewajiban tersebut memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan. Risiko ketidakakuratan estimasi meningkat karena ketidakpastian ruang lingkup dan waktu dari kewajiban tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah mengakui provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$ 10,73 juta seperti yang diungkapkan pada Catatan 33.

Untuk mengatasi hal audit utama di atas, kami telah melakukan prosedur audit sebagai berikut:

- melakukan penelaahan retrospektif atas keakuratan estimasi manajemen dalam hal waktu, arus kas keluar dan asumsi lainnya di mana data historis tersedia;
- membandingkan asumsi manajemen dengan data pasar yang relevan untuk menguji kewajaran tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan;
- menilai perlakuan akuntansi untuk kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan konsistensi penerapannya, khususnya yang terkait dengan sejauh mana kewajiban dikapitalisasi atau dibebankan dan periode amortisasi untuk aset yang dikapitalisasi;
- memeriksa keakuratan matematis dari model yang digunakan untuk menghitung provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang; dan
- menilai kecukupan pengungkapan yang berkaitan dengan ketidakpastian estimasi dan provisi.

Penekanan Suatu Hal

Tanpa memodifikasi opini kami, kami mengarahkan perhatian pada Catatan 51 atas laporan keuangan konsolidasian yang mengungkapkan bahwa Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023, yang disajikan dengan angka yang sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, seperti yang disyaratkan oleh PSAK 208, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Key Audit Matters (Continued)

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows: (Continued)

Provision for Mine Reclamation and Closure

The Group is involved in coal mining operations in various area of interest. There is an inherent risk that these operations may generate significant obligations related to site restoration, reforestation and other remediation work. Such potential obligations are dependent on the environments in which the Group operates and changes in the relevant political and legislative environments.

Estimating and calculating these obligations and the probability they will occur requires significant management judgement. The risk of inaccurate estimates is increased due to the uncertainty of scope and timing of such obligations.

As of 31 December 2024, the Group has recognized provision for mine reclamation and closure of US\$ 10.73 million as disclosed in Note 33.

To address the above key audit matter, we have conducted the audit procedures as follows:

- performed retrospective reviews of the accuracy of management's estimates in terms of timing, cash outflows and other assumptions where historical data is available;
- compared management's assumptions to relevant market data to test the reasonableness of discount rates used in the calculations;
- assessed the accounting treatment for compliance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and consistency of application, in particular related to the extent to which obligations are capitalized or expensed and the amortization period for capitalized assets;
- checked the mathematical accuracy of the models used to calculate provision for mine reclamation and closure; and
- assessed the adequacy of the disclosures pertaining to estimation uncertainty and provisions.

Emphasis of Matter

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 51 to the consolidated financial statements which disclosed that the Group has restated the consolidated financial statements for the year 31 December 2023 and 1 January 2023, which are presented as corresponding figures to the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, as required by PSAK 208, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00064/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/III/2025 tanggal 6 Maret 2025, No. 00244/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan No. 00428/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan 2024 ("laporan tahunan"), tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other Matter

Before this report, we have issued independent auditor's report No. 00064/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/III/2025 dated 6 March 2025, No. 00244/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/IV/2025 dated 11 April 2025 and No. 00428/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/V/2025 dated 19 May 2025 of the consolidated financial statements of the Group for the years ended 31 December 2024 and 2023. Our opinion is not modified with respect to this matter.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the 2024 annual report (the "annual report"), but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report. The annual report is expected to be made available to us after the date of the auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (Continued)

In preparing consolidated the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Auditor's Responsibilities for the Audit of The Consolidated Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of The Consolidated Financial Statements (Continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significant in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA
NIAP AP.1241/
License No. AP.1241



16 Juni 2025 / 16 June 2025

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.